BADAN POM







LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2026

BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG

JALAN PULAU BANGKA, AIR ITAM
PANGKALPINANG, KEP. BANGKA BELITUNG.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja output maupun outcome.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 ini disusun sebagai bagian dari upaya Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kep. Bangka Belitung. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 ini tertuang Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Tahun 2026, evaluasi dan hasil analisis pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Nomenklatur indikator kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang di masa yang akan datang.

Pangkal Pinang, 19 Oktober 2026

Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Lampiran iv
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar xvii
Ringkasan Eksekutif xviii
Highlight xxiii

BAB I. Pendahuluan 2
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 8
1.4 ISU STRATEGIS 9

BAB II. Perencanaan Kinerja 13
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA 13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 16
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) 18
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 34
2.5 METODE PENGUKURAN 40

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 45
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 45
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 305
3.3 REALISASI ANGGARAN 395

BAB IV. Penutup 414
4.1 KESIMPULAN 414
4.2 SARAN 416

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5) Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
6) Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder
7) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
8) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
11) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Keten
12) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
13) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
14) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
15) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
16) Jumlah Desa Pangan Aman
17) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
18) Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

19) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
20) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
21) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Lampiran 5. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Lampiran 6. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Lampiran 7. Realisasi IKU Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 8. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 9. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 10. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 11. Capaian RAPK Triwulan III Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang
Lampiran 12. Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan Tahun 2026
Lampiran 13. Tabel Keselarasan Data Perencanaan Kinerja Tahun 2026
Lampiran 14. Tabel Keselarasan Data Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026
Lampiran 16. Penyesuaian anggaran Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 17. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja
Lampiran 18. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan
Lampiran 19.Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2026 dengan Target Jangka Menengah
Lampiran 20. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Triwulan III 2026
Lampiran 21. Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2026

Lampiran 22. Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden.
Lampiran 23. Lembar Persetujuan Data Kinerja Bulan September 2026
Lampiran 24. Penghargaan Balai Besar POM di Pangkal Pinang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Pangkal Pinang 5
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 19
Tabel 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 ... 31
Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 34
Tabel 2.5 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 37
Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO 41
Tabel 2.8 Sumber Predikat AKIP 42
Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan triwulan bersangkutan dengan target tahunan 42
Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja 43
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2026 47
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 50
Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 53
Tabel 3.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 54
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 54
Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 57
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 59
Tabel 3.8 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 62
Tabel 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 62

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 63
Tabel 3.11 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 64
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 66
Tabel 3.13 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 68
Tabel 3.14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 70
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 71
Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 73
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 79
Tabel 3.18 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 82
Tabel 3.19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 84
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 85
Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 88
Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 91
Tabel 3.23 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 94
Tabel 3.24 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 96
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 97

Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 100
Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 103
Tabel 3.28 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 107
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 108
Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 110
Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 112
Tabel 3.32 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 117
Tabel 3.33 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 117
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 118
Tabel 3.35 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 119
Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 120
Tabel 3.37 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 124
Tabel 3.38 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 125

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 125
Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 128
Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 129
Tabel 3.42 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 132
Tabel 3.43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 132
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 133
Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 136
Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 137
Tabel 3.47 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 139
Tabel 3.48 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 140
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 140
Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 143
Tabel 3.51 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 144

Tabel 3.52 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 148
Tabel 3.53 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 149
Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 149
Tabel 3.55 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 150
Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 152
Tabel 3.57 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 155
Tabel 3.58 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 156
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 156
Tabel 3.60 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 158
Tabel 3.61 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 160
Tabel 3.62 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 163
Tabel 3.63 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 163
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 164
Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 165
Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 170

Tabel 3.67 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 174
Tabel 3.68 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 175
Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 176
Tabel 3.70 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 177
Tabel 3.71 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 179
Tabel 3.72 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 181
Tabel 3.73 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 182
Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 182
Tabel 3.75 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 184
Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 187
Tabel 3.77 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 190
Tabel 3.78 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 190
Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 191
Tabel 3.80 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 193

Tabel 3.81 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 194
Tabel 3.82 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan . 197
Tabel 3.83 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ... 198
Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 199
Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 201
Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 205
Tabel 3.87 Jumlah Desa Pangan Aman 208
Tabel 3.88 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Desa Pangan Aman 209
Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman 209
Tabel 3.90 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman 211
Tabel 3.91 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 214
Tabel 3.92 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 217
Tabel 3.93 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 217
Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 218
Tabel 3.95 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ... 220
Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 223
Tabel 3.97 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 231
Tabel 3.98 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 231

Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 232
Tabel 3.100 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 234
Tabel 3.101 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 235
Tabel 3.102 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 239
Tabel 3.103 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 239
Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 240
Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 242
Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 245
Tabel 3.107 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 248
Tabel 3.108 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 249
Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 249
Tabel 3.110 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 251

Tabel 3.111 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 254
Tabel 3.112 Indeks Pelayanan Publik..... 256
Tabel 3.113 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Indeks Pelayanan Publik 257
Tabel 3.114 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik 257
Tabel 3.115 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik 258
Tabel 3.116 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik 261
Tabel 3.117 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 264
Tabel 3.118 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 264
Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 265
Tabel 3.120 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM..... 266
Tabel 3.121 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 269
Tabel 3.122 Nilai AKIP UPT BPOM 273
Tabel 3.123 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai AKIP UPT BPOM..... 273
Tabel 3.124 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP UPT BPOM..... 274
Tabel 3.125 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM..... 278
Tabel 3.126 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM..... 280
Tabel 3.127 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 284
Tabel 3.128 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 285
Tabel 3.129 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 285
Tabel 3.130 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 287

Tabel 3.131 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 290
Tabel 3.132 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 295
Tabel 3.133 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Indeks Manajemen Risiko 296
Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko 296
Tabel 3.135 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko 299
Tabel 3.136 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko 301
Tabel 3.137 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026 305
Tabel 3.138 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025 385
Tabel 3.139 Tindak Lanjut Triwulan III Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025 389
Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran 395
Tabel 3.141 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan 397
Tabel 3.142 Perbandingan Realisasi Output dengan Realisasi Anggaran 399
Tabel 3.143 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja 402
Tabel 3.144 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2026 405
Tabel 3.145 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output 409

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyebaran Pegawai di Balai Besar POM di Pangkal Pinang 6
Gambar 1.2 Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung 7
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang 8

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Balai Besar POM Pangkal Pinang ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang, pada tahun 2026 telah ditetapkan 7 sasaran kegiatan diantaranya yaitu.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Layanan Publik UPT yang prima
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian 7 Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Berdasarkan **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026, tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di normalisasi karena 19 indikator yang dapat diukur capaiannya kurang dari 110%. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026 sebesar **102,37%** dengan predikat **Istimewa**.

Pada awal tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Namun pada Bulan Juli 2026 terdapat tambahan 1 Rincian Output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi. Dari 21 Rincian Output (RO), 20 RO dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 1 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya yaitu RO Layanan BMN. RO Layanan BMN belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) sampai dengan Triwulan III ini. Target (RPD) Anggaran RO Layanan BMN dialokasikan pada Bulan November 2026.

Dilihat dari data tabel di atas, 20 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,13 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,13) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input.

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 5 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh rata-rata persentase capaian output sebesar 102,14%. Hasil perhitungan tingkat efisiensi dari 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga kategori capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 102,14% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 97,26%.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu

Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000.

Pada bulan April dilaksanakan revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 dimana dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya. Penurunan target tersebut dilakukan pada KRO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), BDB.001 (Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan), BDB.002 (Desa Pangan Aman), BDB.003 (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), BDC (Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE), BMB.001 (Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT), QDG (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT), QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT), QIA.002 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT), QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT), dan QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT). Selain penyesuaian target output tersebut dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang sebesar Rp 10.808.000. Pada bulan Mei dilakukan kembali revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 dimana dilakukan pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66 (PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PANGKAL PINANG) sesuai dengan SBK 1 Perkara. Sampai dengan bulan Juni 2026 total pagu blokir Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000 dan **Pagu Total sebesar Rp 11.655.304.000**.

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.06.26.457 tanggal 22 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026, Badan POM mengusulkan revisi anggaran sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembukaan blokir anggaran Kode A yang bersumber dari PNBP TA 2026 dalam rangka menambah kegiatan utama yang mendukung penerimaan negara (PNBP) Badan POM sehingga

pada bulan Juli dilakukan buka blokir anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000.

Pada Triwulan III 2026, total realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar **Rp8.841.624.757** dari pagu total sebesar **Rp11.655.304.000** dengan capaian **75,86%**. Pada Triwulan III capaian penyerapan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sudah mencapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran khusus triwulan III dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 65% dan capaian 69,87%; Belanja Barang dengan target 70% dan capaian 71,65%; dan Belanja Modal dengan target 70% dan capaian 100%.

Sampai dengan Triwulan III, tidak terdapat Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang tidak mencapai target. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang masih di rentang 100 hingga dibawah 110. Walaupun terdapat kendala-kendala dalam bulan berjalan selama Triwulan III, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dan dapat ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja tetap optimal.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang sudah mengambil langkah antisipatif atas kendala-kendala yang ada, dari beberapa kendala yang ada, telah dilakukan identifikasi risikonya sebesar 65,91%. Kendala yang belum dikelola sebagai risiko akan dimasukkan ke dalam risiko baru pada risk register periode selanjutnya.

Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

HIGHLIGHT

Balai Besar POM di Pangkal Pinang mendapat penghargaan sebagai Terbaik I Kategori Balai Besar POM dalam Skor Indeks Kualitas Data ASN dan Pemanfaatan Document Management System (DMS) Tahun 2026.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola administrasi dan pengelolaan data yang semakin tertib, berkualitas, efektif, dan akuntabel.



BBPOM di Pangkal Pinang kembali meraih predikat Pelayanan Prima dengan Nilai Indeks 4,89 (A) sebagai unit penyelanggara pelayanan publik.

Predikat yang telah diberikan sangat memotivasi BBPOM di Pangkal Pinang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan melayani sepenuh hati dan berintegritas.



Balai Besar POM di Pangkal Pinang resmi meluncurkan SI DULANG POM (Sistem Digital Layanan Publik Balai Besar POM di Pangkal Pinang) di Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Bangka Barat, Senin (27/07/2026). Kegiatan peluncuran dihadiri oleh Pj. Sekda Kab. Bangka Barat, Abimanyu, beserta jajaran Pemerintah Kab. Bangka Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan uji coba penggunaan SI DULANG POM. Melalui inovasi ini, BBPOM di Pangkal Pinang berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang dekat, mudah diakses, cepat, dan responsif bagi masyarakat.



Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan PPNS Badan POM Tahun Anggaran 2026 periode 10 Agustus s.d. 8 Oktober 2026 bertempat di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Megamendung, Bogor. Petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang berkesempatan untuk mengikuti keseluruhan rangkaian pendidikan dan pelatihan tersebut. Berdasarkan hasil penilaian selama mengikuti pendidikan, petugas BBPOM di Pangkal Pinang berhasil meraih predikat Peserta Didik Terbaik Ke-3, sebagai bentuk pencapaian atas kompetensi, kedisiplinan, dedikasi, dan kesungguhan dalam mengikuti seluruh rangkaian pendidikan. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pangkal Pinang melalui Tim Kerja Pemeriksaan melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam pada depot jamu di Pulau Bangka. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap legalitas (izin edar), kesesuaian label, kondisi produk, kedaluwarsa, serta cara penyimpanan produk obat bahan alam yang dijual di depot jamu.

Kepala BBPOM di Pangkal Pinang, Alex Sander menyampaikan bahwa "Intensifikasi pengawasan kali ini berfokus pada sarana depot jamu yang tersebar di wilayah Kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini dilakukan pada periode pengawasan 24-28 Agustus 2026 dengan tujuan untuk memastikan obat bahan alam yang beredar dan dikonsumsi masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat".



Pada bulan September, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan tiga kegiatan Bimtek Internal Pengujian yaitu Bimtek Internal Laboratorium Obat Tradisional-Suplemen Kesehatan pada 31 Agustus 2026, Bimtek Internal Laboratorium Kosmetik dan Bimtek Internal Laboratorium Kimia Pangan yang dilaksanakan pada 21 - 25 September 2026. Rangkaian kegiatan bimtek ini dibuka dengan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan praktikum verifikasi metode tersebut dan ditutup dengan pembahasan hasil verifikasi.



Bertempat di Aula Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bertema "Gen Z Bijak: Cegah AMR dan Cerdas Pilih Pangan Aman dan Bergizi" yang dilaksanakan pada Kamis (13/08/2026). KIE diikuti oleh 72 (tujuh puluh dua) peserta yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Keperawatan, Gizi dan Farmasi. KIE dibuka secara resmi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Zenderi Wardani. Selain materi mengenai AMR dan pangan aman, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli dan mengonsumsi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, maupun pangan olahan.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pangkal Pinang melakukan kunjungan ke Kantor Studio Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Bangka Belitung. Kunjungan ini dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan. (27/08/2026)

Kepala BBPOM di Pangkal Pinang, Alex Sander, bersama tim disambut langsung oleh Kepala LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung, Emirizon. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan diisi dengan diskusi mengenai peluang kerja sama dalam mendukung penyampaian informasi publik yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pengawasan obat dan makanan semakin hari semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pengawas obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pangkal Pinang, ditetapkan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 5 Kabupaten Kota di Pulau Bangka.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM Pangkal Pinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai UPT Badan POM adalah sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

   UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi UPT

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Pangkal Pinang

Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Listrik	Sarana Komunikasi
L.Tanah 5526 m^2 **L.Bangunan** 2075 m^2 **Luas Kantor** 780 m^2 **Luas Laboratorium** 1295 m^2	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	207.000 watt - **kantor** : 33.000 watt - **Laboratorium**: 174.000 watt	- **Saluran telepon** (Ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet jaringan Moratelindo - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 27 unit - Conference Video - LAN server internal

Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan III Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari 2 orang Struktural (1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha), 16 orang staf tata usaha, 23 orang staf pengujian, 6 orang staf Pemeriksaan, 4 orang staf Penindakan, dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain ASN, terdapat 11 orang tenaga outsourcing.

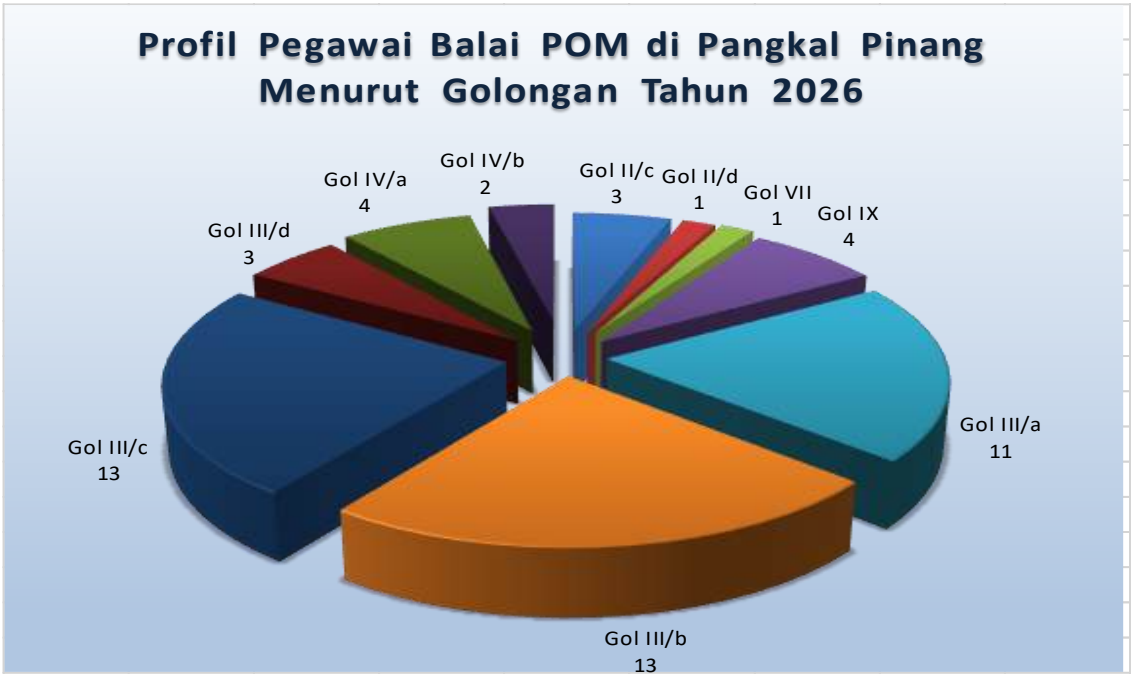

Gambar 1.1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan Golongan Tahun 2026

B. Eksternal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang digambarkan sebagai berikut:

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas 81.725,06 km2, Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 kilometer persegi, atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi, atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbatasan wilayah:

- di sebelah Utara : Laut Natuna
- di sebelah Selatan : Laut Jawa
- di sebelah Barat : Selat Bangka
- di sebelah Timur : Selat Karimata



Gambar 1.2 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. **Jumlah Kabupaten/Kota**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terdapat pulau-pulau kecil disekitarnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

a. Kabupaten Bangka,
b. Kabupaten Bangka Tengah,
c. Kabupaten Bangka Barat,
d. Kabupaten Bangka Selatan,
e. Kabupaten Belitung,
f. Kabupaten Belitung Timur dan
g. Kota Pangkal Pinang.

c. **Pola Transportasi Balai Besar POM Pangkal Pinang di Wilayah Kerja**

Pola transportasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah menggunakan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

d. **Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja**

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1 jam - 5 jam dan/atau transportasi laut 30 menit - 4 jam.

e. **Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja**

Waktu yang diperlukan petugas Balai Besar POM Pangkal Pinang di satu wilayah kerja berkisar antara 1-3 hari.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang seperti terlihat pada gambar 1.1 disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang

1. Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain:

A. ISU INTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.
2. Peralatan laboratorium sering mengalami kerusakan karena sudah berumur lebih dari 15 tahun, dibutuhkan peremajaan alat untuk memperlancar proses pengujian.
3. Keterbatasan anggaran perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium menyebabkan hanya alat prioritas yang dapat diperbaiki.
4. Ruang laboratorium untuk pengujian Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik masih terbatas, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu keselamatan kerja.
5. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel dan nama jenis Pangan Olahan yang di sampling.
6. Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi PFM di fungsi pengujian sangat terbatas dan belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan gap kompetensi pegawai.
7. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan.

8. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori maupun waktu sampling sampel PIRT.
9. Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT tidak sesuai dengan jumlah sarana yang ditelah diawasi.
10. Adanya laporan penandaan produk tembakau yang tidak terlaporkan di SIPT.
11. Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek.
12. Pengembangan kompetensi pegawai fungsi penindakan belum terlaksana sesuai perencanaan.
13. Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak disampaikan secara tepat waktu ke stakeholder terkait.
14. Pengelolaan Barang Bukti belum optimal.
15. Aplikasi Dashboard Penindakan belum berjalan secara optimal.
16. Pemanfaatan Data Kerawanan Kejahatan belum optimal.
17. Alat pengolah data di bagian Penindakan belum sesuai standar spesifikasi dari Direktorat Siber.
18. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai dari tahap perencanaan hingga evaluasi membutuhkan monitoring secara berkelanjutan.
19. Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi belum optimal.
20. Upaya perlindungan data untuk mencegah kebocoran data dan informasi belum optimal.
21. Diperlukan adanya pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih berdampak kepada masyarakat untuk mendukung proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
22. Adanya perbedaan pemahaman antar pegawai mengenai penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
23. Monitoring pengumpulan raw data kinerja masing-masing fungsi belum optimal.
24. Kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal dan masih menjadi temuan dalam audit Inspektorat maupun BPK.
25. Pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan penyesuaian kegiatan pengawasan sarana dan produk.

26. Pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai pedoman yang berlaku.
27. Ruang arsip (Record Center) belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
28. Masih terdapat penciptaan arsip yang belum mengikuti pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku.
29. Pengelolaan persediaan belum optimal, terdapat selisih antara data gudang dan aplikasi SAKTI.
30. Sarana prasarana K3 belum tersedia secara optimal sesuai standar.
31. Pengadaan melalui e-purchasing tidak sampai selesai.

B. ISU EKSTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai Besar di POM Pangkal Pinang.
2. Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan.
3. Kebijakan timeline pengujian yang selalu berubah setiap tahun dan belum dituangkan dalam Pedoman Sampling.
4. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat.
5. Potensi adanya KLB keracunan pangan meningkat dengan berjalannya program MBG.
6. Satgas KLB keracunan pangan belum terbentuk dan bekerja secara optimal
7. Pemberian Gratifikasi dari Pelaku Usaha kepada Petugas.
8. Sarana yang diperiksa dalam kondisi tutup tidak beroperasi akan tetapi tidak bisa dikonfirmasi kepada pemilik sarana karena tidak terdapat kontak yang bisa dihubungi.
9. Petugas mengalami penolakan dari sarana saat dilakukan pemeriksaan.
10. Penyesuaian kebijakan pengawasan dari pusat menuntut UPT untuk cepat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi operasional.
11. Risiko keselamatan petugas saat melakukan pengawasan obat dan makanan
12. Perubahan metode penilaian SRL dari "pernah dan mampu uji" menjadi "harus melalui verifikasi MA menimbulkan kebutuhan pemisahan kegiatan peningkatan SRL dan MA Terverifikasi.

13. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA .
14. Dukungan BPOM terhadap program MBG meliputi sampling, pemeriksaan, penyuluhan dan pengujian.
15. Beredar isu atau hoaks mengenai Obat dan Makanan serta sentimen negatif terhadap BPOM.
16. Adanya program lain dari kementerian/lembaga di sekolah dengan tahapan program yang hampir sama sehingga menghambat keberlanjutan program.
17. Terdapat tumpang tindih program di desa dari kementerian/lembaga lain yang menggunakan metode serupa, sehingga menghambat keberlanjutan program Keamanan Pangan Terpadu.
18. Terjadinya efisiensi anggaran yang menyebabkan PEMDA tidak melaksanakan replikasi program keamanan pangan terpadu.
19. Pengetahuan pelaku UMKM masih rendah terkait perizinan melalui OSS terbaru.
20. Masih rendahnya komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan tahapan pendampingan UMKM.
21. Rendahnya putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan sehingga tidak memberikan efek jera.
22. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
23. Intervensi dari pihak eksternal dalam penindakan atau penyidikan.
24. Peningkatan peredaran produk ilegal dan berbahaya melalui platform digital/online.
25. Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal.
26. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi terhadap BPOM.
27. Masyarakat membutuhkan akses informasi dan edukasi obat dan makanan yang lebih mudah dan berbasis digital.
28. Adanya ancaman siber seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan DDoS, serta risiko dari pihak ketiga.

29. Jumlah responden yang tidak mencukupi untuk pengisian survei.
30. Masih rendahnya komitmen Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK BPOM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PENGUKURAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pangkal Pinang 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2025-2029. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rancangan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah mulai disusun sejak awal tahun 2025. Setelah mengalami beberapa kali penyesuaian pada bulan Desember 2025 Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menetapkan secara resmi Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulanan Tahun 2026.

Secara ringkas, Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Badan POM adalah sebagai berikut:

I. Visi

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

II. Misi

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

IV. TUJUAN

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan dapat mencapai sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang selama lima tahun (2025–2029) disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025–2029. Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2026 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya efektivitas KIE;
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Layanan Publik UPT yang prima;
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	31,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

RKT Tahun 2026 ini disusun dan ditetapkan pada 07 Oktober 2025, target yang tertuang dalam RKT merupakan target tahun 2026 pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang menandatangani Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2026 dengan indikator kinerja utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang serta didukung dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp 13.918.203.000.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai unit kerja eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi

kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000. Pada saat PK disusun, anggaran disusun berdasarkan revisi DIPA kedua dengan pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000, namun total pagu tetap sama atau tidak berubah. Total Pagu tersebut dijabarkan kedalam setiap pagu untuk 20 Rincian Output yang mendukung pencapaian tujuan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini terdapat perubahan/perbedaan jika dibandingkan dengan RKT Tahun 2026, yaitu:

1. Jumlah IKU berkurang dari 28 menjadi 27, terdapat 1 IKU yang tidak masuk kedalam dokumen PK yaitu Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikarenakan anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026 yang menjadi dasar penyusunan anggaran dalam dokumen PK.
2. Terdapat perubahan target pada 17 IKU, disebabkan oleh hasil perhitungan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi lain yang relevan.

Perubahan secara rinci antara RKT dan PK tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,25	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	27			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81			Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pemenuhan target	100			Persentase pemenuhan target	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		pengendalian AMR di wilayah UPT				pengendalian AMR di wilayah UPT		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40			Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81					Anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	10			Jumlah Sekolah yang melaksanakan	7	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		keamanan pangan				pembudayaan keamanan pangan		mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah desa pangan aman	6			Jumlah desa pangan aman	3	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,25	3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	7		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	81,80		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5			Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94			Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama tanggal 29 April 2026 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026, terjadi penyesuaian anggaran BPOM Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, yang berdampak pada pencapaian target Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, mengakibatkan adanya penyesuaian target RO yang berdampak secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan surat Sekretaris Utama No. PR.07.2.07.26.541 tanggal 14 Juli 2026 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Tabel 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,08
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,6
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

Dokumen revisi PK disusun berdasarkan anggaran revisi DIPA kesembilan dengan pagu efektif sebesar Rp 11.655.304.000. Terdapat penambahan 1 Rincian Output dari 20 Rincian Output pada saat PK awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Total pagu tersebut dijabarkan ke setiap pagu 21 Rincian Output yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berikut di bawah ini tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 sesuai penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pangkal Pinang,

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	343,795,000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.85	5,983,000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	143,609,000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	9,369,600
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17,020,380

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	145,595,160
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	16,159,400
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3,639,932,000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	69,515,000
18	Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	99.5	31.25	20,097,000
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	85	92.5	142,830,000
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.4	661,291,000
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	156,999,000
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,454,781,000
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	315,112,000
TOTAL														**11,688,120,000**

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap bulan digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. RAPK tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama tanggal 29 April 2026 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026, terjadi penyesuaian anggaran BPOM Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, yang berdampak pada pencapaian target Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, mengakibatkan adanya penyesuaian target RO yang berdampak secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan surat Sekretaris Utama No. PR.07.2.07.26.541 tanggal 14 Juli 2026 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Tabel 2.5 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	357.295.000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.85	5,983,000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	144.329.000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.862.400
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	8.985.600
6	Persentase keputusan/ rekomendasi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.642.400

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.863.120
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17.118.480
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	148.871.090
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	223.398.910
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	13.950.500
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	91	91	91	91	91	91	14,986,000
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	9.908.500
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3.612.116.000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi												40	22,160,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	4	68.788.000
18	Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	2	71.827.000
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36.173.000
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	68.36	75.36	85.36	88.36	88.36	27.08	20,097,000
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	57.5	57.5	77.5	77.5	92.5	92.5	120.822.000
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.6	675.973.000
25	Nilai AKIP UPT BPOM												82,15	158.719.000
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,454,781,000
27	Indeks Manajemen												2.94	317.695.000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	Risiko UPT BPOM													
TOTAL														11,655,304,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pada Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2026 terdapat 7 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja yang berkontribusi pada pencapaian sasaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Sedangkan NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus no. 1 sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a) Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

A. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip NKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

i. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

ii. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

B. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Sumber Predikat AKIP

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasi evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

b) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan triwulan bersangkutan dengan target tahunan yang terdapat dalam dokumen PK. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan triwulan bersangkutan dengan target tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

c) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja BBPOM di Pangkal Pinang:

1. Tim Monev Tata Usaha menyiapkan media pengumpulan data pada madu pelawan
2. Penanggung Jawab Data tiap Tim Kerja melakukan penginputan data kinerja
3. Ketua Tim Kerja melakukan verifikasi data kinerja yang diinput
4. Ketua Tim Monev memeriksa Kelengkapan data kinerja yang telah diinput oleh semua Tim Kerja
5. Ketua Tim Kerja dan Ketua Tim Monev melakukan evaluasi dan pembahasan di rapat bulanan Bersama Kepala Balai
6. Tim Monev TU melakukan input dan pelaporan data kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada subbab analisis capaian kinerja ini akan diuraikan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Selain itu, juga dilakukan perbandingan realisasi Triwulan III dengan target tahunannya. Setiap indikator akan dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dan menganalisis capaian setiap indikator kinerjanya. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026, terdapat 7 sasaran kegiatan dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
18. Jumlah desa pangan aman
19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
23. Indeks Pelayanan Publik UPT
24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
25. Nilai AKIP UPT BPOM
26. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berkaitan dengan proses penetapan Rencana Strategis BPOM 2025-2029, terdapat perubahan jumlah sasaran kegiatan yang semula 8 sasaran kegiatan menjadi 7 sasaran kegiatan (terdapat pengurangan satu sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT). Berdasarkan hal tersebut, pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026, **jumlah sasaran**

kegiatan menjadi 7 dan **keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik. Berikut Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*98,75*	*99,84*	*101,10%*	*101,10%*
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*98,9*	*100,00*	*101,11%*	*101,11%*
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	*100*	*100*	*100,00%*	*100,00%*
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*96,5*	*100*	*103,63%*	*103,63%*
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	*85*	*88,99*	*104,70%*	*104,70%*
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*100*	*100*	*100,00%*	*100,00%*
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*94,25*	*100,00*	*106,10%*	*106,10%*
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*96,6*	*100,00*	*103,52%*	*103,52%*

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*93,25*	*99,04*	*106,21%*	*106,21%*
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	*93,83*	*96,75*	*103,12%*	*103,12%*
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	*91*	*97,22*	*106,84%*	*106,84%*
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	*78,5*	*78,7*	*100,25%*	*100,25%*
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	*86,85*	*88,13*	*101,47%*	*101,47%*
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	*95*	*95*	*100,00%*	*100,00%*
		18	Jumlah desa pangan aman	*70*	*70*	*100,00%*	*100,00%*
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	*100*	*100*	*100,00%*	*100,00%*
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	*85,36*	*91,36*	*107,03%*	*107,03%*

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	*77,50*	*77,5*	*100,00%*	*100,00%*
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	*50*	*50*	*100,00%*	*100,00%*
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	
Total Capaian PK							1945,08%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)							102,37%
Predikat NKO							Istimewa

Nilai Kinerja Organisasi dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan tabel di atas, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026, tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di normalisasi karena 19 indikator yang dapat diukur capaiannya kurang dari 110%. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026 sebesar **102,37%** dengan predikat **Istimewa**.

Berikut capaian kinerja dari 27 Indikator Kinerja Utama pada Triwulan III Tahun 2026 yang dinyatakan dalam kategori sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	99,84	101,10%	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63%	Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	88,99	104,70%	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	99,04	106,21%	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,75	103,12%	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97,22	106,84%	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,5	78,7	100,25%	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,13	101,47%	Sangat Baik
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00%	Baik
		18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00%	Baik
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,36	91,36	107,03%	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77,50	77,50	100,00%	Baik
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian	
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	

Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama pada Triwulan III Tahun 2026, terdapat **12 (dua belas)** indikator dengan kategori **sangat baik**, **7 (tujuh)** indikator dengan kategori **baik**, dan **8 (delapan)** indikator belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT** diukur dengan 15 indikator sebagai berikut:

1. **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	99,84	101,10%	Sangat Baik

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut terhadap sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap sampel yang tidak ditindaklanjuti yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan, tindak lanjut berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/4, di mana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Pada Triwulan III 2026, pelaksanaan pengujian sesuai rencana sampling dan pengujian. Hasil perhitungan realisasi dari masing-masing komponen untuk

menghasilkan realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III 2026 diperoleh nilai komponen A = 100%, B = 99,34%, C = 100% dan D = 100% sehingga diperoleh realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan rumus (A + B + C + D)/ 4 sebesar 99,84%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 98,75%, capaian kinerja mencapai 101,10% dengan kategori "Sangat Baik".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	98,75	99,84	101,10

Berdasarkan Tabel di atas, indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target sebesar 98,75% baik pada Triwulan II maupun Triwulan III Tahun 2026. Pada triwulan II, realisasi mencapai 100% sedangkan pada triwulan III sebesar 99,84%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan melampaui target secara konsisten pada Triwulan II dan Triwulan III.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	99,84	101,10 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2026 mengalami penyesuaian target sejak Januari 2026, yang semula 90,25% menjadi 98,75%. Hal ini sesuai dengan

kebijakan dari biro perencanaan bahwa target di tahun berjalan tidak boleh lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 (98,75%), realisasi kinerja triwulan III tahun 2026 diperoleh capaian sebesar 101,10% dengan kategori tercapai / melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 99,84 dari target 98,75. Capaian terhadap target ini adalah sebesar 101,10%, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" serta dinyatakan "Tercapai/Melampaui" target tahunan. Walaupun terdapat sedikit penurunan realisasi apabila dibandingkan dengan Triwulan II yang mencapai realisasi 100,00 (capaian 101,27%), kinerja pada Triwulan III tetap berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor utama:

a. Proses pengujian sampel Obat, Obat Tradisional Suplemen Kesehatan (OTSK), dan Kosmetik berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
b. Pemantauan sampel yang ketat dari tahap penerimaan hingga penerbitan hasil uji menggunakan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), sehingga SLA (*Service Level Agreement*) pengujian tidak melewati batas waktu.
c. Ketersediaan reagen, media mikro, dan baku pembanding yang mencukupi selama Triwulan III untuk mendukung kelancaran pengujian sampel.
d. Optimalnya koordinasi antara fungsi pemeriksaan/sampling dengan fungsi pengujian dalam memastikan sampel masuk ke laboratorium tepat waktu, sehingga tahapan pengujian dapat segera dieksekusi tanpa adanya penundaan dari jadwal yang direncanakan.

Di sisi lain, sedikitnya penurunan capaian penyelesaian uji sangat dipengaruhi oleh kendala operasional administratif dan teknis yang terjadi selama Triwulan III, antara lain:

- **Kendala Sistem SIPT (Juli)**: Terjadinya kendala administrasi saat pergantian Ketua Tim (Katim), di mana Surat Perintah Kerja (SPK) untuk sampel Obat, OTSK, dan Kosmetik tidak terbaca pada akun SIPT Katim baru. Hal ini mengharuskan proses *rollback* dan penyesuaian ulang tanggal SPK oleh

Pusdatin, serta munculnya kendala visibilitas pada sampel Obat yang dirujuk ke Balai lain.

- **Kendala Pengujian Rujukan (Agustus)**: Keterlambatan hasil uji konfirmasi parameter BKO (Bahan Kimia Obat) stamina pada sampel OTSK yang dirujuk ke BBPOM di Pekanbaru. Penundaan ini disebabkan oleh kerusakan instrumen LC-MS/MS di laboratorium rujukan pada bulan Juli dan adanya instruksi pengujian ulang dari PPPOMN, sehingga penyelesaian sampel mundur ke bulan Agustus.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk memastikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan perlu dilakukan upaya perbaikan kinerja khususnya terhadap kendala yang ditemukan pada triwulan III yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Penguji di Region Pekanbaru,terkait ketepatan waktu penginputan laporan hasil uji di SIPT dan proses pengujian di Balai lain apabila terjadi kerusakan alat utama.
2. Memprioritaskan jadwal kalibrasi dan pemeliharaan alat ukur laboratorium utama agar tidak terjadi *downtime* yang dapat menghambat *timeline* pengujian.
3. Memastikan ketersediaan sampel (kategori day/night cream)mencukupi untuk dilakukan sampling sepanjang tahun 2026 melalui pemetaan sarana yang lebih terperinci.

Selain itu, ada beberapa upaya antisipatif untuk penyempurnaan kinerja ke depannya, diantaranya :

1. Mengidentifikasi kebutuhan reagen dan media mikro yang dibutuhkan laboratorium yang belum direncanakan sebelumnya dan mengidentifikasi anggaran mana yang bisa direvisi untuk memenuhi kebutuhan reagen/media mikro tersebut.
2. Melakukan koordinasi yang baik antara sampling dan pengujian sehingga SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian dan pelaporan hasil pengujian memenuhi timeline seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling.

3. Mengawal semua tahapan proses dari sampling sampai pelaporan yang mempengaruhi perhitungan indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	**Realisasi** : Pada bulan Juli telah diselesaikan pengujian terhadap : 1. 16 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 15 sampel OBAOK (sampel Balai) 3. 4 sampel SK (4 sampel Balai) 4. 33 sampel kosmetik (28 sampel Balai, 5 sampel Loka) **Kendala** : – Sampel OBAOKSK yang sudah di SPK kan oleh Katim sebelumnya, tidak terbaca di SIPT Katim baru. Setelah berkoordinasi dengan Pusdatin, sampel-sampel tersebut dirollback dan dibuatkan SPK kembali di role Katim baru dengan tanggal SPK dibuat sesuai dengan tanggal SPK sebelumnya. – Sampel Kosmetik dan Obat yang belum dibuatkan SPK, dibuatkan SPK sesuai tanggal deadline waktu sampling/ tanggal sampel diterima laboratorium. – Tanggal SPK semua sampel yang dirollback dan dibuatkan SPK oleh Katim baru adalah sebelum tanggal SK Katim baru. – Sampel Obat-Balai yang dikirim ke Balai lain dan sudah dibuatkan SPK oleh	Lakukan monitoring SIPT sampel Obat-Balai yang diuji di balai lain.	1. Merencanakan pelaksanaan sampling obat kategori JKN 1-3 bulan kedepan dengan target yang lebih banyak pada Kab. Bangka Tengah / Kab. Bangka Selatan Melakukan pemetaan Kosmetik Kategori Impor Filipina yang beredar di toko kosmetik saat pelaksanaan sampling atau pemeriksaan dan berdasarkan riwayat sampling 2 tahun terakhir	Agustus	T	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Katim sebelumnya, belum muncul di role Katim baru. **Upaya** : Terus berkoordinasi dengan Pusdatin melalui admin Balai.						
Agustus	**Realisasi** : Pada bulan Agustus telah diselesaikan pengujian terhadap : 1. 13 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 17 sampel OBAOK (14 sampel Pangkal Pinang, 3 sampel Belitung) 3. 3 sampel SK (3 sampel Pangkal Pinang) 4. 26 sampel kosmetik (22 sampel Pangkal Pinang, 4 sampel Belitung) **Kendala** : 2 sampel OBA Balai bulan Mei, diuji konfirmasi parameter stamina ke BBPOM di Pekanbaru di bulan Juni. Sesuai jadwal uji konfirmasi parameter stamina, BBPOM di Pekanbaru baru melakukan pengujian di bulan Juli, dan di bulan Juli instrumen LC-MS/MS sempat mengalami kerusakan dan 1 sampel diuji ulang beberapa kali sesuai arahan PPPOMN sehingga baru selesai uji di bulan Agustus. **Upaya** : Berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru terkait pengujian sampel uji konfirmasi parameter stamina.	Berkoordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	September	T	-	-
September	**Realisasi** : Pada bulan September telah diselesaikan pengujian terhadap : 1. 10 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 10 sampel OBAOK (9 sampel Pangkal Pinang, 1 sampel Belitung) 3. 3 sampel SK (3 sampel Pangkal Pinang) 4. 25 sampel kosmetik (24 sampel Pangkal Pinang, 1 sampel Belitung)	Ajukan permintaan perbaikan untuk UPS yang rusak.	Mengajukan permintaan perbaikan untuk UPS yang rusak.	Oktober	Y	O-80	Peralatan laboratorium mati secara tiba-tiba ketika padamnya aliran listrik.

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kendala : UPS GCMS Obat dan GCMS Kosmetik rusak. UPS Disolusi ada notif pergantian baterai. **Upaya** : Listrik disambungkan ke UPS GC, sehingga ketiga alat tersebut hanya bisa digunakan bergantian						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan capaian indikator ini meliputi:

1. **Kegiatan Pengujian Laboratorium**: Alokasi anggaran pada kegiatan pengujian sediaan farmasi memberikan kontribusi terbesar, di mana analis bekerja secara kompeten menggunakan metode uji yang telah divalidasi. didukung oleh ketersediaan fasilitas, alat laboratorium yang terkalibrasi dengan baik, serta reagen dan baku pembanding yang memadai.
2. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana**: Kegiatan sampling yang *targeted* dan berbasis risiko pada sarana distribusi maupun produksi memastikan bahwa sampel yang masuk ke laboratorium benar-benar relevan dengan indikator pengawasan.
3. **Manajemen Mutu**: Kegiatan jaminan mutu laboratorium memastikan tidak adanya pengulangan pengujian akibat kesalahan teknis.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	99,84	101,10	283.319.094	278.096.898	98,16	1,03	0,03	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, capaian penggunaan anggaran untuk indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kategori 100% (Efisien). Hal ini dibuktikan dengan capaian Output kinerja yang melampaui target (realisasi 99,84 dari target 98,75 atau sebesar 101,10%), sementara serapan Input (Anggaran) lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III. Realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp278.096.898 dari target anggaran Rp283.319.094, atau setara dengan penyerapan 98,16%.

Kondisi dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,03 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,03 ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sangat efisien. Penyebab utama efisiensi ini adalah keberhasilan laboratorium dalam mengoptimalkan penggunaan bahan operasional pengujian (seperti reagen, media mikro, dan baku pembanding) secara tepat guna. Proses pengadaan kebutuhan laboratorium juga dieksekusi secara efektif sesuai dengan spesifikasi dan harga yang menguntungkan tanpa mengurangi kualitas hasil uji.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang telah dilakukan sehingga anggaran menjadi efisien:

- Melakukan perencanaan kebutuhan laboratorium secara komprehensif sebelum melakukan proses pengadaan barang, sehingga reagen dan bahan habis pakai yang dibeli benar-benar sesuai dengan jumlah kebutuhan.
- Menerapkan praktik berlaboratorium yang baik (*Good Laboratory Practice*), sehingga menekan risiko kegagalan uji yang berakibat pada pemborosan bahan dan waktu.
- Mengelola persediaan laboratorium secara tertib (menerapkan prinsip *First In First Out / First Expired First Out*) agar tidak ada reagen atau baku pembanding yang rusak atau kedaluwarsa sebelum digunakan.

Upaya yang akan dilakukan agar ke depannya tetap efisien:

- Terus mengawal kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi bulanan untuk menghindari deviasi anggaran yang terlalu besar di akhir tahun berjalan.

- Melakukan evaluasi berkala terhadap sisa stok bahan operasional laboratorium pengujian sebelum menyusun usulan pengadaan pada triwulan berikutnya.
- Memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan alat laboratorium (seperti kalibrasi), untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai manfaat maksimal (*Value for Money*).

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian rencana sampling, terutama untuk sampel yang memerlukan uji konfirmasi ke balai regional.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Optimalisasi anggaran untuk pembelian bahan pendukung laboratorium yang masih diperlukan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Pelaporan hasil pengujian perlu dilakukan dengan lebih efektif agar memenuhi timeline pengujian.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Monitoring pelaporan hasil pengujian agar memenuhi timeline dan berkoordinasi dengan Balai regional untuk kelancaran proses pengujian dan pelaporan.

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Pelaporan KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) merupakan pelaporan kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Sedangkan Pelaporan ESO (Efek Samping Obat) merupakan pelaporan mengenai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan obat dan pemantauan keamanan obat di suatu negara. Pelaporan KTD/ESO merupakan indikator penting yang menunjukkan bagaimana pemantauan keamanan obat di suatu negara berjalan dengan baik.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam melaporkan KTD/ESO yang terjadi di masyarakat. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.8 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan III.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga tidak bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan II dengan Triwulan III.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga tidak bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan III dengan Target pada tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil koordinasi dan pendampingan ke tenaga kesehatan selaku PIC di fasilitas pelayanan kesehatan, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaporan KTD/ESO diantaranya yaitu :

1. Tenaga kesehatan selaku PIC sarana ragu dalam memilih KTD/ESO yang akan dilaporkan
2. Adanya interfensi dari dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan (khususnya rumah sakit) yang tidak mengizinkan pelaporan KTD/ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai kriteria KTD/ESO yang dapat dilaporkan
3. Sulitnya menemukan KTD/ESO di Puskesmas dikarenakan jenis obat-obatan yang digunakan dalam terapi merupakan obat pilihan pertama dan kombinasi terapi sederhana sehingga potensi munculnya KTD/ESO lebih kecil

Ketiga hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan yang bertugas sebagai PIC sarana.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memahami kewajiban pelaporan dan segera melakukan pelaporan apabila terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) di sarananya.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring guna memperkuat komitmen dan keterlibatan aktif dalam sistem pelaporan farmakovigilans.
3. Melakukan audiensi ke dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan (khususnya rumah sakit). Audiensi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria KTD/ESO yang dapat dilaporkan oleh fasilitas pelayanan.

Tabel 3.11 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan website e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Agustus 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Agustus	Agustus	Ya	O-03	Pelaporan KTD/ ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
Agustus	1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan website e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan September 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 3 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat	September	Ya	O-03	Pelaporan KTD/ ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	3. Beberapa sarana yang telah di followup saat pemeriksaan rutin/saat sampling (PKM Girimaya, PKM GerungganG, PKM Baturusa) masih belum melakukan pelaporan KTD/ESO karena terkendala sulit menemukan KTD/ESO dan banyaknya pelaporan program puskesmas yang harus dilakukan		melaporkan KTD/ESO pada bulan September				
September	1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Beberapa sarana yang telah di follow up saat pemeriksaan rutin/saat sampling (PKM Gerunggang, PKM Baturusa, PKM Sungai Selan, RS Muhaya, RS Depati Hamzah, RSIA Rona, RSJD Syamsi Jacobalis) masih belum melakukan pelaporan KTD/ESO karena terkendala sulit menemukan KTD/ESO dan banyaknya pelaporan program puskesmas yang harus dilakukan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Oktober 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 4 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Oktober	Oktober	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026 dalam rangka mencapai target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diantaranya yaitu melakukan identifikasi sarana puskesmas dan rumah sakit yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO setiap bulannya, melakukan follow up ke sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO dan melakukan audiensi ke PIC Farmakovigilans dan dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai pelaporan KTD/ESO. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut menghasilkan realisasi pelaporan KTD/ESO sampai dengan Triwulan III sebanyak 9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan rincian 3 laporan dari rumah sakit dan 6

laporan dari puskesmas. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 27,85%, realisasi pelaporan tersebut telah mencapai 71,81% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan berdampak positif pada progress pencapaian target. Dari ketiga upaya tersebut, pelaksanaan follow up langsung ke sarana target menjadi kegiatan yang paling berdampak terhadap peningkatan jumlah laporan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.982.000	5.982.000	100,00	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan III tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan KIE secara *hybrid* (daring dan luring) serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada PIC sarana secara daring dan luring. Koordinasi dan pendampingan secara daring terbukti dapat meningkatkan komitmen PIC sarana dalam melakukan pelaporan KTD/ESO, meskipun dampaknya tidak sebesar jika dilakukan secara luring. Upaya ini meningkatkan efektifitas kegiatan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan penggunaan anggaran yang efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan III yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara daring dan luring yang memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan wilayah dengan tetap mengutamakan kualitas pembinaan

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III tidak terdapat penyesuaian penggunaan anggaran. Penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan menyisakan anggaran Rp 1000.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada Triwulan III tahun 2026, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target diantaranya yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulannya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans dan berpotensi besar dapat melaporkan KTD/ESO
- Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring
- Melakukan audiensi ke PIC Farmakovigilans dan dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan pelaporan KTD/ESO

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya diantaranya yaitu :

- Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulannya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans dan berpotensi besar dapat melaporkan KTD/ESO.
- Terus meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan selaku PIC Farmakovigilans di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya secara langsung dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.

3. **Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.13 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	Sangat Baik

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan atau ketentuan lainnya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel
B. Kesesuaian Parameter Uji
C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian terhadap 160 sampel pangan olahan berisiko. Dari enam kriteria penilaian semuanya mencapai nilai optimal. Target yang ditetapkan pada TW III adalah 98,90%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 101,11%. Target pada TW III berbeda dengan target awal penyusunan Renstra tahun 2025–2029. Terjadi kenaikan target dari 91% menjadi 98,90%. Perubahan target dilaksanakan setelah adanya pembahasan dengan kedeputian 3 terkait target dan perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025. Perubahan target ini dilakukan karena untuk menyesuaikan realisasi dengan target awal yang telah ditetapkan. Target awal ditetapkan lebih rendah karena indikator ini merupakan indikator baru sehingga pada saat penyusunan target belum ada kertas kerja yang dapat menggambarkan capaian dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan pada awal tahun adalah 91% karena belum ada nilai *baseline* untuk indikator ini sehingga belum memperhatikan pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap target. Dengan adanya peningkatkan target diharapkan realisasi dan capaian untuk indikator ini tidak melebihi 110%. Pada Triwulan III, capaian yang diperoleh 101,11 dengan realisasi 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mampu dicapai oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Hasil capaian ini menyebabkan BBPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	98,9	100,00	101,11

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II dan Triwulan III menunjukkan kinerja yang konsisten. Target yang ditetapkan pada masing-masing triwulan sebesar 98,90%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100,00%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 101,11% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel pangan olahan berisiko telah diuji dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian yang melampaui target pada kedua triwulan mengindikasikan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan pengawasan.

Tidak terdapat perbedaan capaian antara Triwulan II dan Triwulan III, yang menunjukkan stabilitas kinerja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sampel pangan olahan berisiko. Konsistensi ini diharapkan dapat dipertahankan pada triwulan berikutnya melalui penguatan koordinasi, optimalisasi proses monitoring, serta peningkatan efektivitas pengawasan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	100,00	101,11 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan I terjadi perubahan target bulanan, triwulan dan tahunan. Target awal yang ditetapkan adalah 91% dan untuk saat ini target dinaikkan menjadi 98,90%. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2026 adalah 98,90% sama dengan target triwulan karena sifatnya flat. Realisasi Triwulan III telah mencapai target triwulan dan tahunan yaitu 100% dengan kategori "Tercapai/Melampaui". Dari enam komponen penilaian yang ditetapkan, semua komponen mencapai nilai maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan BBPOM di Pangkal Pinang dalam mencapai target Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III didukung oleh koordinasi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan sampling, pengujian, serta tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan memperhatikan prioritas pengawasan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan pengujian.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling antara kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Pada saat revisi target ditetapkan, seluruh 15 sampel PIRT telah selesai dilakukan sampling sehingga tetap diproses sesuai rencana awal. Dengan demikian, penyesuaian proporsi target sampling lebih banyak dilakukan pada kategori pangan olahan berisiko. Meskipun

demikian, perubahan target RO tidak mengubah target capaian indikator, karena indikator diukur berdasarkan persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, bukan berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa. Melalui penyesuaian perencanaan sampling dan optimalisasi sumber daya, seluruh target sampling hasil revisi tetap dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Strategi penyesuaian perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah diterapkan pada Triwulan I terus dipertahankan pada Triwulan III sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan reagen, media, dan sarana laboratorium dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan pengujian. Selain itu, BBPOM di Pangkal Pinang tetap menjalin koordinasi yang intensif dengan laboratorium penguji regional Pekanbaru untuk memastikan seluruh sampel dapat diuji, hasil pengujian diterima tepat waktu, dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin kompetensi personel, validitas metode pengujian, ketertelusuran hasil pengujian, pengendalian mutu internal, serta keandalan peralatan laboratorium. Monitoring dan evaluasi terhadap progres sampling, pengujian, dan tindak lanjut juga dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Berbagai upaya tersebut menghasilkan realisasi sebesar 100,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,11%.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BBPOM di Pangkal Pinang melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan berisiko yang menjadi target kinerja setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk

memastikan kategori sampel yang diperiksa dan yang masuk ke laboratorium sesuai dengan rencana dan Pedoman Sampling.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai di lingkup regional Pekanbaru untuk memastikan bahwa sampel regional yang dikirimkan dapat diuji dengan baik dan sesuai ketentuan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel pangan olahan berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mengajukan penambahan alat gelas dan cawan sekali pakai untuk mengatasi kekurangan alat gelas di laboratorium mikrobiologi.
4. Melakukan penyesuaian terhadap target sesuai dengan kesepakatan baru yang ditetapkan oleh pengampu.
5. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.

Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	**Pemeriksaan** Realisasi : Pada Bulan Juli telah dilakukan sampling 25 sampel pangan olahan (24 Sampel MD Reguler dan 1 Fasilitasi UMK Upgrade MD). Target Juli 26 sampel, kurang 1 sampel sebagai kompensasi dari kelebihan sampling beberapa bulan sebelumnya Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Juli	**Pemeriksaan** Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	**Pemeriksaan** PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	**Pemeriksaan** Agustus	**Pemeriksaan** Tidak	-	-
	Pengujian Realisasi : Target sampel sesuai renlak : 107 Sampel masuk pengujian : 107 Sampai dengan bulan Juli jumlah sampel yang masuk	**Pengujian** 1. Prioritas usulan alat lab terutama HPLC 2. Optimalisasi pengadaan pendukung teknis pengujian	**Pengujian** 1. Dilakukan pengajuan rekomendasi alat laboratorium tahun 2027, dan usulan anggaran sesuai rekomendasi alat lab	**Pengujian** Agustus	**Pengujian** Ya	O-70 SDM-17 K3-04	1. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 2. Kesalahan dalam

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 107 sampel dari target renlak sampling dan pengujian, sesuai dengan target revisi RO Kendala : 1. Kendala yang dihadapi di bulan Juli adalah tingginya jumlah sampel masuk ke laboratorium. Selain sampel rutin dan sampel regional, terdapat sampel pihak ketiga (DAK) dari kabupaten Bangka Tengah dan Bangka yang masuk dalam waktu berdekatan dengan parameter uji yang bervariasi dan timeline 15 HK. 2. Kurangnya jumlah analis di pengujian kimia pangan. 1 analis sedang mengikuti pelatihan PFM 1 analis terampil dengan keterbatasan paramater uji yang bisa diberikan (mayoritas parameter uji merupakan kesulitan 3 dan 4) 1 analis cuti alasan penting, masuk kembali akhir Juli 1 analis merangkap sebagai penyelia dan pengelola sistem mutu 3. HPLC yang dimiliki 2, hanya1 yang mampu bekerja optimal untuk pengujian dengan berbagai analit, sehingga antrian pengujian sampel menjadi panjang 4. keterbatasan hotplate, pipet dispenser dan pipet steril yang dimiliki oleh laboratorium mikrobiologi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : 1. Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian sampel sesuai dengan urutan timeline	3. Usulan penempatan CPNS di laboratorium kimia pangan	2. Melakukan review kembali terhadap usulan kebutuhan pendukung teknis pengujian 3. Mengusulkan penempatan CPNS di lab kimia pangan				melakukan pengujian sampel 3. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	2. Melaksanakan lembur untuk mencapai target timeline pengujian 3. Melakukan peminjaman hot plate di lab kimia, menggunakan bulb manual untuk mengganti pipet dispenser						
Agustus	**Pemeriksaan** Realisasi : Pada Bulan Agustus telah dilakukan sampling 17 sampel pangan olahan (16 Sampel MD Reguler dan 1 Kasus ikan teri positif formalin dari Pasar Simpang Katis) Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Agustus **Pengujian** Realisasi : Target sampel sesuai renlak : 124 Sampel masuk pengujian : 124 Sampai dengan bulan Agustus jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 124 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 169 sampel Kendala : 1. Kendala yang dihadapi di bulan Agustus adalah kerusakan alat sentrifuse dengan suhu 2. parameter uji mikrobiologi banyak yang TMS sehingga membutuhkan waktu pengujian lebih lama untuk konfirmasi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : 1. Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian	**Pemeriksaan** Berkoordinasi dengan tim infokom dan pengujian terhadap setiap adanya sampel kasus yang akan masuk uji laboratorium **Pengujian** 1. Agar dllakukan perbaikan alat sentrifuse 2. Pengaturan jadwal pengujian mikrobiologi, memanfaatkan jadwal WFH	**Pemeriksaan** PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan **Pengujian** 1. Mengusulkan perbaikan sentrifuse 2. Tetap masuk di hari jumat meskipun WFH	**Pemeriksaan** September **Pengujian** September	Tidak Ya	- O-70	- Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sampel sesuai dengan urutan timeline 2. Rekomendasi alat laboratorium untuk HPLC						
September	**Pemeriksaan** Realisasi : Pada Bulan September telah dilakukan sampling 19 sampel pangan olahan (15 Sampel Rutin dan 4 Tambahan) Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan September	**Pemeriksaan** Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya penambahan realisasi sampel bulanan	**Pemeriksaan** PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya penambahan realisasi sampel bulanan	**Pemeriksaan** Oktober	Tidak	-	-
	Pengujian Realisasi : Target sampel sesuai renlak : 160 Sampel masuk pengujian : 160 Sampai dengan bulan September jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 160 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 160 sampel Dilakukan revisi terhadap renlak sesuai dengan target output sampai dengan TW IV Kendala : 1. Kendala yang dihadapi di bulan September adalah keterbatasan vessel microwave digester yang bisa digunakan, sebagian besar sudah mulai rusak (menggembung) 2. Keterbatasan disposable ose di laboratorium mikrobiologi menyebabkan waktu untuk pengujian menjadi lebih lama Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : 1. Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian sampel logam agar	**Pengujian** 1. Agar dilakukan pengusulan untuk pembelian microwave digester 2. Agar dipastikan pengadaan kebutuhan pendukung pengujian segera selesai	**Pengujian** 1. Akan mengusulkan kebutuhan alat laboratorium micowave digester 2. Akan dilakukan optimalisasi dan percepatan pengadaan agar kebutuhan pendukung pengujian tercukupi	**Pengujian** Oktober	Ya	O-55	Reagen/media mikro tidak tersedia untuk mengerjakan semua parameter uji

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pemakaian vessel dapat bergantian 2. Koordinasi dengan bagian pengadaan agar tidak ada kendala dalam pengadaan disposable ose						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Triwulan III, indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,00% atau 101,11% dari target sebesar 98,90%. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan secara terencana, didukung koordinasi yang baik antar fungsi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

Program yang paling berkontribusi terhadap pencapaian indikator ini adalah pelaksanaan sampling, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pangan olahan berisiko. Kegiatan tersebut merupakan proses bisnis utama yang secara langsung menghasilkan output berupa sampel yang diuji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Alokasi anggaran terbesar pada indikator ini difokuskan untuk mendukung pelaksanaan sampling di lapangan, pengujian laboratorium, penyediaan reagen, media, bahan habis pakai, serta pengiriman sampel ke laboratorium regional apabila diperlukan. Meskipun terdapat penyesuaian penggunaan anggaran pada Triwulan III, optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan sumber daya memungkinkan seluruh kegiatan prioritas tetap terlaksana sesuai target.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan pendukung, antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi sampling, pengujian, dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui rapat evaluasi

rutin serta pemanfaatan aplikasi Madu Pelawan, sehingga kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

2. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium Kimia Pangan dan Mikrobiologi yang menjamin kompetensi personel, penggunaan metode uji yang tervalidasi, ketertelusuran pengukuran, serta pelaksanaan pengendalian mutu internal. Penerapan sistem manajemen tersebut menghasilkan data pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko.
3. Digitalisasi pengelolaan data laboratorium dan pelaporan hasil pengujian, melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT), aplikasi Madu Pelawan, media penyimpanan berbasis *cloud* (Google Drive), serta penyusunan Catatan Pengujian hingga Laporan Hasil Uji (LHU) secara elektronik. Digitalisasi tersebut meningkatkan validitas data, mempercepat proses pelaporan, mempermudah pemantauan status sampel, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengujian.
4. Koordinasi yang intensif antara fungsi pemeriksaan, laboratorium, dan laboratorium penguji regional Pekanbaru dalam pengelolaan sampel yang memerlukan pengujian lanjutan. Koordinasi tersebut memastikan proses pengujian dan penyampaian hasil uji dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan tindak lanjut.

Di sisi lain, kegiatan yang tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator adalah kegiatan dukungan manajemen, seperti administrasi perkantoran, rapat koordinasi umum, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun tidak menghasilkan output yang secara langsung memengaruhi persentase sampel yang ditindaklanjuti, kegiatan tersebut tetap berperan sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas, penguatan tata kelola organisasi, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator pada Triwulan III menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengawasan pangan olahan telah berjalan secara efektif melalui sinergi antara kegiatan pengawasan, sistem manajemen laboratorium yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017, digitalisasi proses bisnis, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya yang optimal. Hal

tersebut menjadi faktor utama yang mendukung konsistensi capaian kinerja yang melampaui target pada Triwulan III.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	77.232.841	35.370.629	45,80	2,21	1,21	84% (Tidak Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai 100% dari target sebesar 98,9%, dengan capaian output sebesar 101,11%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp35.370.629 dari target anggaran sebesar Rp77.232.841 atau 45,80%. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai Pedoman SAKIP BPOM, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2,21 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1,21, dengan capaian efisiensi sebesar 84% yang termasuk dalam kategori Tidak Efisien.

Kondisi ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan yang cukup besar antara capaian output dan realisasi anggaran, yaitu sebesar 55,31 poin persentase. Meskipun capaian output telah melampaui target yang ditetapkan, penyerapan anggaran belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa proses pengadaan kebutuhan laboratorium yang mengalami adendum serta tertundanya penyelesaian pengadaan dan pembayaran barang akibat kendala dalam proses impor. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2026.

Dengan demikian, capaian output yang tinggi belum diimbangi dengan realisasi penggunaan anggaran sesuai rencana pada periode pelaporan. Kesenjangan

tersebut menyebabkan hasil pengukuran efisiensi berada pada kategori Tidak Efisien. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan anggaran, khususnya melalui percepatan penyelesaian proses pengadaan dan pembayaran, agar realisasi anggaran lebih selaras dengan pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2026.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, BBPOM di Pangkal Pinang melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta pemantauan realisasi anggaran.

Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian proses pengadaan kebutuhan laboratorium yang mengalami adendum maupun kendala impor, serta percepatan proses administrasi dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan penyesuaian perencanaan kebutuhan bahan pengujian berdasarkan prioritas dan ketersediaan persediaan laboratorium, optimalisasi pemanfaatan reagen, media, dan bahan penunjang pengujian, serta penguatan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai target.

Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan penyerapan dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Melalui upaya tersebut, diharapkan penyelesaian pengadaan dan pembayaran dapat dioptimalkan pada Triwulan IV Tahun 2026 sehingga kesenjangan antara capaian output dan realisasi anggaran dapat diperkecil, serta efisiensi penggunaan sumber daya pada akhir tahun dapat meningkat.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Triwulan III mengacu pada hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026 sebagai dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah melampaui target yang ditetapkan. Informasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam mempertahankan strategi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III melalui optimalisasi koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pemanfaatan aplikasi Madu Pelawan dan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) untuk memastikan proses sampling, pengujian, dan tindak lanjut berjalan sesuai rencana. Penyesuaian aktivitas juga dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan terhadap sampel pangan olahan berisiko sesuai hasil analisis risiko dan prioritas pengawasan nasional.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran pada Triwulan III. Penyesuaian yang telah dilakukan pada Triwulan II sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dipertahankan melalui pengendalian penggunaan reagen, media, bahan habis pakai, dan sumber daya laboratorium secara lebih optimal. Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara berkala sehingga penggunaan anggaran tetap selaras dengan pelaksanaan sampling dan pengujian.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan tindak lanjut yang telah direncanakan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II terus diimplementasikan pada Triwulan III. Beberapa tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain penguatan koordinasi teknis sebelum pelaksanaan sampling, peningkatan komunikasi antara tim pemeriksaan dan laboratorium dalam penentuan parameter uji, pemantauan penyelesaian pengujian secara berkala melalui aplikasi Madu Pelawan, serta optimalisasi digitalisasi proses bisnis laboratorium. Implementasi tindak lanjut tersebut mampu mempertahankan realisasi indikator sebesar 100,00% sehingga target kinerja tetap tercapai.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi pada Triwulan III akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Beberapa langkah yang akan terus dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi teknis dalam perencanaan sampling untuk meminimalkan kesalahan kategori sampel, memastikan kesesuaian parameter pengujian antara tim pemeriksaan dan laboratorium, mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, serta melanjutkan pengembangan digitalisasi proses pengujian dan pelaporan laboratorium. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung laboratorium dan peningkatan kompetensi personel akan terus diidentifikasi dan dipenuhi sesuai prioritas untuk menjaga mutu hasil pengujian. Mengingat capaian indikator secara konsisten telah melampaui target pada Tahun 2025, Triwulan I, II dan Triwulan III Tahun 2026, hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses review target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar target yang ditetapkan lebih realistis, menantang, dan mencerminkan kapasitas organisasi.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.18 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023; dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\Sigma\ (70\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (30\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A= Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi dibagi total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
C= Apabila terdeteksi paling sedikit satu parameter dari seluruh parameter yang diujikan maka nilai C adalah 100%, namun apabila seluruh hasil pengujian tidak terdeteksi maka nilai C adalah 0%
n = total sampel

Terdapat perubahan mengenai manual indikator dan perhitungan pada persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar. Realisasi indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan III adalah 100%. Perubahan cara perhitungan persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji tidak menyebabkan terjadinya perubahan realisasi. Target dari indikator ini adalah 100%, artinya apabila ada sampel keracunan pangan atau KLB yang masuk ke laboratorium maka harus diuji secara lengkap berdasarkan juknis keracunan pangan. Realisasi dan capaian sebesar 100% diperoleh dari pengujian sampel kasus keracunan pangan sebanyak dua sampel di

Triwulan I. Dengan hasil ini capaian BBPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kategori **Baik.**

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100	100	100,00

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada Triwulan II dan Triwulan III menunjukkan realisasi sebesar 100% terhadap target 100%, sehingga persentase capaian kinerja pada kedua triwulan mencapai 100,00%. Pengukuran indikator ini dilakukan secara akumulatif sehingga capaian pada Triwulan III merupakan akumulasi realisasi sejak awal tahun.

Pada Triwulan I telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dan seluruh sampel yang diterima berhasil diuji sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga target indikator dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan III tidak ada sampel KLB yang diterima untuk dilakukan pengujian. Oleh karena itu, realisasi indikator pada Triwulan III tetap sebesar 100% sebagai akumulasi dari capaian Triwulan I.

Perubahan rumus penilaian untuk indikator ini berlaku mulai Triwulan III dengan nilai konversi Triwulan I dan II tetap yaitu 100%. Perbedaan penilaian antara Triwulan I, II dan III adalah pada Triwulan III tidak terdapat penilaian untuk sampel pangan olahan terkemas. Sampel yang diuji pada Triwulan I bukanlah merupakan sampel pangan olahan terkemas sehingga tidak terjadi perubahan meskipun terjadi perubahan pembobotan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kesiapsiagaan laboratorium dalam penanganan KLB keracunan pangan telah berjalan dengan baik. Laboratorium tetap mempertahankan kesiapan personel, metode pengujian, peralatan, serta koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan instansi terkait sehingga apabila terjadi KLB keracunan pangan, pengujian dapat segera dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat sampel KLB pada Triwulan III, kinerja

indikator tetap terjaga sesuai target melalui pendekatan pengukuran yang bersifat kumulatif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar yang ditetapkan untuk Tahun 2026 adalah 100%. Sampai dengan Triwulan III, realisasi indikator tetap mencapai 100%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan adalah 100,00% dengan kategori tercapai/melampaui.

Capaian tersebut merupakan akumulasi realisasi sejak awal tahun. Pada Triwulan I telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dan seluruh sampel yang diterima berhasil diuji sesuai standar sehingga target indikator telah tercapai. Selanjutnya, pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat sampel KLB yang perlu diuji. Pada Triwulan III terdapat kejadian yang diduga keracunan akibat makanan namun sampel tidak diuji di BBPOM di Pangkal Pinang sehingga tidak dihitung sebagai realisasi. Pelaporan kejadian tetap dilakukan melalui aplikasi SPIMKER. Oleh karena itu, realisasi indikator pada Triwulan III tetap sebesar 100% sebagai akumulasi capaian dari Triwulan I.

Meskipun target tahunan telah tercapai sampai dengan Triwulan III, BBPOM di Pangkal Pinang tetap mempertahankan kesiapsiagaan dalam penanganan KLB keracunan pangan melalui pemeliharaan kompetensi personel, kesiapan sarana dan prasarana laboratorium, serta koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut diperlukan agar apabila terjadi KLB pada triwulan berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar sehingga capaian indikator tetap dapat dipertahankan hingga akhir Tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan III telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran secara akumulatif, dimana pada Triwulan I telah dilakukan pengujian terhadap seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima sehingga memenuhi target indikator. Pada Triwulan II tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat sampel KLB yang memerlukan pengujian. Pada Triwulan III terdapat kejadian yang diduga keracunan akibat makanan namun sampel tidak diuji di BBPOM di Pangkal Pinang sehingga tidak dihitung sebagai realisasi. Pelaporan kejadian tetap dilakukan melalui aplikasi SPIMKER. Dengan demikian, capaian indikator tetap dipertahankan sebesar 100%.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling pada kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Namun demikian, perubahan target RO tersebut tidak mengubah target capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar, karena indikator ini diukur berdasarkan persentase sampel KLB yang diuji sesuai standar apabila terjadi kejadian KLB, bukan berdasarkan jumlah target sampel dalam Rincian Output Pengawasan Makanan. Oleh karena itu, penyesuaian target RO tidak memengaruhi perhitungan maupun capaian indikator ini.

Keberhasilan mempertahankan capaian indikator didukung oleh kesiapan sistem penanganan KLB yang telah dibangun melalui koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait dalam pelaporan serta penanganan kejadian keracunan pangan. Di sisi internal, BBPOM di Pangkal Pinang juga terus menjaga kesiapan laboratorium melalui penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, pemeliharaan kompetensi personel, ketersediaan metode pengujian yang tervalidasi, serta kesiapan sarana dan bahan pendukung pengujian sehingga apabila terjadi KLB, pengujian dapat segera dilaksanakan sesuai standar.

Selain itu, pengalaman penanganan KLB pada Triwulan I serta upaya koordinasi dan identifikasi kebutuhan pengujian yang telah dilakukan sejak tahun 2025 menjadi modal penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan organisasi. Meskipun pada Triwulan II tidak terdapat sampel KLB yang diuji, kesiapan tersebut tetap dipertahankan untuk memastikan bahwa setiap kejadian KLB yang mungkin terjadi pada periode berikutnya dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai standar.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sampai dengan Triwulan III, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Mengingat indikator ini bergantung pada adanya kejadian KLB keracunan pangan dan pengukurannya bersifat akumulatif, BBPOM di Pangkal Pinang akan terus mempertahankan kesiapsiagaan agar capaian kinerja dapat dipertahankan hingga akhir Tahun 2026 apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja tersebut antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, serta instansi terkait lainnya dalam pelaporan, penanganan, dan pengiriman sampel KLB keracunan pangan sehingga respon terhadap kejadian dapat dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur.
2. Menjaga kesiapan laboratorium melalui pemenuhan ketersediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai, serta memastikan peralatan laboratorium selalu dalam kondisi siap digunakan sehingga seluruh kebutuhan pengujian KLB dapat dipenuhi sesuai standar.
3. Mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, termasuk menjaga kompetensi personel, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian, serta validitas metode uji untuk menjamin hasil pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenai keamanan pangan dan pencegahan keracunan pangan sebagai upaya preventif untuk menurunkan risiko terjadinya KLB.
5. Mengoptimalkan peran Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan KLB Keracunan Pangan di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta mendorong keterlibatan aktif dalam Tim Gerak Cepat tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar penanganan KLB dapat dilakukan secara terpadu dan responsif.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut, BBPOM di Pangkal Pinang diharapkan mampu mempertahankan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi KLB keracunan pangan serta memastikan seluruh sampel yang diterima pada periode berikutnya dapat diuji sesuai standar sehingga target indikator kinerja tahunan tetap tercapai.

Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	**Pemeriksaan** Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang	**Pemeriksaan** koordinasi dengan linsek terkait KLB	**Pemeriksaan** Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan	Agustus	Tidak	-	-
	Pengujian Realisasi : Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Juli karena tidak terdapat sampel Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP	**Pengujian** Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	**Pengujian** Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Agustus	Ya	O-09	Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar
Agustus	**Pemeriksaan** Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan	**Pemeriksaan** koordinasi dengan linsek terkait KLB	**Pemeriksaan**	September	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang **Pengujian** **Realisasi** : Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Terdapat perubahan tools penilaian, dengan perhitungan tools baru tidak mengubah realisasi **Kendala** : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Agustus karena tidak terdapat sampel KLB **Capaian terhadap target** : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% **Upaya yang telah dilakukan** : Melakukan pemantauan berita KLB KP	**Pengujian** Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan **Pengujian** Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	September	Ya	O-09	Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar
September	**Pemeriksaan** Pada bulan September terdapat pelaporan KLB KP yang diperoleh dari Media di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk pengujian sampel telah dilakukan di Labkesmas Provinsi Bangka Belitung dengan hasil E.Coli dan Rhodamin B Negatif. Berdasarkan hasil penelusuran kejadian keracunan pangan dan hasil uji dari Labkesmas bahwa kejadian tersebut diduga tidak termasuk Keracunan Pangan. Hasil penelusuran kejadian telah di input pada laporan SPIMKER **Pengujian** **Realisasi** : Pada bulan September tidak terdapat sampel KLB keracunan pangan yang diuji laboratorium. Berdasarkan informasi dari hasil pemantauan berita KLB KP diperoleh informasi adanya kejadian keracunan di Kabupaten Bangka	**Pemeriksaan** Telah dilakukan koordinasi dengan Dinkes Bangka Barat dan Bangka Tengah terkait potensi kejadian KLB KP dimasa yang akan datang. Telah diusulkan BBPOM untuk dimasukkan sebagai anggota Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB KP untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi jika terjadi Keracunan Pangan. **Pengujian** Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	**Pemeriksaan** Koordinasi penanganan kasus keracunan pangan dengan lintas sektor **Pengujian** Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Oktober Oktober	Tidak Ya	- O-09	- Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Tengah. Terdapat perubahan tools penilaian, dengan perhitungan tools baru tidak mengubah realisasi **Kendala** : Tidak terdapat informasi yang jelas mengenai kejadian keracunan **Capaian terhadap target** : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% **Upaya yang telah dilakukan** : Melakukan pemantauan berita KLB KP						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sampai dengan Triwulan III, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar telah mencapai target sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan, khususnya kegiatan pengambilan sampel, pengujian laboratorium, investigasi, dan koordinasi dalam penanganan kejadian keracunan pangan.

Berbeda dengan indikator lainnya, pelaksanaan pengujian sampel KLB keracunan pangan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang bersifat khusus. Kegiatan pengujian KLB dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian indikator lebih dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam merespons kejadian KLB, meliputi kompetensi personel, kesiapan laboratorium, koordinasi lintas fungsi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pengujian, dibandingkan dengan besarnya alokasi anggaran.

Pada Triwulan III terjadi dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Bangka Tengah namun tidak terdapat sampel kejadian KLB keracunan pangan yang diuji di laboratorium BBPOM di Pangkal Pinang. Meskipun demikian, kegiatan yang mendukung kesiapsiagaan tetap dilaksanakan, antara lain pemeliharaan kesiapan

laboratorium, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, serta pemantauan terhadap potensi kejadian keracunan pangan. Kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa apabila terjadi KLB pada periode berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.500.000	0	0,00	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar belum dapat dihitung karena pada Triwulan III tidak terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD) maupun realisasi anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini. Pengujian sampel KLB keracunan pangan tidak direncanakan sebagai kegiatan rutin, melainkan dilaksanakan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang tersedia pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko.

Sampai dengan Triwulan III tidak terdapat sampel kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat kebutuhan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengujian sampel KLB. Oleh karena itu, nilai Indeks Efisiensi (IE), Tingkat Efisiensi (TE), dan capaian efisiensi belum dapat dihitung.

Karakteristik indikator ini berbeda dengan indikator kinerja lainnya karena pencapaiannya bergantung pada terjadinya kejadian KLB yang bersifat insidental dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator lebih dipengaruhi oleh kesiapan sistem pengawasan, koordinasi lintas sektor, kesiapan laboratorium, serta kompetensi personel dalam merespons kejadian keracunan pangan dibandingkan dengan besarnya penggunaan anggaran. Apabila terjadi KLB, kebutuhan anggaran untuk pengujian akan dipenuhi melalui

optimalisasi anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko sesuai mekanisme yang berlaku.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran khusus, BBPOM di Pangkal Pinang terus melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar penanganan KLB keracunan pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila terjadi kejadian pada periode berikutnya. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, serta instansi terkait untuk mempercepat penerimaan informasi dan pelaporan apabila terjadi dugaan KLB keracunan pangan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko untuk mendukung kesiapan penanganan KLB, termasuk penyediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai laboratorium, serta sarana pendukung pengujian tanpa memerlukan alokasi anggaran tersendiri.
3. Mempertahankan kesiapan Laboratorium Kimia Pangan dan Mikrobiologi melalui penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017, sehingga kompetensi personel, metode pengujian, peralatan, dan sistem pengendalian mutu senantiasa siap digunakan apabila diperlukan pengujian sampel KLB.
4. Melaksanakan pemantauan dan identifikasi secara aktif terhadap laporan dugaan keracunan pangan serta memperkuat koordinasi internal antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium agar respons terhadap setiap kejadian dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai standar.

Dengan upaya tersebut, BBPOM di Pangkal Pinang mampu menjaga kesiapsiagaan laboratorium dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung penanganan KLB keracunan pangan. Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, kesiapan personel, sarana laboratorium, dan mekanisme koordinasi tetap terpelihara sehingga target indikator dapat dipertahankan apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026, BBPOM di Pangkal Pinang memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, serta perencanaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026 dimanfaatkan untuk mempertahankan kesiapsiagaan dalam penanganan KLB keracunan pangan. Meskipun pada Triwulan III tidak terdapat sampel kejadian KLB keracunan pangan, BBPOM di Pangkal Pinang tetap melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait guna memastikan setiap dugaan kejadian keracunan pangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga tetap dilakukan untuk memastikan mekanisme penanganan KLB berjalan sesuai ketentuan, termasuk menjaga kesiapan laboratorium dalam melaksanakan pengujian apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada Triwulan I dan II dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya pada Triwulan III. Mengingat indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, BBPOM di Pangkal Pinang tetap mengoptimalkan pemanfaatan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko untuk mendukung kesiapan penanganan KLB, termasuk pemeliharaan ketersediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta sarana pendukung pengujian. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku sehingga kesiapan laboratorium tetap terjaga tanpa memerlukan pengalokasian anggaran khusus.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II terus dipertahankan pada

Triwulan III. Beberapa tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam sistem pelaporan KLB, pemeliharaan kesiapan laboratorium melalui pemenuhan kebutuhan pengujian, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Meskipun pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan, implementasi tindak lanjut tersebut berhasil mempertahankan kesiapan organisasi sehingga indikator tetap mencapai target sebesar 100%.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan III menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. BBPOM di Pangkal Pinang akan terus memperkuat sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan KLB keracunan pangan, termasuk dengan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kesiapan laboratorium akan terus dipertahankan melalui pemenuhan kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan kompetensi personel sesuai penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa apabila terjadi KLB pada periode berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar sehingga target kinerja tahunan tetap dapat dipertahankan.

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.23 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63%	Sangat Baik

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

B. Kesesuaian Target Sampel

G. Kesesuaian Parameter Uji

H. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

I. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

J. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

K. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar 100% dengan target 96,5%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 103,63% dan termasuk dalam kategori "**Sangat Baik**".

Pada Triwulan III, seluruh target 15 sampel PIRT berisiko telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam batas waktu yang ditetapkan. Seluruh tahapan pengawasan telah dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari penentuan target sampel berbasis risiko, pelaksanaan pengujian dengan parameter yang sesuai, penyampaian laporan hasil pengujian secara tepat waktu, hingga pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dengan terselesaikannya seluruh target sampel pada Triwulan III, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2026.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang telah

berjalan secara efektif melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, sehingga seluruh proses pengawasan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.24 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63	96,5	100	103,63

Berdasarkan tabel di atas, indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan tidak terdapat perubahan capaian dari Triwulan II ke Triwulan III. Pada Triwulan II dan III, target yang ditetapkan sebesar 96,5% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 103,63%.

Pada bulan Juni 2026 dilakukan penyesuaian mekanisme pengisian Rencana Hasil Pengawasan Kinerja (RHPK), khususnya pada kolom realisasi (kolom M). Sesuai ketentuan tersebut, data realisasi diinput kembali secara kumulatif mulai bulan Januari 2026. Penyesuaian ini merupakan perubahan pada mekanisme pelaporan kinerja di dalam aplikasi RHPK dan tidak mengubah metode penilaian maupun substansi perhitungan indikator.

Setelah dilakukan penyesuaian penginputan sesuai ketentuan pada RHPK baru, realisasi indikator BBPOM di Pangkal Pinang tetap tercatat 100% karena seluruh target 15 sampel PIRT berisiko telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dengan demikian, perubahan pada aplikasi RHPK tidak memengaruhi pencapaian kinerja, tetapi hanya memastikan bahwa pelaporan realisasi dilakukan secara kumulatif dan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	100,00	103,63 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2026 ditetapkan sebesar 96,50%. Sampai dengan Triwulan III, BBPOM di Pangkal Pinang berhasil mencapai realisasi sebesar 100,00%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 103,63% dan termasuk dalam kategori "Tercapai/Melampaui".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator telah berhasil dipenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh terselesaikannya seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko, yang meliputi kegiatan sampling, pengujian laboratorium, pelaporan hasil pengujian, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sesuai ketentuan. Seluruh tahapan dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi seluruh komponen penilaian indikator.

Pada bulan Juni 2026 dilakukan penyesuaian mekanisme penginputan realisasi pada RHPK, yaitu pengisian kembali data realisasi secara kumulatif mulai bulan Januari. Penyesuaian tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme pelaporan kinerja dan tidak mengubah metode penilaian maupun hasil perhitungan indikator. Oleh karena itu, realisasi indikator tetap sebesar 100,00%.

Sesuai dengan perencanaan kinerja Tahun 2026, pelaksanaan indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan selesai pada Triwulan II. Dengan telah tercapainya seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko, maka target indikator untuk Tahun 2026 telah diselesaikan sepenuhnya pada Triwulan III. Pada Triwulan III dan Triwulan IV tidak direncanakan lagi pelaksanaan kegiatan maupun penambahan realisasi untuk indikator ini, sehingga fokus BBPOM di Pangkal Pinang adalah mempertahankan kualitas dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III mencapai 100,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 96,50% dengan capaian kinerja 103,63%. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan, hingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling antara kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Namun demikian, perubahan target RO tidak mengubah target capaian indikator kinerja, karena indikator diukur berdasarkan persentase sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, bukan berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa.

Khusus pada indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, hasil penyesuaian RO menyebabkan target sampling berubah dari 15 sampel menjadi 14 sampel. Namun, pada saat revisi target ditetapkan, seluruh 15 sampel PIRT telah selesai dilakukan sampling sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh 15 sampel tetap diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga tidak dilakukan pengurangan terhadap sampel yang telah diambil. Penyesuaian proporsi target sampling selanjutnya dilakukan pada kategori pangan olahan berisiko, sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap sampel PIRT yang telah disampling.

Seluruh target sebanyak 15 sampel PIRT berisiko tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai pedoman sampling dan pengujian. Meskipun pada awal tahun terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran serta perubahan target sampling, BBPOM di Pangkal Pinang mampu melakukan penyesuaian perencanaan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan. Koordinasi dengan unit pengampu teknis terkait perubahan kategori sampel, pengaturan kembali jadwal sampling, serta optimalisasi sumber daya laboratorium

menjadi faktor penting yang mendukung penyelesaian seluruh target pada Triwulan III.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin kompetensi personel, validitas metode pengujian, ketertelusuran hasil pengujian, pengendalian mutu internal, serta keandalan peralatan laboratorium. Penerapan sistem tersebut memberikan keyakinan bahwa seluruh hasil pengujian yang menjadi dasar tindak lanjut telah memenuhi persyaratan mutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres sampling dan pengujian turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Meskipun target indikator telah diselesaikan pada Triwulan III, BBPOM di Pangkal Pinang tetap melakukan berbagai upaya penyempurnaan sebagai bekal pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium sejak tahap penyusunan rencana sampling hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian kategori sampel berdasarkan kemampuan laboratorium dan tingkat risiko produk.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta sarana pendukung pengujian lainnya sejak awal tahun untuk memastikan seluruh parameter uji dapat dilaksanakan sesuai pedoman.
4. Mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 melalui peningkatan kompetensi personel, pemeliharaan validitas metode, pelaksanaan pengendalian mutu internal, kalibrasi dan verifikasi peralatan, serta tindak lanjut terhadap hasil audit internal dan asesmen eksternal guna menjamin keberlangsungan mutu hasil pengujian.
5. Mempertahankan digitalisasi laboratorium melalui pengelolaan Catatan Pengujian, Laporan Hasil Uji, dan pemantauan penyelesaian sampel secara

elektronik guna meningkatkan efisiensi proses kerja, ketertelusuran data, dan ketepatan waktu pelaporan.

Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	**Pemeriksaan** Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Juli. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April **Pengujian** Realisasi : Sampai dengan bulan Juli laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi sampai dengan bulan Juli adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS	**Pemeriksaan** - **Pengujian** Agar dilakukan evaluasi terhadap capaian target	**Pemeriksaan** - **Pengujian** Melakukan evaluasi terhadap capaian dan kesesuaian terhadap target	- Agustus	Tidak Ya	- O-10	- Sampel PIRT terlambat dilaporkan
Agustus	**Pemeriksaan** Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Agustus. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April **Pengujian**	**Pemeriksaan** -	**Pemeriksaan** -	-	-	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Realisasi : Sampai dengan bulan Agustus laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. **Kendala** : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar **Capaian terhadap target** : Realisasi sampai dengan bulan Agustus adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% **Upaya yang telah dilakukan** : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS	**Pengujian** -	**Pengujian** -	-	-	-	-
September	**Pemeriksaan** Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan September. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April **Pengujian** **Realisasi** : Sampai dengan bulan September laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari	**Pemeriksaan** - **Pengujian** -	**Pemeriksaan** - **Pengujian** -	- -	- -	- -	- -

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. Tidak terdapat penambahan sampel PIRT di TW III. **Kendala** : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar **Capaian terhadap target** : Realisasi sampai dengan bulan Agustus adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% **Upaya yang telah dilakukan** : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya kegiatan pengawasan pangan olahan yang meliputi perencanaan sampling berbasis risiko, pemeriksaan sarana, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Program yang paling mendukung pencapaian indikator adalah kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko, karena secara langsung didukung oleh alokasi anggaran untuk pengadaan sampel, reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai laboratorium, operasional pengujian, serta pemeliharaan sistem mutu laboratorium. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan indikator karena memastikan seluruh proses pengujian

dilaksanakan secara konsisten, kompeten, dan menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tindak lanjut hasil pengawasan.

Selain kegiatan utama tersebut, beberapa kegiatan pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, pengelolaan data dan pelaporan secara real time melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan, pembinaan kepada pelaku usaha PIRT dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan.

Sementara itu, penyesuaian rencana pelaksanaan akibat efisiensi anggaran pada awal tahun merupakan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, melalui pengelolaan anggaran yang adaptif, koordinasi lintas fungsi, optimalisasi sumber daya laboratorium, dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara konsisten, perubahan tersebut tidak memengaruhi pencapaian target indikator. Hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya seluruh target pengawasan sebanyak 15 sampel PIRT berisiko pada Triwulan III sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63	4.000.000	0	0,00	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum dapat dihitung karena pada Triwulan III tidak terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD) maupun realisasi anggaran yang dialokasikan pada indikator ini. Pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang dimiliki oleh BBPOM di

Pangkal Pinang. Oleh karena itu, nilai Indeks Efisiensi (IE), Tingkat Efisiensi (TE), dan capaian efisiensi belum dapat dihitung.

Meskipun demikian, seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko telah berhasil diselesaikan pada Triwulan III sesuai ketentuan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa BBPOM di Pangkal Pinang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang menerapkan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, serta pengelolaan kegiatan yang efektif. Dengan optimalisasi sumber daya tersebut, seluruh tahapan sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu meskipun pada Triwulan III tidak terdapat RPD maupun realisasi anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk indikator ini.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya dilaksanakan melalui penyelarasan antara perencanaan sampling, kemampuan laboratorium, dan ketersediaan anggaran pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko. Selama Triwulan III, BBPOM di Pangkal Pinang terus mengoptimalkan pemanfaatan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai, serta peralatan laboratorium yang tersedia sehingga seluruh target pengujian dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan sumber daya berjalan secara efektif. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 juga mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui pengendalian mutu pengujian, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, peningkatan kompetensi personel, serta digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan hasil pengujian. Dengan optimalisasi sumber daya tersebut, seluruh target indikator dapat diselesaikan pada Triwulan III tanpa memerlukan alokasi anggaran tersendiri.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026, BBPOM di Pangkal Pinang

memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan kinerja sehingga target indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat diselesaikan seluruhnya pada Triwulan III Tahun 2026.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Informasi kinerja yang diperoleh dari Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026 dimanfaatkan untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian PIRT berisiko. Penyesuaian dilakukan melalui penguatan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, penyempurnaan perencanaan sampling berbasis risiko, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penyesuaian tersebut terbukti mendukung penyelesaian seluruh target sebanyak 15 sampel PIRT berisiko sesuai ketentuan pada Triwulan III.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Hasil evaluasi penggunaan anggaran pada Tahun 2025 dan Triwulan I dan II Tahun 2026 menjadi dasar dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pada Triwulan III. Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, pelaksanaan kegiatan didukung melalui anggaran pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang tersedia. Optimalisasi penggunaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, peralatan laboratorium, dan sumber daya manusia dilakukan secara terintegrasi sehingga seluruh target pengawasan dapat diselesaikan tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2026 telah ditindaklanjuti secara konsisten selama pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut tersebut meliputi peningkatan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, penyesuaian rencana pelaksanaan sesuai kondisi lapangan, pemenuhan kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta pemeliharaan, kalibrasi, dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai penerapan

Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, pengendalian mutu laboratorium dan monitoring penyelesaian sampel dilakukan secara berkala sehingga seluruh proses pengujian dan tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu. Implementasi rekomendasi tersebut berkontribusi terhadap tercapainya realisasi indikator sebesar 100% pada Triwulan III.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyelesaian seluruh target indikator pada Triwulan III menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. BBPOM di Pangkal Pinang akan mempertahankan mekanisme koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, memperkuat perencanaan sampling berbasis risiko, serta terus meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui penerapan ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, evaluasi terhadap kebutuhan sarana, prasarana, reagen, media mikrobiologi, dan baku pembanding akan dilakukan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan pengawasan pada tahun berikutnya tetap efektif dan tepat waktu. Pengalaman pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 juga akan menjadi masukan dalam penyusunan target dan strategi pengawasan PIRT berisiko pada periode selanjutnya.

6. **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder**

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.28 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	88,99	104,70%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 104,70% dengan realisasi sebesar 88,99%. dengan target pada Triwulan III yaitu 85%. Sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder masuk dalam kategori capaian sangat baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04	85	88,99	104,70

Berdasarkan di atas, persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Triwulan II. Pada Triwulan II, dari target sebesar 85%, realisasi yang dicapai sebesar 86,73% atau 102,04% dari target. Selanjutnya pada Triwulan III, dengan target yang tetap sebesar 85%, realisasi meningkat menjadi 88,99% sehingga capaian kinerja mencapai 104,70%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin efektifnya tindak lanjut yang dilakukan oleh stakeholder terhadap keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Capaian yang melebihi target mengindikasikan adanya peningkatan komitmen stakeholder dalam melaksanakan tindakan perbaikan, didukung oleh penguatan koordinasi, komunikasi, serta pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Hasil ini diharapkan dapat dipertahankan melalui monitoring yang berkesinambungan dan pembinaan kepada stakeholder guna memastikan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan tetap terjaga pada periode berikutnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin efektifnya tindak lanjut yang dilakukan oleh stakeholder terhadap keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan. Capaian yang melebihi target mengindikasikan adanya peningkatan komitmen stakeholder dalam melaksanakan tindakan perbaikan, didukung oleh penguatan koordinasi, komunikasi, serta pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Hasil ini diharapkan dapat dipertahankan melalui monitoring yang berkesinambungan dan pembinaan kepada stakeholder guna memastikan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan tetap terjaga pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	88,99	104,70 ▲	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan Tabel di atas, indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memiliki target Tahun 2026 sebesar 85,00%. Sampai dengan Triwulan III, realisasi yang dicapai sebesar 88,99%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 104,70%. Dengan demikian, kategori pencapaian indikator ini adalah tercapai/melampaui target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut stakeholder terhadap keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan

pengawasan yang didukung oleh koordinasi, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Pencapaian indikator ini diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun melalui monitoring berkala, pembinaan kepada stakeholder, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang masih dalam proses.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai 88,99% atau 104,70% terhadap target tahunan sebesar 85,00%, sehingga target kinerja telah berhasil dilampaui. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya komitmen stakeholder dalam menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi yang intensif dengan stakeholder, serta pembinaan dan komunikasi yang berkesinambungan mampu mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Penggunaan mekanisme pemantauan secara rutin juga memudahkan identifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga dapat segera dilakukan upaya percepatan penyelesaian.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pembenahan aspek teknis perhitungan serta penguatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan, BBPOM di Pangkal Pinang akan terus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut oleh stakeholder. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder akan ditingkatkan melalui pendampingan, pembinaan, serta

penyampaian informasi secara berkala agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, akan dilakukan pemetaan terhadap rekomendasi yang belum atau berpotensi terlambat ditindaklanjuti sebagai dasar dalam menetapkan langkah percepatan penyelesaian. Optimalisasi pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Melalui upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas tindak lanjut yang memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan ketentuan di bidang obat dan makanan.

Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Dari 145 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 133 jawaban Tindak Lanjut. Dari 25 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 20 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 85,86%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Juli	T	-	-
Agustus	Dari 164 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 147 jawaban Tindak Lanjut. Dari 29 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor,	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi	Agustus	T	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	telah terdapat 25 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 87,92%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA		AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan				
September	Dari 182 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 159 jawaban Tindak Lanjut. Dari 32 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 29 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 88,99%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : Pelaku usaha tidak memberikan respon meskipun telah diberikan CAPA ke-2 dan telah di datangi ke sarana untuk segera menjawab CAPA (Apotek Manggala Jaya, Apotek Bunda 3, Toko Obat Bahagia, Apotek Sentra Sehat 6, CV. Sinar Pagi Toboali)	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	September	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh

Stakeholder yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2026 didukung dengan adanya petugas yang responsif dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang ada. Setiap petugas inspeksi telah memahami dan menindaklanjuti hasil inspeksi sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku dan sesuai dengan SOP yang ada. Dalam mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu komitmen dari semua pihak terutama dari sarana agar senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM Pangkal Pinang dengan tepat waktu, perlu monitoring secara berkala menggunakan melalui tools monev inovasi AMOI CAKEP BBPOM di Pangkal Pinang sehingga rekomendasi dapat selalu ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan timeline.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	88,99	104,70	1.451.000	1.445.700	99,63	1,05	0,05	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100% dengan kategori efisien. Capaian tersebut didukung oleh realisasi output sebesar 88,99 dari target 85, sehingga persentase capaian output mencapai 104,70%. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp1.445.700 dari target anggaran Rp1.451.000 atau sebesar 99,63%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian output telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran tidak melebihi alokasi yang direncanakan. Efisiensi penggunaan sumber daya ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi

dibandingkan target dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dilakukan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian penggunaan sumber daya dengan kebutuhan prioritas, serta pemantauan capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dapat terlaksana secara efektif tanpa mengurangi kualitas pencapaian target kinerja.

Selain itu, efisiensi didukung melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder agar tindak lanjut keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan kegiatan juga perlu memperhatikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran, antara lain melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, pengendalian biaya operasional, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas.

Ke depannya, BBPOM di Pangkal Pinang akan terus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui evaluasi berkala terhadap kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian output, peningkatan ketepatan perencanaan kebutuhan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan langkah tersebut, diharapkan penggunaan anggaran dapat semakin optimal, capaian kinerja tetap terjaga, dan seluruh kegiatan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026, hasil evaluasi kinerja sampai dengan semester I dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian target, serta penyusunan perencanaan kinerja periode berikutnya. Pemanfaatan laporan kinerja pada indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran.
- Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

- Laporan kinerja pada triwulan sebelumnya digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
- Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

- Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada subindikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan.
- Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

7. **Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan nilai rata-rata dari persentase Sarana produksi Obat, persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
  - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
  - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
  - Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dikarenakan pada wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk sarana produksi sediaan farmasi hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) maka perhitungan persentase pada indikator ini hanya diambil dari persentase persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam. Adapun untuk perhitungan capaian persentase pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% Sarprod OBA = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.32 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana diperiksa sesuai target yang ditetapkan, dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu, sehingga dikategorikan dalam kategori "Baik" dengan notifikasi warna hijau. Kinerja ini mencerminkan efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan pengawasan terhadap standar yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.33 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100	100	100,00

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan II dengan realisasi triwulan III, tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Hal ini menandakan bahwa penambahan pemeriksaan 1 sarana pada Triwulan III diperiksa sesuai target yang ditetapkan yaitu target pemeriksaan bulan Juli, dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya) serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu. Sehingga capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III sama dengan capaian triwulan II dan termasuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan III dan target tahun 2026, diperoleh kesimpulan bahwa capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan termasuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian 100% pada Triwulan III perihal pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi disebabkan sarana diperiksa sesuai target yang ditetapkan. Perencanaan pemeriksaan UMOT ditargetkan untuk dilakukan pada bulan Juli dan Penanggungjawab Pemeriksaan Sarana Produksi OBA telah memberikan informasi untuk dilakukan pemeriksaan pada bulan tersebut. Selain itu, pelaporan telah dilakukan secara lengkap dengan melampirkan surat tugas, dokumen persiapan inspeksi, berita acara pemeriksaan, laporan hasil inspeksi dan surat tindak lanjut hasil inspeksi dan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya) serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika dan tepat waktu. Tidak terdapat hambatan atau kendala yang terjadi pada triwulan III.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Target pada indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai dan akan menjadi capaian akhir

tahun 2026 dikarenakan tidak terdapat lagi target pemeriksaan sarana pada Triwulan IV.

Tabel 3.35 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bulan Juli	-	-	-	Tidak	-	-
Agustus	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Agustus	-	-	-	Tidak	-	-
September	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan September	-	-	-	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi hingga triwulan III yaitu sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang bersifat teknis, terstruktur, dan adaptif. Program peningkatan kapasitas SDM pengawas dan optimalisasi jadwal inspeksi lapangan menjadi faktor penunjang yang mendukung kelancaran kegiatan pengawasan. Selain itu, telah digunakan inovasi AMOI CAKEP untuk pemantauan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan dan ketepatan waktu pembuatan surat tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sumber daya, efektivitas manajemen program dan tools pembantu pelaksanaan monitoring hasil pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung perlu terus dilakukan sebagai dasar penguatan berkelanjutan dalam siklus manajemen kinerja pengawasan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	2.457.500	2.565.410	104,39	**0,96**	**-0,04**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaancanggaran pada indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini sebesar -0,04 dengan indeks efisiensi 0,96 diperoleh dengan membandingkan % capaian output dengan % capaian input (anggaran). Karena % capaian input lebih besar dari % capaian output diperoleh Tingkat efisiensi -0,04. Tingkat efisiensi < 0 menunjukkan bahwa capaian dinilai tidak efisien. Dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 2.565.410 (104,39%) diperoleh capaian output sebesar 100%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil mapping staf Perencanaan adalah anggaran dengan MAK 3165.QIC.001.55.A, 3165.QIC.001.55.B, 3165.QIC.001.55.C dan 3165.QIC.001.55.D. Anggaran yang sudah direalisasikan pada triwulan III 2026 ini sebesar Rp 2.565.410. Meskipun hanya terdapat 1 target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada triwulan III, namun terdapat realisasi anggaran pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di dalam kota dan di luar kota. Capaian ini diperoleh dari pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang memiliki kode MAK yang sama dengan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi. Selain anggaran dari MAK 3165.QIC.001.55.A, 3165.QIC.001.55.B, 3165.QIC.001.55.C, 3165.QIC.001.55.D, indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga ditunjang oleh anggaran peningkatan kapasitas SDM yaitu

MAK 3165.QIC.004.55.S dan 3165.QIC.004.55.T yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi. Realisasi anggaran peningkatan kapasitas SDM ini melebihi RPD yang ditetapkan karena terdapat kegiatan pelatihan diluar kegiatan terpadu yang telah direncanakan sebelumnya sehingga realisasi melebihi target RPD yang ditetapkan dengan capaian anggaran 104,39%. Sementara untuk realisasi output kinerja, walaupun sesuai target dengan capaian sebesar 100%, namun karena capaian output lebih kecil dari capaian input, tingkat efisiensinya -0,04 (Tidak Efisien).

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa Upaya pencapaian target efisiensi ini antara lain :

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi pencapaian output setiap bulannya untuk memastikan target tercapai minimal 100% dan mengupayakan pencapaian input (anggaran) tidak melebihi perencanaan bulanan yang ditetapkan.
2. Melakukan revisi anggaran sisa kegiatan yang sudah terlaksana untuk dioptimalisasikan ke kegiatan lain yang dapat menunjang target kinerja ini
3. Penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan anggaran.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung pencapaian pada indikator ini dan menyiasati adanya efisiensi anggaran
   - Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   - Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada triwulan sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yan diperlukan.
   - Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
   - Laporan kinerja triwulan II 2026 digunakan untuk mengkaji terkait dengan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan melihat tren kepatuhan sarana.
   - Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.
4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   - Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada subindikator terkait Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
   - Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

8. **Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

– Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

– Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

– Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana

produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara perhitungan: % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

- pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level maka grading sebagai A (MK);
- pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
- pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.37 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, diperoleh realisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 94,25%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,10% dengan kategori "Sangat Baik". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berjalan secara optimal, dimana seluruh sarana yang menjadi target pemeriksaan telah dilakukan pengawasan dan terhadap hasil pemeriksaan telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian yang melampaui target ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui perencanaan yang baik, koordinasi antara petugas pengawas dan pelaku usaha,

serta komitmen dalam memastikan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan. Keberhasilan pencapaian indikator ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan pembinaan, pendampingan, dan monitoring terhadap pelaku usaha pangan olahan guna meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.38 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10	94,25	100,00	106,10

Berdasarkan Tabel 3.38, kinerja indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III menunjukkan capaian yang tetap optimal dibandingkan Triwulan II. Target pada kedua triwulan ditetapkan sebesar 94,25%, dengan realisasi mencapai 100,00%, sehingga persentase capaian pada masing-masing triwulan sebesar 106,10%. Tidak adanya perubahan pada target, realisasi, maupun persentase capaian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berlangsung secara konsisten dan efektif, serta mampu mempertahankan kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan sepanjang Semester I Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10 ▲	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan Tabel 3.39, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" pada Triwulan III Tahun 2026 berhasil mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi sebesar 100,00% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 94,25%. Capaian efisiensi kinerja ini menyentuh angka 106,10%, sehingga menempatkan indikator ini ke dalam kategori Tercapai/Melampaui. Tingginya capaian pada pertengahan tahun ini mengindikasikan bahwa Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melakukan akselerasi dan pengawasan yang masif serta responsif terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah Bangka Belitung, yang didorong oleh efektivitas penjadwalan inspeksi berkala serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan lebih awal dari target lini masa tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" yang mencapai **106,10%** pada Triwulan III ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Strategi Pengawasan dan *Early Action* (Internal)**: Balai Besar POM di Pangkal Pinang menerapkan strategi akselerasi inspeksi sejak awal tahun anggaran (Triwulan II dan awal Triwulan III). Penjadwalan audit sarana produksi pangan olahan dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan proses digitalisasi pelaporan melalui inovasi AMOI Cakap, sehingga dapat memonitoring waktu pelaksanaan Tindak lanjut dan Perbaikan CAPA yang dilakukan oleh sarana produksi.
2. **Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha UMKM Lokal (Eksternal)**: Karakteristik pelaku usaha pangan olahan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yang didominasi oleh UMKM pangan khas daerah, menunjukkan tren peningkatan kesadaran terhadap regulasi keamanan pangan. Efektivitas pembimbingan/desk *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) yang dilakukan petugas secara proaktif membuat pelaku usaha lebih cepat merespons dan menyelesaikan perbaikan sarana mereka.

3. **Pemanfaatan Pengawasan Berbasis Risiko yang Tepat Sasaran**: Penerapan skala prioritas berbasis risiko terhadap sarana produksi pangan olahan berjalan efektif. Petugas berhasil mengidentifikasi dan memprioritaskan sarana dengan tingkat risiko tinggi dan sedang di awal tahun, sehingga pada pertengahan tahun (Triwulan III), intervensi pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya telah selesai melampaui target proporsional tahunan yang direncanakan.

Melampauinya target ini membuktikan efisiensi kerja yang tinggi, di mana seluruh sarana yang menjadi target antara pada paruh pertama tahun 2026 telah tuntas diperiksa sekaligus diselesaikan aspek hukum/tindak lanjut administratifnya secara *zero outstanding*.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis data risiko yang lebih komprehensif, guna memastikan sasaran pengawasan lebih tepat dan berdampak signifikan terhadap keamanan produk yang telah diproduksi oleh sarana tersebut.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas SDM, baik dalam aspek teknis pemeriksaan maupun kemampuan komunikasi dengan pelaku usaha, agar proses pengawasan berjalan efektif dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat. Ketiga, perlu optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengawasan, untuk mempercepat pelaporan, monitoring, serta evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan akan memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan lancar.

Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 Sarana Produksi Pangan Olahan MD selama bulan Juni mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Juni	-	-	-	-	-	-
Agustus	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 Sarana Produksi Pangan Olahan IRTP selama bulan Juli dengan persentase capaian 100%. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Juli	-	-	–	-	-	-
Septem ber	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 Sarana Produksi Pangan Olahan MD selama bulan Agustus dengan persentase capaian 100%. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Agustus	-	-	-	-	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini antara lain adalah Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, yang mencakup kegiatan inspeksi rutin sarana produksi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini didukung dengan perencanaan berbasis risiko dan monitoring evaluasi menggunakan tool monev RHPK inovasi dari Balai Besar POM Pangkal Pinang (AMOI CAKEP). Selain itu, ketersediaan SDM yang kompeten, pelaksanaan pengawasan sesuai SOP, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) juga menjadi faktor pendorong utama. SIPT memungkinkan proses pelaporan dan tindak lanjut

dilakukan secara sistematis dan terekam dengan baik, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja juga sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan program yang baik, pelaksanaan kegiatan yang efisien, dukungan teknologi informasi, serta keterlibatan aktif seluruh petugas pengawas.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	14.681.500	15.345.890	104,53	**1,02**	**0,02**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Tabel 3.41, penggunaan anggaran untuk indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" pada Triwulan III dinilai Efisien dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,02 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,02. Kondisi ini secara administratif karena akselerasi penyerapan anggaran yang sesuai dengan target perencanaan penarikan dana (RPD) Triwulan III, di mana realisasi anggaran mencapai 106,10% (Rp15.345.890 dari rencana Rp14.681.500). Faktor utama hal ini adalah, kesesuaian antara perencanaan target anggaran dengan penyerapan anggaran yang dilakukan, sehingga mencapai efisien dalam penyerapan anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Guna memperbaiki deviasi anggaran tersebut dan memastikan terciptanya efisiensi serta keselarasan antara kinerja fisik dan keuangan pada paruh kedua tahun ini, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan segera melakukan evaluasi ketat. upaya efisiensi biaya operasional akan dioptimalkan melalui penerapan metode klasterisasi wilayah kunjungan—dengan menggabungkan agenda pengawasan, sampling, dan tindak lanjut dalam satu kali perjalanan dinas terpadu, serta memperkuat koordinasi antara fungsi Perencana, Bendahara, dan

Kelompok Substansi Pemeriksaan dalam menyelaraskan kalender kegiatan fisik dengan rencana penarikan anggaran bulanan demi menekan nilai deviasi dan mengembalikan status kinerja keuangan ke kategori "Efisien".

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim Triwulan III tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
    a. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
    b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
    c. Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
    - Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
    - Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
    a. Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

b. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi triwulan sebelumnya.
c. Laporan kinerja Triwulan III tahun 2026 digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
d. Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
   a. Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan
   b. Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat.

9. **Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.42 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III tahun 2026 yaitu sebesar 103,52%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52	96,6	100,00	103,52

Hasil realisasi Triwulan III pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100 dengan persentase capaian 103,52%. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan realisasi Triwulan II, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Hal ini menandakan bahwa seluruh pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan Juli hingga Septemberi diperiksa dan ditindaklanjuti seseuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	100,00	103,52 ▲	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan III pada indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 103,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan III termasuk dalam kategori tercapai/ melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 103,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan history hasil pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.
2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional

prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada fasilitas distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara perencanaan strategis, pelaksanaan teknis yang disiplin, pelaporan yang tepat waktu, serta tindak lanjut dan evaluasi yang konsisten. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam memastikan bahwa sediaan farmasi yang beredar di masyarakat melalui jalur distribusi resmi yang berada dalam pengawasan yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

   Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko fasilitas distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

   Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

   Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

   Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

   Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

6. Penguatan Sinergi Antar Stakeholder

   Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas kesehatan, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait, guna memperluas jangkauan pembinaan dan mempercepat respons terhadap temuan lapangan.

Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Jika cut off data pelaporan SIPT sarana distribusi Sediaan Farmasi diberlakukan tanggal 31 Juli, maka petugas pemeriksa yang melakukan input SIPT dan Ketua Tim yang akan melakukan verifikasi Hasil input SIPT akan kewalahan karena timeline tersebut bersamaan dengan pelaksanaan sampling	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Agustus mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Agustus	Tidak	-	-
Agustus	Kekurangan 1 personil (cuti melahirkan) menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh 2 Tim, sehingga memerlukan HK yang lebih banyak dibandingan pemeriksaan dengan 3 Tim	Penambahan 1 personil dengan kualifikasi Apoteker untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Saryanfar bulan september-oktober	Mengusulkan permintaan 1 personil dengan kualifikasi Apoteker untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Saryanfar bulan september-oktober	September	Tidak	-	-
September	Jadwal bulan September yang cukup padat (Audit Internal, Investigasi KLB) menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan mundur 1 minggu dan mempersempit waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pelaporan hasil pemeriksaan. Hal ini menyebabkan pembuatan Surat TL baru dapat diselesaikan pada akhir bulan September dan Input SIPT baru bisa diselesaikan pada awal bulan Oktober	Lakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan lain	Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi bulan Oktober sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu	Oktober	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala

menggunakan inovasi dari Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	101.610.957	120.698.987	118,79	**0,87**	**0,20**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 118,79% terhadap target RPD TW III, sedangkan realisasi output sebesar 100, target output sebesar 96,6 sehingga persentase capaian output adalah 103,52% dengan tingkat efisiensi 0,20. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 118,79% dan termasuk dalam kategori capaian Efisien. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang dilakukan dalam mencapai target pada Triwulan III proporsional dengan Rencana penarikan dana yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalanan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan lebih efisien dari sisi biaya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan rutin dengan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah yang memiliki cakupan sarana distribusi cukup tinggi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 103,52% dan telah melampaui target yang ditetapkan (96,6). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, perencanaan Triwulan III tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan dengan pelaksanaan monitoring menggunakan inovasi AMOI CAKEP.

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Sedangkan pengertian diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.47 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	99,04	106,21%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III tahun 2026 yaitu sebesar 106,21%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.48 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99	93,25	99,04	106,21

Hasil realisasi Triwulan III pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 99,04 dengan persentase capaian 106,21%. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan realisasi Triwulan II yaitu 98,33 dengan persentase capaian 105,99%, diketahui terdapat peningkatan nilai realisasi dan persentase capaian. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sehingga jumlah pembilang dan penyebut pada rumus perhitungan setiap indikator juga bertambah dan menandakan bahwa seluruh pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada Triwulan III diperiksa dan ditindaklanjuti seseuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	99,04	106,21 ▲	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan III pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 99,04. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 106,21%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan III termasuk dalam kategori tercapai/melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 106,21%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran

   Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan history hasil pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.

2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP

   Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi

   Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten

   Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada sarana distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

   Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

   1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

      Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko sarana distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

   2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

      Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

   3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

      Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

   4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

      Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

   Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi pada perlindungan keamanan pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Jika cut off data pelaporan SIPT sarana distribusi Pangan Olahan diberlakukan tanggal 31 Juli, maka petugas pemeriksa yang melakukan input SIPT dan Ketua Tim yang akan melakukan verifikasi Hasil input SIPT akan kewalahan karena timeline tersebut bersamaan dengan pelaksanaan sampling	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Agustus mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Agustus	Tidak	-	-
Agustus	Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Agustus	-	-	-	Tidak	-	-
September	Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan September	-	-	-	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

   Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu,

kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.51 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	99,04	106,21	148.105.306	134.327.641	90,70	1,17	0,17	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 90,70% terhadap target RPD TW III, sedangkan realisasi output sebesar 99,04, target output sebesar 93,25 sehingga persentase capaian output adalah 106,21% dengan tingkat efisiensi 0,17. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 90,70% dan termasuk dalam kategori capaian Efisien. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam mencapai target pada Triwulan III proporsional dengan capaian outputnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dilakukan upaya optimalisasi perencanaan kegiatan berbasis prioritas dan risiko, sehingga pemeriksaan difokuskan pada sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan sejenis guna menghemat biaya operasional, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan dokumentasi

hasil pengawasan. Pengendalian dan pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja Pada Triwulan III Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan dengan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal (pengawasan dilakukan pada minggu kedua dan ketiga setiap bulan) agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan ketika terjadi keterbatasan personil pemeriksaan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 105,99% dan telah melampaui target yang ditetapkan (93,25). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut

pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, perencanaan TW III tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan dengan pelaksanaan monitoring menggunakan inovasi AMOI CAKEP.

11. **Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan**

Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Yang dimaksud Iklan sediaan farmasi disini mencakup Iklan Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan yang dimaksud dari Iklan sendiri adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Kemudian yang dimaksud diawasi sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun untuk perhitungan persentase capaian pada indikator ini dengan cara menghitung rata-rata capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B.. Persentase iklan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.52 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,75	103,12%	Sangat Baik

Pada Triwulan III, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai kententuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,75 %.

Persentase tersebut telah memenuhi target triwulan dengan capaian terhadap target Triwulan III tahun 2026 sebesar 103,12 % yang dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.53 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53	93,83	96,75	103,12

Realisasi triwulan III untuk indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,75% dengan persentase capaian sebesar 103,12%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Triwulan II, dengan realisasi sebesar 96,20% dan persentase capaian 102,53%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja untuk indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III baik dari sisi realisasi maupun capaian terhadap target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,75	103,12 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi triwulan III untuk indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,75 % dengan capaian terhadap target tahunan 103,12 %. Persentase tersebut diatas target tahun 2026 yang dikategorikan "Tercapai/Melampaui".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 96,75% atau 103,12 % terhadap target tahunan 93,83% menunjukkan bahwa kinerja telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga melampaui target. Peningkatan kinerja ini didukung oleh komitmen petugas, verifikator dan pimpinan dalam memastikan pelaporan iklan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, koordinasi internal dalam pelaporan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas capaian kinerja hingga periode berikutnya agar tetap optimal dan berkelanjutan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada peningkatan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan, antara lain melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaporan secara berkala, penerapan mekanisme pengingat (reminder) dan batas waktu yang lebih tegas, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan yang diinput secara tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi internal antara petugas, verifikator dan Kepala Balai selaku Pimpinan untuk memastikan alur pelaporan iklan. untuk memastikan kelancaran alur pelaporan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keterlambatan pelaporan tidak terulang dan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat tercatat secara optimal serta target tahunan dapat tercapai.

Tabel 3.55 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Pengawasan iklan sediaan famasi dan pangan olahan bulan Juni telah dilaksanakan dengan realisasi 96,20 %. Tidak terdapat kendala dalam pengawasan iklan sediaan	Kekurangan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juli akan dilaporkan pada bulan berikutnya	Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan	Agustus	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	farmasi dan pangan olahan di Bulan Juni		tidak melewati bulan pengawasan				sesuai dengan ketentuan
Agustus	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juli telah dilaksanakan dengan realisasi 95,49% Kendala: Masih terdapat iklan sediaan farmasi yang belum dilaporkan sesuai dengan target bulanannya	Pemenuhan terhadap media iklan yang masih kurang diupayakan untuk dilaksanakan pada bulan berikutnya	Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan tidak melewati bulan pengawasan dan media iklan yang belum terpenuhi	Septemb er	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Septem ber	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Agustus telah dilaksanakan dengan realisasi 96,49 % Kendala: Keterbatasan iklan yang tersedia berdasarkan media yang diawasi terutama untuk media cetak dan media luar ruang	Pemenuhan terhadap media iklan yang masih kurang diupayakan untuk dilaksanakan pada bulan berikutnya	Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan tidak melewati bulan pengawasan dan media iklan yang belum terpenuhi	Oktober	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan tabel kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan periode Juli- September 2026, dapat dianalisis bahwa program/kegiatan pengawasan iklan secara umum telah mendukung ketercapaian kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja adalah pelaksanaan pengawasan rutin yang disertai dengan tindak lanjut berupa verifikasi data di sistem pelaporan (SIPT) serta penarikan dan perbaikan data secara berkala di setiap bulan sehingga mampu meningkatkan realisasi capaian.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,75	103,12	10.095.600	10.547.725	104,48	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar -0,01 , yang menunjukkan kondisi tidak efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi ini diperoleh melalui perbandingan antara persentase capaian output dengan persentase capaian input (anggaran), di mana capaian output sebesar 103,12 % dan capaian input sebesar 104,48 %.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumberdaya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penyesuaian realisasi anggaran dan juga target output pada triwulan berikutnya sehingga capaian terhadap indikator ini dapat lebih efektif dan optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan untuk meningkatkan capaian indikator pada triwulan III antara lain:

- Penggabungan kegiatan pengawasan iklan secara digital dan manual ke satu kegiatan terintegrasi agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya
- Penambahan frekuensi pemantauan terhadap media sosial dan platform e-commerce yang berisiko tinggi terhadap penyebaran iklan yang tidak sesuai ketentuan

- Pemanfaatan intensifikasi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan iklan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja indikator ini dilakukan penyesuaian anggaran. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- Penguatan anggaran operasional pemantauan iklan dilakukan melalui revisi anggaran pada perjalanan dinas , sehingga kegiatan pengawasan iklan dapat dilaksanakan secara terpadu bersama pengawasan rutin
- Pengalihan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan dan peningkatan kapasitas petugas dalam menilai kepatuhan iklan

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan III menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan dengan Triwulan II. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya, kegiatan pengawasan akan terus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan guna menjaga keberlanjutan kinerja yang optimal.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilakukan pada triwulan III untuk menjaga keberlanjutan kinerja antara lain:

- Penyesuaian target bulanan, agar pelaksanaan lebih terukur dan progres capaian lebih mudah dikendalikan
- Perluasan cakupan iklan yang diawasi terutama pada media yang memiliki keterbatasan jumlah media pengawasan.

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau,

dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a.rokok;

b.cerutu;

c.rokok daun;

d.tembakau iris;

e. tembakau padat dan cair dan;

f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula:

% Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = (A+B)/2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat dinas.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Jumlah label yang yang dihitung sebagai pelaporan tepat waktu setiap bulan dnegan jumlah maksimal sebesar target pengawasan pada bulan pengawasan yang telah ditetapkan untuk UPT dalam surat dinas.
- Persentase pemenugan jumlah target pengawasan label maksimal 100 %
- Persentase pemenuhan persentase ketepatan waktu pelaporan label maksimal 100 %
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT dan google form.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.57 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97,22	106,84%	Sangat Baik

Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar 97,22 % dengan capaian terhadap target 106,84%. Capaian ini dikategorikan dengan Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.58 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03	91	97,22	106,84

Capaian indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada Triwulan III menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan dengan Triwulan II, yang ditunjukkan dengan capaian indikator yang tidak melebihi 110% terhadap target yang telah disesuaikan. Perbaikan tersebut didukung oleh evaluasi kinerja hingga Triwulan II, yang menunjukkan bahwa realisasi indikator telah melampaui target awal sebesar 84,04%. Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya penyesuaian target indikator dari 84,04% menjadi 91%. Penyesuaian ini juga bertujuan agar target kinerja lebih mencerminkan perkembangan realisasi yang lebih relevan dalam mengevaluasi pencapaian indikator hingga akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	97,22	106,84 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan III, realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 106,84%. Realisasi tersebut telah melampaui target

tahunan yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga indikator ini termasuk dalam kriteria Tercapai/Melampaui. Target tahunan sebesar 91% merupakan hasil penyesuaian dari target awal sebesar 84,04% berdasarkan evaluasi terhadap realisasi dan capaian kinerja hingga Triwulan II yang telah melampaui target. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan target dengan perkembangan realisasi kinerja yang telah dicapai, sehingga target yang ditetapkan lebih mencerminkan potensi kinerja pada tahun berjalan. Dengan target yang telah disesuaikan tersebut, realisasi Triwulan III sebesar 106,84% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2026 oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan realisasi sebesar 97,22 % dari target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat sedikit penurunan capaian dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan terhadap indikator ini. Capaian Indikator yang melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi pemenuhan target output kegiatan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja indikator.

Selain itu kinerja yang tetap optimal ini didorong oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta didukung oleh komitmen dalam pelaporan hasil pengawasan label yang dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini tetap terjaga pada kategori sangat baik. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan sistem pelaporan melalui SIPT yang telah berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akurat, sehingga memudahkan proses pemantauan, pelaporan, serta validasi data hasil pengawasan. Sinergi antara pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, peningkatan kompetensi petugas dan optimalisasi sistem pelaporan menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik difokuskan pada penguatan strategi dan efektivitas kegiatan pengawasan. Ke depan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang perlu melakukan perencanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan sebaran produk di wilayah pengawasan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas akan terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga menjadi fokus utama perbaikan, dengan memastikan ketertiban, akurasi, dan validitas data yang diinput melalui mekanisme monitoring dan evaluasi rutin. Dalam mendukung hal tersebut, koordinasi dan sinergi antar unit terkait, baik di tingkat pusat maupun UPT Balai POM, akan terus diperkuat untuk memastikan keseragaman interpretasi standar pelabelan dan peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, penyusunan dan pemutakhiran database pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menyediakan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan berikutnya.

Tabel 3.60 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	1. Label tembakau yang diawasi dan dilaporkan pada bulan Juli sebanyak 10 sampel.Terdapat kekurangan 2 label rokok elektrik yang belum dilaporkan 2. Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan	1. Kekurangan label rokok akan dilaporkan pada bulan berikutnya 2. Telah dilakukan pengajuan revisi target RAPK agar capaian indikator tidak melebihi 110 %	1. Mengingatkan PIC pengawas label produk tembakau dan rokok elektronik untuk segera menginput hasil pengawasan di SIPT dan meneruskan ke supervisor agar tidak melewati bulan pengawasan 2. Berkoordinasi dengan	Agustus	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dengan realisasi bulan Juli sebesar 94,05 % dengan capaian 111,91 %.		perencana terkait perubahan target RAPK yang telah diajukan				
Agustus	1. Label tembakau yang diawasi dan dilaporkan pada bulan Agustus sebanyak 12 sampel. 2. Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi bulan Agustus sebesar 96,88 % dengan capaian 106,46 %.	Pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik agar dilaporkan tepat waktu	Mengingatkan PIC pengawas label produk tembakau dan rokok elektronik untuk segera menginput hasil pengawasan di SIPT dan meneruskan ke supervisor agar tidak melewati bulan pengawasan	September	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
September	1. Label tembakau yang diawasi dan dilaporkan pada bulan September sebanyak 12 sampel. 2. Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi bulan September sebesar 97,22 % dengan capaian 106,84 %.	Pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik agar dilaporkan tepat waktu	Mengingatkan PIC pengawas label produk tembakau dan rokok elektronik untuk segera menginput hasil pengawasan di SIPT dan meneruskan ke supervisor agar tidak melewati bulan pengawasan	Oktober	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan.

Salah satu kegiatan utama yang memberikan kontribusi signifikan adalah pelaksanaan pengawasan rutin dan terjadwal terhadap produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Selain itu, penguatan koordinasi internal serta peningkatan ketepatan dalam pelaporan hasil pengawasan turut mendukung optimalisasi capaian indikator ini. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja secara keseluruhan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.61 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97,22	106,84	9.693.900	6.892.400	71,10	1,50	0,50	92% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 71,10 %, jika dibandingkan antara target RPD dan realisasi anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,50 dengan capaian 92 % (efisien). Hal ini didukung oleh perencanaa kegiatan berbasis risiko yang tepat sasaran, pemanfaatan SIPT untuk pelaporan digital , serta pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran. Pencapaian ini akan terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan objek pengawasan yang memiliki potensi ketidaksesuaian tinggi. Pendekatan ini memastikan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal terhadap capaian kinerja.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan lain di bidang pengawasan obat dan makanan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta menekan biaya operasional. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi melalui mekanisme pelaporan elektronik yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya administrasi. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga tetap mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan dengan pengajuan perubahan target indikator sebagai strategi untuk mencapai target kinerja melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta memperluas cakupan pengawasan dalam satu waktu pelaksanaan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi pembiayaan, waktu, maupun tenaga, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dan efektivitas pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Pencapaian keberhasilan kinerja didukung oleh komitmen petugas dalam melaksanakan pengawasan produk tembakau secara konsisten dan sesuai ketentuan, serta didukung oleh kedisiplinan dalam penyampaian laporan secara tepat waktu.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh pemenuhan target output terhadap capaian indikator yang telah dilakukan revisi dan melakukan evaluasi perencanaan target pada akhir periode agar perencanaan kinerja selanjutnya menjadi lebih realistis, terukur dan adaptif terhadap ketersediaan sumber daya dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

13. **Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT**

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)

2) Pelaksanaan Bimtek (B)

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan

4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.62 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan III.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.63 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT BBPOM di Pangkal Pinang merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan II dan Triwulan III tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT Balai Besar POM di Pangkal Pinang merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dilakukan perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan III dan target tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada periode pelaporan dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). Secara umum, keberhasilan atau peningkatan kinerja dicapai oleh UPT yang mampu melaksanakan keempat komponen utama pengendalian AMR secara konsisten, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antara UPT dan Pusat. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan serta penerapan tools pengawasan antibiotik secara rutin dan akurat turut memperkuat capaian indikator ini. Capaian indikator ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan empat komponen utama kegiatan, dukungan sumber daya, dan efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi AMR di tingkat UPT serta peningkatan pendampingan teknis dalam penerapan tools pengawasan antibiotik secara berkesinambungan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) difokuskan pada peningkatan konsistensi pelaksanaan keempat komponen kegiatan, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan memperkuat mekanisme monitoring dan supervisi berkala terhadap pelaksanaan penggunaan tools pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian guna memastikan ketepatan pengisian dan keseragaman penerapan antar petugas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan terkait pengendalian AMR, baik secara internal maupun melalui kolaborasi dengan unit teknis pusat. Dalam rangka memperluas cakupan dan efektivitas advokasi lintas sektor, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, dan instansi terkait guna mendorong sinergi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up (mengirimkan surat resmi) ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Infokom mengenai penyisipan	Agustus	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter		materi AMR pada KIE selanjutnya 4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter				
Agustus	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan Agustus telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 23 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan	September	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Agustus 2026, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan pada 12 Agustus 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026 dan di Poltekes Kemenkes Pangkalpinang pada 13 Agustus 2026 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 8. Telah dilakukan Join Inspection bersama Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 26 Agustus 2026 untuk mengawal SE Bupati Bangka Tengah terkait Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi		Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter				khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						
September	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan September telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 25 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026, TW II 2026 pada 30 Juni 2026 dan TW III 2026 pada 30 September di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan September 2026, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan pada 12 Agustus 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026 dan di	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Oktober	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Poltekes Kemenkes Pangkalpinang pada 13 Agustus 2026 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 8. Telah dilakukan Join Inspection bersama Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 26 Agustus 2026 untuk mengawal SE Bupati Bangka Tengah terkait Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan advokasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, serta instansi terkait turut memperkuat komitmen bersama dalam implementasi strategi pengendalian AMR di tingkat daerah. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan tools pengawasan antibiotik yang telah diintegrasikan dalam kegiatan pemeriksaan rutin di apotek, sehingga pengawasan terhadap penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Kegiatan publikasi hasil pengawasan juga menjadi salah satu bentuk transparansi dan upaya edukatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peresepan antibiotik.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	15.326.585	18.189.084	118,68	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan III tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dilakukan melalui integrasi kegiatan pengawasan AMR dengan pengawasan rutin di sarana pelayanan kefarmasian, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya operasional.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi lintas sektor juga dilakukan secara terpadu dengan program lain yang relevan untuk menghemat sumber daya.

Selain itu, pemanfaatan media daring dalam koordinasi dan publikasi hasil pengawasan turut menekan biaya perjalanan dinas dan logistik, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap efektif dengan penggunaan anggaran yang efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance), dengan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara lebih terintegrasi dan berbasis prioritas risiko. Strategi ini dilaksanakan melalui penggabungan kegiatan yang sejenis, pemanfaatan data pengawasan yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang efisien dilaksanakan melalui rasionalisasi kegiatan, penggabungan aktivitas yang sejenis, serta penyesuaian prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap indikator kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Selain itu, optimalisasi sumber pendanaan juga dilakukan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota yang memperoleh alokasi tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih luas tanpa membebani anggaran utama. Sinergi antara sumber anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperluas cakupan kegiatan, serta tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Target pada indikator ini merupakan indikator kinerja yang diukur secara tahunan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyesuaian perencanaan kinerja dapat dilakukan apabila diperlukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target secara optimal. Penyesuaian tersebut difokuskan pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance). Melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih terintegrasi serta berbasis pada prioritas risiko, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyasar area dengan dampak paling signifikan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan terarah, serta tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja pengendalian AMR secara optimal.

14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan seperangkat standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bagian dari

kebijakan strategis dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta mutu kinerja laboratorium pengujian di lingkungan BPOM. Penyusunan SKL didasarkan pada rencana pengembangan laboratorium yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan sumber daya manusia, peralatan, metode analisis, serta ruang lingkup pengujian. Secara konseptual, SKL merupakan agregasi dari empat tingkatan kemampuan laboratorium, yaitu tingkat 1 hingga tingkat 4, yang masing-masing mencerminkan kompleksitas dan kedalaman kemampuan pengujian yang dimiliki.

Dalam kerangka tersebut, BBPOM Pangkal Pinang diklasifikasikan sebagai laboratorium tingkat 3 (tier 3). Laboratorium pada tingkat ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi, termasuk pengujian terhadap parameter-parameter non-unggulan. Selain itu, laboratorium tingkat 3 juga berfungsi sebagai unit verifikasi dengan melakukan pengujian konfirmasi terhadap hasil pengujian yang berasal dari laboratorium pada tingkat di bawahnya. Dengan demikian, keberadaan laboratorium tingkat 3 tidak hanya berperan sebagai pelaksana pengujian, tetapi juga sebagai pengendali mutu internal dalam sistem laboratorium berjenjang.

Penilaian terhadap pemenuhan SKL pada laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup empat komponen utama. Keempat komponen tersebut dirancang untuk menggambarkan secara komprehensif tingkat kesiapan dan kemampuan laboratorium, baik dari aspek teknis maupun operasional. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja laboratorium, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dan perencanaan dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Selain itu, hasil penilaian SKL menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan laboratorium guna mendukung perlindungan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan khasiat produk farmasi serta pangan olahan.

Adapun empat komponen utama dalam SKL untuk laboratorium tingkat 3 meliputi:

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi

Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam merepresentasikan kapasitas laboratorium secara menyeluruh. Nilai akhir

pemenuhan SKL dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing komponen sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh BPOM, sehingga menghasilkan suatu nilai komposit yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar oleh laboratorium yang bersangkutan.

Standar Ruang Lingkup (SRL) didefinisikan sebagai himpunan parameter uji atau metode analisis (MA) yang telah mampu dilaksanakan oleh suatu laboratorium. SRL mencerminkan cakupan kemampuan teknis laboratorium dalam melakukan berbagai jenis pengujian. Dalam konteks penilaian Standar Kompetensi Laboratorium, SRL diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu: (1) Aspek 1, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal satu orang penguji; dan (2) Aspek 2, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal dua orang penguji. Pembagian ini bertujuan untuk menilai tidak hanya ketersediaan kemampuan pengujian, tetapi juga tingkat redundansi dan keberlanjutan kompetensi sumber daya manusia dalam laboratorium.

Apabila jumlah SRL yang dimiliki laboratorium sama dengan jumlah SRL pada Aspek 1, maka laboratorium tersebut memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 1. Demikian pula, apabila jumlah SRL yang dimiliki sebanding dengan jumlah SRL pada Aspek 2, maka laboratorium memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 2. Dengan demikian, total nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen Standar Kompetensi Laboratorium adalah sebesar 20. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kompetensi laboratorium tidak hanya diukur dari kemampuan individu, tetapi juga dari distribusi dan keberlanjutan kompetensi di antara personel laboratorium.

Standar Peralatan merupakan komponen yang menilai ketersediaan serta kesesuaian jenis dan jumlah peralatan laboratorium dengan kebutuhan pengujian berdasarkan klasifikasi tingkat (tier) laboratorium. Pemenuhan standar peralatan menjadi faktor krusial dalam menjamin keakuratan, ketepatan, dan keandalan hasil pengujian. Oleh karena itu, setiap laboratorium diwajibkan untuk memiliki peralatan yang memadai, terkalibrasi, serta terpelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi merujuk pada metode analisis yang telah melalui proses verifikasi oleh laboratorium untuk memastikan kesesuaian, validitas, dan kinerjanya dalam kondisi operasional setempat. Proses verifikasi ini penting untuk menjamin bahwa metode yang digunakan mampu

menghasilkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam implementasinya, terdapat perubahan kebijakan terkait pembuktian penambahan SRL. Sebelum tahun 2025, penambahan SRL dapat dibuktikan melalui Lampiran Catatan Pengujian (LCP) yang disusun oleh analis sebagai dokumentasi pelaksanaan pengujian. Namun, sejak tahun 2025, kebijakan tersebut mengalami penyesuaian, di mana penambahan SRL harus didukung oleh laporan hasil verifikasi metode analisis (MA). Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan standar pembuktian yang lebih menekankan pada validitas metode secara ilmiah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara SRL dan daftar MA terverifikasi, di mana tidak seluruh metode analisis yang tercantum dalam SRL telah termasuk dalam daftar metode analisis yang terverifikasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses harmonisasi antara cakupan pengujian dan pemenuhan persyaratan verifikasi metode, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan mutu laboratorium ke depan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.67 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,5	78,70	100,25%	Sangat Baik

Tabel di atas menyajikan capaian indikator kinerja nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menjamin mutu layanan pengujian produk farmasi dan pangan olahan. Pada triwulan III, target yang ditetapkan sebesar 78,5 dan realisasi capaian hingga akhir periode pelaporan juga tercatat sebesar 78,7. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai 100,25% dan dikategorikan dalam klasifikasi “Sangat Baik”.

Pada periode pelaporan ini, terdapat penambahan kegiatan yang mencerminkan peningkatan cakupan layanan laboratorium, yaitu penambahan 1 SRL di Laboratorium Obat & Nappza yang juga menambah jumlah standar

kompetensi masing-masing 2 pada Aspek 1 dan 2, penambahan 2 MA Terverifikasi pada Laboratorium Obat & Nappza dan 3 MA Terverifikasi pada Laboratorium Kosmetik.

Sementara itu sejumlah peningkatan kompetensi personel yang dilakukan di Laboratorium Kosmetik menaikkan jumlah Aspek 2 menjadi 112, peningkatan kompetensi personel di Laboratorium OTOKSK menaikkan jumlah Aspek 2 menjadi 123. Namun penambahan aspek-aspek ini belum meningkatkan nilai Standar Kompetensi Laboratorium.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa laboratorium mampu mempertahankan kinerja sesuai target di tengah adanya penambahan kegiatan dan penyesuaian standar. Ke depan, diperlukan upaya optimalisasi agar peningkatan aktivitas yang telah dilakukan dapat semakin berkontribusi terhadap peningkatan nilai capaian SKL pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.68 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13	78,5	78,7	100,25

Tabel di atas menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan II dan triwulan III nilai pemenuhan SKL. Target triwulan III naik 0,1 dari triwulan II, sementara realisasi meningkat dari 78,5 menjadi 78,7. Persentase capaian juga mengalami kenaikan dari 100,13% pada triwulan II menjadi 100,25% pada triwulan III. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem kerja laboratorium serta optimalisasi sumber daya dan proses.

Secara keseluruhan, tren capaian pada tiga triwulan pertama tahun ini menunjukkan kinerja laboratorium yang stabil dan progresif. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh tim laboratorium dalam menjaga standar mutu serta responsivitas terhadap target-target strategis yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,60	78,70	100,13 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan target tahunan 2026 untuk indikator nilai pemenuhan SKL. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 78,6, sementara hingga triwulan III realisasi yang dicapai adalah sebesar 78,7 dengan persentase capaian sebesar 100,13% terhadap target tahunan. Capaian pada triwulan III telah melampaui target tahunan yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya peningkatan dan pemeliharaan standar kompetensi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026 guna memastikan kualitas kinerja tetap terjaga dan hasil yang dicapai dapat dipertahankan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Target kinerja telah terealisasi sesuai dengan rencana. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan dan perhitungan capaian. Dalam pelaksanaan Uji Profisiensi (UP) tahun 2026, terdapat ketentuan bahwa metode analisis (MA) yang digunakan dalam pengujian UP harus terlebih dahulu diverifikasi. Ketentuan ini baru diinformasikan pada saat pelaksanaan UP dimulai, sehingga belum diperhitungkan dalam perencanaan awal tahun. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut dan mengantisipasi dampaknya terhadap penilaian UP, Laboratorium Kosmetik melakukan penyesuaian terhadap rencana MA yang akan diverifikasi.

Selain itu, pada pertengahan September dilakukan kembali rekonsiliasi data peralatan dengan aplikasi DIKOLABORASI serta penyesuaian terhadap kebijakan terbaru dari PPPOMN. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, peralatan TLC System yang tercatat secara terpisah dalam aplikasi DIKOLABORASI, yaitu Automatic Developing Chamber, Automatic Sampler, dan Visualizer, diperhitungkan sebagai satu set dalam pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium (SKL). Dengan demikian, kepemilikan dua dari tiga jenis peralatan tersebut dapat diperhitungkan

sebagai satu capaian, sehingga BBPOM di Pangkal Pinang tercatat memenuhi 50% target peralatan TLC System, yaitu pemenuhan satu dari dua set yang dipersyaratkan.

Sementara itu, pada standar peralatan mikrobiologi, Incubator CO_2 yang sebelumnya tercantum dalam standar peralatan dikeluarkan dari daftar perhitungan karena laboratorium telah memiliki 10 anaerobic jar. Penyesuaian tersebut menyebabkan tidak adanya perubahan pada tingkat pemenuhan standar peralatan kimia dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, rekonsiliasi dan penyesuaian data dilakukan untuk memastikan kesesuaian perhitungan capaian dengan ketentuan dan kebijakan terbaru yang berlaku.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL telah dituangkan dalam rencana aksi SKP tahunan setiap anggota tim. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulan guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan data dukung telah atau akan terselesaikan pada saat penilaian SKL oleh PPPOMN, yang dilaksanakan setiap tanggal 20 pada bulan ketiga tiap triwulan.

Tabel 3.70 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	– Penambahan kompetensi masing-masing satu di Lab Kos dan OT tapi tidak meningkatkan nilai kompetensi Laboratorium. Penambahan 1 kompetensi lagi di Lab Kosmetik belum bisa dilakukan karena antrian alat untuk pengujian sampel. – Penambahan 1 MA Terverifikasi di Lab Kos tapi belum dibuat laporan verifikasi.	Lakukan monitoring pemenuhan rencana aksi bulan Juli.	Akan dilakukan monitoring pemenuhan rencana aksi bulan Juli.	Agustus	T	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	– Pelaksanaan verifikasi alat sudah dilakukan dan dilaporkan tepat waktu. 1.Pelaporan rencana aksi tidak dapat selalu dilakukan di tanggal 2 setiap bulannya karena awal bulan Juli jatuh di *week end*						
Agustus	– Penambahan 2 MA Terverifkasi di Lab Kosmetik. – Peningkatan kompetensi Aspek 2 masing-masing 1 di Lab Kosmetik dan Lab OTOKSK. 1.Terdapat 1 peralatan belum diverifikasi, yaitu *TLC System* di Lab OTOKSK karena Penyelia belum melakukan penyesuaian jadwal verifikasi peralatan yang sudah dibuat oleh Ketua Tim Pengelola SMM.	– Lakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan. 1. Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL PPPOMN untuk TW 3 di bulan September.	– Akan dilakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan. 1. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL PPPOMN untuk TW 3 di bulan September.	September	T	-	-
September	– Telah dilakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2, yaitu 78,7 berupa penambahan 2 MA terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kosmetik. 4.Terdapat 1 peralatan belum diverifikasi, yaitu HPLC Shimadzu di Lab OT. Verifikasi masih dalam proses pengerjaan	Lakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan.	Akan dilakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan.	Oktober	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai pemenuhan SKL dicapai melalui sejumlah langkah :

1. Koordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk menyampling sampel yang dibutuhkan dalam pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.

2. Koordinasi perencanaan jadwal sampling masuk dengan fungsi Pemeriksaan sehingga memberikan waktu bagi laboratorium untuk melaksanakan verifikasi MA setelah pengujian sampel.
3. Perencanaan pengadaan reagensia dan pendukung pengujian yang menjamin ketersediaan bahan yang dibutuhkan untuk pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.
4. Pelaksanaan kalibrasi dan verifikasi instrumen serta pemeliharaan peralatan untuk memonitoring dan memelihara fungsi peralatan labororium.
5. Pengadaan peralatan laboratorium yang dilaksanakan tepat waktu.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.71 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,5	78,7	100,25	3.134.257.921	3.064.584.028	97,78	1,03	0,03	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan ketentuan matriks kinerja dan pendanaan BPOM tahun 2025-2009, Indikator ini mempunyai mapping/tagging anggaran dari RO Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB) dan RO Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD). Untuk RO PDD tidak seluruhnya secara langsung berpengaruh dalam pencapaian target output indikator ini. RPD untuk anggaran yang telah dipetakan pada indikator ini dapat tercapai sebesar 100% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dikategorikan "Efisien".

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SKL dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap langkah pelaksanaan dirancang untuk memastikan ketercapaian target strategis, baik dari sisi substansi kegiatan maupun efisiensi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses

perencanaan berjalan secara sistematis dan telah mempertimbangkan kesinambungan antarperiode anggaran.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Target ini dikawal dalam rencana aksi nilai pemenuhan SKL melalui SKP.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Dilakukan pengadaan bahan pendukung pengujian sesuai kebutuhan, dan adanya alokasi rutin pembelian sampel baik untuk peningkatan kompetensi ataupun verifikasi MA.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Sebagian mikropipet yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi atau digunakan dalam Penetapan Kadar telah dikirim untuk dilakukan kalibrasi.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan monitoring realisasi kegiatan yang sudah direncanakan untuk menjaga capaian tidak kurang dari 100%.

15. **Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampinagn yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria dan bobot keberhasilan pendampingan UPT kepada Kabupaten/ Kota:

a. Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan UPT sesuai tahapan (A). Bobot A sebesar 30% ;
b. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dan sesuai ketentuan (B). Rata-rata bobot B (nilai Y) sebagai berikut:

- 20% jika 100% indikator pada tools diisi
- 17,5% jika 75% - 99% indikator pada tools diisi
- 12,5% jika 50% - 74% indikator pada tools diisi
- 7,5% jika 25% - 49% indikator pada tools diisi
- 2,5% jika 10% - 24% indikator pada tools diisi
- 0% jika 0% - 9% indikator pada tools diisi

c. Kabupaten/Kota melengkapi data dukung (C). Rata-rata bobot C (nilai Z) sebagai berikut:
   - 20% jika 100% indikator pada tools ada data dukungnya
   - 17,5% jika 75% - 99% indikator pada tools ada data dukungnya
   - 12,5% jika 50% - 74% indikator pada tools ada data dukungnya
   - 7,5% jika 25% - 49% indikator pada tools ada data dukungnya
   - 2,5% jika 10% - 24% indikator pada tools ada data dukungnya
   - 0% jika 0% - 9% indikator pada tools ada data dukungnya

d. Kabupaten/Kota mengirimkan penilaian mandiri dan mendapatkan nilai lebih dari 60 hasil verifikasi juri (D). Bobot D sebesar 30%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.72 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	

Indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman merupakan Indikator dengan Target Tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi yang dapat diukur.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat dihitung pada Triwulan IV Tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.73 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan II maupun Triwulan III Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur. Pengukuran capaian indikator baru akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan pendampingan dan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai dilaksanakan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,00	-	-	

Hasil pengukuran Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat diukur karena merupakan indikator dengan target tahunan yang pengukurannya dilakukan setelah seluruh tahapan pendampingan dan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai dilaksanakan pada akhir tahun.

Pada Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat pelaksanaan kegiatan pendampingan secara langsung karena tahapan pengisian dan pemenuhan data dukung oleh pemerintah daerah telah selesai dan saat ini sedang berlangsung proses penilaian di Unit Pengampu sampai dengan Oktober 2026. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan rutin melalui tautan yang tersedia untuk mengetahui perkembangan proses penilaian tersebut.

Sampai dengan akhir Triwulan III, nilai sementara hasil penilaian belum tersedia sehingga capaian indikator belum dapat dievaluasi secara kuantitatif. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan hasil penilaian akan terus dilakukan hingga proses penilaian di Unit Pengampu selesai.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pemantauan perkembangan proses penilaian dan tindak lanjut atas hasil penilaian oleh unit pengampu Program Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan proses penilaian, melakukan koordinasi dengan unit pengampu untuk memperoleh informasi mengenai hasil penilaian, serta menyiapkan tindak lanjut sesuai dengan hasil penilaian dan ketentuan program yang berlaku.

Dengan upaya tersebut, diharapkan hasil penilaian dapat diketahui sesuai jadwal yang ditetapkan dan menjadi dasar evaluasi capaian indikator serta perumusan langkah tindak lanjut guna mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

Tabel 3.75 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Indikator ini merupakan target Tahunan, sampai dengan bulan Juli 2026, telah dilakukan penyelesaian pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengisian mandiri dalam file pemantauan pengisian tools KKPA, diperoleh nilai sementara masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut: - Kabupaten Bangka Tengah sebesar 78,02 - Kabupaten Bangka Selatan sebesar 71,20 - Kota Pangkal Pinang sebesar 67,74 - Kabupaten Bangka Barat sebesar 61,32 - Kabupaten Bangka sebesar 60,28 Nilai tersebut merupakan hasil sementara dari penilaian mandiri dan belum merupakan hasil akhir, karena masih menunggu proses verifikasi dokumen oleh Tim Juri Teknis. Hasil verifikasi direncanakan akan diumumkan pada bulan Oktober 2026. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengisian tools serta nilai sementara tersebut akan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi dan persiapan tindak lanjut sesuai hasil verifikasi. Kendala : Pemenuhan data dukung pada beberapa indikator penilaian masih belum optimal sehingga mempengaruhi capaian nilai sementara hasil penilaian	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengisian tools Penilaian Mandiri KKPA serta penyampaian hasil sementara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi sebelum diterimanya hasil verifikasi dari Tim Juri Teknis.	1. Melakukan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi pengisian tools KKPA kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan nilai sementara hasil penilaian mandiri. 2. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026. 3. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat rekomendasi perbaikan.	Oktober	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	mandiri Kabupaten/Kota. Terdapat Kabupaten/Kota dengan nilai sementara yang masih berada pada batas minimal pemenuhan kriteria, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, sehingga diperlukan perhatian terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dukung sesuai indikator penilaian KKPA.						
Agustus	Indikator ini merupakan target tahunan. Sampai dengan bulan Agustus 2026, proses penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah memasuki tahap menunggu pelaksanaan desk/verifikasi dan penetapan hasil oleh Tim Juri Teknis. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan pendampingan atau pengisian tools tambahan oleh Kabupaten/Kota karena proses selanjutnya menunggu hasil penilaian dari pusat.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap proses desk/verifikasi dan penetapan hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Tim Juri Teknis.	1. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026. 2. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat rekomendasi perbaikan.	Oktober	Tidak	-	-
September	Indikator ini merupakan target tahunan. Sampai dengan bulan September 2026, proses penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah memasuki tahap menunggu pelaksanaan desk/verifikasi dan penetapan hasil oleh Tim Juri Teknis. Pada bulan September 2026 tidak terdapat kegiatan	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap proses desk/verifikasi dan penetapan hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Tim Juri Teknis.	1. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026. 2. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota apabila	Oktober	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pendampingan atau pengisian tools tambahan oleh Kabupaten/Kota karena proses selanjutnya menunggu hasil penilaian dari pusat.		terdapat rekomendasi perbaikan.				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat pelaksanaan kegiatan baru dalam rangka pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Hal ini dikarenakan tahapan pengisian dan pemenuhan data dukung oleh Pemerintah Daerah telah selesai, dan program sedang berada pada tahap penilaian oleh unit pengampu sampai dengan Oktober 2026.

Upaya yang dilakukan selama Triwulan III terbatas pada pemantauan rutin melalui tautan yang tersedia untuk mengetahui perkembangan proses penilaian. Namun, hingga akhir Triwulan III, nilai sementara hasil penilaian belum tersedia sehingga capaian indikator belum dapat dievaluasi secara kuantitatif.

Dengan demikian, pada periode ini belum terdapat kegiatan lanjutan yang dapat dianalisis kontribusinya terhadap peningkatan capaian indikator. Evaluasi keberhasilan program akan dilakukan setelah hasil penilaian dari unit pengampu tersedia, sebagai dasar untuk mengetahui ketercapaian target indikator kinerja Tahun 2026 dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	22.160.000	22.160.000	100,00	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman mencapai Rp22.160.000 atau 100% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sebesar Rp22.160.000. Realisasi anggaran telah sesuai dengan rencana penarikan dana yang ditetapkan. Namun, tingkat efisiensi teknis belum dapat dihitung karena capaian output indikator belum tersedia, mengingat proses penilaian masih berlangsung pada unit pengampu sampai dengan Oktober 2026. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian output belum dapat dievaluasi secara kuantitatif.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran secara berkala, memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan dan kebutuhan pelaksanaan program, serta melakukan pengendalian anggaran agar tetap sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi penggunaan anggaran akan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian indikator setelah tersedia, sehingga penggunaan sumber daya pada periode berikutnya dapat lebih terarah, efektif, dan mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, tidak dilakukan penyesuaian aktivitas atau pelaksanaan kegiatan baru karena tahapan pendampingan teknis pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman dan pemenuhan data dukung oleh Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan. Kegiatan pada periode ini difokuskan pada pemantauan rutin melalui tautan yang tersedia untuk mengetahui perkembangan proses penilaian oleh unit pengampu yang berlangsung sampai dengan Oktober 2026.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp22.160.000 atau 100% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp22.160.000. Realisasi tersebut telah sesuai dengan RPD yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pada periode ini.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2026, proses penilaian Program Kabupaten/Kota Pangan Aman masih berlangsung pada unit pengampu dan nilai hasil penilaian belum tersedia. Dengan demikian, ketercapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dievaluasi secara kuantitatif. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan proses penilaian. Evaluasi capaian indikator akan dilakukan setelah hasil penilaian diterima sebagai dasar pelaporan kinerja Tahun 2026.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada Triwulan IV Tahun 2026, perencanaan kinerja difokuskan pada pemantauan penyelesaian proses penilaian oleh unit pengampu serta penerimaan hasil penilaian yang telah ditetapkan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan ketercapaian indikator kinerja Tahun 2026.

SK 2 : Meningkatnya Efektivitas KIE

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya efektivitas KIE** diukur dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut.

1. **Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

   Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 Indikator/ Kriteria yaitu:

   1) Sumber atau Narasumber KIE
   2) Konten atau Informasi KIE
   3) Pemahaman Audiens KIE
   4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

   Adapun Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi efektivitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 - 75,00	Kurang Efektif
75,01 - 85,00	Cukup Efektif
85,01 - 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

   Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di Pangkal Pinang atau responden

yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 3 bulan terakhir.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.77 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,13	101,47%	Sangat Baik

Pada Triwulan III telah dilakukan survei kepada peserta yang telah mengikuti Kegiatan KIE Langsung maupun KIE melalui Media oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada bulan Juli – September 2026. Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Triwulan III sebesar 86,85 dan realisasi efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III sebesar 88,13. Realisasi telah melampaui target dan diperoleh capaian sebesar 101,47% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.78 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67	86,85	88,13	101,47

Berdasarkan hasil pengukuran, target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II dan Triwulan III sama, yaitu sebesar 86,85.

Pada Triwulan II, realisasi yang dicapai sebesar 87,43 dengan capaian 100,67%, sedangkan pada Triwulan III realisasi sebesar 88,13 dengan capaian 101,47%.

Dibandingkan dengan Triwulan II, realisasi pada Triwulan III meningkat sebesar 0,70 poin, sedangkan persentase capaian meningkat sebesar 0,80 poin persentase. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat efektivitas pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu, realisasi pada kedua triwulan telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator tetap berada di atas target kinerja.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE pada Triwulan III tetap mampu memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan KIE pada Triwulan III menunjukkan perbaikan dibandingkan Triwulan II dalam mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,13	101,47 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target tahun 2026 sebesar 86,85. Pada triwulan III, realisasi yang dicapai sebesar 88,13 sehingga persentase capaian terhadap target tahunan adalah sebesar 101,47%. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III di Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melebihi target tahunan dengan kategori tercapai/melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,13 (Efektif) dari Target 86,85 dengan capaian 101,47 % (Sangat Baik). Hasil Penilaian ini terdiri dari

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara langsung dengan hasil sebesar 88,05 dan KIE melalui Media (Media Sosial, Media Cetak, Media Elektronik, Media Digital dan Media Luar Ruang) dengan hasil sebesar 88,21. Pada saat pelaksanaan survei, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga menyediakan Survei dalam bentuk Hard Copy dikarenakan tidak semua peserta KIE mempunyai Handphone dan Paket Data. Secara keseluruhan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi target dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian efektifitas KIE adalah:

- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.
- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non milenial.
- Memberikan materi berupa leaflet dan pemutaran video Obat dan Makanan pada saat KIE.

Tabel 3.80 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 65 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kota Pangkal Pinang serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Agustus	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
Agustus	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 72 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Selatan serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	September	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
September	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 52 Masyarakat/ Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Selatan serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Oktober	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Cerdas Memilih Pangan Aman dan Bergizi, Bersama Cegah Stunting" di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat pada bulan Juli 2026.

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Gen Z Bijak ; Cegah AMR dan Cerdas Pilih Pangan Aman dan Bergizi" di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang pada bulan Agustus 2026.
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Terasi Toboali Aman dan Bermutu, Wujudkan UMKM Berdaya Saing" di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada bulan September 2026.
4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media digital mengenai Pangan pada TV Ruang Pelayanan Publik pada bulan Juli 2026.
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media digital mengenai Kosmetik pada TV Ruang Pelayanan Publik pada bulan Agustus 2026.

Selain itu, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga aktif melakukan KIE melalui media sosial Instagram, Facebook dan X, pemutaran video pada saat KIE serta melalui Leaflet dan Banner.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.81 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,13	101,47	83.304.000	91.758.800	110,15	0,92	-0,08	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencapai 88,13 atau 101,47% dari target sebesar 86,85. Sementara itu, realisasi anggaran mencapai Rp91.758.800 atau 110,15% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp83.304.000. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Efisiensi (IE) sebesar 0,92 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,08, sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan tidak efisien.

Realisasi anggaran yang melampaui RPD dipengaruhi oleh percepatan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE yang telah

dilaksanakan, termasuk kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran konsumsi pada kegiatan KIE yang disinergikan dengan kegiatan lain. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi anggaran kumulatif sampai dengan September 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan RPD yang direncanakan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan KIE dan realisasi anggaran, serta pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan jadwal realisasi pembayaran. Perencanaan kebutuhan anggaran juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan perjalanan dinas, konsumsi, serta potensi sinergi pelaksanaan kegiatan dengan program lainnya.

Melalui upaya tersebut, diharapkan penarikan dan realisasi anggaran pada periode berikutnya dapat lebih sesuai dengan rencana dan kebutuhan aktual pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan KIE tetap dilakukan dengan memperhatikan karakteristik peserta dan kebutuhan informasi masyarakat. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan disesuaikan dengan sasaran kegiatan untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan media elektronik tetap dioptimalkan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi kepada masyarakat.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran untuk indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencapai Rp91.758.800 atau 110,15% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp83.304.000.

Realisasi yang melampaui RPD tersebut dipengaruhi oleh percepatan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE, termasuk kebutuhan biaya perjalanan dinas dan konsumsi dalam kegiatan yang disinergikan dengan kegiatan lain. Selanjutnya, pemantauan realisasi anggaran dan pemutakhiran RPD dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan aktual guna mendukung pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 88,13 atau 101,47% dari target sebesar 86,85. Capaian tersebut meningkat dibandingkan Triwulan II yang mencapai 87,43 atau 100,67% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE mampu mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi penyesuaian materi dengan karakteristik peserta, penyampaian materi secara interaktif, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media elektronik untuk memperluas jangkauan informasi.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian perencanaan kinerja yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya meliputi:

a) Melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada triwulan selanjutnya.
b) Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan BPOM
c) Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

a) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

b) Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

c) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

   a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
   b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
   c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Adapun Tahapan Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

a. Sekolah Full Intervensi:
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.82 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00%	Baik

Pada Triwulan III Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 95%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III, meliputi:

1. Perencanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan bobot 5%
2. Koordinasi dan survei terhadap sekolah sasaran program dengan bobot 5%
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%;
4. Sosialisasi Keamanan Pangan dengan bobot 20%
5. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot 25%.
6. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan bobot 25%.

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan III telah terlaksana sesuai target sehingga indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.83 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00	95	95	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan meningkat dari 25% pada Triwulan II menjadi 95% pada Triwulan III. Realisasi kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan II ke Triwulan III merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu

perencanaan program, koordinasi dan survei sekolah sasaran, pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah serta Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	95,00	95,00	▲	Akan Tercapai

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 95,00%. Dengan demikian, capaian terhadap target tahunan mencapai 95,00% dan termasuk dalam kategori Akan Tercapai.

Penetapan target kinerja indikator ini mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, yaitu sebanyak 7 sekolah pada Tahun 2025, 10 sekolah pada Tahun 2026, 12 sekolah pada Tahun 2027, 15 sekolah pada Tahun 2028, dan 18 sekolah pada Tahun 2029.

Pada Tahun 2025, target Perjanjian Kinerja sebesar 7 sekolah dapat direalisasikan seluruhnya dengan capaian 100%. Hasil tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan target kinerja tahun berikutnya. Pada Tahun 2026, berdasarkan Renstra, target indikator ditetapkan sebanyak 10 sekolah. Namun, dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran dan kemampuan pelaksanaan program, target tersebut disesuaikan menjadi 7 sekolah dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian kembali sebagai tindak lanjut kebijakan penajaman belanja pemerintah berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Keuangan terhadap target beberapa kegiatan. Kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan alokasi anggaran Rincian Output (RO) Program

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebesar 40,58% dari pagu yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan telah disahkannya usulan revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penajaman belanja oleh Direktorat Jenderal Anggaran serta pembaruan basis data RKA-K/L dan DIPA BPOM, dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dan target Rincian Output (RO) pada beberapa kegiatan. Berdasarkan hasil revisi tersebut, target indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan disesuaikan dari 7 sekolah menjadi 4 sekolah. Penyesuaian ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan target hasil revisi yang berlaku.

Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 sebesar 95,00% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mendekati target tahunan yang ditetapkan. Untuk menjaga pencapaian target pada akhir tahun, perlu dilakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan kegiatan serta penyelesaian tahapan yang masih berjalan pada Triwulan IV Tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai 95,00% dari target tahunan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mendekati target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan perencanaan, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei sekolah sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah, serta Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Selain itu, koordinasi antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan pihak sekolah sasaran turut mendukung kelancaran pelaksanaan program. Dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pengawalan keberlanjutan pembudayaan keamanan pangan di sekolah yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya. Pengawalan dilakukan terhadap 7 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 untuk memantau keberlanjutan penerapan keamanan pangan di lingkungan sekolah serta mendorong agar praktik keamanan pangan yang telah dibangun dapat terus dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, hasil pelaksanaan program tahun 2026 menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan pada periode berikutnya. Dengan demikian, upaya perbaikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada keberlanjutan penerapan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah memasuki tahapan intervensi kepada sekolah sasaran sesuai jadwal. Pada tanggal 21 Juli 2026 telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 14 (empat belas) sekolah di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari 4 (empat) sekolah target intervensi Tahun 2026 dan 10 (sepuluh) sekolah perluasan. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2026 dilaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan	1. Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. 2. Perlu dilaksanakan Monitoring Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada sekolah target intervensi untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pembentukan dan peran aktif Kader Keamanan	1. Melakukan Penyusunan Laporan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan pelaporan melalui aplikasi Sapa Sekolah (sapasekolah.pom.go.id) 2. Melaksanakan kegiatan Monitoring Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terhadap 4 (empat) sekolah target intervensi.	September	Ya	O-26, F-15	1. Kader tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis 2. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan program sekolah yang belum ada nominalnya

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Sekolah dari 4 (empat) sekolah target intervensi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari pihak sekolah dan instansi terkait. Hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah sasaran pada tanggal 21 Juli 2026 (bobot capaian 20%). 3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 22 Juli 2026 (bobot capaian 25%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Juli 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan	Pangan Sekolah, pelaksanaan intervensi kepada komunitas sekolah, serta pemenuhan dokumen pendukung sebagai persiapan menuju sertifikasi sekolah.					

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.						
Agustus	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai progres sebesar 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat target pelaksanaan kegiatan intervensi baru, namun dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pada 4 (empat) sekolah target intervensi di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam pelaksanaan monitoring masih diperlukan penguatan komitmen dan konsistensi sekolah, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah serta pemenuhan dokumen pendukung. Namun demikian, tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat keberlanjutan pelaksanaan program.	Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap 4 (empat) sekolah target intervensi untuk memastikan Kader Keamanan Pangan Sekolah melaksanakan perannya secara aktif, kegiatan pembudayaan keamanan pangan diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah, serta seluruh dokumen dipenuhi sebagai persiapan menuju tahapan sertifikasi sekolah.	1. Melakukan monitoring dan sertifikasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 4 (empat) sekolah target intervensi. 2. Melakukan pendampingan terhadap sekolah apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau pemenuhan dokumen.	September	Tidak	-	-
September	Sampai dengan bulan September 2026, pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai progres sebesar 95% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan September 2026 telah dilaksanakan monitoring dan sertifikasi terhadap 4 (empat) sekolah target intervensi di Kabupaten Bangka Tengah untuk memastikan	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Monitoring dan Sertifikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebagai dokumentasi pelaksanaan dan bahan evaluasi program.	Menyusun dan menyelesaikan laporan hasil Monitoring dan Sertifikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah.	Oktober	Ya	O-26	Kader tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	keberlanjutan penerapan pembudayaan keamanan pangan serta pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung sertifikasi. Hasil monitoring dan sertifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sekolah target intervensi telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan konsistensi sekolah dalam menerapkan pembudayaan keamanan pangan. Namun demikian, tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat pencapaian target program. Sampai dengan bulan September, masih terdapat 5% tahapan kegiatan yang perlu diselesaikan untuk mencapai target 100%, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawalan sekolah yang ditargetkan selesai pada bulan November 2026.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 95% dari target tahunan sebesar 100% didukung oleh pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah melalui serangkaian kegiatan, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei sekolah sasaran, rapat advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis bagi Kader Keamanan Pangan

Sekolah, serta monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Kegiatan-kegiatan tersebut saling mendukung dalam membangun pemahaman, meningkatkan kapasitas, serta mendorong penerapan praktik keamanan pangan di lingkungan sekolah. Koordinasi dan advokasi lintas sektor turut mendukung keterlibatan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan pihak sekolah dalam pelaksanaan program. Sementara itu, sosialisasi dan bimbingan teknis berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas sekolah, sedangkan monitoring dan sertifikasi menjadi bagian dari upaya menilai pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan di sekolah sasaran.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100	46.846.000	58.570.000	125,03	**0,80**	**-0,20**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mencapai realisasi output sebesar 95 dari target 95 atau 100%. Sementara itu, realisasi anggaran mencapai Rp58.570.000 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp46.846.000 atau 125,03%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran melampaui RPD sebesar Rp11.724.000. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,80 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,20, sehingga penggunaan sumber daya pada indikator ini dikategorikan tidak efisien.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan waktu realisasi pembayaran. Pada Juli 2026, gangguan sistem pembayaran melalui Aplikasi SAKTI menyebabkan keterlambatan pencairan dan pembayaran anggaran meskipun pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan. Pada Agustus 2026, realisasi pembayaran atas kegiatan yang telah

dilaksanakan menyebabkan penyerapan anggaran mencapai 111,67% dari RPD, sementara RPD belum sepenuhnya menyesuaikan dengan waktu realisasi pembayaran. Selanjutnya, pada September 2026, realisasi anggaran mencapai 125,03% dari RPD kumulatif seiring dengan penyesuaian dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan lain yang berkaitan dengan pencapaian output program.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target output, dimana capaian Triwulan III tetap mencapai 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pemantauan realisasi anggaran secara berkala dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kendala dalam proses pembayaran. Selain itu, Rencana Penarikan Dana (RPD) perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan, jadwal penyelesaian administrasi pembayaran, serta kebutuhan anggaran aktual.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, seluruh rangkaian kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, dengan capaian output sebesar 100% dari target Triwulan III. Pelaksanaan kegiatan meliputi Rapat Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah, serta Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada pengawalan terhadap 7 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 untuk memantau keberlanjutan dan konsistensi penerapan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Hasil evaluasi realisasi anggaran sampai dengan September 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mencapai Rp58.570.000 atau 125,03% dari RPD

kumulatif sebesar Rp46.846.000. Realisasi yang melampaui RPD tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran akibat gangguan sistem Aplikasi SAKTI pada Juli, ketidaksesuaian waktu realisasi pembayaran dengan RPD pada Agustus, serta penyesuaian dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan lain yang berkaitan dengan pencapaian output program pada September. Selanjutnya, pemantauan realisasi anggaran dan pemutakhiran RPD dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan aktual guna mendukung pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 telah mencapai target output Triwulan III sebesar 100%. Rekomendasi pada Triwulan II berupa penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan tahapan intervensi telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Selain pencapaian output, evaluasi juga mengidentifikasi perlunya perbaikan dalam pengelolaan penarikan dan realisasi anggaran agar lebih selaras dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada pengawalan terhadap 7 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan program pada periode selanjutnya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Perencanaan pada periode berikutnya difokuskan pada kegiatan pengawalan terhadap 7 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 melalui pemantauan pelaksanaan praktik keamanan pangan di lingkungan sekolah. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan, dan menyusun perbaikan program pada periode berikutnya. Dari aspek anggaran, perencanaan penarikan dana akan disusun dan dipantau secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan, kebutuhan aktual, serta waktu penyelesaian administrasi pembayaran agar realisasi anggaran lebih sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.87 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00%	Baik

Pada Triwulan III Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 70% dan telah terealisasi sebesar 70%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III, meliputi:

1. Perencanaan Program Desa Pangan Aman dengan bobot 5%
2. Koordinasi dan survei terhadap desa sasaran program dengan bobot 5%
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%;
4. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dengan bobot 25%.
5. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat dengan bobot sebesar 20%.

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan III telah terlaksana sesuai target sehingga indikator Jumlah Desa Pangan Aman memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.88 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	70	70	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Desa Pangan Aman meningkat dari 25% pada Triwulan II menjadi 70% pada Triwulan III. Realisasi kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan II ke Triwulan III merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) serta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah desa pangan aman	100	70,00	70,00	▲	Akan Tercapai

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 70,00%. Dengan demikian, capaian terhadap target tahunan mencapai 70,00% dan termasuk dalam kategori Akan Tercapai.

Penetapan target kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, yaitu sebanyak 3 desa pada Tahun 2025, 6 desa pada Tahun 2026, 6 desa pada Tahun 2027, 7 desa pada Tahun 2028, dan 7 desa pada Tahun 2029.

Pada Tahun 2025, target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 3 desa dapat direalisasikan seluruhnya dengan capaian 100%. Hasil tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya. Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029, target indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6 desa. Namun, dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran serta kemampuan pelaksanaan program, target tersebut pada awal Tahun 2026 disesuaikan menjadi 3 desa dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Selanjutnya, dilakukan penyesuaian kembali sebagai tindak lanjut kebijakan penajaman belanja pemerintah berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Keuangan terhadap target beberapa kegiatan. Kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan alokasi anggaran Rincian Output (RO) Program Desa Pangan Aman sebesar 43,07% dari pagu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pelaksanaan kegiatan dari 3 desa menjadi 2 desa.

Sehubungan dengan telah disahkannya usulan revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penajaman belanja oleh Direktorat Jenderal Anggaran serta diperbaruinya basis data RKA-K/L dan DIPA BPOM, dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dan target Rincian Output (RO) pada beberapa kegiatan. Berdasarkan hasil revisi tersebut, target indikator Jumlah Desa Pangan Aman disesuaikan dari 3 desa menjadi 2 desa. Penyesuaian target tersebut telah memperoleh persetujuan melalui mekanisme revisi DIPA dan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta pemantauan kinerja Tahun 2026.

Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 sebesar 70,00% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman masih memerlukan tindak lanjut untuk mencapai target akhir tahun. Oleh karena itu, pada Triwulan IV Tahun 2026 perlu dilakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan intervensi pada desa sasaran serta penyelesaian tahapan kegiatan yang masih berjalan agar target kinerja sesuai hasil revisi dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai 70% dari target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi sesuai target kumulatif Triwulan III dan capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan

pencapaian target sampai dengan periode pelaporan didukung oleh pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan perencanaan, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), serta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait turut mendukung pelaksanaan program, terutama dalam mendorong keterlibatan pemangku kepentingan serta meningkatkan kapasitas kader dan komunitas masyarakat dalam penerapan keamanan pangan di desa sasaran.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam penentuan dan kesiapan desa sasaran pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.90 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah memasuki tahapan intervensi kepada desa sasaran sesuai jadwal. Pada tanggal 30 Juli 2026 telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) kepada kader dari 2 (dua) desa target intervensi Tahun 2026.	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah melalui aplikasi GKPD Online (gkpdonline.pom.go.id).	September	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari pemerintah desa dan instansi terkait. Hingga akhir Juli 2026, tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga seluruh tahapan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target waktu. Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada tanggal 30 Juli 2026 (bobot capaian 25%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Juli 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.						
Agustus	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah mencapai progres sebesar 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat pelaksanaan kegiatan intervensi baru. Tahapan program masih berada pada proses tindak lanjut setelah pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada tanggal 30 Juli 2026 kepada kader dari 2 (dua) desa target intervensi Tahun 2026 di Kabupaten Bangka Tengah.	Perlu dilakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan Kader Keamanan Pangan Desa dapat melaksanakan kegiatan secara optimal serta memastikan kesiapan desa dalam mengikuti tahapan program selanjutnya.	Melakukan persiapan pelaksanaan tahapan intervensi berikutnya yaitu Bimbingan Teknis Komunitas Desa/ Kelurahan	September	Tidak	-	-
September	Sampai dengan bulan September 2026, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah mencapai progres sebesar	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas Desa/Kelurahan sebagai	Menyusun dan menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas	Oktober	Ya	SDM-04	Program Keamanan Pangan desa tidak dilanjutkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan September 2026 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Komunitas Desa/Kelurahan pada 2 (dua) lokus target intervensi Tahun 2026 di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Desa Perlang pada tanggal 23 September 2026 dan Kelurahan Arung Dalam pada tanggal 24 September 2026. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Sampai dengan bulan September 2026, tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan program.	dokumentasi pelaksanaan dan bahan evaluasi Program Desa Pangan Aman.	Desa/Kelurahan di Desa Perlang dan Kelurahan Arung Dalam, Kabupaten Bangka Tengah.				secara mandiri oleh desa yang telah diintervensi

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai 70% dari target tahunan sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100% terhadap target kumulatif Triwulan III. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Desa Pangan Aman sesuai dengan tahapan yang direncanakan, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), serta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat.

Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia di desa sasaran. Sementara itu, koordinasi dan advokasi lintas sektor mendukung keterlibatan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program. Keseluruhan kegiatan

tersebut saling mendukung dalam mendorong penerapan keamanan pangan di lingkungan desa.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.91 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Jumlah desa pangan aman	70	70	100	44.821.000	42.893.100	95,70	1,04	0,04	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator Jumlah Desa Pangan Aman mencapai realisasi output sebesar 70% sesuai dengan target kumulatif yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, realisasi sampai dengan September 2026 sebesar Rp42.893.100 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp44.821.000 atau 95,70%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp1.927.900 antara RPD dan realisasi anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi anggaran dapat dikendalikan di bawah rencana penarikan dana. Kondisi ini tidak memengaruhi pencapaian target output, karena seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan III telah dilaksanakan sesuai jadwal dan realisasi output telah mencapai 70% sesuai target kumulatif. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04, sehingga penggunaan sumber daya pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman dikategorikan efisien.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perencanaan kebutuhan biaya secara cermat sesuai dengan tahapan kegiatan dan target output yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala serta penyesuaian penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketercapaian output program. Koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Upaya tersebut diharapkan dapat

mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mendukung pencapaian target tahunan Program Desa Pangan Aman sebesar 100%.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman pada Triwulan III difokuskan pada penyelesaian tahapan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat, yang didukung oleh koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target kumulatif sebesar 70% pada Triwulan III Tahun 2026.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran pada Triwulan III disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan dan perkembangan realisasi belanja. Sampai dengan September 2026, realisasi anggaran mencapai Rp42.893.100 atau 95,70% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp44.821.000. Selisih antara RPD dan realisasi anggaran sebesar Rp1.927.900 disebabkan oleh efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pemantauan realisasi anggaran dan pemutakhiran RPD dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan aktual guna mendukung pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan III mencapai 70%, sesuai dengan target kumulatif periode tersebut, sehingga capaian kinerja terhadap target Triwulan III sebesar 100%. Pelaksanaan tahapan kegiatan sampai dengan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Komunitas Masyarakat telah mendukung pencapaian

target tersebut. Selain itu, penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 95,70% dari RPD menunjukkan bahwa realisasi belanja dapat dikendalikan di bawah rencana penarikan dana. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melanjutkan kegiatan berikutnya sekaligus mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran guna mencapai target tahunan sebesar 100%.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Perencanaan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026 difokuskan pada pelaksanaan tahapan program yang masih diperlukan untuk memenuhi target tahunan indikator Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan petunjuk teknis, jadwal, dan target yang telah ditetapkan, disertai penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala sejak dini dan memastikan pencapaian target kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran tetap terjaga.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.mand (Pengunjung Pasar).

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.92 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	Baik

Pada Triwulan III Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III, meliputi:

1. Perencanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan bobot 5%.
2. Koordinasi dan survei terhadap pasar sasaran program dengan bobot 5%.
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dengan bobot 25%
5. Kegiatan Sosialisasi Kemanan Pangan kepada Komunitas Pasar dengan bobot 20%
6. Pengawalan Pasar dengan bobot capaian 10%
7. Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi dengan bobot capaian 20%

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan III telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan sehingga indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.93 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00	100	100	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas meningkat dari 70% pada Triwulan II menjadi 100% pada Triwulan III. Realisasi

kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan II ke Triwulan III merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar, Pengawalan Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100,00	100,00	▲	Tercapai/ Melampaui

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 100,00%. Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target tahunan mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori Tercapai/Melampaui.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang direncanakan sampai dengan Triwulan III telah terlaksana sesuai target. Pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei pasar sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, Pengawalan Pasar, serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi.

Keberhasilan pencapaian target ini menjadi dasar untuk terus mendorong keberlanjutan program melalui pengawalan penerapan keamanan pangan di pasar serta penguatan komitmen komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat terus dipertahankan dan mendukung terciptanya pasar rakyat yang aman dan bermutu.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai target kumulatif yang ditetapkan sebesar 100,00%. Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya tahapan kegiatan sesuai dengan rencana, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei pasar sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar, Pengawalan Pasar, serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi.

Selain itu, koordinasi antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan instansi terkait menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tahapan kegiatan secara terencana dan dukungan para pemangku kepentingan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator pada Triwulan III Tahun 2026.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Meskipun target indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026 telah tercapai pada Triwulan III, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program dan penerapan keamanan pangan di pasar sasaran.

Upaya yang akan dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pengampu program, pengelola pasar, dan instansi terkait guna mendorong komitmen serta dukungan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Selain itu, pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi perlu terus dilakukan untuk memantau keberlanjutan penerapan keamanan pangan dan tindak lanjut hasil intervensi. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu diperkuat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program serta dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Tabel 3.95 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah memasuki tahapan pengawalan pasar sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan implementasi program pada pasar yang telah diintervensi. Pada tanggal 24 Juli 2026 telah dilaksanakan kegiatan Pengawalan Pasar di Pasar Pelataran Parkir Terminal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang bertujuan untuk memantau keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pengelola pasar serta pemerintah daerah setempat. Hingga akhir Juli 2026, tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga seluruh tahapan kegiatan masih berjalan sesuai dengan rencana. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 (bobot capaian 25%). 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 (bobot capaian 20%). 4. Pengawalan Pasar pada tanggal 24 Juli 2026 (bobot capaian 10%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Juli 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 80% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang	Perlu dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah sebagai tindak lanjut Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk memastikan keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar.	1. Melakukan koordinasi dengan pengelola Pasar Simpang Katis dan pemerintah daerah terkait sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Agustus 2026 sesuai dengan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Agustus	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.						
Agustus	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dengan capaian progres sebesar 100%. Pada tanggal 18 Agustus 2026 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Agustus 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 (bobot capaian 25%). 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 (bobot capaian 20%). 4. Pengawalan Pasar pada tanggal 24 Juli 2026 (bobot capaian 10%). 5. Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 18 Agustus 2026 (bobot capaian 20%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Agustus 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 100% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Kendala : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka	Perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar serta penguatan komitmen pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam mempertahankan praktik keamanan pangan yang telah diterapkan setelah selesainya tahapan intervensi program.	1. Menyusun laporan hasil Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam upaya mempertahankan keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	November	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Tengah berjalan dengan baik. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan kegiatan maupun penyelesaian seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.						
September	Sampai dengan bulan September 2026, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dengan capaian progres sebesar 100%. Pada bulan September 2026 tidak terdapat pelaksanaan kegiatan baru karena seluruh tahapan intervensi program telah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus 2026. Tidak terdapat kendala signifikan dalam penyelesaian seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam mendukung keberlanjutan penerapan keamanan pangan di Pasar Simpang Katis setelah selesainya tahapan intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam mendukung keberlanjutan penerapan keamanan pangan di Pasar Simpang Katis.	November	Ya	O-56	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan III Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sampai dengan Juli 2026, kegiatan telah mencapai progres sebesar 80%, yang didukung oleh pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, serta Pengawalan Pasar. Selanjutnya, pada Agustus 2026 dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sehingga seluruh tahapan kegiatan selesai dengan capaian progres sebesar 100%.

Pelaksanaan tahapan kegiatan secara berurutan, didukung koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar, menjadi faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian target indikator. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat penyelesaian kegiatan sampai dengan Agustus 2026. Dengan demikian, target indikator sebesar 100% pada Triwulan III Tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	36.173.000	36.173.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas mencapai realisasi output sebesar 100% dari target 100%, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp36.173.000 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sebesar Rp36.173.000 atau 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00, sehingga penggunaan sumber daya pada indikator ini dikategorikan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran sesuai RPD telah direalisasikan dan target output dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas juga telah dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari perencanaan dan koordinasi hingga Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perencanaan kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan tahapan kegiatan dan target output Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu,

pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan RPD dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan instansi terkait juga mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal serta membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ke depan, upaya efisiensi akan terus ditingkatkan melalui evaluasi kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan penerapan keamanan pangan di pasar sasaran.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada periode sebelumnya, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan III Tahun 2026, kegiatan difokuskan pada penyelesaian tahapan intervensi, yaitu Pengawalan Pasar pada Juli 2026 serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi pada Agustus 2026. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung penyelesaian seluruh tahapan program sehingga realisasi kinerja mencapai 100% sesuai target kumulatif Triwulan III.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp36.173.000 atau 100% dari RPD sebesar Rp36.173.000. Kesesuaian realisasi anggaran dengan RPD tersebut mendukung pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sesuai rencana. Pemantauan realisasi anggaran tetap dilakukan untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan target kinerja yang ditetapkan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai realisasi 100% pada Triwulan III Tahun 2026. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, koordinasi dan

survei pasar sasaran, advokasi lintas sektor, bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan, pengawalan pasar, hingga pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi.

Meskipun target kinerja telah tercapai, evaluasi pada September 2026 mengidentifikasi risiko O-56, yaitu kemungkinan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan program serta mendorong penerapan prinsip keamanan pangan secara konsisten setelah tahapan intervensi selesai.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Perencanaan kinerja pada periode berikutnya perlu mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program, termasuk pentingnya menjaga keberlanjutan penerapan keamanan pangan di pasar yang telah diintervensi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan instansi terkait. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan kegiatan berikutnya agar program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target tahapan kegiatan, tetapi juga mendorong keberlanjutan penerapan keamanan pangan di pasar sasaran.

SK 3 : Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu** diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**

   A. Ruang Lingkup UMKM:

   1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

      a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

      b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

   2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

      a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

      – Belum memiliki sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Tahap I; dan

      – Sudah memiliki sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Tahap I dan akan naik ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

      b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

      B. UMKM yang memenuhi standar adalah

      - UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
      - UMKM OBA (Obat Bahan Alam) yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3).

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi :

Pengumpulan Data UMK, Seleksi dan Penetapan UMK, Pelaksanaan Bimbingan Teknis CPPOB, Pelaksanaan Pendampingan UMK, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT namun harus beralih ke nomor izin edar obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up/UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;

2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);

3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan	Januari - Maret	5	Data UMK Pangan Olahan
2	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Target	Januari-Maret	10	Keputusan Kepala UPT BPOM terkait daftar UMK Pangan Olahan yang Didampingi
3	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Februari-Juni	30	Laporan Bimtek CPPOB
4	Pelaksanaan Pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) Pangan Olahan	Februari-Desember	50	Data Izin Penerapan CPPOB yang Terbit
5	Pelaporan	Februari-Desember	5	1. Laporan Progress 2. Laporan Akhir

Catatan:

Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam

tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat bahan alam	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula : Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB * + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang

memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

*UMK dinyatakan telah memperoleh IP-CPPOB yaitu UMK yang telah melakukan pengajuan IP CPPOB pada aplikasi dan minimal status pengajuan IP CPPOB sudah berada pada tahap evaluasi dokumen serta sudah memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan ke tahap penerbitan IP CPPOB

Contoh: UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = (4+6+8) / (4+6+8+10+10) x 100%

Catatan: Sebagai penyebut, jumlah target UMK Pangan Olahan,
UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029 mengacu pada target RO UMKM pada Renstra masing-masing UPT (Total Target RO UMKM 2025-2029).

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.97 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,36	91,36	107,03%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan, capaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat cara pembuatan OBA,Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 107,03% dengan realisasi sebesar 91,36 % dari target pada triwulan III yaitu 85,36 %. Sehingga capaian untuk indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.98 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65	85,36	91,36	107,03

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2026, indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan menunjukkan adanya sedikit penurunan. Pada Triwulan II, realisasi capaian sebesar 108,65% berada di atas target yang ditetapkan (68,32% dari target 62,88%). Sementara itu, pada Triwulan III terjadi penurunan kinerja dengan capaian 107,03 (91,36% dari target 85,36%), sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pada triwulan III terdapat perubahan target pendampingan yang semula 4 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM Obat Bahan Alam menjadi 5 UMKM Pangan

Olahan. Perubahan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengampu untuk pengalihan komoditi pendampingan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	91,36	91,36 ▲	**Akan Tercapai**

Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 sebesar 100 % , dapat disampaikan bahwa capaian dan realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik(CPOBA),Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Industri Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan (IP CPPOB) sebesar 91,36 dengan kategori akan tercapai.

Namun demikian, apabila dilakukan analisis perbandingan kinerja berdasarkan definisi operasional indikator, hasil evaluasi terhadap data pada Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (CPOBA), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dasar pengukuran antara realisasi kinerja yang menggambarkan hasil pendampingan UMKM pada periode berjalan dan target tahunan yang ditetapkan berdasarkan definisi operasional indikator. Oleh karena itu, analisis capaian perlu mempertimbangkan mekanisme pengukuran indikator serta kesesuaian antara realisasi dan target yang digunakan, agar penilaian kinerja dapat dilakukan secara tepat dan menggambarkan pencapaian indikator secara akuntabel.

Pada target bulanan, capaian realisasi dihitung berdasarkan progres tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan kepada UMKM selama tahun berjalan. Sementara itu, target tahunan dihitung berdasarkan persentase jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan terhadap target kumulatif pendampingan UMKM dalam periode lima tahun. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan capaian pada triwulan berjalan belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat pencapaian terhadap target tahunan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan tahapan pendampingan yang sedang dilaksanakan. Pada triwulan III juga dilakukan penyesuaian target tahunan untuk indikator ini berdasarkan penyesuaian jumlah target pendampingan yang sebelumnya telah dilakukan pada triwulan II dari 9 menjadi 5 UMKM yang dilakukan pendampingan. Penyesuaian target tahunan yang dilakukan semula 31,25 % menjadi 27,08%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 91,36 % dari target triwulan tahunan sebesar 100 % . Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya penyesuaian target pendampingan dari sebelumnya 4 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM OBA menjadi 5 UMKM Pangan Olahan sehingga terdapat penyesuaian realisasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan tahapan pendampingan yang telah diselesaikan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian indikator ini adalah:

1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi inovasi UMKM PACAK melalui berbagai kanal media sosial resmi BBPOM di Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal pemenuhan sarana produksi terhadap persyaratan IP CPPOB, dan registrasi produk sehingga dapat meningkatkan saing produk pangan olahan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan pendampingan.

Tabel 3.100 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	UMK Pangan Olahan: Sampai dengan bulan Juni telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 3 pelaku usaha pangan UMK Obat Bahan Alam: belum terdapat progress pendampingan Obat Bahan Alam	UMK Pangan Olahan: Terdapat kendala pendaftaran akun e sertifikasi yang disebabkan oleh status KSWP pelaku usaha UMK OBA: Perlu dilakukan follow up terkait kendala penanggungjawab teknis sarana	UMKM Pangan: Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan dan Follow up akun oss yang akan dilakukan pendaftaran e sertifikasi UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku usaha jika terdapat penanggung jawab teknis Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK untuk dilakukan revisi	Agustus	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
Agustus	UMK Pangan Olahan 1. Sampai dengan bulan Juli telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 3 pelaku usaha pangan 2. Terdapat kendala status KSWP pelaku usaha yang perlu dikonfirmasi untuk pendaftaran akun e- sertifikasi UMK Obat Bahan Alam Tidak terdapat progres dalam pendampingan UMK Obat Bahan Alam akibat tidak ditemukannya Tenaga Teknis yang bersedia sebagai Penanggung Jawab Sarana sehingga pelaku usaha mengundurkan diri sebagai target pendampingan	UMK Pangan Olahan 1. review dokumen yang telah disusun oleh pelaku usaha untuk selanjutnya diajukan di e-sertifikasi 2. Koordinasi dengan PIC e sertifikasi direktorat pengawasan produksi dan kantor pajak pratama terkait status KSWP pelaku usaha UMK Obat Bahan Alam Mengalihkan komoditi target pendampingan dari Obat Bahan Alam ke Pangan Olahan	UMK Pangan Olahan 1. Melakukan review kelengkapandokumen UMK yang akan yang akan mengajukan di e sertifikasi 2. Koordinasi dengan PiC e-sertifikasi direktorat pengawasan produksi dan Kantor Pajak Pratama status KSWP pelaku usaha UMK Obat Bahan Alam Mengirimkan Nota Dinas kepada kedeputian 2 terkait pengalihan komoditi obat bahan alam ke pangan olahan	September	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
September	1. Telah dilakukan penyesuaian target pendampingan menjadi 5 UMK Pangan Olahan 2. Perlu dilakukan revisi SK Target pendampingan , namun masih menunggu balasan dari PMPU untuk pengalihan komoditi 3. Sampai dengan bulan Agustus telah dilakukan pendmapingan penyusunan dokumen kepada 4 pelaku usaha pangan Telah dilakukan penerbitan IP CPPOB sebanyak 3 dari 5 target pendampingan	Melanjutkan tahpaan pendampingan kepada UMK yang menjadi target pendampingan	Menyusun perencanaan untuk fasilitasi pendampingan UMKM pangan olahan	Oktober	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Respon positif dari pelaku usaha pada Triwulan III terhadap tahapan pendampingan turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian kinerja. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dengan pelaku usaha maupun lintas sektor terkait, guna memastikan setiap tahapan pendampingan dapat dilaksanakan secara optimal dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.101 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,36	91,36	107,03	15.915.000	12.360.000	77,66	1,38	0,38	95% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau Izin Penerapan IP CPPOB Pangan Olahan adalah sebesar 0,38, yang menunjukkan kondisi efisien. Perhitungan tingkat efisiensi ini diperoleh melalui perbandingan antara persentase capaian output dengan persentase capaian input (anggaran), di mana capaian output sebesar 107,03% dan capaian input sebesar 77,66%.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumberdaya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penyesuaian

realisasi anggaran dan juga target output pada triwulan berikutnya sehingga capaian terhadap indikator ini dapat lebih efektif dan optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan III adalah dengan melakukan pengalihan target pendampingan yang semula 4 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMK Obat Bahan Alam menjadi 5 UMKM Pangan Olahan dengan melakukan permintaan pengalihan komoditi kepada Unit pengampu dan memperoleh persetujuan untuk dilakukan pengalihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat penyesuaian tahapan pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan dna penerbitan Surat Keputusan terbaru untuk target pendampingan Pangan Olahan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, telah dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan fasilitasi pendampingan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pendampingan agar berjalan secara efektif, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Capaian indikator terhadap persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I memberikan capaian yang baik. Hal ini disebabkan antara lain karena respon yang baik dari pelaku usaha dalam pelaksanaan tahapan pendampingan. Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada triwulan III, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target:

- Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan petunjuk teknis pendampingan UMKM

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pemerintah daerah untuk memperoleh rekomendasi pelaku usaha UMKM yang akan dijadikan target tambahan pendampingan pada tahun 2026.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain:

- Melanjutkan tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB pada UMK yang menjadi target.
- Mengusulkan revisi rencana penarikan dana anggaran agar kegiatan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan target output kegiatan.

SK 4 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahan, pelaksanaan inspeksi rutin dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan mencerdaskan masyarakat dalam rangkaian proses produksi, distribusi dan penggunaan produk obat dan makanan.

a. Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
   1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
   2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
   3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
   4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
b. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
   = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%
c. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut

d. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

1. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.102 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77,5	77,50	100,00%	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2026, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT menunjukkan realisasi sebesar 77,50% dari target yang ditetapkan sebesar 77,5%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100,00% dan termasuk dalam kategori "Baik", yang menunjukkan bahwa target kinerja penyidikan pada Triwulan III Tahun 2026 telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.103 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,50	150,01	77,5	77,5	100,00

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per-UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

   Tahapan Penindakan antara lain:

   a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dim'ulainya Penyidikan)

   b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

   c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

   d)Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Presentasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 77,5 dengan realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2026 sebesar 77,5. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kriteria "Baik".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	77,50	83,78	**Akan Tercapai**

Perbandingan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III dengan target 2026 menghasilkan capaian sebesar 83,78%. Hasil ini diperoleh dari realisasi kinerja Triwulan III sebesar 77,50 terhadap target 2026 sebesar 92,5. Hasil ini menunjukkan adanya progres untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2026 dengan kategori "Akan Tercapai".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Pada triwulan III tahun 2026, ada 1 (satu) realisasi perkara sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan penyidikan oleh Tim Kerja Penindakan Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan SPDP nomor SPDP/01-26/BPON-

PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026. Selanjutnya telah dilakukan tahap I yaitu penyerahan berkas perkara ke penuntut umum oleh penyidik melalui Korwas PPNS POLDA BABEL pada perkara tersebut tanggal 26 Agustus 2026.

2. Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Kep. Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dalam rangka penyelesaian pemberkasan kedepannya, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan dilakukan proses Pemberkasan yang beriringan dengan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
2. Selalu berkonsultasi dengan Korwas PPNS dan JPU peneliti berkas dalam proses tahapan penyidikan hingga penyelesaian berkas perkara, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tidak menyalahi aturan.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus pada target potensial untuk dinaikkan ke proses penyidikan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga ke pemberkasan.
5. Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan *on site* di lapangan.
6. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Nilai Indikator Kinerja ini dihasilkan melalui: 1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Diterbitkannya SPDP a.n Terlapor R dengan nomor SPDP dengan nomor SPDP/01-26/BPOM-PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 Upaya 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Ahli 2. Telah dilakukan Koordinasi dengan Jaksa Peneliti pada tanggal 22 Juli 2026 3. Telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Tersangka a.n R dengan nomor S.Tap.Tsk/01-26/BPOM-PPNS.20B/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 4. Telah dilakukan Pemeriksaan Tersangka dilanjutkan penyusunan Berkas Perkara 5. Pada buan Juli juga dilakukan Revisi POK terkait penyesuaian anggaran kegiatan penindakan berupa revisi angagran pelatihan PPNS dan penyesuaian di anggaran pemberkasan 6. Telah dilakukan revisi RAPK dengan dasar pengurangan target perkara dari 2 menjadi 1 perkara Kendala Hasil perkembangan perkara R patut diduga akan ada tambahan tersangka sesuai hasil Koordinasi dengan Jaksa Peneliti sehingga akan dilakukan Gelar Perkara naik Penyidikan dan Pemeriksaan Saksi-saksi kembali untuk Tersangka yang lain	Proses Pemberkasan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Koordinasi secara intensif dengan Jaksa Peneliti dan Korwas PPNS	Agustus	Y	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Agustus	Nilai Indikator Kinerja ini dihasilkan melalui: 1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) Nomor B-PD.03.03.20B.08.26.1178 tanggal 26 Agustus 2026 Upaya 1. Telah dilakukan koordinasi kelengkapan formil dan materiil pada tanggal 10 Agustus 2026 2. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Ahli tambahan hasil Koordinasi dengan JPU 3. Telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Tersangka a.n RT dengan nomor S.Tap.Tsk/02-26/BPOM-PPNS.20B/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 4. Telah dilakukan Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) a.n TSK R dengan nomor Surat Nomor B PD.03.03.20B.08.26.1178 tanggal 26 Agustus 2026 Kendala 1. BAP Ahli Pidana terhadap TSK baru a.n RT belum bisa dilakukan dikarenakan keterbatasan Anggaran 2. Anggaran yang tersedia di QCD akan banyak bergeser ke anggaran pemberkasan 3. RPD tidak tercapai dikarenakan belum terserapnya Anggaran Pelatihan PPNS yang direncanakan di bulan Agustus. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan terkait efisiensi SBK Dimungkinkan Capaian di TW III akan melebihi 110%	1. Koordinasi dengan Jaksa Peneliti sesuai Peraturan Perundang-undangan 2. Dilakukan Revisi Anggaran di QCD	1. Koordinasi dengan Jaksa terkait urgensi Ahli Pidana, apabila dirasa sudah cukup alat bukti dari Berkas yang kita sampaikan maka tidak diperlukan lagi BAP Ahli pidana sehingga anggaran bisa dialihkan ke kegiatan yang lain 2. Dilakukan revisi anggaran dari anggaran perjadin ke non perjadin, kemudian dalam rangka pencapaian nilai NKA dari hasil efisiensi SBK QCD maka akan dialihkan sekira 10% QCD ke AEA atau sekira Rp 12.071.000	September	Y	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
September	Nilai Indikator Kinerja ini dihasilkan melalui: 1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) Nomor B-PD.03.03.20B.08.26.1178 tanggal 26 Agustus 2026 Upaya 1. JPU mengeluarkan P-19 pada tanggal 7 September 2026 dan telah dilakukan pemenuhan sesuai petujuk JPU 2. PPNS telah mengirimkan kembali Berkas Perkara R pada tanggal 21 September 2026 3. Sesuai KUHAP JPU memiliki 14 Hari dalam penelitian Berkas Perkara setelah P-19 sehingga dimungkinkan awal Oktober keluar P-21 Sesuai KUHAP terbaru bahwa pihak yang menerbitkan P-21 adalah Kejaksaan Negeri Setempat sehingga perlu tambahan koordinasi dengan Kejari setempat	Koordinasi dengan Jaksa terkait penerbitan P-21	Koordinasi secara intensif dengan Jaksa Kejati dan Kejari	Oktober	Y	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran secara terselubung dari sarana eceran atau toko kelontong memberikan informasi penting mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

Informasi atau data potensi kerawanan kejahatan yang diperoleh melalui rekomendasi fungsi pemeriksaan, hasil profiling atau patroli siber menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan penindakan dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pengan olahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antara fungsi penindakan dan pemeriksaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Kegiatan rutin operasi intelijen dan verifikasi data patrol siber dilaksanakan secara sinergis menghasilkan data atau informasi yang dapat menjadi acuan bagi Tim Kerja Pemeriksaan maupun Tim Kerja Penindakan.

Dalam penyelesaian target perkara, fungsi penindakan aktif melakukan koordinasi dan menjalin hubungan lintas sektor dalam hal ini CJS (Criminal Justice System) atau melakukan fungsi respon kepada lintas sektor terkait dengan "INOVASI PULAU BANGKA" (Penggalangan Lintas Sektor untuk Bersinergi melawan Kejahatan Obat dan Makanan).

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77,5	77,5	100,00	102.695.612	88.059.480	85,75	1,17	0,17	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT "Efisien". Hal ini dikarenakan capaian Target IKU di angka 77,5 dengan realisasi sebesar 77,5, sehingga Persentase Capaian Output adalah 100% dengan Persentase Capaian Anggaran 85,75%. Adanya bergeseran modus Operandi kejahatan obat dan makanan menyebabkan Anggaran yang dikeluarkan lebih banyak dalam kegiatan intelijen guna mengungkap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Pulau Bangka.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi pada Triwulan III tahun 2026 yaitu dilakukannya proses kegiatan intelijen, kegiatan pengawasan pengamatan penelitian pemeriksaan dan operasi intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran disasar untuk mendapatkan informasi mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   a. Melakukan Koordinasi secara efektif dengan Jaksa Penuntut Umum terkait penerbitan P-21 pada perkara yang sedang berjalan, baik dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang.
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   a. Terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga dilakukan permohonan Revisi Anggaran DJA sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3. Nota Dinas ini berisi untuk mengusulkan perubahan target perkara dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan rincian anggaran semula Rp. 142.830.000 menjadi Rp. 120.822.000 (-Rp. 22.008.000).
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   i. Berdasarkan rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2025 dengan rekomendasi memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan intelijen yang berfokus pada target sasaran yang akan dilakukan penyidikan pada triwulan selanjutnya. Telah dilakukan beberapa kegiatan

intelijen yang menargetkan informasi yang bernilai A1 untuk target operasi penindakan.

ii. Melakukan evaluasi masalah/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun sebelumnya dan menentukan langka-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan

iii. Secara terus menerus melakukan Koordinasi dan Kerja sama dengan *Criminal Justice System* untuk mendukung capaian target 2026.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

i. Melaksanakan proses pemberkasan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terkhusus terkait penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SK 5 : Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.107 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 50 dengan realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2026 sebesar 50. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori "Baik".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.108 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00

Realisasi kinerja Triwulan II dan Triwulan II berada pada nilai yang sama sebesar 50 yang dengan target 50, sehingga capaiannya sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja Triwulan III sebesar 50 yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 94 menghasilkan persentase capaian sebesar 53,19% dengan kategori "Perlu Upaya Keras". Capaian ini masih dinilai on the track dikarenakan s.d TW III Kinerja yang dinilai adalah Analisis Penelusuran Siber yang terdiri Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (bobot 50%) dimana Pelaporan BBPOM di Pangkal Pinang selalu tepat waktu. Sementara target lainnya yaitu Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (bobot 25%) dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (bobot 25%) dinilai di B12.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Melakukan Kegiatan Patroli Siber secara komprehensif dan dilaporkan secara tepat waktu.
2. Walaupun anggaran dilakukan pemblokiran namun masih bisa melaporkan Laporan Profiling Siber dengan tidak melakukan Kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana hanya melalui akun yang bersangkutan ataupun memanfaatkan Anggaran QCD untuk melakukan kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana target profiling.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Memperkuat Komunikasi antar fungsi seperti Infokom, pemeriksaan, dan Pengujian guna menindaklanjuti Rekomendasi Tindak Lanjut yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal
2. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM.
3. Akan dilakukan kegiatan pengumpulan data bahan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.

4. Koordinasi dengan Tim Kerja Pemeriksaan dan melakukan perencanaan kedepannya terkait pengumpulan Peserta dari Asosiasi atau yang lainnya sehingga tim kerja penindakan bisa ikut serta untuk pemaparan kegiatan penggalangan.

Tabel 3.110 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 10 (sepuluh) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 23 Juli 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Juni, sebanyak 144 link dari 145 link telah ditakedown (99,31%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 5 (lima) data dengan 7 data kerawanan	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital secara tepat waktu	Agustus	Y	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kendala : Tidak ada kendala dalam pemenuhan IKU ini						
Agustus	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 9 (sembilan) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 20 Agustus 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Juli, sebanyak 151 link dari 155 link telah ditakedown (97,42%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Agustus telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Penambahan Rekomendasi yang diberikan oleh Dit CT pada bulan Juli terkait fungsi Kerawanan dan penggalangan sebanyak 4 Rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya. (c) Sehingga s.d Agustus Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah sebanyak 7 (tujuh) Rekomendasi 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data dengan 15 data kerawanan Kendala : Anggaran AEA untuk profiling Siber hanya tersisa 1 kali perjalanan dinas dalam kota sehingga akan dimungkinkan melaporkan NIHIL	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform	Laporan Profiing Siber memanfaatkan Open Source Intelligence Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas	September	Y	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Dimungkinkan Capaian di TW III akan tercapai 100%						
September	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan September secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 18 (delapan belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 23 September 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Agustus, sebanyak 164 link dari 162 link telah ditakedown (98,78%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) s.d Agustus terdapat 9 rekomendasi dari Dit CT yang harus ditindaklanjuti oleh UPT (b) Terhadap 9 Rekomendasi tersebut telah dilakukan Tindak Lanjut terhadap 6 Rekomendasi Kendala : - Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian Indikator Kinerja ini	Lakukan update data dukung TL Rekomendasi	Konsolidasi dengan fungsi pemeriksaan dan infokom dalam pemenuhan TL Rekomendasi khususnya dalam hal Pengawasan dan KIE	November	Y	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan. Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam

melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi utuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.111 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	4.482.000	4.482.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada Triwulan III dinilai Tidak Efisien dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,97 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,03. Kondisi tidak efisien ini secara administratif disebabkan oleh realisasi anggaran yang sedikit melebihi target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III, di mana realisasi anggaran mencapai 103,03% atau sebesar Rp4.482.000 dari rencana Rp4.350.000. Meskipun demikian, target kinerja berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi output sebesar 100% (50 dari target 50). Deviasi anggaran tersebut terjadi karena adanya kebutuhan operasional dalam proses penyelesaian kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan RPD. Akibatnya, meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, realisasi belanja yang sedikit melampaui rencana menyebabkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya masuk dalam kategori Tidak Efisien berdasarkan metode perhitungan Indeks Efisiensi.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Adanya penurunan anggaran dari tahun sebelumnya 2025 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2026 dengan jumlah target yang sama.

Sehingga diperlukan adanya penyesuaian anggaran dan kegiatan di dalam Indikator Kinerja ini.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga ada penyesuaian berupa dalam kegiatan pembuatan laporan Penjejakan Digital (Profiling Siber). Tim kerja kegiatan penindakan melaksanakan penjejakan hanya secara siber dengan memanfaatkan informasi yang didapatkan dari Open Source dengan malaksanakan Open Source Intelligence (OSINT) tanpa adanya kegiatan verifikasi lapangan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada tahun 2026 dilakukan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut terhadap Hasil Identifikasi Kementerian Keuangan pada Lampiran Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melaksanakan monitoring evaluasi secara periodik untuk memastikan realisasi tercapai sesuai dengan target.
- Dalam upaya bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor dilaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Bangka Belitung.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Inovasi PULAU BANGKA dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor seperti Korwas PPNS, BNN, ASPERINDO dan lintas sektor lainnya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Dibutuhkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.

SK 6 : Layanan Publik UPT yang prima

Capaian Sasaran Kegiatan **Layanan Publik Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang Prima** diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berikut:

1. **Indeks Pelayanan Publik**

   Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

   a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
   b. Profesionalitas SDM (25%);
   c. Sarana Prasarana (18%);
   d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
   e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
   f. Inovasi (12%).

   Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

   a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
   b. Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026.

Tabel 3.112 Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		

Merupakan Target Tahunan dan Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik diberikan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Publik (Tim UPP) BPOM setelah Desk Penilaian Pelayanan Publik pada tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.113 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-

Indikator Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan II maupun Triwulan III Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur. Pengukuran capaian indikator akan dilakukan pada Laporan Kinerja Tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.114 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 sebesar 4,85. Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Pangkal Pinang untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM di Pangkal Pinang, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM di Pangkal Pinang misalnya timeline untuk pengujian sampel pihak ketiga Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM

pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BBPOM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sebagai berikut :

- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pelatihan Pelayanan Publik.
- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Tabel 3.115 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator dengan target tahunan. Sampai dengan bulan Juli 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.03.04.22.07.26.1317 tanggal 16 Juli 2026 terkait perubahan lingkungan strategis, pelaksanaan PEKPPP, serta pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.	Melakukan persiapan dan inventarisasi data dukung penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan sesuai aspek dan indikator penilaian.	1. Melakukan persiapan pelaksanaan Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan melalui inventarisasi data dukung. 2. Melakukan monitoring terhadap proses integrasi dan pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 melalui aplikasi Evortala.	Agustus	Tidak	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Tindak lanjut pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 telah dilakukan melalui penambahan responden Formulir F03 sebanyak 5 orang sesuai ketentuan PEKPPP Nasional. Selain itu, telah dilaksanakan rapat evaluasi internal terkait penetapan standar pelayanan publik dan penetapan maklumat pelayanan sebagai tindak lanjut perubahan pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Terkait Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah memperoleh informasi dan ketentuan pelaksanaan melalui Nota Dinas tersebut. Pelaksanaan pendataan direncanakan pada periode 22 Juli s.d. 30 September 2026 melalui aplikasi Evortala Modul Pelayanan Inklusif, sehingga pada bulan Juli masih dalam tahap persiapan pelaksanaan Kendala : Belum dilakukan penginputan Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada aplikasi Evortala karena masih dalam tahap persiapan dan pemenuhan data dukung sesuai dengan aspek dan indikator yang telah ditetapkan.						
Agustus	Pada bulan Agustus 2026 telah diperoleh hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,89 dengan capaian 101,04% terhadap target tahunan yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada aspek yang masih	Pada bulan Agustus 2026 telah diperoleh hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,89 dengan capaian 101,04% terhadap target tahunan yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	September	Tidak	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	memiliki ruang untuk ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian IPP.	pelayanan publik, khususnya pada aspek yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian IPP.					
September	Pada bulan Agustus 2026 telah diperoleh hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,89 dengan capaian 101,04% terhadap target tahunan yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada aspek yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian IPP.	Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Oktober	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM di Pangkal Pinang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Adapun terdapat beberapa Inovasi yaitu :

1. Silasmi-24 (Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan Setiap Hari Melalui Online 24 Jam)
2. Telah terdapat tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium melalui SIPT
3. Lada Bangka 48 (Layanan Handal Analisis Barang Bukti Narkotika 48 Jam)
4. UMKM Pacak untuk membantu mempermudah UMKM mendapatkan Izin Edar

5. Terasi Bangka (Literasi Asik Bareng Kami) membantu masyarakat dalam memperoleh materi/informasi terkait Obat dan Makanan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.116 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	5.140.000	3.831.000	74,53	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Merupakan target tahunan sehingga pada Triwulan III belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya. Sampai dengan Triwulan III, realisasi anggaran sebesar Rp3.831.000 atau 74,53% dari target Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp5.140.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan sertifikasi, yang dijadwalkan pada periode berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran antara lain:

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran apabila diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
- Melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran secara berkala agar penggunaan anggaran tetap sesuai rencana dan mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II dan Laporan Kinerja Tahun 2025, Balai Besar POM di Pangkal Pinang terus melakukan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.

- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk SP4N-LAPOR! dan kanal pengaduan internal.
- Memastikan sarana dan prasarana pelayanan publik tetap dalam kondisi baik, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan reward dan punishment bagi petugas pelayanan publik sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran pada Triwulan III difokuskan pada kegiatan sertifikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi akan direalisasikan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik serta didukung oleh pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, pemutakhiran informasi pelayanan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada aspek yang masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan PEKPPP.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pelaksanaan Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, setelah penandatanganan Berita Acara Hasil PEKPPP dan diterimanya hasil evaluasi resmi, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang diberikan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2027. Perbaikan akan difokuskan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan, termasuk pemenuhan standar pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh pengguna layanan.

SK 7 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian Sasaran Kegiatan **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal** diukur dengan 4 (empat) indikator berikut:

1. **Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**

   Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 119 tahun 2026 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang akan melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM menerangkan hal-hal berikut :

   1) Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
   2) Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
   3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit:

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot komponen penilaian hasil

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel : 22,5%
   a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): 17,5%
   b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya: 5%
2. Pelayanan Publik yang Prima : 17,5%
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 17,5%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.117 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		

Nilai Pembangunan ZI merupakan target tahunan, kinerjanya diukur pada triwulan IV berdasarkan hasil penilaian oleh inspektorat, sehingga belum dapat dihitung realisasi maupun capaian pada TW III.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.118 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Nilai Pembangunan ZI merupakan indikator kinerja dengan target tahunan, kinerjanya diukur pada triwulan IV, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan target, realisasi dan capaian triwulan III dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,60	-	-	

Pada Triwulan III dilakukan revisi target Nilai Pembagunan ZI UPT, dari semula sebesar 90,35 menjadi 91,60. Hal ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Inspektorat Utama Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan POM tahun 2026, dimana terdapat perubahan ketentuan penilaian komponen hasil "Capaian kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya". Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan nilai Pembangunan ZI yang diperoleh pada tahun 2025 sebagai baseline dan menyesuaikan nilai capaian kinerja lebih baik sesuai ketentuan terbaru, maka ditetapkan target Nilai Pembangunan ZI tahun 2026 menjadi sebesar 91,60.

Realisasi kinerja untuk indikator ini diukur pada triwulan IV, sehingga perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahun 2026 belum dilakukan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Merupakan indikator kinerja dengan target tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III ini belum dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian indikator kinerja ini. Upaya untuk mendukung pencapaian target terus dilakukan sampai dengan triwulan III ini secara konsisten.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Melaksanakan rencana kerja yang telah disusun secara konsisten untuk mendukung penerapan pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.
- Melakukan evaluasi atas hasil pembangunan Zona Integritas yang telah diperoleh serta menyusun rencana tindak lanjut atau langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

- Melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pembangunan ZI yang telah disusun secara konsisten.
- Melakukan evaluasi hasil survei BerAKHLAK, menyusun rencana tindak lanjut serta melaksanakan tindak lanjutnya sesuai rencana yang telah disusun.
- Melaksanakan kegiatan/inovasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat
- Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
- Meningkatkan publikasi kinerja kepada masyarakat.

Tabel 3.120 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Realisasi Kegiatan : Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Juli diantaranya yaitu : 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan perencanaan 2. Melakukan kegiatan sharing session Pembangunan ZI menuju WBBM dengan Balai Besar POM di Aceh 3. Melakukan TL Pemenuhan dokumen data dukung hasil monitoring dan evaluasi PPID 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pegawai yang di rotasi per Januari 2026 5. Melakukan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP melalui pelatihan di ideas 6. Pelaksanaan internalisasi (Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Whistleblowing System, Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan) melalui konten di media sosial Kendala : 1. Berdasarkan nota dinas inspektur utama perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBMN Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang,total nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang sebesar 89,06 (**di bawah target tahun 2026 yaitu 90,40**) 2. Hasil survei BerAKHLAK	1. Melakukan evaluasi terkait hasil nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang untuk langkah perbaikan kedepannya 2. Melakukan evaluasi atas hasil survei BerAKHLAK dalam upaya peningkatan implementasi BerAKHLAK di BBPOM Pangkal Pinang 3. Melakukan reviu terhadap rencana kerja pembangunan ZI yang telah disusun sehingga dapat lebih efektif dan efisien	1. Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi pada hasil evaluasi atau nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang 2. Melakukan evaluasi hasil survei BerAKHLAK dan menyusun rencana tindak lanjut 3. Mereviu, menyusun dan menetapkan revisi rencana kerja pembangunan ZI tahun 2026	September	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	BBPOM di Pangkal Pinang terdapat 3 parameter yang mendapatkan **nilai tidak sehat** yaitu Harmonis, adaptif dan kolaboratif 3. Dari hasil rapat monitoring dan evaluasi renja sd juni 2026, dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian atas renja yang disusun pada awal tahun 2026.						
Agustus	Realisasi Kegiatan : Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Agustus diantaranya yaitu : 1. Rapat pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan ZI tahun 2026 2. Pelaksanaan inovasi pulau ketawai (pemberian penghargaan Pegawai Panutan) 3. Pelaksanaan self assesment AKIP dan desk dengan inspektorat 4. Pemberian penghargaan petugas layanan publik 5. Pelaksanaan kegiatan sesuai renja masing-masing area perubahan 6. Melaksanakan reviu dan penyusunan Revisi Renja Pembangunan ZI Tahun 2026 Kendala : 1. Hasil survei BerAKHLAK BBPOM di Pangkal Pinang terdapat 3 parameter yang mendapatkan **nilai tidak sehat** yaitu Harmonis, adaptif dan kolaboratif 2. Inovasi unggulan yang dimiliki oleh BBPOM di Pangkal Pinang belum mampu menunjukkan dampak inovasi bagi masyarakat	1. Melakukan evaluasi atas hasil survei BerAKHLAK dalam upaya peningkatan implementasi BerAKHLAK di BBPOM Pangkal Pinang 2. Lakukan Penguatan pelaksanaan inovasi Tribakti Obat dan Makanan dengan mengangkat terkait terasi Toboali (buat perencanaan mulai dari pembentukan tim efektif pelaksanaan inovasi, rencana tahapan kegiatan, serta dampak yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi)	1. Melakukan evaluasi hasil survei BerAKHLAK dan menyusun rencana tindak lanjut 2. Membentuk tim pelaksana, membuat perencanaan dan pelaksanaan inovasi Tribakti Obat dan Makanan terkait Terasi Toboali aman	September	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait Reformasi Birokrasi, pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM
September	Realisasi Kegiatan : Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan September diantaranya yaitu : 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai renja masing-masing area perubahan 2. Pelatihan Publik Speaking melalui kegiatan SAPA Bang Robee dengan mengundang narasumber dari BBPOM Denpasar. 3. Pelaksanaan inovasi Tri	Pastikan seluruh rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Pembangunan ZI tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya dilaksanakan dengan baik	Melaksanakan rencana tindak lanjut hasil evalusi pembangunan ZI tahun 2026 sesuai timeline yang telah disusun dan menuangkan pada lembar monitoring dan evaluasinya yang dilengkapi dengan bukti dukung pelaksanaan.	Oktober	Ya	O-34	Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Bakti Obat dan Makanan "Terasi Toboali Aman Bahan Berbahaya" : Penyesuaian Perencanaan inovasi dan pelaksanaan kegiatan KIE keamanan pangan dan CPPOB kepada 50 pelaku usaha terasi di kecamatan Toboali 4. menyusun rencana tindak lanjut hasil survei BerAKHLAK Tahun 2026 5. Menyusun pemetaan dampak program kerja AoC dalam mendukung peningkatan hasil survei berakhlak tahun 2027 6. Melakukan penyesuaian format untuk penyajian tindak lanjut monev Renja sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Pembangunan ZI tahun 2026						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan rencana kerja secara konsisten oleh Tim ZI maupun tim AoC BBPOM di Pangkal Pinang. Diperlukan komitmen dari semua pihak agar pelaksanaan rencana kerja tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Semua pelaksanaan didokumentasikan secara tertib agar lebih mudah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pada Tahun 2026 terdapat 7 program kerja Tim Agen Perubahan dalam upaya internalisasi dan meningkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas dan budaya kerja BerAKHLAK yaitu CFD (Chill and Fun at Work Day), BESTIE (BerAKHLAK Engagemet Strategy For Trust, Integrity and Excellence), Besame Digital (BErkas SAmpai, MEdia Elektronik DIGITAL), Ngopi Suat (Ngobrol Santai Ulas Aspirasi Terkini), Gerasak (Gerakan Sadar Risiko), Belinyu (Belajar Integritas Yuk), Serumpun SeBaLaI (Serentak Semangat Bersama Lahirkan Inovasi). Selain proker AoC, terdapat program/inovasi yang dilaksanakan di masing-masing area perubahan yang secara konsisten tetap dilaksanakan.

Seluruh program/inovasi ini diharapkan mampu untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.121 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	570.494.681	580.004.120	101,67	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Belum dapat disimpulkan karena nilai output merupakan target tahunan,sehingga sampai saat ini belum ada realisasi maupun capaian terhadap output.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu optimalisasi terhadap anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan dan program yang disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Pemetaan anggaran yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini diantarannya pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pengadaan alat pengolah data, pemeliharaan gedung dan peralatan, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas, dimana sampai dengan TW III telah mencapai serapan anggaran sebesar 101,67% dari RPD yang telah ditetapkan di TW III. Dengan dukungan anggaran tersebut diharapkan rencana kerja pembangunan Zi dapat berjalan dengan baik.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim tahun 2026 periode sebelumnya telah dilakukan pemanfaatan informasi sebagai berikut:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian strategi terhadap pencapaian target yaitu pemilihan program AOC yang lebih spesifik dan berdampak baik internal maupun eksternal.

Pada triwulan III, Telah dilakukan pemetaan dampak proker AoC secara spesifik dan cara mengukurnya. Telah dilakukan pula identifikasi risiko terhadap program

kerja/inovasi yang baru. Selain itu telah dilakukan pula penyesuaian SOP/Surat Keputusan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Anggaran yang telah tersedia juga dialokasikan secara bijaksana agar dapat menunjang program/kegiatan. Misalnya untuk perbaikan sarana/prasarana kantor dan peningkatan kompetensi petugas layanan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Tindak lanjut yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III dari hasil evaluasi/rekomendasi sebelumnya diantaranya :

- pelaksanaan monev renja yang dilengkapi dengan penjelasan kendala dan tindak lanjutnya.
- Melakukan monev terhadap seluruh aplikasi yang digunakan (pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengukuran kinerja, operasional SDM dan Layanan)
- Melakukan reviu dan perbaikan standar layanan dengan memanfaatkan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
- Melakukan pemetaan/analisis dampak yang diharapkan dari penerapan inovasi di seluruh area perubahan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada periode selanjutnya perlu dilakukan tindak lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Zi dan hasil nilai survei berakhlak. Serta perlu penyesuain rencana untuk penguatan inovasi Tri Bakti Obat dan Makanan, sehingga berdampak lansung pada masyarakat.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Bobot 4 (empat) komponen penilaian AKIP, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.122 Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan IV Tahun 2026 sehingga tidak ada capaian pada triwulan III.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.123 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan II dan III tidak bisa dibandingkan karena penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.124 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	82,15	-	-	

Pada Triwulan III, terdapat perubahan komponen penilaian AKIP (capaian kinerja tidak menjadi komponen penilaian) dan bobot penilaian Nilai AKIP sehingga dilakukan revisi target Nilai AKIP BBPOM di Pangkal Pinang. Setelah dilakukan konversi dari nilai AKIP Tahun 2025 dengan menggunakan perhitungan revisi pembobotan, diperoleh target Tahun 2026 menjadi 82,15 (target semula sebesar 80,1). Indikator Nilai AKIP merupakan indikator tahunan sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi triwulan dengan target tahunannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pada Triwulan III. Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan/penurunan kinerja diantaranya :

1. Rancangan Renstra belum memuat matriks pemetaan kebijakan dan strategi.
2. Hasil pengukuran data capaian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan data sumber dan/atau kertas kerja perhitungan realisasi/capaian kinerja seperti pada indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terdapat perubahan/kesalahan data pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan namun belum disertai dokumentasi kertas kerja sebelum dan setelah perubahan serta informasi data yang berubah dan justifikasinya.
4. Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun

justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya.

5. Hasil evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja. Evaluasi kinerja belum berdampak pada capaian kinerja, serta belum terdapat upaya perbaikan maupun penjelasan dalam proses monitoring kinerja seperti pada indikator yang targetnya belum tercapai, namun belum terdapat upaya nyata yang akan dilakukan (rencana aksi) untuk mencapai kinerja.
6. Pembahasan hasil evaluasi internal yang tertuang pada notulen rapat belum menginformasikan arahan/keputusan yang jelas dari pimpinan terutama terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110%.
7. Capaian output tahun 2024 dengan capaian tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 35%.
8. Indikator kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 11,76% dan Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 57,14%.

Oleh karena itu, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III 2026 antara lain:

1. Penetapan tim SAKIP tahun 2025 (penunjukkan ketua tim kerja, tim monitoring dan evaluasi, tim laporan kinerja dan tim penyusun rencana strategis).
2. Menetapkan Rencana Strategi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029.
3. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran tahun 2026.
4. Menyampaikan surat usulan terkait komponen penilaian SAKIP ke Inspektorat Utama.
5. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disertai dengan kertas kerja penetapan target.
6. Menyusun MPH dan SKP Tahun 2026.
7. Mempublikasikan dokumen perencanaan (Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2026, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dan Rencana

Aksi Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2026) dan dokumen pelaporan kinerja (Laporan kinerja tahun 2025 dan Laporan kinerja interim Triwulan I-II tahun 2026) di esr.menpan, subsite BBPOM Pangkal Pinang dan website BPOM.

8. Membuat Sertifikat dan Memo Teguran sebagai pemberian reward punishment atas capaian kinerja Tahun 2025 dan Triwulan I-II Tahun 2026
9. Publikasi capaian kinerja Tahun 2025 dan Triwulan I-II Tahun 2026 melalui Instagram dan whatsapp group Balai.
10. Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Triwulan 4 tahun 2025, SKP tahunan 2025 dan SKP Triwulan I-II 2026.
11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I-II Tahun 2026 secara tepat waktu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP.
12. Melaporkan data monev bulan Desember 2025 - September 2026 pada aplikasi Simetris E-Performance dan e-monev Bappenas.
13. Melaksanakan Rapat Evaluasi kinerja Desember 2025 - September 2026.
14. Menyusun dan menyampaikan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I-II Tahun 2026 secara tepat waktu.
15. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2027 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2026 dengan mengacu pada target Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2026.
16. Melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir dampak penyesuaian anggaran dan target RO pada DIPA 2026 sekaligus menyesuaikan pergantian pimpinan (ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026)
17. Melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dan Ongoing Tahun 2026 sebagai tahap awal sebelum pelaksanaan desk evaluasi melalui aplikasi SAPA APIP pada tanggal 7 Agustus 2026.
18. Telah dilakukan desk SAKIP oleh Inspektorat Utama pada tanggal 31 Agustus 2026.
19. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RKAKL 2027 (20-21 Agustus 2026).

20. Melakukan revisi Laporan Kinerja tahun 2025 sesuai dengan hasil reviu dari Biro Perencanaan dan Keuangan dan menyampaikan hasil perbaikan pada link yang disediakan.

Pada bulan April 2026 ditemukan adanya kesalahan rumus pada RHPK yang berakibat terjadinya perbedaan data capaian kinerja sampai dengan Maret 2026 dengan yang telah dirapatkan pada periode sebelumnya. Namun hal ini telah dilakukan penyesuaian baik pada data monitoring dan evaluasi pada aplikasi Simetris E-Performance maupun pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelaksanaan penyelengaraan SAKIP perlu terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM. Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mencapai target nilai AKIP di akhir tahun 2026:

1. Secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025.
2. Melakukan pengumpulan data kinerja setiap bulannya dan melaporkan pada aplikasi dan link yang tersedia secara tepat waktu.
3. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan secara konsisten untuk mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap bulannya.
4. Menyusun laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan dengan mengacu pada pedoman SAKIP, serta melaporkan pada link yang tersedia secara tepat waktu.
5. Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola AKIP secara berkala.
6. Memastikan akurasi data kinerja yang dilaporkan setiap bulannya melalui verifikasi data oleh ketua tim kerja dan ketua tim monev.
7. Melakukan pengumpulan sumber data (raw data) kinerja satu pintu pada MADU PELAWAN.
8. Melakukan monitoring kertas kerja pencapaian kinerja lebih baik dari periode sebelumnya.

Tabel 3.125 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan pengelolaan SAKIP diantaranya : 1. Penyampaian Laporan Monev di E-Performance 2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal TW II Tahun 2026 3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2026 4. Pelaporan Monev melalui E-BAPPENAS 5. Rapat Evaluasi Kinerja Interim TW II Tahun 2026 Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	1. Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja 2. Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada Perencanaan Kinerja dengan adanya Penyesuaian Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Lakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Juli sebelum dilaporkan 2. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman	Agustus	Ya	SDM-06 SDM-14	1. Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan
Agustus	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan pengelolaan SAKIP diantaranya : 1. Penyampaian Laporan Monev di E-Performance 2. Pelaporan Monev melalui E-BAPPENAS 3. Rapat Evaluasi Bulan Juli Tahun 2026 4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self Assesment) Evaluasi SAKIP (7 Agustus 2026) 5. Desk Evaluasi SAKIP (31 Agustus 2026) 6. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RKAKL 2027 (20-21 Agustus 2026) Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam	1. Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja. 2. Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada Perencanaan Kinerja dengan adanya Penyesuaian Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Lakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Agustus sebelum dilaporkan **(16 tabel menjadi 20 tabel)** 2. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. **PK dan RAPK sudah disetujui dan ditetapkan per 31 Juli 2026** 3. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman. **Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program**	September	Ya	SDM-06 SDM-14	1. Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM	**dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM.** Evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai **SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM**				
September	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan September telah dilakukan kegiatan pengelolaan SAKIP diantaranya : 1. Penyampaian Laporan Monev di E-Performance 2. Pelaporan Monev melalui E-BAPPENAS 3. Rapat Evaluasi Bulan Agustus Tahun 2026 4. Desk Evaluasi SAKIP 5. Menindaklanjuti hasil Desk Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat (1 September 2026) Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	1. Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja. 2. Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada Perencanaan Kinerja dengan adanya Penyesuaian Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Lakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Agustus sebelum dilaporkan **(16 tabel menjadi 20 tabel)** 2. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. PK dan RAPK sudah disetujui dan ditetapkan per 31 Juli 2026 3. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman. Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM	Oktober	Ya	SDM-06 SDM-14	1. Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Pemanfaatan website Madu Pelawan untuk pengumpulan dan monitoring data kinerja BBPOM di Pangkal Pinang (madupelawan.bpompp.info)
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi melalui monev online (aplikasi simetris e-performance, e-monev bappenas dan sakti kemenkeu)
3. Program peningkatan pemahaman personil SAKIP dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang
4. Program Sharing Implementasi SAKIP dengan mengundang BBPOM di Mataram sebagai narasumber

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.126 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	105.983.192	119.015.503	112,30	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, target anggaran rencana penarikan dana (target anggaran) sampai dengan Triwulan III yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 105.983.192. Realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 119.015.503. Namun indikator Nilai AKIP merupakan indikator tahunan sehingga target dan realisasinya baru ada pada akhir tahun. Maka dari itu, belum bisa dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian nilai AKIP BBPOM di Pangkal Pinang selama setahun pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 yaitu sebesar Rp 156.999.000. Pada Bulan Mei 2026 dilakukan revisi anggaran sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini menjadi Rp 157.270.000. Kemudian dilakukan revisi pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 pada Bulan Juli

sehingga anggarannya menjadi Rp 158.719.000. Selanjutnya dilakukan beberapa kali revisi anggaran sehingga pada Bulan September total anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini menjadi Rp 157.219.000.

Anggaran ini akan digunakan untuk operasional pelaporan, perjalanan koordinasi/konsultasi pimpinan, peningkatan kompetensi petugas. Sedangkan beberapa kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang tidak menggunakan anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyusun rencana tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator dan capaian output setiap bulannya.
- Melakukan pengawalan dalam implementasi AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk mencapai target nilai AKIP tahun 2025.
- Melakukan penyesuaian anggaran yang dipetakan (jika diperlukan) untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I-II tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Melakukan penyesuaian format laporan evaluasi internal dan monitoring evaluasi bulanan dengan melakukan identifikasi poin-poin yang ada pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025.
- Menyusun kertas kerja penetapan target Renstra maupun Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan dengan manual iku yang terbaru.

- Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan realisasi tahun 2025.
- Mengidentifikasi kesesuaian nomenklatur Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan antar dokumen perencanaan.
- Melakukan penyesuaian pada laporan kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 dan pedoman SAKIP 2026.
- Mengajukan usulan perubahan target output dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
- Melakukan revisi target output bulanan dan rencana penarikan dana (halaman III DIPA) setiap triwulannya.
- Melakukan penyesuaian pada notulen dan laporan evaluasi internal sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan mapping anggaran yang menunjang pencapaian target indikator kinerja nilai AKIP
   - Melaksanakan beberapa kegiatan secara daring karena pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja nilai AKIP terbatas
   - Melakukan penyesuaian mapping anggaran karena adanya revisi anggaran
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Dari laporan laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I-II Tahun 2026 juga diperoleh informasi terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat untuk meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Pangkal Pinang. Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut antara lain :
   - Melakukan revisi SK Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang.
   - Membuat matriks kesesuaian Renstra BBPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM.
   - Mengadakan sharing Pengelolaan AKIP dengan BBPOM di Mataram.
   - Mengirim ke Biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin.

- Melakukan evaluasi pada rapat evaluasi internal terkait IKU yang tidak dapat mencapai target (capaian < 100%) atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% yang dituangkan pada notulen rapat evaluasi dan laporan evaluasi internal.
- Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive dan melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data.
- Membuat kolom verifikasi data kinerja untuk ketua tim kerja dan ketua tim monev.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk triwulan berikutnya antara lain :

- Melakukan penyesuaian kertas kerja penetapan target kinerja sesuai dengan target dan manual iku terbaru.
- Melakukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026) dengan menyesuaikan pergeseran/pengurangan anggaran dan revisi target rincian output (RO) tahun 2026.
- Melakukan penyesuaian dokumen perjanjian kinerja tahun 2026 karena adanya pergantian Kepala Balai.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Berdasarkan KMK No. 196 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran, nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%);
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 5%) dan Efisiensi SBK (bobot 10%), dan Efisiensi Non SBK (bobot 10%);
3. Bonus/Reward RO Prioritas Nasional dan Kebermanfaatan.

Cara Perhitungan dan Formula:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

No	Kategori	NKA
1	Sangat Baik	NKA > 90
2	Baik	90 ≥ NKA > 80
3	Cukup	80 ≥ NKA > 60
4	Kurang	60 ≥ NKA > 50
5	Sangat Kurang	NKA ≤ 50

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.127 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan pada triwulan III tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.128 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan antara triwulan II dan triwulan III tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.129 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-		

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 sebesar 5,00. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan III belum ada karena penilaian Kinerja Anggaran didapat pada Triwulan IV tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai kinerja anggaran baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja sampai dengan Triwulan III. Namun berdasarkan evaluasi atas realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja pada Tahun 2026, diantaranya:

1. Belanja kontraktual : Melakukan Kontrak Pra-DIPA dan percepatan pelaksanaan kontrak utamanya pada triwulan I.
2. Penyerapan anggaran : Melakukan perencanaan dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kemenkeu setiap triwulan.

3. Nilai efisiensi pada parameter EKA : melakukan pengawalan efisiensi penggunaan anggaran SBKK dan SBKU.
4. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan anggaran kegiatan yang di prioritaskan dilaksanakan triwulan III
5. Melakukan penyelesaian tagihan dibawah tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada Triwulan III tahun 2026 terdapat satu (1) komponen penilaian IKPA yang tidak mendapatkan nilai 100 yaitu pada komponen Penyerapan Anggaran dengan nilai 93,07 sehingga nilai total IKPA sampai dengan bulan September sebesar 98,61. Penyebab tidak tercapainya komponen penyerapan anggaran dikarenakan terdapat satu (1) jenis belanja yang tidak mencapai target penyerapan untuk Triwulan II yaitu pada Belanja Barang dan nilai Penyerapan Anggaran Triwulan I pada belanja barang dan belanja modal yang juga tidak mencapai 100 menjadi akumulasi pada penilaian Penyerapan Anggaran untuk Triwulan III. Hal ini disebabkan kegiatan belum bisa direncanakan secara optimal karena adanya rencana penyesuaian target dari unit pengampu sehubungan dengan telah dilakukannya pemotongan anggaran DIPA 2026 pada bulan Desember 2025 lalu. Hal ini juga berpengaruh terhadap rencana pengadaan diantaranya pengadaan reagen yang masih menunggu jumlah target sampel final yang berpengaruh pada perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis reagennya.

Untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026, sampai dengan Triwulan III terdapat beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

1. Penetapan Tim Pengelola Keuangan tahun 2026
2. Melakukan pengajuan UP tahun 2026 dan melaksanakan revolving UP tepat waktu
3. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran
4. Melaksanakan revisi POK untuk penyesuaian kegiatan
5. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026
6. Melakukan penyusunan RPD/Revisi Halaman III DIPA
7. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta pencairan tagihan kontraktual dan non kontraktual sesuai ketentuan
8. Mengikuti Revisi Kewenangan DJA untuk penyesuaian target output dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada Desember 2025 untuk DIPA 2026

9. Mengikuti Revisi Kewenangan DJA untuk pembukaan blokir PNBP

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya untuk pencapaian target kinerja kedepannya :

1. Melakukan revisi Hal III DIPA triwulan IV dengan melakukan penyesuaian dengan realisasi sd triwulan III
2. Mempertahankan pelaksanaan Revisi DIPA yang masuk ke jenis revisi perhitungan IKPA hanya sebanyak 2 kali setiap semester.
3. Pemenuhan target serapan anggaran yang telah ditetapkan kemenkeu setiap triwulannya.
4. Penyelesaian tagihan belanja tepat waktu
5. Pertanggungjawaban uang persedian (UP) secara tepat waktu dan optimalisasi penggunaannya sesuai target minimal *revolving*.
6. Pencapaian target RPD (rencana penarikan dana) per jenis belanja dengan deviasi tidak lebih dari 5% setiap bulannya.
7. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
8. Penyusunan target output bulanan dan pencapaian target output sesuai dengan target yang telah diinput pada aplikasi.
9. Merevisi anggaran SBK agar capaian Efisiensi SBK optimal.

Tabel 3.130 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan Monitoring Anggaran dan RPD Juli 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan Target Output 2026 dan	1. Lakukan Penyesuaian Target Output (RO) sesuai usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM Kewenangan DJA TA 2026 dalam rangka Penajaman Belanja dan pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab Output (RO) dan revisi penyesuaian Target Output (RO) TW III (Bulan 07-12) 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Agustus 2026 3. Melakukan pemutakhiran Hal III DIPA TW III Tahun 2026 paling lama Agustus 2026	Agustus	Ya	SDM-07, SDM-09 dan O-36	1. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. 2. Lambatnya proses pencairan tagihan 3. Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Realisasi Output sd Juni pada Aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Juli masih belum optimal, karena nilai Capaian Output belum ada (Penginputan paling lama 10 Agustus 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan Anggaran mendapat nilai 88,58. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir TW. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA sebagai komponen NKA	target serapan anggaran TW III 3. Lakukan penyusunan RPD / halaman III DIPA TW III sesuai Revisi DJA					Triwulan kedepan
Agustus	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan Monitoring Anggaran dan RPD Agustus 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Melakukan penginputan Target Output 2026 dan Realisasi Output sd Juli pada Aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Agustus masih belum optimal, karena nilai Capaian Output belum ada (Penginputan paling lama 10 hari setelah bulan Agustus 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan Anggaran mendapat nilai 91,29. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir TW.	1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran TW III	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab Output (RO) 2. Monitoring pencapaian RPD bulan September 2026	September	Ya	SDM-07, SDM-09 dan O-36	1. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. 2. Lambatnya proses pencairan tagihan 3. Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 Triwulan kedepan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA sebagai komponen NKA						
September	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan September telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan Monitoring Anggaran dan RPD September 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Melakukan penginputan Target Output 2026 dan Realisasi Output sd Agustus pada Aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan September masih belum optimal (98,61), karena nilai Capaian Output belum ada (Penginputan paling lama 10 hari setelah bulan September 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan Anggaran mendapat nilai 93,07. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA sebagai komponen NKA	1. Lakukan penyesuaian target output dan pastikan target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Target serapan anggaran Triwulan III tidak tercapai, agar direviu dan disusun kembali perencanaan kegiatan untuk mencapai target serapan anggaran Triwulan IV (Tahunan)	1. Melakukan revisi target output Triwulan III 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab Output (RO) 3. Menyusun RPD Triwulan IV (Tahunan) dengan pendekatan target serapan anggaran Triwulan IV (Tahunan) dan lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan	Oktober	Ya	SDM-07, SDM-09 dan O-36	1. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. 2. Lambatnya proses pencairan tagihan 3. Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 Triwulan kedepan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Menyusun POA Fisik dan POA Anggaran secara tepat.
2. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap komponen komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran pada nilai IKPA Balai secara rutin.
3. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap KRO SBKU dan SBKK untuk mengoptimalkan nilai EKA (NK Perencanaan Anggaran).
4. Melakukan rapat evaluasi secara rutin untuk membahas pelaksanaan kinerja anggaran.
5. Reminder berkala setiap minggunya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja agar melakukan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan IKPA.
6. Penggunaan aplikasi ASIKKEKKU versi 2 dalam proses pencairan tagihan.
7. Penggunaan google sites Madu Pelawan sebagai monitoring dan pelaporan kinerja, anggaran, dan target output secara tepat waktu.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.131 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	2.649.821.222	2.663.344.023	100,51	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan III untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar Rp 3.832.743.687 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 3.856.185.746 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 100,61%. Namun pada Triwulan III ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 5.454.781.000. Anggaran ini akan digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langganan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Honorarium Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini adalah dengan melakukan pencairan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah di susun disetiap awal triwulan dan selalu menjaga nilai pada indikator-indikator yang mempengaruhi nilai IKPA dan EKA sehingga target Output Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai. Kemudian melakukan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran belanja pegawai ke belanja lainnya yang lebih membutuhkan jika terdapat kelebihan kebutuhan belanja pegawai dikarenakan pada 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang mutasi ke UPT BPOM lainnya sehingga terdapat kelebihan kebutuhan setelah dilakukan monev belanja pegawai. Terdapat kekurangan biaya listrik sampai dengan akhir tahun dan pengangkutan limbah sehingga revisi dari belanja pegawai akan digunakan untuk kebutuhan operasional tersebut.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam laporan kinerja periode sebelumnya, telah dilakukan pemanfaatan informasi tersebut berupa :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian aktivitas/kegiatan yang dilakukan pada triwulan III yaitu :

- Menyusun strategi ulang dalam pencapaian IKPA dengan memprioritaskan pencapaian komponen Halaman III DIPA sampai dengan bulan September, dikarenakan komponen penyerapan anggaran sudah dipastikan tidak dapat mencapai angka maksimal 100,00.
- Monitoring penyerapan KRO SBKK sesuai KMK terbaru.
- Melakukan revolving UP setiap 2 minggu, untuk menunjang pencapaian RPD yang telah ditetapkan, sehingga deviasi maksimal 5% masih dapat terpenuhi.

- Mempertahankan penggunaan inovasi ASIKKEKKU V.2 untuk menunjang percepatan pencairan tagihan sehingga menunjang pencapaian RPD dan serapan anggaran.
- Mengikuti Revisi Kewenangan DJA yang dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan revisi optimalisasi anggaran untuk memenuhi anggaran dan target output yang akan dicapai.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Mapping anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran berasal dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langganan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Honorarium Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator NKA yang meliputi pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk seluruh indikator dan output (RO) pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang, pada Triwulan III Tahun 2026 telah dilakukan beberapa penyesuaian penggunaan anggaran melalui revisi anggaran sebanyak 1 kali revisi kewenangn DJA dan 5 kali revisi POK yang bertujuan untuk :

- Penyesuaian kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga RPD masih dapat terpenuhi.
- Penambahan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target output dan RPD.
- Optimalisasi anggaran untuk pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan dalam pencapaian output.
- Penyesuian target output dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada bulan Desember 2025 untuk DIPA 2026.
- Pembukaan pagu blokir dengan sumber dana PNBP.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas Evaluasi sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2026 telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya berupa:

- Melakukan revisi pemutakhiran Halaman III DIPA untuk triwulan III pada Revisi Kewenangan DJA dikarenakan jadwal yang bersamaan dengan revisi DIPA sehingga RPD Triwulan III tetap termutakhirkan

- Melakukan revisi untuk indikator Revisi yang masuk perhitungan IKPA hanya 1-2 kali tiap semester, sesuai ketentuan penilaian IKPA untuk bisa mendapatkan nilai komponen revisi anggaran pada IKPA secara optimal
- Menyusun kertas kerja perhitungan efisiensi SBK tahun 2026
- Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026
- Monitoring RPD dan serapan anggaran setiap bulannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Adapun penyesuaian perencanaan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, berupa:

- Melakukan Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA (penyesuaian Rencana Penarikan Dana triwulan IV)
- Melakukan pelaporan rencana target output setiap awal triwulan dan realisasi output bulanan.
- Melaksanakan revisi DIPA/ DJA untuk mengalihan anggaran ke RO yang membutuhkan sebanyak 2 kali setiap semester ke KRO yang membutuhkan.
- Melaksanakan revisi anggaran (POK) untuk penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.
- Melakukan revisi Belanja Pegawai ke output yang membutuhkan karena pada tahun 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang mutasi ke UPT BPOM lainnya sehingga terdapat kelebihan kebutuhan setelah dilakukan monev belanja pegawai.
- Melakukan revisi DJA pada KRO SBKK yaitu pergeseran ke KRO lainnya yang membutuhkan agar nilai efisiensi SBK dan penyerapan anggaran bisa maksimal.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{Skor\ Total}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
- Angka 16 merupakan jumlah karakteristik kunci penilaian

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.132 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai indeks akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga pada Triwulan III tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi yang dapat dilakukan.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan II dengan Triwulan III

Tabel 3.133 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan II dan Triwulan III Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan II hingga Triwulan III Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	-	-	

Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2026 sebesar 2,94. Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun diukur pada akhir tahun atau Triwulan IV sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan II dengan target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja hingga triwulan III. Namun berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kinerja diantaranya :

1. Belum terdapat kertas kerja/ justifikasi penentuan skor risiko untuk seluruh level risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register.

2. Telah dilakukan reviu risiko secara berkala sesuai dengan pedoman, namun belum dilakukan reviu oleh Auditor Internal (AI) sebelum dilakukan pelaporan manajemen risiko semester II tahun 2025 pada aplikasi SAPAAPIP.
3. Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.
4. Telah dilakukan tagging risiko melalui RHK pegawai pada aplikasi SIASN namun belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh risiko, seperti risiko yang diperlukan tindakan mitigasi kode risiko O-47.
5. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:

   - Terdapat risk event yang merupakan negasi dari proses/kegiatan bisnis, misalnya pada kode risiko O-20, O-21, dan O-22.

   - Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti "tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal misalnya pada kode risiko O-57, O-34, O-47, O-31 dan O-60.

   - Narasi pada akibat/potensi kerugian risiko sama dengan narasi pada risk event, misalnya pada kode risiko SDM-11.

   - Telah dilakukan pengujian aktivitas pengendalian (existing control) terhadap risiko dengan level risiko inheren diatas selera risiko (≥16), namun metode yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur pada juklak manajemen risiko, misalnya pada kode risiko K3-03.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian indeks manajemen risiko tahun 2026 yaitu :

1. Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
2. Menyusun Daftar Risiko Semester 1 dan 2 tahun 2026
3. Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
4. Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan
5. Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
6. Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
7. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP

8. Melakukan internalisasi terkait risiko di *Instagram* dan *WhatsApp* group Balai Besar (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)
9. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko dengan *Refreshment* dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko
10. Melakukan Reviu Risiko Semester I Tahun 2026
11. Menyusun Risiko Semester II Tahun 2026 berdasarkan Hasil Reviu dari Inspektorat II
12. Melaporkan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP secara lengkap dan tepat waktu
13. Melakukan Penilaian Mandiri dan Penyampaian Data Dukung Pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM Tahun 2026
14. Menindaklanjuti Monitoring Kepatuhan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP
15. Melakukan Pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko
16. Melakukan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai
17. Menghadiri Desk Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM Tahun 2026.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
    1. Melakukan evaluasi terhadap hasil maturitas risiko tahun 2025 serta menyusun rencana tindak lanjutnya
    2. Menyusun rencana aksi/ tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2026
    3. Melakukan sosialisasi Risiko semester 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai
    4. Melakukan update dan penyesuaian daftar risiko di SAPAAPIP hingga Triwulan II
    5. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko
    6. Melakukan perbaikan identifikasi risiko pada program kerja baru AoC
    7. Membuat surat permohonan *refreshment* atau penyegaran ulang dalam pengelolaan manajemen risiko kepada Inspektorat II
    8. Melakukan penyesuaian daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan masukan dari Inspektorat II

9. Melakukan reviu atas RTP semester I tahun 2026
10. Menyusun daftar risiko semester II tahun 2026
11. Melakukan Reviu Risiko Semester II Tahun 2026
12. Mengembangkan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko pada IDEAS
13. Mengadakan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai
14. Menyusun Revisi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 berdasarkan Hasil Desk dari Inspektorat II

Tabel 3.135 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juli	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Melakukan Reviu Risiko Semester I Tahun 2026 2. Menyusun Risiko Semester II Tahun 2026 berdasarkan Hasil Reviu dari Inspektorat II saat Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (sebagai Pedoman) sehingga tidak terjadi kesalahan berulang 3. Melaporkan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP secara lengkap dan tepat waktu Dari hasil Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi dari Inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BBPOM di Pangkal Pinang pada Tahun 2026	1. Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan sosialisasi Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko	Agustus	Ya	SDM-10	Penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
Agustus	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Penilaian Mandiri dan Penyampaian Data Dukung Pelaksanaan Penilaian Tingkat	1. Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan sosialisasi Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko	September	Ya	SDM-10	Penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM Tahun 2026 (mengisi Kertas Kerja Evaluasi 18-28 Agustus 2026) 2. Menindaklanjuti Monitoring Kepatuhan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP 3. Pegawai mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengelolaan risiko Dari hasil Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi dari Inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BBPOM di Pangkal Pinang pada Tahun 2026						
September	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan September telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Penilaian Mandiri dan Penyampaian Data Dukung Pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM Tahun 2026 2. Menindaklanjuti Monitoring Kepatuhan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP 3. Pegawai mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengelolaan risiko 4. Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai (Senin, 7 September 2026) 5. Undangan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM Tahun 2026, jadwal pelaksanaan BBPOM di Pangkal Pinang, Jumat 2 Oktober 2026 Dari hasil Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Laporan	1. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman 2. Mengikuti Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di BBPOM di Pangkal Pinang, Jumat 2 Oktober 2026	1. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko 2. Menindaklanjuti hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di BBPOM di Pangkal Pinang	Oktober	Ya	SDM-10	Penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Evaluasi dari Inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BBPOM di Pangkal Pinang pada Tahun 2026						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen risiko melalui IDEAS.
2. Peningkatan pemahaman dan *awareness* pegawai terkait manajemen risiko dengan sosialisasi berkala melalui infografis dan informasi lainnya di media sosial dan *WhatsApp Group* Balai yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan dan Program AoC GERASAK (Gerakan Sadar Risiko).
3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan pedoman.
4. Mengadakan *refreshment* atau penyegaran kembali tentang pengelolaan Manajemen Risiko dengan mengundang Inspektorat II Badan POM sebagai narasumber.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.136 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	147.106.851	166.919.337	113,47	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan III untuk indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar Rp 221.775.337 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 232.085.616 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 104,65%. Hingga Triwulan III ini

belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Indeks Manajemen Risiko pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 315,112,000 dan setelah dilakukan Revisi RAPK tahun 2026 berubah menjadi Rp 317,695,000. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sewa rumah dinas. Hingga Triwulan III, penggunaan anggaran yang dapat di realisasikan sampai dengan Triwulan III difokuskan pada sewa rumah dinas dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor beserta honor pejabat pengadaan. Pada Triwulan II terjadi 2 kali penyesuaian anggaran, penyesuaian anggaran pertama pada bulan April menjadi Rp Rp 313.222.000 dan penyesuaian terakhir pada bulan Mei sebesar Rp 312.707.000. Hingga Triwulan III, terjadi beberapa kali penyesuaian anggaran dan penyesuaian anggaran terakhir menjadi Rp 325.472.000, penyesuaian ini difokuskan pada pengadaan peralatan/perlengkapan kantor.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko dengan memanfaatkan IDEAS.
- Melakukan pengelolaan risiko sesuai pedoman dan dilaporkan secara tepat waktu setiap semester.
- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi auditor internal maupun APIP atas implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan.
- Memanfaatkan anggaran yang telah dipetakan secara efisien dalam mencapai kinerja.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim hingga Triwulan III, pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
- Menyusun Risiko Semester 1 tahun 2026
- Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
- Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan
- Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
- Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
- Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
- Melakukan internalisasi terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)
- Membuat surat permohonan *refreshment* penerapan manajemen risiko ke Inspektorat II untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko ASN BBPOM di Pangkal Pinang
- Melakukan reviu atas RTP Semester 1 Tahun 2026
- Menyusun daftar risiko Semester 2 tahun 2026 dan menyampaikan pada aplikasi SAPAAPIP
- Menyusun daftar risiko semester II tahun 2026
- Melakukan Reviu Risiko Semester II Tahun 2026
- Mengembangkan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko
- Mengadakan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai
- Menyusun Revisi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 berdasarkan Hasil Desk dari Inspektorat II

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Hingga triwulan III, terjadi beberapa kali penyesuaian anggaran untuk indikator kinerja indeks manajemen risiko dari awal pemetaan anggaran pada

RAPK dan Revisi RAPK. Penyelenggaraan Manajemen risiko akan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan dukungan anggaran yang tersedia.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari hasil evaluasi penilaian maturitas risiko tahun 2025 yang dilakukan inspektorat terdapat beberapa hal yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan III tahun 2026 diantaranya :

- Telah dilakukan eskalasi risiko ke deputi pembina dengan memberikan tanda centang pada laporan risiko di SAPAAPIP
- Auditor Internal telah melakukan reviu risk register semester 1 tahun 2026
- Menetapkan SK Level Kemungkinan dan Dampak Risiko sebagai panduan dalam penentuan penilaian risiko pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang
- Menyusun rencana aksi/tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2025
- Melakukan penyesuaian risiko di SAPAAPIP
- Melakukan internalisasi terkait manajemen risiko
- Melakukan penyesuaian daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan masukan dari Inspektorat II pada kegiatan *refreshment* dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko
- Melakukan pengembangan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko melalui IDEAS

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Kedepannya hal-hal yang dapat dilakukan penyesuaian diantaranya :

- Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
- Melakukan penyesuaian daftar risiko semester II berdasarkan masukan dari hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2026.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN III TAHUN 2026

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama setiap bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh rekomendasi perbaikan atas capaian kinerja disertai dengan timeline penyelesaiannya. Berikut progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi Bulan Desember 2025 – Agustus 2026 yang ditindaklanjuti pada Bulan Januari – September 2026.

Tabel 3.137 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Realisasi : Pada Bulan Juni telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 17 sampel Obat, 28 sampel Kosmetik, 14 sampel OBA, 1 sampel Kuasi dan 4 sampel SK. Pelaksanaan sampling mengacu pada hasil revisi penyesuaian target	1. Agar menyesuaikan pelaksanaan sampling obat kategori JKN pada Kabupaten yang memiliki stok yang memadai 2. Agar melakukan pemetaan merk dan bobot kosmetik bentuk	1. Merencanakan pelaksanaan sampling obat kategori JKN 1-3 bulan kedepan dengan target yang lebih banyak pada Kab. Bangka Tengah / Kab. Bangka Selatan 2. Melakukan pemetaan merk	Selesai	-	-	Ya	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			RO dengan target renlak bulanan sesuai yang disetujui pengampu Kendala : 1. Terdapat kendala dalam memenuhi target sampel Obat Kategori JKN di Kota Pangkal Pinang, dikarenakan kekosongan stok di sarana JKN (Puskesmas) akibat kendala pengadaan obat yang di alami oleh GFK Dinas Kesehatan Kota Pangkal PInang 2. Terkendala dalam memenuhi target sampel Kosmetik Bentuk Sediaan Lip Color, dikarenakan keterbatasan jumlah untuk setiap item dengan nomor bets yang sama dan kecilnya bobot sampel yang beredar di pasaran.	sediaan Lip Color serta target sarana yang memungkinkan untuk disampling	kosmetik bentuk sediaan Lip Color dengan bobot sampel yang cukup besar dan melakukan pendataan lebih banyak target sarana sampling kosmetik sebagai cadangan tempat sampling apabila sampel sulit ditemukan						
			Realisasi : Pada bulan Juni telah dilakukan pengujian terhadap sampel berikut: 1. 35 sampel obat (sampel regionalisasi 31 sampel balai 4) 2. 11 sampel OBA (sampel Balai), 1 sampel loka 3. 29 sampel kosmetik balai, 4 sampel loka 4. 1 sampel kuasi (balai) 5. 9 sampel SK balai,1 sampel loka	Dilakukan pengaturan penggunaan alat AAS	Akan dibuat jadwal pemakaian alat AAS	Selesai	-	-	Ya	O-50	Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Capaian : 101,27% Kendala : Terjadi antrian alat AAS menggunakan GFA untuk pengujian logam								
		Agt	Realisasi : Pada Bulan Juli telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 15 sampel Obat, 22 sampel Kosmetik, 11 sampel OBA, 1 sampel Kuasi dan 3 sampel SK. Terdapat pengurangan 2 sampel SK (Target 5, Disampling 3) karena telah dilakukan sampling sebelumnya pada INWAS SK Kendala : 1. Terdapat kendala dalam memenuhi target sampel Obat Kategori JKN di Kota Pangkal Pinang, dikarenakan kekosongan stok di sarana JKN (Puskesmas) akibat kendala pengadaan obat yang di alami oleh GFK Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang 2. Terdapat kendala dalam memenuhi sampel Kosmetik Kategori Impor Filipina yang jumlah dan jenisnya terbatas di lapangan	1. Agar menyesuaikan pelaksanaan sampling obat kategori JKN pada Kabupaten yang memiliki stok yang memadai 2. Agar melakukan pemetaan merk kosmetik Impor Filipina serta mengacu pada riwayat sampling tahun sebelumnya	1. Merencanakan pelaksanaan sampling obat kategori JKN 1-3 bulan kedepan dengan target yang lebih banyak pada Kab. Bangka Tengah / Kab. Bangka Selatan 2. Melakukan pemetaan Kosmetik Kategori Impor Filipina yang beredar di toko kosmetik saat pelaksanaan sampling atau pemeriksaan dan berdasarkan riwayat sampling 2 tahun terakhir	Selesai	-	-	Ya	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Realisasi : Pada bulan Juli telah diselesaikan pengujian terhadap : 1. 16 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 15 sampel OBAOK (sampel Balai) 3. 4 sampel SK (4 sampel Balai) 4. 33 sampel kosmetik (28 sampel Balai, 5 sampel Loka) Kendala : - Sampel OBAOKSK yang sudah di SPK kan oleh Katim sebelumnya, tidak terbaca di SIPT Katim baru. Setelah berkoordinasi dengan Pusdatin, sampel-sampel tersebut dirollback dan dibuatkan SPK kembali di role Katim baru dengan tanggal SPK dibuat sesuai dengan tanggal SPK sebelumnya. - Sampel Kosmetik dan Obat yang belum dibuatkan SPK, dibuatkan SPK sesuai tanggal deadline waktu sampling/ tanggal sampel diterima laboratorium. - Tanggal SPK semua sampel yang dirollback dan dibuatkan SPK oleh Katim baru adalah sebelum tanggal SK Katim baru. - Sampel Obat-Balai yang dikirim ke Balai lain dan sudah dibuatkan SPK oleh Katim sebelumnya, belum muncul di role Katim baru.	Lakukan monitoring SIPT sampel Obat-Balai yang diuji di balai lain.	Monitoring SIPT sampel Obat-Balai yang diuji di Balai lain.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Upaya : Terus berkoordinasi dengan Pusdatin melalui admin Balai.								
		Sep	Realisasi : Pada bulan Agustus telah diselesaikan pengujian terhadap : 1. 13 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 17 sampel OBAOK (14 sampel Pangkal Pinang, 3 sampel Belitung) 3. 3 sampel SK (3 sampel Pangkal Pinang) 4. 26 sampel kosmetik (22 sampel Pangkal Pinang, 4 sampel Belitung) Kendala : 2 sampel OBA Balai bulan Mei, diuji konfirmasi parameter stamina ke BBPOM di Pekanbaru di bulan Juni. Sesuai jadwal uji konfirmasi parameter stamina, BBPOM di Pekanbaru baru melakukan pengujian di bulan Juli, dan di bulan Juli instrumen LC-MS/MS sempat mengalami kerusakan dan 1 sampel diuji ulang beberapa kali sesuai arahan PPPOMN sehingga baru selesai uji di bulan Agustus. Upaya : Berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru terkait pengujian sampel uji konfirmasi parameter stamina.	Berkoordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	Selesai	-	-	Ya	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Realisasi : Pada Bulan September telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 15 sampel Obat, 26 sampel Kosmetik, 16 sampel OBA, 1 sampel Kuasi dan 2 sampel SK. Terdapat tambahan 7 sampel kasus OBA yang di sampling bulan September Kendala : Sampling obat september baru bisa dilakukan pada tanggal 1-2 september, namun hari kerja yang tersedia hanya tanggal 3 dan 4 september untuk mengelola sampel, mengevaluasi penandaan sampel dan input SIPT sampel dan pada tanggal 7 september harus segera dikirimkan ke lab regional sesuai kemampuan uji dikarenakan PJ sampling obat sedang cuti.	Berkoordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait perencanaan sampling OBA untuk bulan September-Desember.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Jul	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 6 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Juni yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung dan PKM Payung. Realisasi hingga bulan Juni yaitu 13.33% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Adanya interfensi dari dokter yang tidak mengizinkan pelaporan KTD / ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai jenis KTD / ESO yang dapat dilaporkan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3. Agar melakukan audiensi ke dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai KTD / ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
		Agt	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 7 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Juli yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Agustus	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung, PKM Payung dan RSUD Abu Hanifah. Realisasi hingga bulan Juli yaitu 15.56% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan website e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Agustus						Sarana Pelayanan Kesehatan
		Sep	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 7 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Agustus yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung, PKM Payung dan RSUD Abu Hanifah. Tidak terdapat pelaporan pada bulan Agustus. Realisasi hingga bulan Agustus yaitu 15.56% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan September 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 3 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan September	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Terdapat update tampilan website e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Beberapa sarana yang telah di followup saat pemeriksaan rutin / saat sampling (PKM Girimaya, PKM GerungganG, PKM Baturusa) masih belum melakukan pelaporan KTD/ESO karena terkendala sulit menemukan KTD/ESO dan banyaknya pelaporan program puskesmas yang harus dilakukan								
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Realisasi : Pada Bulan Juni telah dilakukan sampling 19 sampel pangan olahan (Target Juni 20 sampel, kurang 1 sampel sebagai kompensasi dari kelebihan sampling bulan sebelumnya). Pelaksanaan sampling mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Juni	Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Realisasi : - Sampai dengan bulan Juni jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 82 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 82 sampel, terdapat penyesuaian dan revisi terhadap renlak untuk menindaklanjuti perubahan target RO sampel pangan Kendala : Kendala yang dihadapi di bulan Juni adalah tingginya jumlah sampel masuk ke laboratorium. Selain sampel rutin dan sampel regional, terdapat sampel pihak ketiga (DAK) dari kabupaten Bangka Tengan dan Bangka yang masuk dalam waktu berdekatan dengan parameter uji yang bervariasi dan timeline 15 HK. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian sampel sesuai dengan urutan timeline	Perlu dilakukan koordinasi dengan pemilik sampel DAK agar sampel tidak masuk laboratorium secara bersamaan	Berkomunikasi dengan dinas kesehatan / pemilik sampel DAK agar dilakukan pembagian jadwal pengiriman sampel ke laboratorium	Selesai	-	-	Ya	O-70	Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Agt	Realisasi : Pada Bulan Juli telah dilakukan sampling 25 sampel pangan olahan (24 Sampel MD Reguler dan 1 Fasilitasi UMK Upgrade MD). Target Juli 26 sampel, kurang 1 sampel sebagai kompensasi dari kelebihan sampling beberapa bulan sebelumnya Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Juli	Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	Selesai	-	-	Ya	-	-
			Realisasi : Target sampel sesuai renlak : 107 Sampel masuk pengujian : 107 Sampai dengan bulan Juli jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 107 sampel dari target renlak sampling dan pengujian, sesuai dengan target revisi RO Kendala : 1. Kendala yang dihadapi di bulan Juli adalah tingginya jumlah sampel masuk ke laboratorium. Selain sampel rutin dan sampel regional, terdapat sampel pihak ketiga (DAK) dari kabupaten Bangka Tengah dan Bangka yang masuk dalam waktu	1. Prioritas usulan alat lab terutama HPLC 2. Optimalisasi pengadaan pendukung teknis pengujian 3. Usulan penempatan CPNS di laboratorium kimia pangan	1. Dilakukan pengajuan rekomendasi alat laboratorium tahun 2027, dan usulan anggaran sesuai rekomendasi alat lab 2. Melakukan review kembali terhadap usulan kebutuhan pendukung teknis pengujian 3. Mengusulkan penempatan CPNS di lab kimia pangan	Selesai	-	-	Ya	O-70 SDM-17 K3-04	1. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 2. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 3. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			berdekatan dengan parameter uji yang bervariasi dan timeline 15 HK. 2. Kurangnya jumlah analis di pengujian kimia pangan. 1 analis sedang mengikuti pelatihan PFM 1 analis terampil dengan keterbatasan paramater uji yang bisa diberikan (mayoritas parameter uji merupakan kesulitan 3 dan 4) 1 analis cuti alasan penting, masuk kembali akhir Juli 1 analis merangkap sebagai penyelia dan pengelola sistem mutu 3. HPLC yang dimiliki 2, hanya1 yang mampu bekerja optimal untuk pengujian dengan berbagai analit, sehingga antrian pengujian sampel menjadi panjang 4. keterbatasan hotplate, pipet dispenser dan pipet steril yang dimiliki oleh laboratorium mikrobiologi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : 1. Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian sampel sesuai dengan urutan timeline								

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Melaksanakan lembur untuk mencapai target timeline pengujian 3. Melakukan peminjaman hot plate di lab kimia, menggunakan bulb manual untuk mengganti pipet dispenser								
		Sep	Realisasi : Pada Bulan Agustus telah dilakukan sampling 17 sampel pangan olahan (16 Sampel MD Reguler dan 1 Kasus ikan teri positif formalin dari Pasar Simpang Katis) Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Agustus	Berkoordinasi dengan tim infokom dan pengujian terhadap setiap adanya sampel kasus yang akan masuk uji laboratorium	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	Selesai	-	-	Ya	-	-
			Realisasi : Target sampel sesuai renlak : 124 Sampel masuk pengujian : 124 Sampai dengan bulan Agustus jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 124 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 169 sampel Kendala : 1. Kendala yang dihadapi di bulan Agustus adalah kerusakan alat sentrifuse dengan suhu 2. parameter uji mikrobiologi banyak yang TMS sehingga membutuhkan	1. Agar dllakukan perbaikan alat sentrifuse 2. Pengaturan jadwal pengujian mikrobiologi, memanfaatkan jadwal WFH	1. Mengusulkan perbaikan sentrifuse 2. Tetap masuk di hari jumat meskipun WFH	Selesai	-	-	Ya	O-70	Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			waktu pengujian lebih lama untuk konfirmasi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : 1. Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian sampel sesuai dengan urutan timeline 2. Rekomendasi alat laboratorium untuk HPLC								
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Jul	Tidak terjadi kasus KLB pada bulan Juni	koordinasi dengan linsek terkait KLB	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan	Belum Selesai	Koordinasi yang dilaksanakan baru pada internal balai, koordinasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Agustus	Tidak	-	-
			Realisasi : Pada bulan Juni tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Selesai	-	-	Ya	O-09	Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sampel KLB KP pada bulan Juni karena tidak terdapat sampel Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP								
		Agt	Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang	koordinasi dengan linsek terkait KLB	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan	Belum Selesai	Koordinasi yang dilaksanakan baru pada internal Balai, koordinasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	September	Tidak	-	-
			Realisasi : Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Juli karena tidak terdapat sampel	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Selesai	-	-	Ya	O-09	Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP								
		Sep	Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang	Koordinasi dengan linsek terkait KLB	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan	Belum Selesai	Koordinasi lintas sektor yang telah dilaksanakan : - Dinkes Bangka Barat - Dinkes Bangka Tengah	Oktober	Tidak	-	-
			Realisasi : Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Terdapat perubahan tools penilaian, dengan perhitungan tools baru tidak mengubah realisasi Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Agustus karena tidak terdapat sampel KLB Capaian terhadap target :	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Selesai	-	-	Ya	O-09	Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP								
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Juni. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April	-	-	Selesai	-	-	Ya	-	-
			Realisasi : Sampai dengan bulan Juni laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan	Agar dilakukan evaluasi terhadap capaian target	Melakukan evaluasi terhadap capaian dan kesesuaian terhadap target pada TW II	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Mei adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS								
		Agt	Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Juli. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April	-	-	Selesai	-	-	Ya	-	-
			Realisasi : Sampai dengan bulan Juli laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan,	Agar dilakukan evaluasi terhadap capaian target	Melakukan evaluasi terhadap capaian dan kesesuaian terhadap target	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi sampai dengan bulan Juli adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS								
		Sep	Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Agustus. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
			Realisasi : Sampai dengan bulan Agustus laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi sampai dengan bulan Agustus adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS								
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan	Jul	Dari 130 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 115 jawaban Tindak Lanjut.	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Dari 20 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 17 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 86.73%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA	belum memberikan tanggapan	jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan						
		Agt	Dari 145 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 133 jawaban Tindak Lanjut. Dari 25 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 20 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 85,86%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA		pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan						
		Sep	Dari 164 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 147 jawaban Tindak Lanjut. Dari 29 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 25 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 87,92%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Selesai	-	-	Tidak	-	-
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	Jul	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Juni	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Agt	Telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut sarana	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan		produksi sediaan farmasi (UMOT Inti Art) terhadap 1 sarana dengan persentase capaian 100% Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bulan Juli								
		Sep	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Agustus	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 Sarana Produksi Pangan Olahan MD selama bulan Juni mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Juni	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Agt	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 Sarana Produksi Pangan Olahan IRTP selama bulan Juli dengan persentase capaian 100%. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Juli	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Sep	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 Sarana Produksi Pangan	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Olahan MD selama bulan Agustus dengan persentase capaian 100%. Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Agustus								
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Pada bulan Juni dilakukan pemeriksaan ke 14 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 1 PBF, 1 PKM, 1 RS, 1 Klinik, 3 Apotek dan 2 Fasilitas Lain, serta 2 Sardist OBA dan 3 Sardist KOS. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juni sebesar 100% (total 72 sarana) Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan juni	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Juli mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Agt	Pada bulan Juli dilakukan pemeriksaan ke 12 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 1 PBF, 2 PKM, 1 RS, 1 Klinik, 2 Apotek dan 1 Fasilitas Lain, serta 1 Sardist OBA, 1 Sardist SK dan 2 Sardist KOS. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Agustus mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juli sebesar 100% (total 84 sarana) Kendala : Jika cut off data pelaporan SIPT sarana distribusi Sediaan Farmasi diberlakukan tanggal 31 Juli, maka petugas pemeriksa yang melakukan input SIPT dan Ketua Tim yang akan melakukan verifikasi Hasil input SIPT akan kewalahan karena timeline tersebut bersamaan dengan pelaksanaan sampling								
		Sep	Pada bulan Agustus dilakukan pemeriksaan ke 15 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 1 PBF, 2 PKM, 1 RS, 2 Klinik, 2 Apotek dan 1 Fasilitas Lain, serta 4 Sardist OBA dan 2 Sardist KOS. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Agustus sebesar 100% (total 99 sarana) Kendala : Kekurangan 1 personil (cuti melahirkan) menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh 2 Tim, sehingga memerlukan HK yang lebih banyak	Penambahan 1 personil dengan kualifikasi Apoteker untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Saryanfar bulan september-oktober	Mengusulkan permintaan 1 personil dengan kualifikasi Apoteker untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Saryanfar bulan september-oktober	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dibandingan pemeriksaan dengan 3 Tim								
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jul	Pada bulan Juni dilakukan pemeriksaan ke 5 sarana distribusi pangan olahan. Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juni sebesar 98.83% (total 60 sarana) Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan juni	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Juli mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Agt	Pada bulan Juli dilakukan pemeriksaan ke 5 sarana distribusi pangan olahan. Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juli sebesar 98.92% (total 65 sarana) Kendala : Jika cut off data pelaporan SIPT sarana distribusi Pangan Olahan diberlakukan tanggal 31 Juli, maka petugas pemeriksa yang melakukan input SIPT dan Ketua Tim yang akan melakukan verifikasi Hasil input SIPT akan kewalahan karena timeline	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Agustus mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			tersebut bersamaan dengan pelaksanaan sampling								
		Sep	Pada bulan Agustus dilakukan pemeriksaan ke 5 sarana distribusi pangan olahan. Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Agustus sebesar 99% (total 70 sarana) Tidak terdapat kendala selama pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan Agustus	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Jul	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juni telah dilaksanakan dengan realisasi 96,20% Tidak terdapat kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di bulan Juni	- Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Selesai	-	-	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
		Agt	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juli telah dilaksanakan dengan realisasi 95,49% Kendala: Masih terdapat iklan sediaan farmasi yang belum dilaporkan sesuai dengan target bulanannya	Kekurangan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juli akan dilaporkan pada bulan berikutnya	Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan tidak melewati bulan pengawasan	Selesai	Pengawasan iklan telah dilaksanakan tepat waktu	-	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Sep	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Agustus telah dilaksanakan dengan realisasi 96,49 % Kendala: Keterbatasan iklan yang tersedia berdasarkan media yang diawasi terutama untuk media cetak dan media luar ruang	Pemenuhan terhadap media iklan yang masih kurang diupayakan untuk dilaksanakan pada bulan berikutnya	Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan tidak melewati bulan pengawasan dan media iklan yang belum terpenuhi	Selesai	-	-	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Jul	- Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 95,83 %. - Capaian indikator melebihi 110 % dikarenakan adanya pemenuhan terhadap target output yang berpengaruh terhadap target indikator	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Perlu dilakukan perhitungan kembali jika dilakukan penyesuaian label tembakau yang diawasi sehingga capaian tidak melebihi 110%	- Melakukan monitoring data produk tembakau yang telah dientry di SIPT dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan - Dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Selesai	-	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
		Agt	1. Label tembakau yang diawasi dan dilaporkan pada bulan Juli sebanyak 10 sampel.Terdapat kekurangan 2 label rokok elektrik yang belum dilaporkan 2. Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan	1. Kekurangan label rokok akan dilaporkan pada bulan berikutnya 2. Telah dilakukan pengajuan revisi target RAPK agar capaian indikator tidak melebihi 110 %	1. Mengingatkan PIC pengawas label produk tembakau dan rokok elektronik untuk segera menginput hasil pengawasan di SIPT dan meneruskan ke supervisor agar tidak melewati bulan pengawasan 2. Berkoordinasi dengan	Selesai	Telah dilakukan penyesuaian revisi target RAPK sehingga realisasi pada bulan Agustus tidak melebihi 110 %	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dengan realisasi bulan Juli sebesar 94,05 % dengan capaian 111,91 %.		perencana terkait perubahan target RAPK yang telah diajukan						
		Sep	1. Label tembakau yang diawasi dan dilaporkan pada bulan Agustus sebanyak 12 sampel. 2. Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi bulan Agustus sebesar 96,88 % dengan capaian 106,46 %.	Pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik agar dilaporkan tepat waktu	Mengingatkan PIC pengawas label produk tembakau dan rokok elektronik untuk segera menginput hasil pengawasan di SIPT dan meneruskan ke supervisor agar tidak melewati bulan pengawasan	Selesai	-	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Jul	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter (Bersurat secara resmi)	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Infokom mengenai penyisipan materi AMR pada KIE selanjutnya 4. Berkoordinasi dengan	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya		Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter								
		Agt	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan Juli telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 21 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Infokom mengenai penyisipan materi AMR pada KIE selanjutnya 4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter								
		Sep	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan Agustus telah digunakan Tools pemetaan	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penggunaan antibiotik terhadap 23 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Agustus 2026, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dan oleh Dinas Kesehatan Kab.	2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Bangka Selatan pada 12 Agustus 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026 dan di Poltekes Kemenkes Pangkalpinang pada 13 Agustus 2026 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 8. Telah dilakukan Join Inspection bersama Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 26 Agustus 2026 untuk mengawal SE Bupati Bangka Tengah terkait Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter								
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	Jul	1. Pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei telah difollow up.	Ketepatan waktu pelaporan rencana aksi	Menyeragamkan batas waktu pelaporan rencana aksi	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		2. Monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 telah dilakukan dengan realisasi IKU sebesar 78,5 atau 100,2% (hasil laporan PPPOMN) dengan rincian : penambahan 2 SRL di Lab Kos, 1 MA Terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kos. 3. Hasil monitoring rencana aksi SKL bulan Juni : - peningkatan 3 PU kompetensi di Lab Kosmetik belum terlaksana dengan justifikasi : sampel yang dibutuhkan untuk pengujian 2 PU kompetensi adalah sampel bulan Juni dan pengujian baru dijadwalkan minggu I bulan Juli karena banyaknya PUK yang harus diuji, sementara 1 PU lainnya masih menunggu sampel masuk/ dibeli (Lab Kosmetik : Agar perencanaan lebih dioptimalkan). 4. Ada peningkatan ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL setiap bulannya.	SKL agar lebih dioptimalkan lagi.	bulanan, yaitu setiap tanggal 2 di bulan berikutnya.						
		Agt	- Penambahan kompetensi masing-masing satu di Lab Kos dan OT tapi tidak meningkatkan nilai kompetensi Laboratorium. Penambahan 1 kompetensi lagi di Lab Kosmetik belum bisa dilakukan karena antrian alat	Lakukan monitoring pemenuhan rencana aksi bulan Juli.	Akan dilakukan monitoring pemenuhan rencana aksi bulan Juli.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			untuk pengujian sampel. - Penambahan 1 MA Terverifikasi di Lab Kos tapi belum dibuat laporan verifikasi. - Pelaksanaan verifikasi alat sudah dilakukan dan dilaporkan tepat waktu. - Pelaporan rencana aksi tidak dapat selalu dilakukan di tanggal 2 setiap bulannya karena awal bulan Juli jatuh di week end.								
		Sep	- Penambahan 2 MA Terverifkasi di Lab Kosmetik - Peningkatan kompetensi Aspek 2 masing-masing 1 di Lab Kosmetik dan Lab OTOKSK - Terdapat 1 peralatan belum diverifikasi, yaitu TLC System di Lab OTOKSK karena Penyelia belum melakukan penyesuaian jadwal verifikasi peralatan yang sudah dibuat oleh Ketua Tim Pengelola SMM.	- Lakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan. - Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL PPPOMN untuk TW 3 di bulan September.	- Akan dilakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan. - Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL PPPOMN untuk TW 3 di bulan September.	Selesai	-	-	Tidak	-	-
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Jul	Telah dilaksanakan Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri kepada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Pangkal Pinang (17 Juni 2026), Kabupaten Bangka Tengah (18 Juni 2026) dan Kabupaten Bangka Selatan (15 Juni 2026). Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik	Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota	1. Melaksanakan pendampingan teknis lanjutan kepada PIC Kabupaten/Kota dalam proses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Melakukan monitoring dan	Selesai	-	-	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan pemerintah daerah telah memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengisian tools serta pengumpulan data dukung. Kendala : Sampai dengan akhir bulan Juni 2026, sebagian besar Kabupaten / Kota belum melakukan pengisian tools penilaian mandiri dan belum melengkapi data dukung secara optimal sehingga capaian pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.	Pangan Aman sesuai target yang telah ditetapkan.	evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung pada masing-masing Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil monitoring kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi dan percepatan pemenuhan target indikator Program Kabupaten/Kota Pangan Aman						
		Agt	Indikator ini merupakan target Tahunan, sampai dengan bulan Juli 2026, telah dilakukan penyelesaian pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengisian mandiri dalam file pemantauan pengisian tools KKPA, diperoleh nilai sementara masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut: - Kabupaten Bangka Tengah sebesar 78,02 - Kabupaten Bangka Selatan sebesar 71,20 - Kota Pangkal Pinang sebesar 67,74 - Kabupaten Bangka Barat sebesar	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengisian tools Penilaian Mandiri KKPA serta penyampaian hasil sementara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi sebelum diterimanya hasil verifikasi dari Tim Juri Teknis.	1. Melakukan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi pengisian tools KKPA kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan nilai sementara hasil penilaian mandiri. 2. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026. 3. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			61,32 - Kabupaten Bangka sebesar 60,28 Nilai tersebut merupakan hasil sementara dari penilaian mandiri dan belum merupakan hasil akhir, karena masih menunggu proses verifikasi dokumen oleh Tim Juri Teknis. Hasil verifikasi direncanakan akan diumumkan pada bulan Oktober 2026. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengisian tools serta nilai sementara tersebut akan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi dan persiapan tindak lanjut sesuai hasil verifikasi. Kendala : Pemenuhan data dukung pada beberapa indikator penilaian masih belum optimal sehingga mempengaruhi capaian nilai sementara hasil penilaian mandiri Kabupaten/Kota. Terdapat Kabupaten/Kota dengan nilai sementara yang masih berada pada batas minimal pemenuhan kriteria, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, sehingga diperlukan perhatian terhadap kelengkapan dan kesesuaian		Kabupaten/Kota apabila terdapat rekomendasi perbaikan.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			data dukung sesuai indikator penilaian KKPA.								
		Sep	Indikator ini merupakan target tahunan. Sampai dengan bulan Agustus 2026, proses penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah memasuki tahap menunggu pelaksanaan desk/verifikasi dan penetapan hasil oleh Tim Juri Teknis. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat kegiatan pendampingan atau pengisian tools tambahan oleh Kabupaten/Kota karena proses selanjutnya menunggu hasil penilaian dari pusat.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap proses desk/verifikasi dan penetapan hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Tim Juri Teknis.	1. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026. 2. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat rekomendasi perbaikan.	Selesai	-	-	Tidak	-	-
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jan					Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu	Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu		Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko	Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Feb					Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu	Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu		Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko	Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko
		Maret					Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu	Status Belum Diisi, Mohon untuk diisi terlebih dahulu		Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko	Mohon pilih Ya/Tidak terlebih dahulu pada kelola Risiko
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Jul	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 63 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Barat serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Selesai	-	-	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
		Agt	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 65 orang siswa SMA	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kota Pangkal	Selesai	-	-	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Negeri 1 Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Pinang serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.						tingkat efektifitas KIE.
		Sep	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 72 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Selatan serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Selesai	-	-	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jul	Sampai dengan bulan Juni 2026, Tahapan Intervensi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan belum dilaksanakan karena sesuai jadwal, pelaksanaan intervensi kepada sekolah sasaran baru akan dimulai pada bulan Juli 2026. Meskipun demikian, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan keberlanjutan program, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan kepada 7 (tujuh) Sekolah di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan sekolah yang telah diintervensi Tahun 2025.	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan guna memastikan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan administrasi dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Juli 2026.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.	jadwal pada bulan Juli 2026.							
		Agt	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah memasuki tahapan intervensi kepada sekolah sasaran sesuai jadwal. Pada tanggal 21 Juli 2026 telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 14 (empat belas) sekolah di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari 4 (empat) sekolah target	1. Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. 2. Perlu dilaksanakan Monitoring Program Sekolah yang Melaksanakan	1. Melakukan Penyusunan Laporan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan pelaporan melalui aplikasi Sapa Sekolah (sapasekolah.pom.go.id) 2. Melaksanakan kegiatan	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			intervensi Tahun 2026 dan 10 (sepuluh) sekolah perluasan. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2026 dilaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dari 4 (empat) sekolah target intervensi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari pihak sekolah dan instansi terkait. Hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada sekolah sasaran pada tanggal 21 Juli 2026 (bobot capaian 20%). 3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan	Pembudayaan Keamanan Pangan pada sekolah target intervensi untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pembentukan dan peran aktif Kader Keamanan Pangan Sekolah, pelaksanaan intervensi kepada komunitas sekolah, serta pemenuhan dokumen pendukung sebagai persiapan menuju sertifikasi sekolah.	Monitoring Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terhadap 4 (empat) sekolah target intervensi.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Pangan Sekolah pada tanggal 22 Juli 2026 (bobot capaian 25%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Juli 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.								
		Sep	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai progres sebesar 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat target pelaksanaan kegiatan intervensi baru, namun dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pada 4 (empat) sekolah target intervensi di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam pelaksanaan monitoring masih diperlukan penguatan komitmen dan konsistensi sekolah, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah serta	Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap 4 (empat) sekolah target intervensi untuk memastikan Kader Keamanan Pangan Sekolah melaksanakan perannya secara aktif, kegiatan pembudayaan keamanan pangan diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah, serta seluruh dokumen dipenuhi sebagai persiapan	1. Melakukan monitoring dan sertifikasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 4 (empat) sekolah target intervensi. 2. Melakukan pendampingan terhadap sekolah apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau pemenuhan dokumen.	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pemenuhan dokumen pendukung. Namun demikian, tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat keberlanjutan pelaksanaan program.	menuju tahapan sertifikasi sekolah.							
18	Jumlah desa pangan aman	Jul	Sampai dengan bulan Juni 2026, tahapan Intervensi Program Desa Pangan Aman belum dilaksanakan karena sesuai dengan jadwal, pelaksanaan intervensi kepada desa sasaran baru akan dimulai pada bulan Juli 2026. Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Desa Pangan Aman guna memastikan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada bulan Juli 2026.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Agt	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah memasuki tahapan intervensi kepada desa sasaran sesuai jadwal. Pada tanggal 30 Juli 2026 telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) kepada kader dari 2 (dua) desa target intervensi Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari pemerintah desa dan instansi terkait. Hingga akhir Juli 2026, tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga seluruh tahapan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai target waktu. Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada tanggal 30 Juli 2026 (bobot capaian 25%). Dengan demikian, sampai dengan	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah melalui aplikasi GKPD Online (gkpdonline.pom.go.id).	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			bulan Juli 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.								
		Sep	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah mencapai progres sebesar 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Pada bulan Agustus 2026 tidak terdapat pelaksanaan kegiatan intervensi baru. Tahapan program masih berada pada proses tindak lanjut setelah pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada tanggal 30 Juli 2026 kepada kader dari 2 (dua) desa target intervensi Tahun 2026 di Kabupaten Bangka Tengah.	Perlu dilakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan Kader Keamanan Pangan Desa dapat melaksanakan kegiatan secara optimal serta memastikan kesiapan desa dalam mengikuti tahapan program selanjutnya.	Melakukan persiapan pelaksanaan tahapan intervensi berikutnya yaitu Bimbingan Teknis Komunitas Desa/ Kelurahan	Selesai	-	-	Ya	-	-
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jul	Pada bulan Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu tahapan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Meningkatkan koordinasi dengan pengelola pasar dan pemerintah daerah guna memperkuat komitmen dalam penerapan Program	Melaksanakan kegiatan Pengawalan terhadap Pasar yang telah diintervensi pada tahun 2025 sebagai upaya pemantauan keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 dengan bobot capaian sebesar 20%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.							
		Agt	Sampai dengan bulan Juli 2026, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah memasuki tahapan pengawalan pasar sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan implementasi program pada pasar yang telah diintervensi.	Perlu dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah sebagai tindak	1. Melakukan koordinasi dengan pengelola Pasar Simpang Katis dan pemerintah daerah terkait sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan Pengawasan	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Pada tanggal 24 Juli 2026 telah dilaksanakan kegiatan Pengawalan Pasar di Pasar Pelataran Parkir Terminal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang bertujuan untuk memantau keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pengelola pasar serta pemerintah daerah setempat. Hingga akhir Juli 2026, tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga seluruh tahapan kegiatan masih berjalan sesuai dengan rencana. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%). 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 (bobot capaian 25%). 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 (bobot capaian 20%).	lanjut Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk memastikan keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar.	Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Agustus 2026 sesuai dengan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.						

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			4. Pengawalan Pasar pada tanggal 24 Juli 2026 (bobot capaian 10%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Juli 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 80% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.								
		Sep	Sampai dengan bulan Agustus 2026, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dengan capaian progres sebesar 100%. Pada tanggal 18 Agustus 2026 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Agustus 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 (bobot capaian 25%).	Perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan penerapan prinsip keamanan pangan oleh komunitas pasar serta penguatan komitmen pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam mempertahankan praktik keamanan pangan yang telah diterapkan setelah selesainya tahapan intervensi program.	1. Menyusun laporan hasil Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam upaya mempertahankan keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 (bobot capaian 25%). 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 (bobot capaian 20%). 4. Pengawalan Pasar pada tanggal 24 Juli 2026 (bobot capaian 10%). 5. Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 18 Agustus 2026 (bobot capaian 20%). Dengan demikian, sampai dengan bulan Agustus 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 100% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan. Kendala : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan baik. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan kegiatan maupun penyelesaian seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.								

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Jul	UMK Pangan Olahan: - Sampai dengan bulan Juni telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 3 pelaku usaha pangan UMK Obat Bahan Alam: belum terdapat progress pendampingan Obat Bahan Alam	UMK Pangan Olahan: Terdapat kendala pendaftaran akun e sertifikasi yang disebabkan oleh status KSWP pelaku usaha UMK OBA: Perlu dilakukan follow up terkait kendala penanggungjawab teknis sarana	UMKM Pangan : Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan dan follow up akun oss yang akan dilakukan pendaftaran e sertifikasi UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku usaha jika telah terdapat penanggung jawab teknis. -Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK untuk dilakukan revisi	Belum Selesai	- Konfirmasi status KSWP pelaku usaha sudah dilakukan ke Kantor Pajak dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan - Revisi SK target pendampingan 2026	Agustus	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
		Agt	UMK Pangan Olahan: 1. Sampai dengan bulan Juli telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 3 pelaku usaha pangan 2. Terdapat kendala status KSWP pelaku usaha yang perlu di konfirmasi untuk pendaftaran akun e sertifikasi UMK Obat Bahan Alam: Tidak terdapat progres dalam pendampingan UMK Obat Bahan Alam akibat tidak ditemukannya Tenaga Teknis yang bersedia sebagai Penanggung Jawab Sarana sehingga	UMK Pangan Olahan: 1. Review dokumen yang telah disusun oleh pelaku usaha untuk selanjutnya diajukan di e- sertifikasi 2. Koordinasi dengan pic e -sertifikasi direktorat pengawasan produksi dan Kantor Pajak Pratama status KSWP pelaku usaha UMK Obat Bahan Alam Mengalihkan komoditi target pendampingan	UMK Pangan Olahan: 1. Melakukan review dan kelengkapan dokumen UMK yang akan mengajukan di sertifikasi 2. Koordinasi dengan pic e -sertifikasi direktorat pengawasan produksi dan Kantor Pajak Pratama status KSWP pelaku usaha UMK Obat Bahan Alam: Mengirimkan Nota Dinas kepada Kedeputian 2 terkait pengalihan komoditi dari obat	Selesai	-	-	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pelaku usaha mengundurkan diri sebagai target pendampingan	dari Obat Bahan Alam ke Pangan Olahan	bahan alam ke pangan olahan						
		Sep	1. Telah dilakukan penyesuaian target pendampingan menjadi 5 UMK Pangan Olahan 2. Perlu dilakukan revisi SK target pendampingan, namun masih menunggu balasan dari PMPU untuk pengalihan komoditi 2. Sampai dengan bulan Agustus telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 4 pelaku usaha pangan 3. Telah dilakukan penerbitan IP CPPOB sebanyak 3 dari 5 target pendampingan	Melanjutkan tahapan pendampingan kepada UMK yang menjadi target pendampingan	Menyusun perencanaan untuk fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan	Selesai	-	-	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Jul	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan : 1. Operasi Pengawasan pada tanggal 25 Juni 2025 di Toko AKIAN yang beralamat di Dusun Parit Kelapa RT 003 RW 000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung. 2. Dilakukan Gelar Perkara dengan dasar LK nomor LK/01-26/BPOM-PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 3. Dikeluarkannya SPDP dengan	1. Proses Pemberkasan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan 2. Dilakukan pengusulan revisi target RAPK	1. Pemenuhan Alat bukti berupa Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka 2. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum 3. Pengusulan revisi target RAPK di bulan Juli	Selesai	-	-	Ya	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			nomor SPDP/01-26/BPOM-PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 Nilai Indikator ini didapatkan dari : 1. Tahapan TAHAP 2 atas Perkara LK//02-25/BPOM-PPNS.7B/IX/2025, dan 2. Tahapan SPDP atas Perkara K/01-26/BPOM-PPNS.20B/VI/2026 Kendala : Dalam proses penyidikan di bulan Juni belum ditemukan kendala								oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka
		Agt	Nilai Indikator Kinerja ini dihasilkan melalui: 1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Diterbitkannya SPDP a.n Terlapor R dengan nomor SPDP dengan nomor SPDP/01-26/BPOM-PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 Upaya	Proses Pemberkasan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Koordinasi secara intensif dengan Jaksa Peneliti dan Korwas PPNS	Selesai	-	-	Ya	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Ahli 2. Telah dilakukan Koordinasi dengan Jaksa Peneliti pada tanggal 22 Juli 2026 3. Telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Tersangka a.n R dengan nomor S.Tap.Tsk/01-26/BPOM-PPNS.20B/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 4. Telah dilakukan Pemeriksaan Tersangka dilanjutkan penyusunan Berkas Perkara 5. Pada buan Juli juga dilakukan Revisi POK terkait penyesuaian anggaran kegiatan penindakan berupa revisi angagran pelatihan PPNS dan penyesuaian di anggaran pemberkasan 6. Telah dilakukan revisi RAPK dengan dasar pengurangan target perkara dari 2 menjadi 1 perkara Kendala Hasil perkembangan perkara R patut diduga akan ada tambahan tersangka sesuai hasil Koordinasi dengan Jaksa Peneliti sehingga akan dilakukan Gelar Perkara naik Penyidikan dan								Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Pemeriksaan Saksi-saksi kembali untuk Tersangka yang lain								
		Sep	Nilai Indikator Kinerja ini dihasilkan melalui: 1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) Nomor B-PD.03.03.20B.08.26.1178 tanggal 26 Agustus 2026 Upaya 1. Telah dilakukan koordinasi kelengkapan formil dan materiil pada tanggal 10 Agustus 2026 2. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Ahli tambahan hasil Koordinasi dengan JPU 3. Telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Tersangka a.n RT dengan nomor S.Tap.Tsk/02-26/BPOM-PPNS.20B/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 4. Telah dilakukan Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) a.n TSK R dengan	1. Koordinasi dengan Jaksa Peneliti sesuai Peraturan Perundang-undangan 2. Dilakukan Revisi Anggaran di QCD	1. Koordinasi dengan Jaksa terkait urgensi Ahli Pidana, apabila dirasa sudah cukup alat bukti dari Berkas yang kita sampaikan maka tidak diperlukan lagi BAP Ahli pidana sehingga anggaran bisa dialihkan ke kegiatan yang lain 2. Dilakukan revisi anggaran dari anggaran perjadin ke non perjadin, kemudian dalam rangka pencapaian nilai NKA dari hasil efisiensi SBK QCD maka akan dialihkan sekira 10% QCD ke AEA atau sekira Rp 12.071.000	Selesai	-	-	Ya	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			nomor Surat Nomor B PD.03.03.20B.08.26.1178 tanggal 26 Agustus 2026 Kendala 1. BAP Ahli Pidana terhadap TSK baru a.n RT belum bisa dilakukan dikarenakan keterbatasan Anggaran 2. Anggaran yang tersedia di QCD akan banyak bergeser ke anggaran pemberkasan 3. RPD tidak tercapai dikarenakan belum terserapnya Anggaran Pelatihan PPNS yang direncanakan di bulan Agustus. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan terkait efisiensi SBK Dimungkinkan Capaian di TW III akan melebihi 110%								
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Jul	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Mei secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 21 (dua puluh satu) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan	1. Monitoring Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Melakukan Monitoring lintas fungsi terhadap Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dit CT	Selesai	-	-	Ya	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			melalui secara tepat waktu pada tanggal 8 Juni 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Mei, sebanyak 105 link dari 124 link telah ditakedown (84,68%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Juni telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Juni telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 30 (tiga puluh) data dengan 46 data kerawanan								

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Kendala : s.d Juni dalam pemenuhan Nilai Indikator Kinerja dan anggaran tidak terdapat kendala								
		Agt	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 10 (sepuluh) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 23 Juli 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Juni, sebanyak 144 link dari 145 link telah ditakedown (99,31%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital secara tepat waktu	Selesai	-	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			(b) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 5 (lima) data dengan 7 data kerawanan Kendala : Tidak ada kendala dalam pemenuhan IKU ini								
		Sep	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 9 (sembilan) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 20 Agustus 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform	Laporan Profiing Siber memanfaatkan Open Source Intelligence Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas	Selesai	-	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan,

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			takedown s.d Juli, sebanyak 151 link dari 155 link telah ditakedown (97,42%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Agustus telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Penambahan Rekomendasi yang diberikan oleh Dit CT pada bulan Juli terkait fungsi Kerawanan dan penggalangan sebanyak 4 Rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya. (c) Sehingga s.d Agustus Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah sebanyak 7 (tujuh) Rekomendasi 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data dengan 15 data kerawanan Kendala : Anggaran AEA untuk profiling Siber							pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			hanya tersisa 1 kali perjalanan dinas dalam kota sehingga akan dimungkinkan melaporkan NIHIL Dimungkinkan Capaian di TW III akan tercapai 100%								
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Jul	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Sampai dengan bulan Juni 2026, seluruh tahapan Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) telah selesai dilaksanakan, termasuk penyempurnaan data dukung pada aplikasi Evortala sesuai hasil verifikasi tim evaluator. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga telah melaksanakan Pelatihan Pelayanan Publik pada bulan Juni 2026 untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menunggu hasil	1. Menunggu Hasil Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 dari Biro Hukum dan Organisasi sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	1. Melakukan Koordinasi dan Monitoring terhadap penyampaian Hasil Penilaian PEKPPP dari Biro Hukum dan Organisasi 2. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik secara berkala untuk memastikan fasilitas pelayanan publik tetap dalam kondisi baik.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penilaian PEKPPP Tahun 2026 dari Biro Hukum dan Organisasi.								
			Realisasi : Jumlah sampel pihak ketiga bulan Juni = 33 sampel (sampel DAK) Kendala : Sampel masuk bersamaan dalam jumlah banyak dengan parameter uji bervariasi sedangkan timeline 15 HK Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan penjadwalan pengujian berdasarkan prioritas sampel dan timeline, WFO pada hari jumat	Agar dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan pemilik sampel DAK agar sampel tidak masuk dalam waktu bersamaan	Melakukan kaji ulang permintaan pengujian sampel DAK dari dinas kesehatan	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel
			Realisasi : Pada bulan Juni telah dilakukan pengujian sebanyak 21 sampel pihak ketiga. Terdapat 2 sampel yang melewati 48 jam karena terjadi gangguang pada aplikasi SIPT	Melakukan mitigasi risiko terkait hal tersebut	Akan melakukan mitigasi risiko terkait gangguan SIPT pada sampel pihak ketiga	Selesai	-	-	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
											layanan pengujian sampel narkotika
			Sampai dengan Bulan Juni terdapat 2 Sertifikasi CDOB dan 1 IP CPPOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-	Selesai	-	-	Ya	F-24	Pungutan liar yang dilakukan oleh petugas layanan sertifikasi kepada pelaku usaha
		Agt	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator dengan target tahunan. Sampai dengan bulan Juli 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.03.04.22.07.26.1317 tanggal 16 Juli 2026 terkait perubahan lingkungan strategis, pelaksanaan PEKPPP, serta pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Tindak lanjut pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 telah dilakukan melalui penambahan responden Formulir F03 sebanyak 5 orang sesuai ketentuan PEKPPP Nasional. Selain itu, telah dilaksanakan rapat evaluasi internal terkait penetapan standar pelayanan publik dan penetapan maklumat	Melakukan persiapan dan inventarisasi data dukung penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan sesuai aspek dan indikator penilaian.	1. Melakukan persiapan pelaksanaan Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan melalui inventarisasi data dukung. 2. Melakukan monitoring terhadap proses integrasi dan pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 melalui aplikasi Evortala.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pelayanan sebagai tindak lanjut perubahan pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Terkait Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah memperoleh informasi dan ketentuan pelaksanaan melalui Nota Dinas tersebut. Pelaksanaan pendataan direncanakan pada periode 22 Juli s.d. 30 September 2026 melalui aplikasi Evortala Modul Pelayanan Inklusif, sehingga pada bulan Juli masih dalam tahap persiapan pelaksanaan Kendala : Belum dilakukan penginputan Pendataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada aplikasi Evortala karena masih dalam tahap persiapan dan pemenuhan data dukung sesuai dengan aspek dan indikator yang telah ditetapkan.								
			Realisasi : Jumlah sampel pihak ketiga sampai dengan bulan Juli = 42 sampel Kendala :	Agar dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan pemilik sampel DAK agar sampel tidak	Melakukan kaji ulang permintaan pengujian sampel DAK dari dinas kesehatan	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Sampel masuk bersamaan dalam jumlah banyak dengan parameter uji bervariasi sedangkan timeline 15 HK Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan penjadwalan pengujian berdasarkan prioritas sampel dan timeline, WFO pada hari jumat	masuk dalam waktu bersamaan							
			Jumlah sampel pihak ketiga masuk dan selesai uji s/d Juli = 207 sampel	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
			Layanan sertifikasi yang telah dilaksanakan hingga bulan Juli: - 2 Rekomendasi Sertifikasi CDOB - Penerbitan 5 IP CPPOB - 1 Verifikasi IP CPPOB	-	-	Selesai	-	-	Ya	F-24	Pungutan liar yang dilakukan oleh petugas layanan sertifikasi kepada pelaku usaha
		Sep	Pada bulan Agustus 2026 telah diperoleh hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,89 dengan capaian 101,04% terhadap target tahunan yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah memenuhi target yang ditetapkan.	Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan dan	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada aspek yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian IPP.		meningkatkan kualitas pelayanan publik.						
			Realisasi : Jumlah sampel pihak ketiga sampai dengan bulan Agustus = 42 sampel Kendala : Pada bulan Agustus tidak terdapat kendala karena tidak ada sampel pihak ketiga Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunkasi dengan fungsi pemeriksaan terkait rencana sampel DAK yang akan masuk laboratorium	Agar dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan pemilik sampel DAK agar sampel tidak masuk dalam waktu bersamaan	Melakukan kaji ulang permintaan pengujian sampel DAK dari dinas kesehatan	Selesai	-	-	Tidak	-	-
			Jumlah sampel Nappza masuk dan selesai uji s/d Agustus = 225 sampel.	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Layanan sertifikasi yang telah dilaksanakan hingga bulan Agustus: - 2 Rekomendasi Sertifikasi CDOB - Penerbitan 4 IP CPPOB - 1 Verifikasi IP CPPOB - 1 Audit SMKPO	-	-	Selesai	-	-	Ya	F-24	Pungutan liar yang dilakukan oleh petugas layanan sertifikasi kepada pelaku usaha
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Jul	Realisasi Kegiatan : Merupakan indikator dengan target tahunan,beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Juni diantaranya yaitu : 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan perencanaan 2. Menjalankan inovasi dan program AOC sesuai perencanaan, dilaksanakan CFD di tanggal 26 Juni 2026 3. Melakukan kegiatan sharing session terkait SAKIP dengan Balai Besar POM di Mataram 4. Melakukan pelatihan pelayanan publik tanggal 15 Juni 2026 5. Melakukan survei dan pengukuran pemahaman terkait gratifikasi dan benturan kepentingan melalui quiz POKJA 5 6. Melaksanakan rapat monev tim PPID dan pengisian data pada aplikasi e-vortala 7. Melaksanakan kegiatan	1. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja 2. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian nilai LKE	1. Akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja di bulan juli 2026 2. Akan dilakukan evaluasi hal-hal yang masih belum optimal (jika surat telah evaluasi resmi telah terbit)	Belum Selesai	Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja di bulan Juli pada tanggal 29 Juli 2026. Telah diterima surat resmi terkait hasil penilaian ZI BBPOM di Pangkal Pinang, namun belum dilakukan evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil nilai tersebut.	September	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengambilan sumpah pegawai CPNS menjadi PNS. 8. Melakukan evaluasi kinerja pegawai terkait perpindahan jabatan Kendala : Berdasarkan nota dinas inspektrur utama perihal Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2026,total nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang sebesar 89,06 (di bawah target tahun 2026 yaitu 90,40)								
		Agt	Realisasi Kegiatan : Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Juli diantaranya yaitu : 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan perencanaan 2. Melakukan kegiatan sharing session Pembangunan ZI menuju WBBM dengan Balai Besar POM di Aceh 3. Melakukan TL Pemenuhan dokumen data dukung hasil monitoring dan evaluasi PPID 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pegawai yang di rotasi per Januari 2026 5. Melakukan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP melalui pelatihan di	1. Melakukan evaluasi terkait hasil nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang untuk langkah perbaikan kedepannya 2. Melakukan evaluasi atas hasil survei BerAKHLAK dalam upaya peningkatan implementasi BerAKHLAK di BBPOM Pangkal Pinang 3. Melakukan reviu terhadap rencana kerja pembangunan ZI yang	1. Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi pada hasil evaluasi atau nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang 2. Melakukan evaluasi hasil survei BerAKHLAK dan menyusun rencana tindak lanjut 3. Mereviu, menyusun dan menetapkan revisi rencana kerja pembangunan ZI tahun 2026	Belum Selesai	Telah dilaksanakan penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi pada hasil hasil evaluasi pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang Tahun 2026 dan revisi Renja pembangunan Zona Integritas Tahun 2026. Namun,	September	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			ideas 6. Pelaksanaan internalisasi (Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Whistleblowing System, Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan) melalui konten di media sosial Kendala : 1. Berdasarkan nota dinas inspektur utama perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBMN Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang,total nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang sebesar 89,06 (di bawah target tahun 2026 yaitu 90,40) 2. Hasil survei BerAKHLAK BBPOM di Pangkal Pinang terdapat 3 parameter yang mendapatkan nilai tidak sehat yaitu Harmonis, adaptif dan kolaboratif 3. Dari hasil rapat monitoring dan evaluasi renja sd juni 2026, dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian atas renja yang disusun pada awal tahun 2026.	telah disusun sehingga dapat lebih efektif dan efisien			penyusunan tindak lanjut hasil survei berAKHLAK belum dilaksanakan, sesuai timeline akan dilaksanakan di bulan september.				zona integritas menuju WBBM
		Sep	Realisasi Kegiatan : Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Agustus	1. Melakukan evaluasi atas hasil survei BerAKHLAK dalam upaya	1. Melakukan evaluasi hasil survei BerAKHLAK dan menyusun rencana tindak	Selesai	-	-	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			diantaranya yaitu : 1. Rapat pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan ZI tahun 2026 2. Pelaksanaan inovasi pulau ketawai (pemberian penghargaan Pegawai Panutan) 3. Pelaksanaan self assesment AKIP dan desk dengan inspektorat 4. Pemberian penghargaan petugas layanan publik 5. Pelaksanaan kegiatan sesuai renja masing-masing area perubahan 6. Melaksanakan reviu dan penyusunan Revisi Renja Pembangunan ZI Tahun 2026 Kendala : 1. Hasil survei BerAKHLAK BBPOM di Pangkal Pinang terdapat 3 parameter yang mendapatkan nilai tidak sehat yaitu Harmonis, adaptif dan kolaboratif 2. Inovasi unggulan yang dimiliki oleh BBPOM di Pangkal Pinang belum mampu menunjukkan dampak inovasi bagi masyarakat	peningkatan implementasi BerAKHLAK di BBPOM Pangkal Pinang 2. Lakukan Penguatan pelaksanaan inovasi Tribakti Obat dan Makanan dengan mengangkat terkait terasi Toboali (buat perencanaan mulai dari pembentukan tim efektif pelaksanaan inovasi, rencana tahapan kegiatan, serta dampak yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi)	lanjut 2. Membentuk tim pelaksana, membuat perencanaan dan pelaksanaan inovasi Tribakti Obat dan Makanan terkait Terasi Toboali aman						BPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait Reformasi Birokrasi, pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM
25	Nilai AKIP UPT BPOM	Jul	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP,	Hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan Monev BBPOM di Pangkal	1. Melakukan penyusunan Laporan Monev paling lama tanggal 10 Juli 2026	Selesai	-	-	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pada bulan Juni telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Pelaporan monev melalui e-bappenas 3. Sharing SAKIP dengan BBPOM di Mataram pada tanggal 11 Juni 2026 Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	Pinang telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan, agar terus dipertahankan pada periode-periode berikutnya. Agar dipastikan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai perencanaan yang dibuat	2. Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal triwulan II paling lama 15 Juli 2026 3. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan II paling lama tanggal 20 Juli 2026 4. Melakukan penyampaian TL rekomendasi Evaluasi AKIP tahun 2025 di SAPA APIP						sesuai dengan pedoman SAKIP
		Agt	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan pengelolaan SAKIP diantaranya : 1. Penyampaian Laporan Monev di E-Performance 2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal TW II Tahun 2026 3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2026 4. Pelaporan Monev melalui E-BAPPENAS 5. Rapat Evaluasi Kinerja Interim TW II	1. Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja 2. Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada Perencanaan Kinerja dengan adanya Penyesuaian Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Juli sebelum dilaporkan 2. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Melakukan pelaporan	Selesai	-	-	Ya	SDM-06 SDM-14	1. Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Tahun 2026 Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Lakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM	monev bulanan sesuai pedoman						
		Sep	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan pengelolaan SAKIP diantaranya : 1. Penyampaian Laporan Monev di E-Performance 2. Pelaporan Monev melalui E-BAPPENAS 3. Rapat Evaluasi Bulan Juli Tahun 2026 4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self Assesment) Evaluasi SAKIP (7 Agustus 2026) 5. Desk Evaluasi SAKIP (31 Agustus	1. Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja. 2. Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada Perencanaan Kinerja dengan adanya Penyesuaian Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Agustus sebelum dilaporkan (16 tabel menjadi 20 tabel) 2. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. PK dan RAPK sudah disetujui dan	Selesai	-	-	Ya	SDM-06 SDM-14	1. Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2026) 6. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RKAKL 2027 (20-21 Agustus 2026) Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026 3. Lakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM	ditetapkan per 31 Juli 2026 3. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman. Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM						
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Jul	Merupakan indikator dengan target tahunan.Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juni telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran	1. Target serapan anggaran tw II tidak tercapai, agar direviu dan disusun kembali perencanaan kegiatan untuk mencapai target serapan triwulan III. 2. Lakukan penyesuaian target output dan	1. Menyusun RPD tw III dengan pendekatan target serapan anggaran triwulan III 2. Melakukan revisi target output tw II 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan RPD Juni 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan realisasi output sd Mei pada aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Juni sebesar 97,92. Komponen Capaian Output Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 89,61. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	pastikan target yang disusun dapat tercapai setiap bulannya	masing-masing penanggungjawab output.						diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan
		Agt	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan Monitoring Anggaran dan RPD Juli 2026	1. Lakukan Penyesuaian Target Output (RO) sesuai usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM Kewenangan DJA TA 2026 dalam rangka Penajaman Belanja dan pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab Output (RO) dan revisi penyesuaian Target Output (RO) TW III (Bulan 07-12) 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Agustus 2026 3. Melakukan pemutakhiran	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09 dan O-36	1. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. 2. Lambatnya proses pencairan tagihan 3. Tidak bisa

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan Target Output 2026 dan Realisasi Output sd Juni pada Aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Juli masih belum optimal, karena nilai Capaian Output belum ada (Penginputan paling lama 10 Agustus 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan Anggaran mendapat nilai 88,58. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir TW. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA sebagai komponen NKA	2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran TW III 3. Lakukan penyusunan RPD / halaman III DIPA TW III sesuai Revisi DJA	Hal III DIPA TW III Tahun 2026 paling lama Agustus 2026						diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 Triwulan kedepan
		Sep	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan	1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab Output (RO)	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09 dan O-36	1. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap.

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan Monitoring Anggaran dan RPD Agustus 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Melakukan penginputan Target Output 2026 dan Realisasi Output sd Juli pada Aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Agustus masih belum optimal, karena nilai Capaian Output belum ada (Penginputan paling lama 10 hari setelah bulan Agustus 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan Anggaran mendapat nilai 91,29. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir TW. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA sebagai komponen NKA	berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran TW III	2. Monitoring pencapaian RPD bulan September 2026						2. Lambatnya proses pencairan tagihan 3. Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 Triwulan kedepan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Jul	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Juni telah dilakukan tindak lanjut atas hasil reviu daftar risiko semester I tahun 2026 oleh inspektorat II pada pelaksanaan Bimtek Manrisk bulan Mei yang lalu dan melakukan penyesuaian pada aplikasi SAPAAPIP Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Hasil reviu oleh inspektorat II dalam Bimtek Manrisk agar dijadikan pedoman dalam penyusunan daftar risiko semester 2 tahun 2026, sehingga tidak terjadi kesalahan berulang.	Melakukan reviu atas RTP sem 1 thn 2026 serta Menyusun daftar Semester 2 tahun 2026 dan menyampaikan pada aplikasi SAPAAPIP sebelum 20 Juli 2026	Selesai	-	-	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
		Agt	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juli telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Melakukan Reviu Risiko Semester I Tahun 2026 2. Menyusun Risiko Semester II Tahun 2026 berdasarkan Hasil Reviu dari Inspektorat II saat Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (sebagai Pedoman) sehingga tidak terjadi kesalahan berulang	1. Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan sosialisasi Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko	Belum Selesai	Sosialisasi Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai akan dilakukan di bulan September	September	Ya	SDM-10	Penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3. Melaporkan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP secara lengkap dan tepat waktu Dari hasil Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi dari Inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BBPOM di Pangkal Pinang pada Tahun 2026								
		Sep	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Agustus telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Penilaian Mandiri dan Penyampaian Data Dukung Pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM Tahun 2026 (mengisi Kertas Kerja Evaluasi 18-28 Agustus 2026) 2. Menindaklanjuti Monitoring Kepatuhan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2026 pada SAPAAPIP 3. Pegawai mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengelolaan risiko	1. Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan sosialisasi Risiko Semester II Tahun 2026 kepada seluruh pegawai 2. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko	Selesai	-	-	Ya	SDM-10	Penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Dari hasil Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi dari Inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BBPOM di Pangkal Pinang pada Tahun 2026								

2. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Utama memberikan beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan kedepannya terkait implementasi SAKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi akip tahun 2025 dan melaksanakan tindak lanjut sesuai rencana aksi yg telah disusun. Berikut rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi sakip tahun 2025.

Tabel 3.138 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
A	PERENCANAAN KINERJA		
1	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II
2	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja (jika ada)	TW II - TW IV
3	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan evaluasi internal	TW II - TW IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
4	Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang	Bersurat ke biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin	TW II
B	PENGUKURAN KINERJA		
1	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 3. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan	TW I - TW IV
2	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi	TW I - TW IV
3	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data setiap bulan	TW II - TW IV
C	PELAPORAN KINERJA		
1	Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan	Sharing/diskusi dengan UPT lainnya terkait mekanisme pengumpulan data kinerja	TW II

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
	pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai		
2	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	Melampiran lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada laporan kinerja	TW II - TW IV
3	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV
4	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV
D	EVALUASI INTERNAL		
1	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	TW II - IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
2	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >120% pada notulen rapat evaluasi	TW I - IV

Berikut rencana aksi hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan III tahun 2026.

Tabel 3.139 Tindak Lanjut Triwulan III Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
A	PERENCANAAN KINERJA						
1	Belum ada matriks kesesuaian Renstra BBPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II	Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM			Telah membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM
2	1. Belum membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Belum menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	TW II - TW IV	1. Pada Laporan Kinerja Tahun 2025 telah melampirkan Tabel Identifikasi Kesesuaian Nomenklatur Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan beserta justifikasi ketidaksesuaiannya (**Lampiran 26**) 2. Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II 2026 telah melampirkan Tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan tahun 2026 (**Lampiran 12** dan **Lampiran 13**)	1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan tahun 2026 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja (tahun 2026) antar dokumen perencanaan di laporan kinerja interim tahun 2026	TW IV	1. Telah membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Telah menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja
3	Belum melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal dan melampirkannya pada laporan evaluasi internal	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	TW II - TW IV	1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal Bulan Juni 2026 (yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2026) 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen	1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal selanjutnya 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di	TW IV	Telah melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal dan melampirkannya pada laporan evaluasi internal

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
				perencanaan di laporan evaluasi internal Triwulan II	laporan evaluasi internal selanjutnya		
4	Belum bersurat mengajukan penetapan SKP Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang ke biro SDM	Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	TW II	Bersurat ke biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin			Telah bersurat ke Biro SDM mengajukan penetapan SKP Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang
B	PENGUKURAN KINERJA						
1	Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive namun belum mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	TW I - TW IV	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 3. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan sampai dengan Bulan September 2026	Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan untuk periode selanjutnya	TW IV	1. Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Telah mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja pada google drive sampai dengan data Bulan September 2026
2	Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive namun belum mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	TW I - TW IV	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi (sampai dengan Bulan September 2026)	Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi untuk periode selanjutnya	TW IV	Telah membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive dan mengunci link drive setiap bulannya
3	Belum mendokumentasikan kertas kerja perhitungan capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	TW II - TW IV	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data sampai dengan Bulan September 2026	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data untuk periode selanjutnya	TW IV	Telah mendokumentasikan RHPK pada media pengumpulan sumber data sampai dengan Bulan September 2026
C	PELAPORAN KINERJA						

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Belum mereviu kembali pengumpulan data kinerja	Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai	TW II	Telah mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja dan melakukan upaya berikut: 1. Sharing SAKIP dengan BBPOM di Mataram termasuk didalamnya membahas mekanisme pengumpulan data kinerja 2. Melakukan revisi SK Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang 3. Membuat Nota Dinas Pengelolaan Data Kinerja Melalui Situs Madu Pelawan			Telah mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja
2	Belum mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	TW II - TW IV	Telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan reviu berjenjang: 1. Membuat kolom approval pada RHPK 2. Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada Notulen dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II 3. Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada Laporan kinerja interim Internal Triwulan II (**Lampiran 23**)	Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja	TW IV	Telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan reviu berjenjang

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
3	Belum melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dan lainnya secara lebih optimal	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada: 1. Laporan kinerja tahun 2025 (tercantum **di BAB 3.1 poin h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**) 2. Laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 (tercantum **di bab 3.1 poin f Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan**) 3. Laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 (tercantum **di bab 3.1 poin g Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.3 Realisasi anggaran poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**)	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim selanjutnya	TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I dan II tahun 2026
4	Belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada: 1. Laporan kinerja tahun 2025 (tercantum **di BAB 3.1 poin**	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim selanjutnya	TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.		**h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**) 2. Laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 (tercantum **di bab 3.1 poin f Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan**) 3. Laporan kinerja interim triwulan II tahun 2026 (tercantum di **bab 3.1 poin g Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.3 Realisasi anggaran poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**)			kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I dan II tahun 2026, serta didalamnya telah menjelaskan penyebab efisiensi dan inefisiensi penggunaan sumber daya
D	EVALUASI INTERNAL						
1	Belum membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan lebih dari 110%, serta belum memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	TW II - IV	Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal Triwulan II untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan lebih dari 110%, serta memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan lebih dari 110%, serta memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	TW IV	Telah membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan lebih dari 110%, serta memonitoring progres tindak lanjut

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
							rekomendasi setiap bulannya
2	Belum menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai	TW II - IV	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan April-September 2026	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi bulan berikutnya	TW IV	Telah menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan April-September 2026

3.3 REALISASI ANGGARAN

a. **Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja**

Pada Triwulan III 2026, total realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar Rp8.841.624.757 dari pagu total sebesar Rp11.655.304.000 dengan capaian 75,86%. Pada Triwulan III capaian penyerapan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sudah mencapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran khusus triwulan III dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 65% capaian 69,87%; Belanja Barang dengan target 70% dan capaian 71,65%; dan Belanja Modal dengan target 70% dan capaian 100%.

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dibandingan dengan realisasi anggaran di Balai Besar POM di Pangkal Pinang:

Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW III)	Realisasi	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75	99.84	101.10	357,295,000	283,319,094	278,096,898	98.16
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5,983,000	5,982,000	5,982,000	100.00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9	100.00	101.11	144,329,000	77,232,841	35,370,629	45.80
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	7,862,400	3,500,000	0	0.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5	100	103.63	8,985,600	4,000,000	0	0.00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	85	88.99	104.70	1,672,400	1,451,000	1,445,700	99.63

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW III)	Realisasi	%
	ditindaklanjuti oleh stakeholder							
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	2,860,120	2,457,500	2,565,410	104.39
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	100	106.10	17,091,480	14,681,500	15,345,890	104.53
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	100	103.52	154,885,990	101,610,957	120,698,987	118.79
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	99.04	106.21	213,192,010	148,105,306	134,327,641	90.70
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	96.75	103.12	14,695,500	10,095,600	10,547,725	104.48
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97.22	106.84	14,986,000	9,693,900	6,892,400	71.10
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	23,355,500	15,326,585	18,189,084	118.68
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.5	78.7	100.25	3,612,116,000	3,134,257,921	3,064,584,028	97.78
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	22,160,000	22,160,000	22,160,000	100.00
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85	88.13	101.47	116,138,000	83,304,000	91,758,800	110.15
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100	68,788,000	46,846,000	58,570,000	125.03
18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100	71,827,000	44,821,000	42,893,100	95.70
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	36,173,000	36,173,000	36,173,000	100.00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	85.36	91.36	107.03	20,097,000	15,915,000	12,360,000	77.66

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW III)	Realisasi	%
	IP CPPOB pangan olahan							
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.5	77.5	100.00	120,822,000	102,695,612	88,059,480	85.75
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	5,230,000	4,482,000	4,482,000	100.00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	7,591,000	5,140,000	3,831,000	74.53
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	673,673,000	570,494,681	580,004,120	101.67
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	157,219,000	105,983,192	119,015,503	112.30
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5,450,804,000	3,832,743,687	3,856,185,746	100.61
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	325,472,000	221,775,337	232,085,616	104.65
	TOTAL			102.44	11,655,304,000	8,904,247,713	8,841,624,757	99.30

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Apabila dilihat dari sasaran kegiatan, realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.141 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)		
		Pagu	Target (RPD TW III)	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4,601,470,000	3,833,874,204	3,716,206,392	96.93
2	Meningkatnya efektivitas KIE	292,926,000	211,144,000	229,394,900	108.64
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20,097,000	15,915,000	12,360,000	77.66
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	120,822,000	102,695,612	88,059,480	85.75
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5,230,000	4,482,000	4,482,000	100.00
6	Layanan Publik UPT yang prima	7,591,000	5,140,000	3,831,000	74.53

No	Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)		
		Pagu	Target (RPD TW III)	Realisasi	%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6,607,168,000	4,730,996,897	4,787,290,985	101.19
	TOTAL	**11,655,304,000**	**8,904,247,713**	**8,841,624,757**	**99.30**

c. **Evaluasi dan Analisis Anggaran berisi perbandingan rencana dan realisasi anggaran per program/kegiatan dan analisa tingkat pencapaiannya.**

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000.

Pada bulan April dilaksanakan revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 dimana dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya. Penurunan target tersebut dilakukan pada KRO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), BDB.001 (Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan), BDB.002 (Desa Pangan Aman), BDB.003 (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), BDC (Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE), BMB.001 (Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT), QDG (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT), QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT), QIA.002 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT), QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT), dan QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT). Selain penyesuaian target output tersebut dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang sebesar Rp 10.808.000. Pada bulan Mei dilakukan kembali revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas

Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 dimana dilakukan pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66 (PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PANGKAL PINANG) sesuai dengan SBK 1 Perkara. Sampai dengan bulan Juni 2026 total pagu blokir Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000 dan **Pagu Total sebesar Rp 11.655.304.000**.

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.06.26.457 tanggal 22 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026, Badan POM mengusulkan revisi anggaran sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembukaan blokir anggaran Kode A yang bersumber dari PNBP TA 2026 dalam rangka menambah kegiatan utama yang mendukung penerimaan negara (PNBP) Badan POM sehingga pada bulan Juli dilakukan buka blokir anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000.

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Apabila dilihat dari Rincian Output (RO), realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.142 Perbandingan Realisasi Output dengan Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Output			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		T (RPD)	R	%
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	9	9	100.00	Rp 5,230,000	Rp 4,482,000	Rp 4,482,000	100.00
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	97	293	302.06	Rp 7,591,000	Rp 5,140,000	Rp 3,831,000	74.53
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100.00	Rp 68,788,000	Rp 46,846,000	Rp 58,570,000	125.03
4	Desa Pangan Aman	70	70	100.00	Rp 71,827,000	Rp 44,821,000	Rp 42,893,100	95.70
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	100	100.00	Rp 36,173,000	Rp 36,173,000	Rp 36,173,000	100.00
6	Masyarakat yang ditingkatkan	405	416	102.72	Rp 89,633,000	Rp 63,294,000	Rp 71,443,800	112.88

No	Kegiatan	Output			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		T (RPD)	R	%
	pengetahuannya melalui KIE							
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	108	108	100.00	Rp 14,986,000	Rp 9,693,900	Rp 6,892,400	71.10
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	72	72	100.00	Rp 7,999,000	Rp 6,634,000	Rp 5,815,000	87.65
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	4	4	100.00	Rp 26,505,000	Rp 20,010,000	Rp 20,315,000	101.52
10	Perangkat pengolah data dan komunikasi	2	2	100.00	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 24,919,500	99.68
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	61	66	107.81	Rp 1,647,956,000	Rp 1,170,101,571	Rp 1,100,427,678	94.05
12	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100	100	100.00	Rp 120,822,000	Rp 102,695,612	Rp 88,059,480	85.75
13	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45.00	100.00	Rp 5,983,000	Rp 5,982,000	Rp 5,982,000	100.00
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	80	91	114.20	Rp 20,097,000	Rp 15,915,000	Rp 12,360,000	77.66
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	157	160	101.91	Rp 183,337,000	Rp 106,892,841	Rp 57,530,629	53.82
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	444	447	100.68	Rp 357,295,000	Rp 283,319,094	Rp 278,096,898	98.16
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	12	13	108.33	Rp 21,624,000	Rp 18,590,000	Rp 19,357,000	104.13
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	180	185	102.78	Rp 406,129,000	Rp 275,138,448	Rp 283,763,437	103.13

No	Kegiatan	Output			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		T (RPD)	R	%
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT							
19	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100	100	100.00	Rp 1,964,160,000	Rp 1,964,156,350	Rp 1,964,156,350	100.00
20	Layanan BMN	50	50	100.00	Rp 2,700,000	Rp -	Rp 2,700,000	-
21	Layanan Perkantoran	75	75	100.00	Rp 6,571,469,000	Rp 4,699,362,897	Rp 4,753,856,485	101.16
	TOTAL			112.02	Rp 11,655,304,000	Rp 8,904,247,713	Rp 8,841,624,757	99.30

Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pengelolaan anggaran antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan seperti kegiatan terpadu yang sesuai SK Kegiatan Terpadu terdapat penyesuaian yang mana terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau dilakukan secara daring untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan rencana penarikan dana setiap triwulan.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.
5. Melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran sampai dengan triwulan II dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.
6. Memonitoring perencanaan dan pengelolaan anggaran secara berkala.

Berikut penyesuaian anggaran yang sudah dilaksanakan Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada triwulan III untuk mengoptimalkan anggaran serta efktif dan efisien:

Tabel 3.143 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.06.26.457 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026 tanggal 22 Juni 2026 yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan IKU Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	• Dilakukan revisi untuk pembukaan blokir anggaran Kode A yang bersumber dari PNBP TA 2026 dalam rangka menambah kegiatan utama yang mendukung penerimaan negara (PNBP) Badan POM	Juli
2	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang berkenaan dengan IKU Jumlah desa pangan aman	• Melakukan penyesuaian anggaran Belanja Bahan pada 521211 pada detail ATK dan Pengadaan Seminar Kit • melakukan penambahan belanja Belanja Jasa Profesi pada akun 522151	Juli
3	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan Koordinasi/Bimbingan Teknis/Fgd Laboratorium yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Perjalanan Koordinasi/Konsultasi Pimpinan yang berkenaan dengan IKU Nilai Akip Upt BPOM	• Melakukan penambahan akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 untuk kegiatan koordinasi • Melakukan penyesuaian anggaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 untuk kegiatan Redistribusi Pegawai	Juli
4	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan IKU IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • kebutuhan anggaran pada kegiatan Gelar Perkara yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• Penyesuaian anggaran pada anggaran Penggandaan Bahan dan Pencetakan dan Produk Informasi Keamanan Pangan pada akun Belanja Bahan (521211). • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dan akun perjalanan dinas biasa (524111) pada kegiatan sarana distribusi	Agustus

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• kebutuhan penyesuaian anggaran pada Audit Sertifikasi Di Dalam Kota dan Audit Sertifikasi Di Luar Kota yang berkenaan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik UPT • kebutuhan penyesuaian anggaran pada kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang berkenaan dengan IKU Jumlah desa pangan aman	• penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524113 untuk kebutuhan perjalanan sertifikasi • penyesuaian anggara pada akun Belanja Bahan 521211 di detail Penggandaan Materi/Pencetakan/ATK dan Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan	September
6	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• kebutuhan anggaran pada Pengadaan Suku Cadang Dan Kolom, Pengadaan Baku pembanding, dan Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT • kebutuhan penyesuaian anggaran pada Pemberkasan yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• penyesuaian anggaran pada akun Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523123, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 untuk kegiatan di Pengujian • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Bahan 521211 dan akun Belanja Jasa Profesi 522151 untuk kegiatan Pemberkasan Perkara	September

d. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan, sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan. Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana).

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berikut tingkat efisiensi sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan III Tahun 2026.

Tabel 3.144 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,30	3.782.905.619	3.669.875.308	97,01	1,06	0,06	100% (Efisien)	Output dan Anggaran dihitung dari IKU yang bisa dihitung TE nya
2	Meningkatnya efektivitas KIE	100,37	211.144.000	229.394.900	108,64	0,92	-0,08	Tidak Efisien	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	107,03	15.915.000	12.360.000	77,66	1,38	0,38	95% (Efisien)	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	102.695.612	88.059.480	85,75	1,17	0,17	100% (Efisien)	

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	4.482.000	4.482.000	100,00	1,00	0,00	100% (Efisien)	
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	5.140.000	3.831.000	74,53	-	-	-	Tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	4.730.996.897	4.787.290.985	101,19	-	-	-	Tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya
	TOTAL	102,14	4.117.142.231	4.004.171.688	97,26	1,05	0,05	100% (Efisien)	Output dan Anggaran dihitung dari IKU/SK yang bisa dihitung Tingkat Efisiensinya

Rata-rata capaian output dan total anggaran (RPD dan realisasi) dihitung dari indikator-indikator yang dapat diukur tingkat efisiensinya. Dari 27 indikator kinerja utama, hanya 20 indikator yang dapat dihitung tingkat efisiensinya sehingga total RPD untuk pengukuran efisiensi sebesar Rp 4.117.142.231 (dari total RPD sampai dengan triwulan III sebesar Rp 8.904.247.713).

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 5 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh rata-rata persentase capaian output sebesar 102,14%. Hasil perhitungan tingkat efisiensi dari 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga kategorinya capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 102,14% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 97,26%.

Berikut analisis untuk perhitungan tingkat efisiensi anggaran per sasaran kegiatan:

1) Pada Sasaran Kegiatan 1 **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 3.669.875.308 atau 97,01% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sasaran

kegiatan ini yaitu Rp 3.782.905.619. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan beserta pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian; rapat koordinasi pusat dan balai dalam manajemen sampling; pembelian suku cadang dan kolom, baku pembanding, reagensia dan media mikro, alat gelas, gas laboratorium; kalibrasi peralatan laboratorium dan perbaikan alat laboratorium; pengujian sampel pihak ketiga; pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana penunjang pengujian; edukasi pelaporan ESO ke sarana pelayanan Kesehatan; pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan dan pengujian; perjalanan koordinasi dalam kota dan luar kota; operasional laboratorium keliling; *food security*; perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu obat beredar; perkuatan pengawasan iklan dan penandaan obat sesudah beredar; perkuatan pengawasan produk tembakau; pengawasan, sampling, dan evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di sarana retail; dan pendampingan kabupaten kota pangan aman. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 103,30% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,06 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,06 dengan capaian TE **100% (Efisien)**. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,06) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih besar dari capaian input (anggaran).

2) Pada Sasaran Kegiatan 2 **Meningkatnya efektivitas KIE**, anggaran yang direalisasikan telah melebihi rencana penarikan dana triwulan III. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ini sebesar Rp 229.394.900, sedangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sasaran kegiatan ini yaitu Rp 211.144.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan program Keamanan Pangan Terpadu yaitu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sedangkan capaian sasaran kegiatan (output) sebesar 100,37% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 0,92 dan Tingkat Efisiensi (TE) -0,08 dengan capaian **Tidak Efisien**. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **tidak efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (0,92) lebih kecil dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih rendah dari capaian input (anggaran). Ketidakefisienan disebabkan karena dilakukan percepatan realisasi anggaran untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan KIE dan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

3) Pada Sasaran Kegiatan 3 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 12.360.000 atau 77,66% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sasaran kegiatan ini yaitu Rp 15.915.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dan Bimtek IP CPPOB BBPOM di Pangkal Pinang. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 107,03% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,38 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,38 dengan capaian TE 95% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,38) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

4) Pada Sasaran Kegiatan 4 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 88.059.480 atau 85,75% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 102.695.612. Anggaran ini digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan penindakan dalam upaya penegakan hukum. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 100% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,17 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,17 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan keempat adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,17) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

5) Pada Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.482.000 atau 100% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 4.482.000. Total anggaran selama setahun yang dialokasikan untuk sasaran kegiatan pada tahun 2026 sebesar Rp 5.230.000 yang digunakan untuk kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 100% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,00 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kelima

adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1) sama dengan Standar Efisiensi (1) dengan capaian output sama dengan capaian input.

6) Pada Sasaran Kegiatan 6 **Layanan Publik UPT yang Prima**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 3.831.000 atau 74,53% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 5.140.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan sertifikasi, yang dijadwalkan pada periode berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.

   Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelayanan publik dan audit sertifikasi. Capaian sasaran kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

7) Pada Sasaran Kegiatan 7 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.787.290.985 atau 101,19% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sasaran kegiatan ini yaitu Rp 4.730.996.897. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pembinaan Kinerja oleh Deputi Pembina, pengelolaan limbah B3, simulasi K3, koordinasi lintas sektor, pembayaran gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, administrasi kegiatan, pengelolaan sistem akuntansi instansi, pengadaan jasa tenaga outsourcing, operasional pelaporan, peningkatan kompetensi petugas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Capaian Sasaran Kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

Tabel 3.145 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output Triwulan III Tahun 2026

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	302,06	74,53	**4,05**	**3,05**	**75% (Tidak Efisien)**	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	125,03	**0,80**	**-0,20**	**Tidak Efisien**	**Output berupa persentase progress**
4	Desa Pangan Aman	100,00	95,70	**1,04**	**0,04**	**100% (Efisien)**	**Output berupa persentase progress**
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	**Output berupa persentase progress**

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	102,72	112,88	0,91	-0,09	Tidak Efisien	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	100,00	71,10	1,41	0,41	92% (Efisien)	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	87,65	1,14	0,14	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	101,52	0,98	-0,02	Tidak Efisien	
10	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,68	1,00	0,00	100% (Efisien)	
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107,81	94,05	1,15	0,15	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
12	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100,00	85,75	1,17	0,17	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
13	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (Efisien)	
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	114,20	77,66	1,47	0,47	92% (Efisien)	Output berupa persentase progress
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,91	53,82	1,89	0,89	88% (Efisien)	
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,68	98,16	1,03	0,03	100% (Efisien)	
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	108,33	104,13	1,04	0,04	100% (Efisien)	
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	102,78	103,13	1,00	0,00	Tidak Efisien	
19	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
20	Layanan BMN	100,00	-	-	-	-	Output berupa persentase progress dan Tidak dapat dihitung TE nya
21	Layanan Perkantoran	100,00	101,16	0,99	-0,01	Tidak Efisien	Output berupa persentase progress
	TOTAL	112,02	99,27	1,13	0,13	100% (Efisien)	Dihitung dari output yang dapat dihitung tingkat efisiensinya

Pada awal tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Namun pada Bulan Juli 2026 terdapat tambahan 1 Rincian Output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi. Dari 21 Rincian Output (RO), 20 RO dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 1 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya yaitu RO Layanan BMN. RO Layanan BMN belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) sampai dengan Triwulan III ini. Target (RPD) Anggaran RO Layanan BMN dialokasikan pada Bulan November 2026.

Dilihat dari data tabel di atas, 20 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,13 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,13) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh efisiensi dalam penggunaan sumber daya sampai dengan triwulan III antara lain:

1. Monitoring realisasi anggaran dan RPD (Rencana Penarikan Dana) sampai dengan triwulan III.
2. Melakukan revisi anggaran dan revisi kegiatan sesuai dengan prioritas dan pagu anggaran yang ada.
3. Melakukan revisi halaman III DIPA sampai dengan Triwulan III.
4. Mereviu kembali target output tahunan sesuai dengan pagu anggaran 2026 dan mengajukan revisi target output melalui revisi kewenangan DJA.
5. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output pada triwulan III.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) Bulan Januari September 2026.

Namun Balai Besar POM di Pangkal Pinang tetap terus mempertahankan efisiensi hingga akhir tahun. Beberapa upaya yang terus dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk mencapai efisiensi di tahun 2026 yaitu:

1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan melakukan revisi kegiatan, serta melakukan optimalisasi anggaran.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) setiap bulannya pada rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres capaian Rincian Output.

3. Melakukan revisi halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana) setiap triwulan.
4. Melakukan revisi anggaran baik kewenangan KPA, Kanwil maupun DJA untuk pergeseran anggaran dalam rangka mencapai target RO dengan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output setiap triwulan pada aplikasi sakti.

BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam perhitungan NKO Balai Besar POM di Pangkal Pinang dinilai dari 7 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut hasil pengukuran NKO pada Triwulan III Tahun 2026:

1. **12 (dua belas) indikator yang capaiannya Sangat Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, 5. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, 9. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, 10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, 11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dan 12. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
2. **7 (enam) indikator yang capaiannya Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, 2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, 4. Jumlah desa pangan aman, 5. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, 6. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dan 7. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Berdasarkan tabel di atas, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026, tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di normalisasi karena 19 indikator yang dapat diukur capaiannya kurang dari 110%. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026 sebesar **102,37%** dengan predikat **Istimewa**.

Pada Triwulan III, tidak terdapat Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang tidak mencapai target. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang masih di rentang 100 hingga dibawah 110. Walaupun terdapat kendala-kendala dalam bulan berjalan selama Triwulan III tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dan dapat ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja tetap optimal.

4.2 SARAN

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

1. Mengajukan permintaan perbaikan untuk UPS yang rusak.
2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 4 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM
3. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Oktober
4. Akan mengusulkan kebutuhan alat laboratorium micowave digester
5. Akan dilakukan optimalisasi dan percepatan pengadaan agar kebutuhan pendukung pengujian tercukupi
6. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP
7. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA
8. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan
9. Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi bulan Oktober sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu
10. Mengingatkan kepada PIC pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melaporkan hasil pengawasan di SIPT sesuai dengan target dan tidak melewati bulan pengawasan dan media iklan yang belum terpenuhi

11. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026
12. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
13. Akan dilakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan.
14. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dokumen Penilaian Mandiri KKPA oleh Tim Juri Teknis yang direncanakan diumumkan pada bulan Oktober 2026.
15. Menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Juri Teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat rekomendasi perbaikan.
16. Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.
17. Menyusun dan menyelesaikan laporan hasil Monitoring dan Sertifikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah.
18. Menyusun dan menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas Desa/Kelurahan di Desa Perlang dan Kelurahan Arung Dalam, Kabupaten Bangka Tengah.
19. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam mendukung keberlanjutan penerapan keamanan pangan di Pasar Simpang Katis.
20. Menyusun perencanaan untuk fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan hingga penerbitan IP CPPOB
21. Koordinasi secara intensif dengan Jaksa Kejati dan Kejari
22. Konsolidasi dengan fungsi pemeriksaan dan infokom dalam pemenuhan TL Rekomendasi khususnya dalam hal Pengawasan dan KIE
23. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

24. Menyampaikan hasil kaji ulang kepada Dinas Kesehatan terkait
25. Melaksanakan rencana tindak lanjut hasil evalusi pembangunan ZI tahun 2026 sesuai timeline yang telah disusun dan menuangkan pada lembar monitoring dan evaluasinya yang dilengkapi dengan bukti dukung pelaksanaan.
26. Kroscek kesesuaian rumus RHPK sesuai dengan perubahan DO terbaru Manual Indikator Kinerja pada saat penginputan Data Kinerja Agustus sebelum dilaporkan (16 tabel menjadi 20 tabel)
27. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat Penyesuain Target Output (RO), sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama (Nomor PR.07.2.07.26.541), 14 Juli 2026 Hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. PK dan RAPK sudah disetujui dan ditetapkan per 31 Juli 2026
28. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman. Keputusan Kepala Badan POM Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pedoman Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu, sesuai SE Inspektur Utama (Nomor PI.04.7.06.26.01 Tahun 2026), 5 Juni 2026 tentang Sub Kriteria Lembar Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM
29. Menyusun RPD Triwulan IV (Tahunan) dengan pendekatan target serapan anggaran Triwulan IV (Tahunan) dan lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan
30. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko
31. Menindaklanjuti hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di BBPOM di Pangkal Pinang.

LAMPIRAN





Lampiran 1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti
Januari	14.00	98,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	59.00	98.75	100.00	100.00	100.00	100.00
Maret	96.00	98.75	100.00	100.00	100.00	100.00
April	147.00	98,76	100.00	100.00	100.00	100.00
Mei	208.00	98.75	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni	282.00	98.75	100.00	100.00	100.00	100.00
Juli	334.00	98,77	100.00	100.00	100.00	100.00
Agustus	385.00	98.75	100.00	99.05	100.00	100.00

Obat

Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3
Januari	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00
Februari	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00
Maret	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00
April	38.00	38.00	100.00	38.00	38.00	100.00	38.00	38.00	100.00
Mei	57.00	56.00	100.00	57.00	56.00	100.00	57.00	56.00	100.00
Juni	74.00	73.00	100.00	74.00	73.00	100.00	74.00	73.00	100.00
Juli	89.00	88.00	100.00	89.00	88.00	100.00	89.00	88.00	100.00
Agustus	104.00	104.00	100.00	104.00	104.00	100.00	104.00	104.00	100.00
September	119.00	119.00	100.00	119.00	119.00	100.00	119.00	119.00	100.00

Bulan	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan *(UPT yang melakukan pengujian)*	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud *(UPT yang melakukan pengujian)*	C1
Januari	30.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	20.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	30.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	20.00	17.00	17.00	100.00
Maret	30.00	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	20.00	20.00	20.00	100.00
April	30.00	38.00	38.00	100.00	38.00	38.00	100.00	20.00	36.00	36.00	100.00
Mei	30.00	57.00	56.00	100.00	57.00	56.00	100.00	20.00	38.00	38.00	100.00
Juni	30.00	74.00	73.00	100.00	74.00	73.00	100.00	20.00	73.00	73.00	100.00
Juli	30.00	89.00	88.00	100.00	89.00	88.00	100.00	20.00	89.00	89.00	100.00
Agustus	30.00	104.00	104.00	100.00	104.00	104.00	100.00	20.00	102.00	102.00	100.00
September	30.00	119.00	119.00	100.00	119.00	119.00	100.00	20.00	112.00	112.00	100.00

Bulan	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud 2	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman sampling sampai dengan periode yang dimaksud	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.00	6.00	100.00	10.00	#DIV/0!
Februari	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	20.00	6.00	6.00	100.00	10.00	100.00
Maret	20.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	20.00	7.00	7.00	100.00	10.00	100.00
April	20.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	8.00	8.00	100.00	10.00	100.00
Mei	20.00	38.00	38.00	100.00	38.00	38.00	100.00	20.00	15.00	15.00	100.00	10.00	100.00
Juni	20.00	57.00	57.00	100.00	57.00	57.00	100.00	20.00	19.00	19.00	100.00	10.00	100.00
Juli	20.00	72.00	72.00	100.00	72.00	72.00	100.00	20.00	22.00	22.00	100.00	10.00	100.00
Agustus	20.00	88.00	88.00	100.00	88.00	88.00	100.00	20.00	27.00	27.00	100.00	10.00	100.00
September	20.00	102.00	102.00	100.00	102.00	102.00	100.00	20.00	30.00	30.00	100.00	10.00	100.00

Obat Bahan Alam

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan
Januari	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00
Februari	15.00	15.00	100.00	12.00	12.00	100.00	100.00
Maret	22.00	22.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
April	37.00	37.00	100.00	31.00	31.00	100.00	100.00
Mei	51.00	51.00	100.00	45.00	45.00	100.00	100.00
Juni	66.00	66.00	100.00	58.00	58.00	100.00	100.00
Juli	78.00	78.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00
Agustus	87.00	89.00	97.75	90.00	92.00	97.83	97.79
September	104.00	99.00	100.00	100.00	102.00	98.04	99.02

Bulan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	C Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Februari	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	12.00
Maret	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00
April	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00
Mei	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	100.00	36.00
Juni	49.00	49.00	100.00	49.00	49.00	100.00	49.00
Juli	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00
Agustus	76.00	78.00	97.44	78.00	78.00	100.00	78.00
September	85.00	87.00	97.70	87.00	87.00	100.00	87.00

Bulan	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0.00	#DIV/0!	2.00	2.00	100.00	#DIV/0!
Februari	12.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00
Maret	15.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00
April	25.00	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00
Mei	36.00	100.00	9.00	9.00	100.00	100.00
Juni	49.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00
Juli	64.00	100.00	11.00	11.00	100.00	100.00
Agustus	78.00	100.00	12.00	12.00	100.00	99.05
September	87.00	100.00	13.00	13.00	100.00	99.34

Suplemen Kesehatan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan
Januari	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00
Februari	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Maret	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00
April	6.00	6.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00
Mei	15.00	9.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00
Juni	19.00	14.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00
Juli	22.00	19.00	100.00	24.00	24.00	100.00	100.00
Agustus	25.00	22.00	100.00	27.00	27.00	100.00	100.00
September	27.00	26.00	100.00	30.00	30.00	100.00	100.00

Bulan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	C Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai
Januari	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Februari	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00
Maret	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00
April	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00
Mei	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00
Juni	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00
Juli	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00
Agustus	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	22.00
September	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00

Bulan	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0.00	#DIV/0!	2.00	2.00	100.00	#DIV/0!
Februari	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Maret	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
April	6.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Mei	6.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Juni	15.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Juli	19.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00
Agustus	22.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00
September	25.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00

Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan
Januari	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00
Februari	27.00	27.00	100.00	32.00	32.00	100.00	100.00
Maret	44.00	44.00	100.00	52.00	52.00	100.00	100.00
April	66.00	66.00	100.00	62.00	62.00	100.00	100.00
Mei	95.00	92.00	100.00	78.00	78.00	100.00	100.00
Juni	123.00	120.00	100.00	111.00	111.00	100.00	100.00
Juli	145.00	142.00	100.00	144.00	144.00	100.00	100.00
Agustus	169.00	168.00	100.00	170.00	170.00	100.00	100.00
September	195.00	195.00	100.00	195.00	195.00	100.00	100.00

Bulan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	B Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	C Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai
Januari	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Februari	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00
Maret	44.00	44.00	100.00	44.00	44.00	100.00	44.00
April	66.00	66.00	100.00	53.00	53.00	100.00	53.00
Mei	95.00	92.00	100.00	95.00	92.00	100.00	95.00
Juni	123.00	120.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00
Juli	145.00	145.00	100.00	123.00	123.00	100.00	123.00
Agustus	169.00	169.00	100.00	145.00	145.00	100.00	145.00
September	195.00	195.00	100.00	169.00	169.00	100.00	169.00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	D Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0.00	#DIV/0!	5.00	5.00	100.00	#DIV/0!
Februari	27.00	100.00	7.00	7.00	100.00	100.00
Maret	44.00	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00
April	53.00	100.00	11.00	11.00	100.00	100.00
Mei	92.00	100.00	13.00	13.00	100.00	100.00
Juni	95.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00
Juli	123.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
Agustus	145.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00
September	169.00	100.00	21.00	21.00	100.00	100.00

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	0	0.00	#DIV/0!	-	1. Menetapkan 45 Sarana target KIE Farmakovigilans 2. Mempersiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans
Februari	-	0	45	0	Kendala : Setelah pelaksanaan KIE Farmakovigilans, masih terdapat Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso sarananya	1. Membantu pembuatan akun e-meso sarana yang belum melakukan pendaftaran 2. Membatasi jumlah akun yang difasilitasi pembuatannya sebagai strategi untuk mencapai IKU yang diharapkan
Maret	-	0	45	0	Kendala : Sarana lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April 2. Memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso
April	-	2	45	4.44	Kendala : Sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan dan lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei 2. Melakukan follow up sarana target dan memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso
Mei	-	3	45	6.67	Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni 2. Melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO
Juni	-	6	45	13.33	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 6 sarana yang telah melaporkan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					KTD/ESO hingga bulan Juni yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung dan PKM Payung. Realisasi hingga bulan Juni yaitu 13.33% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Adanya interfensi dari dokter yang tidak mengizinkan pelaporan KTD / ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai jenis KTD / ESO yang dapat dilaporkan	2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3. Agar melakukan audiensi ke dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai KTD / ESO
	-					
Juli	-	7	45	15.56	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 7 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Juli yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung, PKM Payung dan RSUD Abu Hanifah. Realisasi hingga bulan Juli yaitu 15.56% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Agustus 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	
Agustus	-	7	45	15.56	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 7 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Agustus yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung, PKM Payung dan RSUD Abu Hanifah. Tidak terdapat pelaporan pada bulan Agustus. Realisasi hingga bulan Agustus yaitu 15.56% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan website e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Beberapa sarana yang telah di followup saat pemeriksaan rutin / saat sampling (PKM Girimaya, PKM GerungganG, PKM Baturusa) masih belum melakukan pelaporan KTD/ESO karena terkendala sulit menemukan KTD/ESO dan banyaknya pelaporan program puskesmas yang harus dilakukan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan September 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO
September	-	9	45	20.00	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek,	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					terdapat 9 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan September yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung, PKM Payung, RSUD Abu Hanifah, PKM Girimaya dan PKM Sinar Baru. Realisasi hingga bulan september yaitu 20.00% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Beberapa sarana yang telah di follow up saat pemeriksaan rutin/saat sampling (PKM Gerunggang, PKM Baturusa, PKM Sungai Selan, RS Muhaya, RS Depati Hamzah, RSIA Rona, RSJD Syamsi Jacobalis) masih belum melakukan pelaporan KTD/ESO karena terkendala sulit menemukan KTD/ESO dan banyaknya pelaporan program puskesmas yang harus dilakukan	dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Oktober 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	12.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00
Februari	29.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Maret	29.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April	30.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mei	63.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni	82.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juli	107.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Agustus	124.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
September	160.00	98.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3A. Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	12.00	12.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00
Februari	29.00	29.00	100.00	37.00	37.00	100.00	100.00
Maret	30.00	29.00	100.00	39.00	39.00	100.00	100.00
April	40.00	40.00	100.00	51.00	51.00	100.00	100.00
Mei	63.00	63.00	100.00	81.00	81.00	100.00	100.00
Juni	82.00	82.00	100.00	106.00	106.00	100.00	100.00
Juli	107.00	107.00	100.00	135.00	135.00	100.00	100.00
Agustus	124.00	124.00	100.00	160.00	160.00	100.00	100.00
September	160.00	160.00	100.00	205.00	205.00	100.00	100.00

3B. Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	29.00	29.00	100.00
Maret	30.00	30.00	100.00
April	40.00	40.00	100.00
Mei	63.00	63.00	100.00
Juni	82.00	82.00	100.00
Juli	107.00	107.00	100.00
Agustus	124.00	124.00	100.00
September	160.00	160.00	100.00

3C. Ketepatan Pengam. Keputusan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	29.00	29.00	100.00
Maret	30.00	30.00	100.00
April	40.00	40.00	100.00
Mei	63.00	63.00	100.00
Juni	82.00	82.00	100.00
Juli	107.00	107.00	100.00
Agustus	124.00	124.00	100.00
September	160.00	160.00	100.00

3D. Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	29.00	29.00	100.00
Maret	30.00	30.00	100.00
April	40.00	40.00	100.00
Mei	63.00	63.00	100.00
Juni	82.00	82.00	100.00
Juli	107.00	107.00	100.00
Agustus	124.00	124.00	100.00
September	160.00	160.00	100.00

3E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	29.00	29.00	100.00
Maret	30.00	30.00	100.00
April	40.00	40.00	100.00
Mei	63.00	63.00	100.00
Juni	82.00	82.00	100.00
Juli	107.00	107.00	100.00
Agustus	124.00	124.00	100.00
September	160.00	160.00	100.00

3F. Tindak Lanjut sesuai Pedoma

Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Januari			#DIV/0!
Februari	2.00	2.00	100.00
Maret	2.00	2.00	100.00
April	3.00	3.00	100.00
Mei	3.00	3.00	100.00
Juni	7.00	7.00	100.00
Juli	7.00	7.00	100.00
Agustus	12.00	12.00	100.00
September	16.00	16.00	100.00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Februari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Maret	100	100	Keterbatasan informasi kronologi kejadian keracunan pangan	-Meningkatkan koordinasi antar fungsi dalam penanganan keracunan pangan dengan -mengusulkan pembentukan TGC dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait -Melakukan koordinasi dengan pihak terkait -Melakukan pelaporan pada SPIMKER KLB KP -Usulan untuk pembentukan TGC KLB KP
April	100	100	Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga pelaporan pada SPIMKER perlu perbaikan	Agar dilakukan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT
Mei	100	100	Kendala : Laboratorium hanya menerima sampel tanpa penjelasan kronologi dari pengirim sampel dan tidak ada kaji ulang permintaan pengujian yang sesuai dengan identifikasi epidemiologi. Laboratorium harus mengulang pengujian dengan berbagai parameter karena permintaan uji yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan penggunaan reagen dan media yang tidak efisien dan waktu pengujian yang lama. Kurangnya pemahaman mengenai penanganan sampel KLB KP.	1. Forum koordinasi dengan linsek terkait KLB 2. Agar dilakukan koordinasi dengan pengirim sampel dan pengembangan kompetensi penanganan sampel KLB KP
Juni	100	100	Tidak terdapat kendala pada bulan Juni 2026	Agar dilakukan pemantauan berita KLB KP
			Realisasi : Pada bulan Juni tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang.	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Juni karena tidak terdapat sampel Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP	
Juli	100	100	Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang	koordinasi dengan linsek terkait KLB
			Realisasi : Pada bulan Juli tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Juli karena tidak terdapat sampel Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan
Agustus	100	100	Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang	Koordinasi dengan linsek terkait KLB
	100	100	Realisasi : Pada bulan Agustus tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Terdapat perubahan tools penilaian, dengan perhitungan tools baru tidak mengubah realisasi Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Agustus karena tidak terdapat sampel KLB Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP	Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan
September	100	100	Pada bulan September terdapat pelaporan KLB KP yang diperoleh dari Media di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk pengujian sampel telah dilakukan di Labkesmas Provinsi Bangka Belitung dengan hasil E.Coli dan Rhodamin B Negatif. Berdasarkan hasil penelusuran kejadian keracunan pangan dan hasil uji dari Labkesmas bahwa kejadian tersebut diduga tidak termasuk Keracunan Pangan. Hasil penelusuran kejadian telah di input pada laporan SPIMKER	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinkes Bangka Barat dan Bangka Tengah terkait potensi kejadian KLB KP dimasa yang akan datang. Telah diusulkan BBPOM untuk dimasukkan sebagai anggota Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB KP untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi jika terjadi Keracunan Pangan.
	100	100	Realisasi : Pada bulan September tidak ada sampel KLB yang diuji oleh laboratorium tetapi berdasarkan hasil pemantauan berita KLB terdapat satu	Agar tetap dilakukan pemantauan berita KLB KP di wilayah pengawasan BBPOm di Pangkal Pinang

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			kejadian yang diberitakan sebagai keracunan pangan di Kabupaten Bangka Tengah. Sampel diuji di Labkesmas sehingga tidak dilakukan pengujian di laboratorium BBPOM di Pangkal Pinang Kendala : Tidak tersedia informasi yang disampiakan ke laboratorium. Capaian terhadap target : Capaian tetap 100% dan merupakan akumulasi dari capaian TW sebelumnya Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP	

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	96,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	96,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	96,5	96.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.33
April	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mei	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juli	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Agustus	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
September	96,5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

5A. Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** Cat: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	14.00	15.00	93.33	18.00	18.00	100.00	96.67
April	15.00	15.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
Mei	15.00	15.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
Juni	15.00	15.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
Juli	15.00	15.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
Agustus	15.00	15.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00			#DIV/0!	100.00

5B. Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai parameter uji	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	14.00	14.00	100.00
April	15.00	15.00	100.00
Mei	15.00	15.00	100.00
Juni	15.00	15.00	100.00
Juli	15.00	15.00	100.00
Agustus	15.00	15.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00

5C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	14.00	14.00	100.00
April	15.00	15.00	100.00
Mei	15.00	15.00	100.00
Juni	15.00	15.00	100.00
Juli	15.00	15.00	100.00
Agustus	15.00	15.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00

5D. Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah sampel yang dilakukan sampling dan pengujian s.d TW 2	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	14.00	14.00	100.00
April	15.00	15.00	100.00
Mei	15.00	15.00	100.00
Juni	15.00	15.00	100.00
Juli	15.00	15.00	100.00
Agustus	15.00	15.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00

5E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	14.00	14.00	100.00
April	15.00	15.00	100.00
Mei	15.00	15.00	100.00
Juni	15.00	15.00	100.00
Juli	15.00	15.00	100.00
Agustus	15.00	15.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00

5F. Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	3.00	3.00	100.00
April	3.00	3.00	100.00
Mei	3.00	3.00	100.00
Juni	3.00	3.00	100.00
Juli	3.00	3.00	100.00
Agustus	3.00	3.00	100.00
September	15.00	15.00	100.00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	85.00	100.00	#DIV/0!	100.00
Februari	85.00	81.40	0.00	40.70
Maret	85.00	88.06	0.00	44.03
April	85.00	87.23	53.33	70.28
Mei	85.00	91.82	78.95	85.38
Juni	85.00	88.46	85.00	86.73
Juli	85.00	91.72	80.00	85.86
Agustus	85.00	89.63	86.21	87.92
September	85.00	87.36	90.63	88.99

6A. Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku
Januari	15.00	15.00	100.00
Februari	35.00	43.00	81.40
Maret	59.00	67.00	88.06
April	82.00	94.00	87.23
Mei	101.00	110.00	91.82
Juni	115.00	130.00	88.46
Juli	133.00	145.00	91.72
Agustus	147.00	164.00	89.63
September	159.00	182.00	87.36

6B. Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	1.00	0.00
Maret	0.00	3.00	0.00
April	8.00	15.00	53.33
Mei	15.00	19.00	78.95
Juni	17.00	20.00	85.00
Juli	20.00	25.00	80.00
Agustus	25.00	29.00	86.21
September	29.00	32.00	90.63

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Maret	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
April	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Mei	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Juni	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Juli	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Agustus	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
September	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00

Sarana Produksi Obat

Bulan	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target renlak	A. % Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak	Jumlah target sesuai renlak	B. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C1. % Ketepatan penetapan tindak lanjut
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
April	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Mei	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Juni	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Juli	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
September	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 2	C2. % Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut	Jumlah inspeksi dengan penulisan laporan sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 3	C3. % Kesesuaian format laporan inspeksi	Jumlah laporan yang disampaikan melalui SIPT	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 4	C4. % Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Maret	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
April	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Mei	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Juni	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Juli	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
September	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan kesesuaian keseluruhan cakupan CPOB	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 5	C5. % Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan penulisan PLOR yang tepat	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 6	C6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarana Produksi OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang	Jumlah seluruh tindak lanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
Februari	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
Maret	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
April	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
Mei	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
Juni	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
Juli	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
Agustus	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
September	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00

Sarana Produksi OBA SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod SK
Januari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarana Produksi Kosmetik

Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod Kosmetik
Januari	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	94,25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	
Februari	94,25	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Maret	94,25	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
April	94,25	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00
Mei	94,25	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00
Juni	94,25	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	100.00
Juli	94,25	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	100.00
Agustus	94,25	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00
September	94,25	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00	100.00

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetil	% Sardis
Januari	0.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Februari	3.00	95.00	100.00	#DIV/0!	100.00	98.33
Maret	3.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
April		95.16	100.00	100.00	97.92	98.27
Mei		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juli		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Agustus		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
September		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

9A. % Sardis Obat

Bulan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	% pemenuhan target pemeriksaan	A: Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan
Januari	3	3	100.00	3
Februari	9	10	90.00	9
Maret	16	16	100.00	16
April	28	31	90.32	28
Mei	38	38	100.00	38
Juni	47	47	100.00	47
Juli	55	55	100.00	55
Agustus	64	64	100.00	64
September	73	73	100.00	73

Bulan	B. Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat dari tim inspeksi, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat
Januari	3	3.00	100.00	100.00
Februari	9	9.00	100.00	95.00
Maret	16	16.00	100.00	100.00
April	28	28.00	100.00	95.16
Mei	38	38.00	100.00	100.00
Juni	47	47.00	100.00	100.00
Juli	55	55.00	100.00	100.00
Agustus	64	64.00	100.00	100.00
September	73	73.00	100.00	100.00

9B. % Sardis OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil	% Sardis OBA
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
Maret	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
April	4	4	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00
Mei	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	100.00
Juni	8	8	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00	100.00
Juli	9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	100.00
Agustus	13	11	100.00	13	13	100.00	13	13	100.00	13	13	100.00	100.00
September	14	12	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00	100.00

9C. % Sardis SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil	% Sardis SK
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
April	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
Mei	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
Juni	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
Juli	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
Agustus	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
September	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00

9D. % Sardis KOS

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil	% Sardis Kos
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	4	4	100	4	4	100	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00
Maret	8	8	100	8	8	100	8	8	100.00	8	8	100.00	100.00
April	11	12	92	11	11	100	11	11	100.00	11	11	100.00	97.92
Mei	13	13	100	13	13	100	13	13	100.00	13	13	100.00	100.00
Juni	16	16	100	16	16	100	16	16	100.00	16	16	100.00	100.00
Juli	18	18	100	18	18	100	18	18	100.00	18	18	100.00	100.00
Agustus	20	20	100	20	20	100	20	20	100.00	20	20	100.00	100.00
September	23	23	100	23	23	100	23	23	100.00	23	23	100.00	100.00

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	93,25	12	12	20.00	11	12	64.17	12	12	10.00	94.17
Februari	93,25	26	26	20.00	25	26	67.31	26	26	10.00	97.31
Maret	93,25	42	42	20.00	41	42	68.33	42	42	10.00	98.33
April	93,25	49	50	19.60	48	49	68.57	49	49	10.00	98.17
Mei	93,25	55	52	20.00	54	55	68.73	55	55	10.00	98.73
Juni	93,25	60	57	20.00	59	60	68.83	60	60	10.00	98.83
Juli	93,25	65	62	20.00	64	65	68.92	65	65	10.00	98.92
Agustus	93,25	70	67	20.00	69	70	69.00	70	70	10.00	99.00
September	93,25	73	70	20.00	72	73	69.04	73	73	10.00	99.04

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	#DIV/0!	100.00	66.67	66.67	94.00	81.83
Februari	100.00	100.00	86.67	80.00	94.50	92.23
Maret	100.00	95.83	90.48	85.71	94.67	93.34
April	100.00	96.88	92.98	88.89	94.75	94.70
Mei	100.00	97.50	94.20	91.67	94.80	95.63
Juni	100.00	97.92	95.24	92.86	95.00	96.20
Juli	100.00	98.21	95.83	91.67	91.71	95.49
Agustus	100.00	98.44	96.40	92.59	95.00	96.49
September	100.00	98.61	96.83	93.33	95.00	96.75

11A. % Iklan Obat

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak 2	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	6	6	100.00	6	6	100.00	100.00
Maret	12	12	100.00	12	12	100.00	100.00
April	18	18	100.00	18	18	100.00	100.00
Mei	24	24	100.00	24	24	100.00	100.00
Juni	30	30	100.00	30	30	100.00	100.00
Juli	36	36	100.00	36	36	100.00	100.00
Agustus	42	42	100.00	42	42	100.00	100.00
September	48	48	100.00	48	48	100.00	100.00

11B. % Iklan Kos

Bulan	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik
Januari	1	1	100.00	1	1	100.00	15	15	100.00	3	3	100.00
Februari	2	2	100.00	2	2	100.00	30	30	100.00	6	6	100.00
Maret	3	3	100.00	2	3	66.67	45	45	100.00	10	9	100.00
April	3	4	75.00	4	4	100.00	60	60	100.00	13	12	100.00
Mei	4	5	80.00	5	5	100.00	85	75	100.00	15	15	100.00
Juni	5	6	83.33	6	6	100.00	98	90	100.00	20	18	100.00
Juli	6	7	85.71	7	7	100.00	113	105	100.00	23	21	100.00
Agustus	7	8	87.50	8	8	100.00	128	120	100.00	26	24	100.00
September	9	9	100.00	8	9	88.89	143	135	100.00	29	27	100.00

Bulan	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator	Jumlah iklan yang dievaluasi 2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Januari	100.00	20	20	100.00	20	20	100.00	100.00	100.00
Februari	100.00	40	40	100.00	40	40	100.00	100.00	100.00
Maret	91.67	60	60	100.00	60	60	100.00	100.00	95.83
April	93.75	80	80	100.00	80	80	100.00	100.00	96.88
Mei	95.00	109	109	100.00	109	109	100.00	100.00	97.50
Juni	95.83	129	129	100.00	129	129	100.00	100.00	97.92
Juli	96.43	149	149	100.00	149	149	100.00	100.00	98.21
Agustus	96.88	169	169	100.00	169	169	100.00	100.00	98.44
September	97.22	189	189	100.00	189	189	100.00	100.00	98.61

11C. % Iklan OBA OK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi 2	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	4	4	100.00	0	4	0.00	4	4	100.00	66.67
Februari	10	10	100.00	6	10	60.00	10	10	100.00	86.67
Maret	14	14	100.00	10	14	71.43	14	14	100.00	90.48
April	19	19	100.00	15	19	78.95	19	19	100.00	92.98
Mei	23	23	100.00	19	23	82.61	23	23	100.00	94.20
Juni	28	28	100.00	24	28	85.71	28	28	100.00	95.24
Juli	32	32	100.00	28	32	87.50	32	32	100.00	95.83
Agustus	37	37	100.00	33	37	89.19	37	37	100.00	96.40
September	42	42	100.00	38	42	90.48	42	42	100.00	96.83

11D. % Iklan SK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	3	3	100.00	0	3	0.00	3	3	100.00	66.67
Februari	5	5	100.00	2	5	40.00	5	5	100.00	80.00
Maret	7	7	100.00	4	7	57.14	7	7	100.00	85.71
April	9	9	100.00	6	9	66.67	9	9	100.00	88.89
Mei	12	12	100.00	9	12	75.00	12	12	100.00	91.67
Juni	14	14	100.00	11	14	78.57	14	14	100.00	92.86
Juli	16	16	100.00	13	16	81.25	15	16	93.75	91.67
Agustus	18	18	100.00	15	18	83.33	17	18	94.44	92.59
September	20	20	100.00	17	20	85.00	19	20	95.00	93.33

11E. % Iklan PO

Bulan	Target iklan yang diawasi sesuai renlak	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan (40%)	Target Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak)	Realisasi Media Cetak	Target Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online)	Realisasi Media Online	Target Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran)	Realisasi Media Penyiaran
Januari	10	10	1	40.00	1	4	100.00%	5	4	80.00%	2	0	0.00%
Februari	20	20	1	40.00	2	5	100.00%	10	9	90.00%	4	0	0.00%
Maret	30	30	1	40.00	3	10	100.00%	15	14	93.33%	6	0	0.00%
April	40	40	1	40.00	4	13	100.00%	20	19	95.00%	8	0	0.00%
Mei	50	50	1	40.00	5	13	100.00%	25	24	96.00%	10	0	0.00%
Juni	60	60	1	40.00	6	13	100.00%	30	32	100.00%	12	0	0.00%
Juli	70	65	0.93	37.14	7	13	100.00%	35	32	91.43%	14	0	0.00%
Agustus	80	80	1	40.00	8	13	100.00%	40	47	100.00%	16	0	0.00%
September	90	90	1	40.00	9	15	100.00%	45	52	100.00%	18	0	0.00%

Bulan	Target Media Luar Ruang	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang)	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan (20%)	Jumlah Iklan yang telah Dilaporkan ke Pusat	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan (40%)	% Iklan PO
Januari	2	2	100.00%	14.00	10	10	40.00	94.00
Februari	4	6	100.00%	14.50	20	20	40.00	94.50
Maret	6	6	100.00%	14.67	30	30	40.00	94.67
April	8	8	100.00%	14.75	40	40	40.00	94.75
Mei	10	13	100.00%	14.80	50	50	40.00	94.80
Juni	12	15	100.00%	15.00	60	60	40.00	95.00
Juli	14	20	100.00%	14.57	65	65	40.00	91.71
Agustus	16	20	100.00%	15.00	80	80	40.00	95.00
September	18	23	100.00%	15.00	90	90	40.00	95.00

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	-	Lakukan perubahan target sesuai perencanaan yang telah disusun.
Februari	-	-	-	Lakukan monitoring pengisian tools SKL sesuai arahan PPPOMN.
Maret	78,2	78.20	-	Lakukan perhitungan perencanaan untuk TW 2 untuk melihat apakah dengan penurunan capaian karena perubahan standar peralatan. target TW 2 masih bisa tercapai.
April	78,2	78.2	- SRL : 2 MA peningkatan SRL di Lab Kosmetik (termasuk juga bagian dari komponen SKL Verif MA) belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Peningkatan SRL direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2.	Memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL dilaksanakan sesuai rencana.
Mei	78,2	78.2	Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL bulan Mei masih belum optimal, terutama di Lab Kos dan OTOKSK.	1. Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL agar lebih dioptimalkan dan seluruh laporan dilaporkan tepat waktu. 2. Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 secara tepat waktu.
Juni	78,4	78.5	1. Pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei telah difollow up. 2. Monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 telah dilakukan dengan realisasi IKU sebesar 78,5 atau 100,2% (hasil laporan PPPOMN) dengan rincian : penambahan 2 SRL di Lab Kos, 1 MA Terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kos. 3. Hasil monitoring rencana aksi SKL bulan Juni : - peningkatan 3 PU kompetensi di Lab Kosmetik belum terlaksana dengan justifikasi : sampel yang dibutuhkan untuk pengujian 2 PU kompetensi adalah sampel bulan Juni dan pengujian baru dijadwalkan minggu I bulan Juli karena banyaknya PUK yang harus diuji, sementara 1 PU lainnya masih menunggu sampel masuk/ dibeli (Lab Kosmetik : Agar perencanaan lebih dioptimalkan). 4. Ada peningkatan ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL setiap bulannya.	Ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL agar lebih dioptimalkan lagi.
Juli	78.4	78.5	- Penambahan kompetensi masing-masing satu di Lab Kos dan OT tapi tidak meningkatkan nilai kompetensi Laboratorium. Penambahan 1 kompetensi lagi di Lab Kosmetik belum bisa dilakukan karena antrian alat untuk pengujian sampel. - Penambahan 1 MA Terverifikasi di Lab Kos tapi belum dibuat laporan verifikasi. - Pelaksanaan verifikasi alat sudah dilakukan dan dilaporkan tepat waktu. - Pelaporan rencana aksi tidak dapat selalu dilakukan di tanggal 2 setiap bulannya karena awal bulan Juli jatuh di week end.	Lakukan monitoring pemenuhan rencana aksi bulan Juli.
Agustus	78.4	78.5	- Penambahan 2 MA Terverifkasi di Lab	- Lakukan monitoring verifikasi peralatan yang

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Kosmetik - Peningkatan kompetensi Aspek 2 masing-masing 1 di Lab Kosmetik dan Lab OTOKSK - Terdapat 1 peralatan belum diverifikasi, yaitu TLC System di Lab OTOKSK karena Penyelia belum melakukan penyesuaian jadwal verifikasi peralatan yang sudah dibuat oleh Ketua Tim Pengelola SMM.	belum dilakukan. - Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL PPPOMN untuk TW 3 di bulan September.
September	78.5	78.7	- Telah dilakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2, yaitu 78,7 berupa penambahan 2 MA terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kosmetik. - Terdapat 1 peralatan belum diverifikasi, yaitu HPLC Shimadzu di Lab OT. Verifikasi masih dalam proses pengerjaan.	Lakukan monitoring verifikasi peralatan yang belum dilakukan.

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	-	Segera menyusun perencanaan Kegiatan KIE
Februari	-	-	Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masih terkendala belum pastinya jumlah target output sasaran serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan cakupan sasaran menjadi terbatas dan pemilihan target KIE belum dapat dilakukan secara optimal.	1. Menetapkan target output KIE sasaran secara jelas dengan mengkoordinasikan ke Biro Perencanaan dan Unit Pengampu, 2. Melakukan prioritisasi KIE berbasis risiko serta, 3. Mengoptimalkan metode KIE yang efisien sesuai ketersediaan anggaran.
Maret	86,85	88.79	Belum ditetapkannya jumlah target KIE menjadi kendala utama dalam perencanaan, karena menyebabkan belum dapat dipastikan kebutuhan sumber daya dalam menyapai target	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan targte perencanaan yang sudah ditetapkan
April	86,85	87.66	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran tanpa ada kendala	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE
Mei	86.85	87.36	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran tanpa ada kendala	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.
Juni	86.85	87.43	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 63 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE
Juli	86.85	87.50	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 65 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE
Agustus	86.85	87.94	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 72 mahasiswa Poltekkes	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Kemenkes Pangkal Pinang serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE
September	86.85	88.13	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 52 Masyarakat/ Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Selatan serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE

14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Januari	Melakukan perencanaan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang menunjang IKU AMR
Februari	-	-	Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Februari	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection ke Dinas Kesehatan Kabupaten yang menjadi target
Maret	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Gubernur tentang Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
April	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Tengah terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Mei	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up (mengirimkan surat resmi) ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Juni	-	-	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter (Bersurat secara resmi)

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya” Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	
Juli	-	-	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan Juli telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 21 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya” 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	
Agustus	-	-	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan Agustus telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 23 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Agustus 2026, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan pada 12 Agustus 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026 dan di Poltekes Kemenkes Pangkalpinang pada 13 Agustus 2026 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 8. Telah dilakukan Join Inspection bersama Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 26 Agustus 2026 untuk mengawal SE Bupati Bangka Tengah terkait Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
September	-	-	Merupakan target tahunan. Berikut progress kegiatan AMR TW III : 1. Hingga bulan September telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 25 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan.	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat terkait proses penerbitan SE

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026, TW II 2026 pada 30 Juni 2026 dan TW III 2026 pada 30 September di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan September 2026, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan pada 12 Agustus 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026 dan di Poltekes Kemenkes Pangkalpinang pada 13 Agustus 2026 7. Telah dikirimkan Surat kedua ke Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait Permohonan Informasi Progres Penerbitan SE Pengendalian AMR pada 20 Juli 2026 8. Telah dilakukan Join Inspection bersama Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 26 Agustus 2026 untuk mengawal SE Bupati Bangka Tengah terkait Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Barat terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawalan (5%)	Realisasi
Januari	5	5.00					5.00
Februari	5	5.00					5.00
Maret	10	10.00					10.00
April	25	25.00					25.00
Mei	25	25.00					25.00
Juni	25	25.00					25.00
Juli	70	25.00	20.00	25.00			70.00
Agustus	70	25.00	20.00	25.00			70.00
September	95	25.00	20.00	25.00	25.00		95.00

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi
Januari	5	5.00					5.00
Februari	5	5.00					5.00
Maret	10	10.00					10.00
April	25	25.00					25.00
Mei	25	25.00	0.00				25.00
Juni	25	25.00	0.00	0.00			25.00
Juli	50	25.00	25.00	0.00			50.00
Agustus	50	25.00	25.00	0.00	0.00		50.00
September	70	25.00	25.00	20.00	0.00		70.00

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Target	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi
Januari	5	5.00					5.00
Februari	5	5.00					5.00
Maret	10	10.00					10.00
April	25	25.00					25.00
Mei	50	25.00	25.00				50.00
Juni	70	25.00	25.00	20.00			70.00
Juli	80	25.00	25.00	20.00		10.00	80.00
Agustus	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00
September	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00

18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Januari	2.5	40.00	0.00	0.00	4.44	9
Februari	2.7	43.20	0.00	0.00	4.80	9
Maret	12.9	102.40	10.00	0.00	12.49	9
April	41.23	241.60	10.00	0.00	50.32	5
Mei	52.05	276.60	20.00	0.00	59.32	5
Juni	62.88	321.60	20.00	0.00	68.32	5
Juli	71.2	321.60	20.00	0.00	68.32	5
Agustus	75.15	391.80	0.00	0.00	78.36	5
September	89.73	456.80	0.00	0.00	91.36	5

18A. UMKM Pangan Olahan

Bulan	Target	Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan (Jan-Maret) Bobot 5%	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PO Target (Jan-Maret) Bobot 10%	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) (Feb-Juni) Bobot 30%	Pendampingan CPPOB dalam hal Penyiapan Sarana Prasarana sesuai IP CPPOB (Feb-Des) 15%	Pendampingan penyusunan dokumen (Feb-Des) 15%	Coaching esertifikasi/akun (Okt- Nov) 15%	Terbit IP CPPOB (April-Des) 5%	Pelaksanaan Pendampingan UMK PO (Feb-Des) Bobot 50%	Pelaporan (Feb-Des) Bobot 5%	Progress
Januari	5	40.00							0.00		40.00
Februari	5,4	40.00							0.00	3.2	43.20
Maret	15,8	40.00	60.00						0.00	2.4	102.40
April	52,45	20.00	40.00	120.00	60.00				60.00	1.6	241.60
Mei	59,1	20.00	40.00	120.00	60.00	15.00	15.00	5.00	95.00	1.6	276.60
Juni	65,75	20.00	40.00	120.00	60.00	45.00	30.00	5.00	140.00	1.6	321.60
Juli	72,4	20.00	40.00	120.00	60.00	45.00	30.00	5.00	140.00	1.6	321.60
Agustus	80,3	25.00	50.00	120.00	75.00	60.00	45.00	15.00	195.00	1.8	391.80
September	89,45	25.00	50.00	150.00	75.00	75.00	60.00	20.00	230.00	1.8	456.80

18B. UMKM OBA

Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari	0	0.00					0.00
Februari	0	0.00					0.00
Maret	10	10.00	0.00				10.00
April	30	10.00	0.00				10.00
Mei	45	10.00	0.00	10.00			20.00
Juni	60	10.00	0.00	10.00	0.00		20.00
Juli	70	10.00	0.00	10.00	0.00		20.00
Agustus	70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
September	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

18C. UMKM KOS

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari		0.00					0.00
Februari		0.00					0.00
Maret		0.00					0.00
April		0.00	0.00				0.00
Mei		0.00	0.00				0.00
Juni		0.00	0.00	0.00			0.00
Juli		0.00	0.00	0.00			0.00
Agustus		0.00	0.00	0.00			0.00
September		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
Februari		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
Maret		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
April		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
Mei		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
Juni		1	1	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	57.50
Juli		1	1	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	57.50
Agustus		1	1	0	0	0	1	0	0.55	0	0	0	0	1	1	77.50
September		1	1	0	0	0	1	0	0.55	0	0	0	0	1	1	77.50

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	50	50.00%	-	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu
Februari	50	50.00%	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang lintas fungsi belum dilakukan secara komprehensif 2. Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	1. Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform 2. Perlu dibuatkan tools dalam rangka monitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan Data Kerawanan yang melibatkan lintas fungsi sehingga Data Kerawanan bisa mendukung kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, sinergisme dengan pemangku kepentingan
Maret	50	50.00%	Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	50	50.00%	Kendala : pemanfaatan data kerawanan sudah mulai dilakukan monev oleh Dit CT sebagai TL Rekomendasi BPK	Data Kerawanan ini bisa dimanfaatkan untuk a. Mendukung kegiatan teknis pengawasan b. Mendukung kegiatan penindakan c. Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Mendukung kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha e. Mendukung sinergisme kegiatan dengan pemangku kepentingan f. Mendukung penyusunan strategi pengawasan BPOM
Mei	50	50.00%	Kendala : Belum dilakukan penyerapan anggaran AEA dikarenakan anggaran AEA hanya bisa dimanfaatkan 2 OK Perjalanan Dinas sehingga perlu diatur untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran Balai	Untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran penyerapan Anggaran AEA dilakukan sesuai RPD yang telah direncanakan
Juni	50	50.00%	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Mei secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 21 (dua puluh satu) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 8 Juni 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Mei, sebanyak 105 link dari 124 link telah ditakedown (84,68%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Juni telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Juni telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 30 (tiga puluh) data dengan 46 data kerawanan Kendala : s.d Juni dalam pemenuhan Nilai Indikator Kinerja dan anggaran tidak terdapat kendala	1. Monitoring Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
Juli	50	50.00%	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 10 (sepuluh) link yang direkomendasikan takedown	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			(b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 23 Juli 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Juni, sebanyak 144 link dari 145 link telah ditakedown (99,31%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Juli telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 5 (lima) data dengan 7 data kerawanan Kendala : Tidak ada kendala dalam pemenuhan IKU ini	
Agustus	50	50.00%	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Juli secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 9 (sembilan) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 20 Agustus 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Juli, sebanyak 151 link dari 155 link telah ditakedown (97,42%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Analisis Kejahatan dari Dit CT berupa "Obat Setelan" yang terdapat 3 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Monitoring TL s.d Agustus telah dilakukan terhadap 3 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Penambahan Rekomendasi yang diberikan oleh Dit CT pada bulan Juli terkait fungsi Kerawanan dan penggalangan sebanyak 4 Rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya. (c) Sehingga s.d Agustus Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah sebanyak 7 (tujuh) Rekomendasi 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data dengan 15 data kerawanan	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Kendala : Anggaran AEA untuk profiling Siber hanya tersisa 1 kali perjalanan dinas dalam kota sehingga akan dimungkinkan melaporkan NIHIL Dimungkinkan Capaian di TW III akan tercapai 100%	
September	50	50.00%	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan September secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 18 (delapan belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling telah dilaporkan melalui secara tepat waktu pada tanggal 23 September 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Agustus, sebanyak 164 link dari 162 link telah ditakedown (98,78%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) s.d Agustus terdapat 9 rekomendasi dari Dit CT yang harus ditindaklanjuti oleh UPT (b) Terhadap 9 Rekomendasi tersebut telah dilakukan Tindak Lanjut terhadap 6 Rekomendasi Kendala : - Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian Indikator Kinerja ini	Lakukan update data dukung TL Rekomendasi

21. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)
Januari	84.04	100.00	100.00	100.00
Februari	84.04	100.00	100.00	100.00
Maret	84.04	100.00	100.00	100.00
April	84.04	100.00	100.00	100.00
Mei	84.04	95.00	90.00	92.50
Juni	84.04	100.00	91.67	95.83
Juli	84.04	97.62	90.48	94.05
Agustus	84.04	100.00	93.75	96.88
September	84.04	100.00	94.44	97.22

21A. Pemenuhan Target

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	24.00	24.00	100.00
Maret	36.00	36.00	100.00
April	48.00	48.00	100.00
Mei	57.00	60.00	95.00
Juni	72.00	72.00	100.00
Juli	82.00	84.00	97.62
Agustus	96.00	96.00	100.00
September	108.00	108.00	100.00

21B. Ketepatan Waktu

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Ketepatan waktu pelaporan label
Januari	12.00	12.00	100.00
Februari	24.00	24.00	100.00
Maret	36.00	36.00	100.00
April	48.00	48.00	100.00
Mei	54.00	60.00	90.00
Juni	66.00	72.00	91.67
Juli	76.00	84.00	90.48
Agustus	90.00	96.00	93.75
September	102.00	108.00	94.44

Lampiran 2
Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK .02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :
a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan di Pangkal Pinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 09 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31.25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS RIYANTO
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
AGUS RIYANTO	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	84.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		sesuai Standar	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.6
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		05 - Jumlah desa pangan aman	3
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31.25
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 11,688,120,000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,107,936,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6,580,184,000

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang Revisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALEX SANDER
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, 31 July 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
ALEX SANDER	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.6
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		05 - Jumlah desa pangan aman	2
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.08
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.6
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.15
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 11.655.304.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5.081.135.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6.574.169.000

Pangkal Pinang, 31 July 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang



ALEX SANDER

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Balai Besar POM di Pangkal Pinang

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	343,795,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	192,545,000	192,545,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel	151,250,000	151,250,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													27.85	5,983,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/KLINIK)	5,983,000	5,983,000

03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	143,609,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	44,057,000	44,057,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	117,120,000	99,582,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	117,120,000	8,198,400

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	9,369,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	117,120,000	9,369,600

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan [illegible]		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	1,088,500
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	458,900
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	204,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	596,570
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	1,415,050
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	265,200
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	4,310,000	575,400

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17,020,380

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	1,570,800
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	4,310,000	3,534,600
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	8,381,450
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	3,533,530

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang [illegible]	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	145,596,160

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika di Medan	3,917,000	3,917,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP di Bandung	2,015,000	2,015,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	22,960,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	9,180,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	60,368,760
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Forum Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik di Jakarta	3,602,000	3,602,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	4,155,000	2,906,500
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I di Jkaarta	2,067,000	2,067,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Palembang	1,491,000	1,491,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di Jakarta	2,067,000	2,067,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	056 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Jakarta	4,796,000	4,796,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Peningkata Kompetensi Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah Jdl Jakarta	2,077,000	2,077,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	056 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II di Jakarta	3,469,000	3,469,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Evaluasi Sampling Kosmetik di Surabaya	6,745,000	6,745,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	2,077,000	2,077,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	68,535,000	9,594,900
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	4,155,000	4,155,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam	2,105,000	2,105,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	4,155,000	1,246,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	68,535,000	58,940,100
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	6,120,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	40,245,840
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PEMERIKSAAN JAJANAN BUKA PUASA	48,525,000	48,525,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY	81,165,000	81,165,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Q - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Serang	4,172,000	4,172,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan di Padang	6,756,000	6,756,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	6,560,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OT di Jakarta	2,077,000	2,077,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Jakarta	2,067,000	2,067,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - Pengadaan Sampel	14,986,000	14,986,000
2.	-	-	A - Pengadaan Sampel	0	0

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	16,159,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	1,700,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	3,280,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	11,179,400

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3,639,932,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN ALAT GELAS	80,000,000	80,000,000
2.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	161,000,000	161,000,000
3.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - Pengadaan Baku pembanding	100,000,000	100,000,000
4.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - BIMBINGAN TEKNIS KALIBRASI	9,917,000	9,917,000
5.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	311,650,000	311,650,000
6.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	41,100,000	41,100,000
7.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	39,668,000	39,668,000
8.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	ZA - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	47,250,000	47,250,000
9.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - Pertemuan Manajerial Pengujian Mikrobiologi dan biologi molekuler	6,800,000	6,800,000
10.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN PENUNJANG LABORATORIUM	330,000,000	330,000,000
11.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - BIMBINGAN INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	24,963,000	24,963,000
12.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - WORKSHOP ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORY (ARFLI DI PPPOMN	9,917,000	9,917,000
13.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - BIMTEK INTERNAL DENGAN INSTRUKTUR PPPOMN	61,605,000	61,605,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - WORKSHOP REGIONALISASI LABORATORIUM	7,147,000	7,147,000
15.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PERBAIKAN PERALATAN LABORATORIUM	120,741,000	120,741,000
16.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - Uji Profisiensi Eksternal	12,000,000	12,000,000
17.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PEMBELIAN SAMPEL RUANG LINGKUP	2,000,000	2,000,000
18.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	206,000,000	206,000,000
19.	OR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/penemajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	1,964,160,000	1,964,160,000
20.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM OLEH PETUGAS PPPOMN	29,001,000	29,001,000
21.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - SURVEILAN TERJADWAL KAN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP AKREDITASI	75,013,000	75,013,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENDAMPINGAN KABUPATEN KOTA PANGAN AMAN	22,160,000	22,160,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN	84,781,000	84,781,000
2.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	4,852,000	4,852,000
3.	OR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	26,505,000	26,505,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	69,515,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN	8,439,000	8,439,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - PERJALANAN KOORDINASI	2,855,000	2,855,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	18,313,000	18,313,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	18,876,000	18,876,000
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - MONITORING DAN SERTIFIKASI SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN	21,032,000	21,032,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI PROGRAM TERPADU KEAMANAN PANGAN	15,900,000	15,900,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA	8,050,000	8,050,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA	9,795,000	9,795,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	10,560,000	10,560,000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN	13,035,000	13,035,000
6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	5,280,000	5,280,000
7.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA	3,000,000	3,000,000
8.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAWALAN DESA	6,957,000	6,957,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS PASAR	8,795,000	8,795,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev	6,300,000	6,300,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	3,521,000	3,521,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan	C - Pengawasan	3,957,000	3,957,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Komunitas				
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pemberian fast kit	12,600,000	12,600,000
6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - ADVOKASI PROGRAM PPASK	1,500,000	1,500,000

3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	98.5	31.25	20,097,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	12,975,000	12,975,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek IP CPPOB BPOM di Pangkal Pinang	7,122,000	7,122,000

4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	65	92.5	142,830,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2,000,000	2,000,000
2.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	E - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	39,260,000	39,260,000
3.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	670,000	670,000
4.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	32,877,000	32,877,000
5.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	268,000	268,000
6.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	268,000	268,000
7.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	6,965,000	6,965,000
8.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	1,680,000	1,680,000
9.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	15,870,000	15,870,000
10.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	670,000	670,000
11.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	1,000,000	1,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	4,860,000	4,860,000
13.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)	B - Pelaksanaan Wasmaltrik	29,992,000	29,992,000
14.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2026	6,250,000	6,250,000

NO.																
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber	5,230,000	5,230,000

NO.																
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT SERTIFIKASI DI DALAM KOTA	3,991,000	3,991,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - AUDIT SERTIFIKASI DI LUAR KOTA	3,600,000	3,600,000

NO.																
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.4	681,291,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PENGADAAN PAKAIAN DINAS	43,200,000	43,200,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	185,836,000	185,836,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	104,050,000	104,050,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	1,020,000	1,020,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40,000,000	40,000,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	60,000,000	60,000,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - Pembinaan Kinerja oleh Deputi Pembina	5,525,000	5,525,000
8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENGELOLAAN LIMBAH B3	2,700,000	2,700,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - SIMULASI K3	5,000,000	5,000,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	92,160,000	92,160,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	112,000,000	112,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	9,800,000	9,800,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.1	156,999,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI PIMPINAN	74,420,000	74,420,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - OPERASIONAL PELAPORAN	75,600,000	75,600,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	6,979,000	6,979,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	5,454,781,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	13,800,000	13,800,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - LANGGANAN DAYA DAN JASA	497,932,000	497,932,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - ADMINISTRASI KEGIATAN	86,160,000	86,160,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA TENAGA OUTSOURCING	759,792,000	759,792,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai	4,097,097,000	4,097,097,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.94	315,112,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	239,400,000	239,400,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - SEWA RUMAH DINAS PIMPINAN	70,000,000	70,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5,712,000	5,712,000

														Total	11,688,120,000

Pangkal Pinang, 26 Februari 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Revisi

Balai Besar POM di Pangkal Pinang

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	357.296.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	190.898.000	190.898.000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel	166.397.000	166.397.000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													27.85	5.983.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/KLINIK)	3.640.000	3.640.000
2.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	B - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Distribusi Obat	2.343.000	2.343.000

03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	144.329.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	48.857.000	48.857.000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	112.320.000	95.472.000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.862.400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	112.320.000	7.862.400

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	8.985.600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	112.320.000	8.985.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.842.400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	11.280.000	1.128.000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	3.104.000	310.400
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2.040.000	204.000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.863.120

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	5.200.000	728.000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	11.280.000	1.466.400
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	3.104.000	403.520
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2.040.000	265.200

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25	17.118.480

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	5.200.000	4.472.000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2.040.000	1.570.800
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	3.104.000	2.390.080

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	11.280.000	8.685.600

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	148.871.090

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	59.580.000	41.706.000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I di Jkaarta	3.960.000	3.960.000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	30.676.000	4.294.640
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Palembang	3.810.000	3.810.000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Forum Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik di Jakarta	6.989.000	6.989.000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Peningkata Kompeteriesi Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah)di Jakarta	3.960.000	3.960.000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	U - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	13.022.000	13.022.000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	20.400.000	9.996.000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	3.960.000	2.772.000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	119.105.000	58.361.450

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	223.398.910

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	20.400.000	6.324.000
2.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY	89.875.000	89.875.000
3.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	3.980.000	1.188.000
4.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan di Padang	6.911.000	6.911.000
5.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	59.580.000	11.916.000
6.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	30.676.000	26.381.360
8.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	119.105.000	38.922.550
9.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PEMERIKSAAN JAJANAN BUKA PUASA	43.881.000	43.881.000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	13.950.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	20.400.000	2.040.000
3.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	119.105.000	11.910.500

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	91	91	91	91	91	91	14.986.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - Pengadaan Sampel	0	0
2.	DR.3185.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - Pengadaan Sampel	14.986.000	14.986.000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	19.908.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3185.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	20.400.000	2.040.000
2.	DR.3185.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	119.105.000	11.910.500
3.	DR.3185.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	59.580.000	5.958.000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.8		3.612.116.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	2.484.000	2.484.000
3.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM OLEH PETUGAS PPPOMN	29.001.000	29.001.000
4.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	206.000.000	206.000.000
5.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - BIMBINGAN INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	22.147.000	22.147.000
6.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PEMBELIAN SAMPEL RUANG LINGKUP	2.000.000	2.000.000
7.	DR.3185.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - Uji Profisiensi Eksternal	12.000.000	12.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PERBAIKAN PERALATAN LABORATORIUM	120.782.000	120.782.000
9.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - BIMTEK INTERNAL DENGAN INSTRUKTUR PPPOMN	61.605.000	61.605.000
10.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	39.672.000	39.672.000
11.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	1.964.160.000	1.964.160.000
12.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - ASESMEN TERJADWAL/REAKREDITASI KAN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP AKREDITASI	70.623.000	70.623.000
13.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	058 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - KOORDINASI/BIMBINGAN TEKNIS/FGD LABORATORIUM	25.725.000	25.725.000
14.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - BIMBINGAN TEKNIS KALIBRASI	9.817.000	9.817.000
15.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	26.100.000	26.100.000
16.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	37.250.000	37.250.000
17.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN ALAT GELAS	80.000.000	80.000.000
18.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - Pengadaan Baku pembanding	100.000.000	100.000.000
19.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	311.850.000	311.850.000
21.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN PENUNJANG LABORATORIUM	340.000.000	340.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
22.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	151.000.000	151.000.000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22.160.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENDAMPINGAN KABUPATEN KOTA PANGAN AMAN	22.160.000	22.160.000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116.138.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN	83.338.000	83.338.000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	6.295.000	6.295.000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	26.505.000	26.505.000

		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	4	68.788.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	14.370.000	14.370.000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN	7.242.000	7.242.000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - MONITORING DAN SERTIFIKASI SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN	15.718.000	15.718.000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	11.118.000	11.118.000
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - PERJALANAN KOORDINASI	20.340.000	20.340.000

		05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	2	71.827.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA	13.690.000	13.690.000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI PROGRAM TERPADU KEAMANAN PANGAN	13.180.000	13.180.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA	11.200.000	11.200.000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	12.584.000	12.584.000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN	9.730.000	9.730.000
6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	5.240.000	5.240.000
7.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAWALAN DESA	6.203.000	6.203.000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36.173.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - ADVOKASI PROGRAM PPABK	1.800.000	1.800.000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pembelian test kit	11.988.000	11.988.000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - Pengawalan Program PPABK	4.661.000	4.661.000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS PASAR	8.005.000	8.005.000
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev	3.010.000	3.010.000
6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	6.709.000	6.709.000

3.	05 – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	68.36	75.36	85.36	88.36	88.36	27.08	20.097.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	16.090.000	16.090.000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek IP CPPOB BPOM di Pangkal Pinang	4.007.000	4.007.000

4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	57.5	57.5	77.5	77.5	92.5	92.5	120.822.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	F - Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Penindakan	2.495.000	2.495.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	18.745.000	18.745.000
6.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	8.840.000	8.840.000
7.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	1.870.000	1.870.000
8.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	10.540.000	10.540.000
9.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	G - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	28.900.000	28.900.000
10.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1.050.000	1.050.000
11.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	1.250.000	1.250.000
12.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	4.660.000	4.660.000
13.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmalitrik	38.940.000	38.940.000
14.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	E - Renewal Sertifikasi Remote Pilot APDI	1.532.000	1.532.000
15.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2.000.000	2.000.000

5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5.230.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3166.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber	5.230.000	5.230.000

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,85	7.591.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT SERTIFIKASI DI DALAM KOTA	3.991.000	3.991.000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - AUDIT SERTIFIKASI DI LUAR KOTA	3.600.000	3.600.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Balai Besar POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pangkal Pinang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BPOM di Pangkal Pinang
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Pangkal Pinang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Pangkal Pinang
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik BPOM di Pangkal Pinang yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Pangkal Pinang
9.2	Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Pangkal Pinang
9.4	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi

Balai Besar POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.7B.12.25.339 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
SK 2	**Meningkatnya efektivitas KIE**
2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2.3	Jumlah desa pangan aman
2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 3	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 6	**Layanan Publik UPT yang prima**
6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 7	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
7.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
7.2	Nilai AKIP UPT BPOM
7.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
7.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7
Realisasi IKU Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75	Jul	98.75	100.00	101.27%	101.27%	Rp 357,295,000.00	Rp 245,699,094.00	Rp 245,873,194.00	100.07%
			Agt	98.75	99.76	101.02%	101.02%	Rp 357,295,000.00	Rp 265,009,094.00	Rp 262,852,965.00	99.19%
			Sep	98.75	99.84	101.10%	101.10%	Rp 357,295,000.00	Rp 283,319,094.00	Rp 278,096,898.00	98.16%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85	Jul	-	-	-	-	Rp 5,983,000.00	Rp 5,982,000.00	Rp 5,982,000.00	100.00%
			Agt	-	-	-	-	Rp 5,983,000.00	Rp 5,982,000.00	Rp 5,982,000.00	100.00%
			Sep	-	-	-	-	Rp 5,983,000.00	Rp 5,982,000.00	Rp 5,982,000.00	100.00%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.90	Jul	98.9	100.00	101.11%	101.11%	Rp 144,329,000.00	Rp 24,912,841.00	Rp 24,912,841.00	100.00%
			Agt	98.9	100.00	101.11%	101.11%	Rp 144,329,000.00	Rp 29,922,841.00	Rp 28,765,642.00	96.13%
			Sep	98.9	100.00	101.11%	101.11%	Rp 144,329,000.00	Rp 77,232,841.00	Rp 35,370,629.00	45.80%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Jul	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 7,862,400.00	Rp -	Rp -	0.00%
			Agt	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 7,862,400.00	Rp -	Rp -	0.00%
			Sep	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 7,862,400.00	Rp 3,500,000.00	Rp -	0.00%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.50	Jul	96.5	100.00	103.63%	103.63%	Rp 8,985,600.00	Rp -	Rp -	0.00%
			Agt	96.5	100.00	103.63%	103.63%	Rp 8,985,600.00	Rp -	Rp -	0.00%
			Sep	96.5	100.00	103.63%	103.63%	Rp 8,985,600.00	Rp 4,000,000.00	Rp -	0.00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	Jul	85	85.86	101.01%	101.01%	Rp 1,642,400.00	Rp 1,177,000.00	Rp 1,160,000.00	98.56%
			Agt	85	87.92	103.44%	103.44%	Rp 1,640,900.00	Rp 1,314,000.00	Rp 1,194,000.00	90.87%
			Sep	85	88.99	104.70%	104.70%	Rp 1,672,400.00	Rp 1,451,000.00	Rp 1,445,700.00	99.63%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Jul	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 2,863,120.00	Rp 2,101,300.00	Rp 2,079,200.00	98.95%
			Agt	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 2,863,270.00	Rp 2,279,400.00	Rp 2,238,200.00	98.19%
			Sep	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 2,860,120.00	Rp 2,457,500.00	Rp 2,565,410.00	104.39%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	Jul	94.25	100.00	106.10%	106.10%	Rp 17,118,480.00	Rp 12,571,700.00	Rp 12,440,800.00	98.96%
			Agt	94.25	100.00	106.10%	106.10%	Rp 17,119,830.00	Rp 13,626,600.00	Rp 13,407,800.00	98.39%
			Sep	94.25	100.00	106.10%	106.10%	Rp 17,091,480.00	Rp 14,681,500.00	Rp 15,345,890.00	104.53%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.60	Jul	96.6	100.00	103.52%	103.52%	Rp 148,871,090.00	Rp 71,924,057.00	Rp 53,282,707.00	74.08%
			Agt	96.6	100.00	103.52%	103.52%	Rp 154,468,990.00	Rp 93,278,507.00	Rp 89,779,654.00	96.25%
			Sep	96.6	100.00	103.52%	103.52%	Rp 154,885,990.00	Rp 101,610,957.00	Rp 120,698,987.00	118.79%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	Jul	93.25	98.92	106.08%	106.08%	Rp 223,398,910.00	Rp 118,650,206.00	Rp 113,408,256.00	95.58%
			Agt	93.25	99.00	106.17%	106.17%	Rp 215,777,010.00	Rp 123,377,756.00	Rp 121,559,534.00	98.53%
			Sep	93.25	99.04	106.21%	106.21%	Rp 213,192,010.00	Rp 148,105,306.00	Rp 134,327,641.00	90.70%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	Jul	93.83	95.49	101.76%	101.76%	Rp 13,950,500.00	Rp 7,334,600.00	Rp 7,384,100.00	100.67%
			Agt	93.83	96.49	102.83%	102.83%	Rp 14,695,500.00	Rp 8,715,100.00	Rp 8,233,600.00	94.48%
			Sep	93.83	96.75	103.12%	103.12%	Rp 14,695,500.00	Rp 10,095,600.00	Rp 10,547,725.00	104.48%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	Jul	91	94.05	103.35%	103.35%	Rp 14,986,000.00	Rp 6,436,900.00	Rp 4,992,800.00	77.57%
			Agt	91	96.88	106.46%	106.46%	Rp 14,986,000.00	Rp 8,065,400.00	Rp 6,060,400.00	75.14%
			Sep	91	97.22	106.84%	106.84%	Rp 14,986,000.00	Rp 9,693,900.00	Rp 6,892,400.00	71.10%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	Jul	-	-	-	-	Rp 19,908,500.00	Rp 12,117,585.00	Rp 9,469,385.00	78.15%
			Agt	-	-	-	-	Rp 21,187,500.00	Rp 13,722,085.00	Rp 13,077,799.00	95.30%
			Sep	-	-	-	-	Rp 23,355,500.00	Rp 15,326,585.00	Rp 18,189,084.00	118.68%
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.6	Jul	78.4	78.50	100.13%	99.87%	Rp 3,612,116,000.00	Rp 2,799,067,551.00	Rp 2,795,884,989.00	99.89%
			Agt	78.4	78.50	100.13%	99.87%	Rp 3,612,116,000.00	Rp 2,946,397,471.00	Rp 2,946,008,224.00	99.99%
			Sep	78.5	78.70	100.25%	100.13%	Rp 3,612,116,000.00	Rp 3,134,257,921.00	Rp 3,064,584,028.00	97.78%
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40.0	Jul	-	-	-	-	Rp 22,160,000.00	Rp 16,472,000.00	Rp 22,067,000.00	133.97%
			Agt	-	-	-	-	Rp 22,160,000.00	Rp 22,160,000.00	Rp 22,067,000.00	99.58%
			Sep	-	-	-	-	Rp 22,160,000.00	Rp 22,160,000.00	Rp 22,160,000.00	100.00%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85	Jul	86.85	87.50	100.75%	100.75%	Rp 116,138,000.00	Rp 68,279,000.00	Rp 69,582,000.00	101.91%
			Agt	86.85	87.94	101.26%	101.26%	Rp 116,138,000.00	Rp 71,804,000.00	Rp 72,362,000.00	100.78%
			Sep	86.85	88.13	101.47%	101.47%	Rp 116,138,000.00	Rp 83,304,000.00	Rp 91,758,800.00	110.15%
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	Jul	70	70.00	100.00%	70.00%	Rp 68,788,000.00	Rp 35,856,000.00	Rp 34,229,000.00	95.46%
			Agt	70	70.00	100.00%	70.00%	Rp 68,788,000.00	Rp 39,556,000.00	Rp 44,173,000.00	111.67%
			Sep	95	95.00	100.00%	95.00%	Rp 68,788,000.00	Rp 46,846,000.00	Rp 58,570,000.00	125.03%
18	Jumlah desa pangan aman	2	Jul	50	50.00	100.00%	50.00%	Rp 71,827,000.00	Rp 27,271,000.00	Rp 27,356,900.00	100.31%
			Agt	50	50.00	100.00%	50.00%	Rp 71,827,000.00	Rp 39,021,000.00	Rp 38,195,100.00	97.88%
			Sep	70	70.00	100.00%	70.00%	Rp 71,827,000.00	Rp 44,821,000.00	Rp 42,893,100.00	95.70%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Jul	80	80.00	100.00%	80.00%	Rp 36,173,000.00	Rp 25,589,000.00	Rp 25,589,000.00	100.00%
			Agt	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 36,173,000.00	Rp 35,573,000.00	Rp 35,573,000.00	100.00%
			Sep	100	100.00	100.00%	100.00%	Rp 36,173,000.00	Rp 36,173,000.00	Rp 36,173,000.00	100.00%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	27.08	Jul	68.36	68.32	99.94%	-	Rp 20,097,000.00	Rp 12,315,000.00	Rp 10,835,000.00	87.98%
			Agt	75.36	78.36	103.98%	-	Rp 20,097,000.00	Rp 14,115,000.00	Rp 10,835,000.00	76.76%
			Sep	85.36	91.36	107.03%	-	Rp 20,097,000.00	Rp 15,915,000.00	Rp 12,360,000.00	77.66%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan										
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	Jul	57.5	57.50	100.00%	62.16%	Rp 120,822,000.00	Rp 49,166,612.00	Rp 49,200,680.00	100.07%
			Agt	57.5	77.50	134.78%	83.78%	Rp 120,822,000.00	Rp 88,746,612.00	Rp 52,410,680.00	59.06%
			Sep	77.5	77.50	100.00%	83.78%	Rp 120,822,000.00	Rp 102,695,612.00	Rp 88,059,480.00	85.75%
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.00	Jul	50	50.00	100.00%	53.19%	Rp 5,230,000.00	Rp 4,482,000.00	Rp 4,482,000.00	100.00%
			Agt	50	50.00	100.00%	53.19%	Rp 5,230,000.00	Rp 4,482,000.00	Rp 4,482,000.00	100.00%
			Sep	50	50.00	100.00%	53.19%	Rp 5,230,000.00	Rp 4,482,000.00	Rp 4,482,000.00	100.00%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85	Jul	-	-	-	-	Rp 7,591,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 1,670,000.00	75.91%
			Agt	-	-	-	-	Rp 7,591,000.00	Rp 3,890,000.00	Rp 2,900,000.00	74.55%
			Sep	-	-	-	-	Rp 7,591,000.00	Rp 5,140,000.00	Rp 3,831,000.00	74.53%
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.60	Jul	-	-	-	-	Rp 675,973,000.00	Rp 489,845,681.00	Rp 490,865,528.00	100.21%
			Agt	-	-	-	-	Rp 674,473,000.00	Rp 537,445,681.00	Rp 543,416,871.00	101.11%
			Sep	-	-	-	-	Rp 673,673,000.00	Rp 570,494,681.00	Rp 580,004,120.00	101.67%
25	Nilai AKIP UPT BPOM	82.15	Jul	-	-	-	-	Rp 158,719,000.00	Rp 73,983,192.00	Rp 103,912,103.00	140.45%
			Agt	-	-	-	-	Rp 160,219,000.00	Rp 88,483,192.00	Rp 110,077,103.00	124.40%
			Sep	-	-	-	-	Rp 157,219,000.00	Rp 105,983,192.00	Rp 119,015,503.00	112.30%
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Jul	-	-	-	-	Rp 5,454,781,000.00	Rp 3,053,143,911.00	Rp 3,055,182,541.00	100.07%
			Agt	-	-	-	-	Rp 5,454,781,000.00	Rp 3,443,943,799.00	Rp 3,462,914,779.00	100.55%
			Sep	-	-	-	-	Rp 5,450,804,000.00	Rp 3,832,743,687.00	Rp 3,856,185,746.00	100.61%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94	Jul	-	-	-	-	Rp 317,695,000.00	Rp 209,871,337.00	Rp 210,935,024.00	100.51%
			Agt	-	-	-	-	Rp 317,695,000.00	Rp 215,823,337.00	Rp 217,726,524.00	100.88%
			Sep	-	-	-	-	Rp 325,472,000.00	Rp 221,775,337.00	Rp 232,085,616.00	104.65%

Lampiran 8

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T (RPD)	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	9	9	100.00	Rp 4,482,000	Rp 4,482,000	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	97	293	302.06	Rp 5,140,000	Rp 3,831,000	74.53	4.05	3.05	75% (Tidak Efisien)	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100.00	Rp 46,846,000	Rp 58,570,000	125.03	0.80	-0.20	Tidak Efisien	Output berupa persentase progress
4	Desa Pangan Aman	70	70	100.00	Rp 44,821,000	Rp 42,893,100	95.70	1.04	0.04	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	100	100.00	Rp 36,173,000	Rp 36,173,000	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	405	416	102.72	Rp 63,294,000	Rp 71,443,800	112.88	0.91	-0.09	Tidak Efisien	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	108	108	100.00	Rp 9,693,900	Rp 6,892,400	71.10	1.41	0.41	92% (Efisien)	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	72	72	100.00	Rp 6,634,000	Rp 5,815,000	87.65	1.14	0.14	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	4	4	100.00	Rp 20,010,000	Rp 20,315,000	101.52	0.98	-0.02	Tidak Efisien	
10	Perangkat pengolah data dan komunikasi	2	2	100.00	Rp 25,000,000	Rp 24,919,500	99.68	1.00	0.00	100% (Efisien)	
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	61	66	107.81	Rp 1,170,101,571	Rp 1,100,427,678	94.05	1.15	0.15	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T (RPD)	R	%				
12	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100	100	100.00	Rp 102,695,612	Rp 88,059,480	85.75	1.17	0.17	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
13	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45.00	100.00	Rp 5,982,000	Rp 5,982,000	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	80	91	114.20	Rp 15,915,000	Rp 12,360,000	77.66	1.47	0.47	92% (Efisien)	Output berupa persentase progress
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	157	160	101.91	Rp 106,892,841	Rp 57,530,629	53.82	1.89	0.89	88% (Efisien)	
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	444	447	100.68	Rp 283,319,094	Rp 278,096,898	98.16	1.03	0.03	100% (Efisien)	
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	12	13	108.33	Rp 18,590,000	Rp 19,357,000	104.13	1.04	0.04	100% (Efisien)	
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	180	185	102.78	Rp 275,138,448	Rp 283,763,437	103.13	1.00	0.00	Tidak Efisien	
19	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100	100	100.00	Rp 1,964,156,350	Rp 1,964,156,350	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	Output berupa persentase progress
20	Layanan BMN	50	50	100.00	Rp -	Rp 2,700,000	-	-	-	-	Output berupa persentase progress dan Tidak dapat dihitung TE nya
21	Layanan Perkantoran	75	75	100.00	Rp 4,699,362,897	Rp 4,753,856,485	101.16	0.99	-0.01	Tidak Efisien	Output berupa persentase progress
	TOTAL			112.02	Rp 8,904,247,713	Rp 8,838,924,757	99.27	1.13	0.13	100% (Efisien)	Dihitung dari output yang dapat dihitung tingkat efisiensinya

Lampiran 9

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75	99.84	101.10	283,319,094	278,096,898	98.16	1.03	0.03	100% (Efisien)	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5,982,000	5,982,000	100.00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9	100.00	101.11	77,232,841	35,370,629	45.80	2.21	1.21	84% (Tidak Efisien)	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	3,500,000	0	0.00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5	100	103.63	4,000,000	0	0.00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	88.99	104.70	1,451,000	1,445,700	99.63	1.05	0.05	100% (Efisien)	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	2,457,500	2,565,410	104.39	0.96	-0.04	Tidak Efisien	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	100	106.10	14,681,500	15,345,890	104.53	1.02	0.02	100% (Efisien)	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	100	103.52	101,610,957	120,698,987	118.79	0.87	0.20	100% (Efisien)	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	93.25	99.04	106.21	148,105,306	134,327,641	90.70	1.17	0.17	100% (Efisien)	

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
	sesuai ketentuan										
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	96.75	103.12	10,095,600	10,547,725	104.48	0.99	-0.01	Tidak Efisien	
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97.22	106.84	9,693,900	6,892,400	71.10	1.50	0.50	92% (Efisien)	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	15,326,585	18,189,084	118.68	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.5	78.7	100.25	3,134,257,921	3,064,584,028	97.78	1.03	0.03	100% (Efisien)	
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	22,160,000	22,160,000	100.00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85	88.13	101.47	83,304,000	91,758,800	110.15	0.92	-0.08	Tidak Efisien	
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100	46,846,000	58,570,000	125.03	0.80	-0.20	Tidak Efisien	
18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100	44,821,000	42,893,100	95.70	1.04	0.04	100% (Efisien)	
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	36,173,000	36,173,000	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.36	91.36	107.03	15,915,000	12,360,000	77.66	1.38	0.38	95% (Efisien)	
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.5	77.5	100.00	102,695,612	88,059,480	85.75	1.17	0.17	100% (Efisien)	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	100.00	4,482,000	4,482,000	100.00	1.00	0.00	100% (Efisien)	

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
	diselesaikan sesuai standar										
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	5,140,000	3,831,000	74.53	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	570,494,681	580,004,120	101.67	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	105,983,192	119,015,503	112.30	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	3,832,743,687	3,856,185,746	100.61	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	221,775,337	232,085,616	104.65	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
	TOTAL			102.44	4,117,142,231	4,004,171,688	97.26	1.05	0.053	100% (Efisien)	Rata-rata dari IKU yang bisa dihitung efisiensinya

Lampiran 10

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan III Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW III)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103.30	3,782,905,619	3,669,875,308	97.01	**1.06**	**0.06**	**100% (Efisien)**	Output dan Anggaran dihitung dari IKU yang bisa dihitung TE nya
2	Meningkatnya efektivitas KIE	100.37	211,144,000	229,394,900	108.64	**0.92**	**-0.08**	**Tidak Efisien**	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	107.03	15,915,000	12,360,000	77.66	**1.38**	**0.38**	**95% (Efisien)**	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	102,695,612	88,059,480	85.75	**1.17**	**0.17**	**100% (Efisien)**	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	4,482,000	4,482,000	100.00	**1.00**	**0.00**	**100% (Efisien)**	
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	5,140,000	3,831,000	74.53	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	4,730,996,897	4,787,290,985	101.19	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
	TOTAL	**102.14**	**4,117,142,231**	**4,004,171,688**	**97.26**	**1.05**	**0.05**	**100% (Efisien)**	**Output dan Anggaran dihitung dari IKU yang bisa dihitung TE nya**

Lampiran 11

Capaian RAPK Triwulan III Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang

KERTAS KERJA CAPAIAN RAPK
TRIWULAN III TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan JULI				Realisasi s.d bulan AGUSTUS				Realisasi s.d bulan SEPTEMBER				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	98,75	100,00	101,27	101,27	98,75	99,78	101,02	101,02	98,75	99,84	101,10	101,10	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zrC_n4vu1-VBJvWeIKOml_BdZX1A4_-HxRR5wCGpw/edit?gid=2048744218#gid=2048744218	https://drive.google.com/drive/folders/1hVV3oHJxCPdmOa_kLlm_v44-0BAosRfbJ?usp=sharing
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAI36ZA6sz_a41le17DAkUuiw/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1V0_4eB2pmzh_1pghDtVCykpo8YTuk5_Y?usp=sharing
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	98,90	100,00	101,11	101,11	98,90	100,00	101,11	101,11	98,90	100,00	101,11	101,11	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAqwlw5eTMCEdJGFM5gBH1mGc7MxoY1w_GM7OdtbGk/edit?gid=1985572361#gid=1985572361	https://drive.google.com/drive/folders/1TxK15UhVMMxD112A2xLoZSIXobLxYbL?usp=sharing
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAI36ZA6sz_a41le17DAkUuiw/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1D9CAdkZ-9rUQMPLTxfLJaD2mlfFP1yox?usp=sharing
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	96,50	100,00	103,63	103,63	96,50	100,00	103,63	103,63	96,50	100,00	103,63	103,63	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kBMtv2lPral8FHouQiTL48cjetw1/edit?gid=1763099736#gid=1763099736	https://drive.google.com/drive/folders/1AHz8uJsN1DS-Dw7k01jmUAJOdqs-Ib2_?usp=sharing
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85,00	85,86	101,01	101,01	85,00	87,92	103,44	103,44	85,00	88,99	104,70	104,70	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbekBa-0xnhfb2G7NnWS6BwY4LqBZu26oGp6SEqWw/edit?gid=1780692388#gid=1780692388	https://drive.google.com/drive/folders/1iEQuPcGEvr6uWTBqo8Lo11kX_I0LQM?usp=sharing
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_lJCclZvKPK5gB8Rh_tsM_RrFQCH2BBoLwGJfk50/EdEw/edit?gid=181525344#gid=181525344	https://drive.google.com/drive/folders/1VKDtiQ3NXBSmHaFcv7WtHK5RlBA0wGoPp?usp=sharing
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	94,25	100,00	106,10	106,10	94,25	100,00	106,10	106,10	94,25	100,00	106,10	106,10	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgLSrzDe-XsqK-mQsGca9wKFv803wlOTFnyBDbWI_Oo/edit?gid=377862384#gid=377862384	https://drive.google.com/drive/folders/1tZLE51Jz7JL6216c0P-UCYiScqhCjQo?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan JULI				Realisasi s.d bulan AGUSTUS				Realisasi s.d bulan SEPTEMBER				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	96,60	100,00	103,52	103,52	96,60	100,00	103,52	103,52	96,60	100,00	103,52	103,52	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6b7zDNERrDcci7kXPJicMR54aBEo2-R6dvz_7GPs4T/edit?gid=2115003066#gid=2115003066	https://drive.google.com/drive/folders/1O6HfW44VSVckEYqd7bAE2J7r6z4AouRR?usp=sharing
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	98,92	106,06	106,06	93,25	99,00	106,17	106,17	93,25	99,04	106,21	106,21	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INkVsRNs78Mp22NLfqjDGo-y2P1H90/vnf/78MVm9A/edit?gid=1136053142#gid=1136053142	https://drive.google.com/drive/folders/1tpmxqOArd94i0CtlQL0XIGTweGcq5aY?usp=sharing
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dawasi sesuai ketentuan	93,83	93,83	95,49	101,76	101,76	93,83	96,49	102,83	102,83	93,83	96,75	103,12	103,12	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KkvmrD-R5.gvRpX0MTpe-_hqRQ2zCTwrLWTjMQ1rMsHVY/edit?gid=1369600169#gid=1369600169	https://drive.google.com/drive/folders/1XQE6nXIHHeVCtb2RRHdTTR2Rs9R_r7?usp=sharing
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dawasi sesuai standar	91	91,00	94,05	103,35	103,35	91,00	96,88	106,46	106,46	91,00	97,22	106,84	106,84	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sqiCeMMPASCNwK7_tDEmDB44ADhtj6RiO1t6l0-5Cs/edit?gid=1337970582#gid=1337970582	https://drive.google.com/drive/folders/19-hPTtjXr8SZ_IRQY7rsD_mPnkeoOuki?usp=sharing
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d95U-ZOvoA2RDvAI3BZA6sz_a41le17DAkiUuis/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1o2dMPWuGpSUOzzaNe4g7x_A2I8i1vF?usp=sharing
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	78,40	78,50	100,13	99,87	78,40	78,50	100,13	99,87	78,50	78,70	100,25	100,13	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d95U-ZOvoA2RDvAI3BZA6sz_a41le17DAkiUuis/edit?gid=841248174#gid=841248175	https://drive.google.com/drive/folders/1PMrHrNRyoonDG-78cnJMRMVkYI2Sd82C?usp=sharing
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d95U-ZOvoA2RDvAI3BZA6sz_a41le17DAkiUuis/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1oIBub4PNt-tPS2vxrBMRpBF-xrBSaRI?usp=sharing
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	86,85	87,50	100,75	100,75	86,85	87,94	101,26	101,26	86,85	88,13	101,47	101,47	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d95U-ZOvoA2RDvAI3BZA6sz_a41le17DAkiUuis/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/19mLJB_SDXiW8E1Fv8vvmI6AbPV9rEYvX?usp=sharing
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	95,00	95,00	100,00	95,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yb6LuBbkFOa3yeqmub1qeTwyT2qac52HcX/edit#gid=341469046#gid=341469046	https://drive.google.com/drive/folders/1Tvb4bu6AU0F1fnOrqj6_B-nYG4qFrqK9?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan JULI				Realisasi s.d bulan AGUSTUS				Realisasi s.d bulan SEPTEMBER				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
18	Jumlah desa pangan aman	2	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	70,00	70,00	100,00	70,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XcOnxr1vVw_SrlzlleZEIWP12d6hBm2S6E/edit#gid=1741298471	https://drive.google.com/drive/folders/16DeAYoDwG8HBPbvalC_Bo7E-xGLYAXm?usp=sharing
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16vUCJxFnS8JPMdOXQaCD-mdYp5ak3EPIL/edit#gid=1180720909	https://drive.google.com/drive/folders/111GcaQuuK-Efn7BxjRbc1d44psVY7Tc?usp=sharing
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,08	68,36	68,32	99,94	68,32	75,36	78,36	103,98	78,36	85,36	91,36	107,03	91,36	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17grDtQSsI3AOvcPBQpoFNp2NPnFbIhX8/edit#gid=1486849497	https://drive.google.com/drive/folders/1jGqFYMWtmSnlEK7uA0LfOfHG259fV?usp=sharing
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	57,50	57,50	100,00	62,16	57,50	77,50	134,78	83,78	77,50	77,50	100,00	83,78	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qan5o2BKwJsKoRC2J4mfWnSrIIwxrAdRxx/edit#gid=2497187688	https://drive.google.com/drive/folders/1L-xBkja3AxZWBpoqHcwLI4qTFcaAb7CH?usp=sharing
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	50,00	100,00	53,19	50,00	50,00	100,00	53,19	50,00	50,00	100,00	53,19	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZOvqA2RDyAI3RZA6sz_a41e17DAkUjs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1mvpX-517cXGIBGclNvcEU2k0G82SC5d?usp=sharing
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZOvqA2RDyAI3RZA6sz_a41e17DAkUjs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1ChkuBRd3g1RlbdrKbOpq2fWYtpfvQ2FI?usp=sharing
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	91,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZOvqA2RDyAI3RZA6sz_a41e17DAkUjs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1-yBr4BLIKOHkdVvBvmLQunAaM8Jupal_?usp=sharing
25	Nilai AKIP UPT	82,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZOvqA2RDyAI3RZA6sz_a41e17DAkUjs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1VFDO4_3i5oqivEVtXne3tRIMVgBJECO?usp=sharing
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZOvqA2RDyAI3RZA6sz_a41e17DAkUjs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1SaZ8bT0GoQrkrsPLIdrUvmYHJpqAJo?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan JULI				Realisasi s.d bulan AGUSTUS				Realisasi s.d bulan SEPTEMBER				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5IJ-ZOvoAZRfOvAI3EfZA6sz_p41le17DAkI/ua/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1Bkr_o3cfLkH2iJFHiOoFMBTwaL3C88cy?usp=sharing

Pangkal Pinang, 12 Oktober 2026
Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang

Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12

Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan Tahun 2026

Nomenklatur Sasaran Kegiatan

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sesuai
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Sesuai
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Sesuai
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sesuai
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
	UPT	wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT	wilayah kerja UPT	
6	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Sesuai
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Sesuai

Nomenklatur Indikator Kinerja Utama

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Sesuai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sesuai
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sesuai
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sesuai
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Sesuai
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sesuai
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sesuai
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					Sesuai
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sesuai
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sesuai
19	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Sesuai
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Sesuai
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	PK Revisi 2026	RAPK 2026	RAPK Revisi 2026	Keterangan
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Sesuai
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Sesuai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Sesuai
26	Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Sesuai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Sesuai
28	Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Sesuai

Lampiran 13

Tabel Keselarasan Data Perencanaan Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026	Revisi PK 2027
				Target	Target	Target	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25	90,25	98,75	98,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	27	27,85	27,85
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	98,9	98,9
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	96,5	96,5
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	94,25	94,25
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	95,75	96,6	96,6
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	93,25	93,25
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,6	89,6	93,83	93,83
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81	81	84,04	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi	77	77	78,6	78,6

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026	Revisi PK 2027
				Target	Target	Target	Target
			dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	40	40	40
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81		
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	86,85	86,85	86,85
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	7	4
		18	Jumlah desa pangan aman	6	6	3	2
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	31,25	31,25	27,08
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	91	92,5	92,5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	91	94	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	4,75	4,85	4,85
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	90,4	90,4	91,6
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	81,8	81,8	80,1	82,15
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	2,94	2,94	2,94

Lampiran 14

Tabel Keselarasan Data Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan III			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)			Simetris E-Performance			Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	99,84	101,10%	98,75	99,84	101,10%	98,75	99,84	101,10%	98,75	99,84	101,10%	
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100,00	103,63%	96,5	100,00	103,63%	96,5	100,00	103,63%	96,5	100,00	103,63%	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	88,99	104,70%	85	88,99	104,70%	85	88,99	104,70%	85	88,99	104,69%	Terjadi perbedaan angka capaian dikarenakan pembulatan

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan III			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)			Simetris E-Performance			Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	94,25	100,00	106,10%	94,25	100,00	106,10%	94,25	100,00	106,10%	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	96,6	100,00	103,52%	96,6	100,00	103,52%	96,6	100,00	103,52%	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	99,04	106,21%	93,25	99,04	106,21%	93,25	99,04	106,21%	93,25	99,04	106,21%	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,75	103,12%	93,83	96,75	103,12%	93,83	96,75	103,12%	93,83	96,75	103,11%	Terjadi perbedaan angka capaian dikarenakan pembulatan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	97,22	106,84%	91	97,22	106,84%	91	97,22	106,84%	91	97,22	106,84%	
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan III			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)			Simetris E-Performance			Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,5	78,70	100,25%	78,5	78,70	100,25%	78,5	78,70	100,25%	78,5	78,70	100,25%	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,13	101,47%	86,85	88,13	101,47%	86,85	88,13	101,47%	86,85	88,13	101,47%	
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00%	95	95	100,00%	95	95	100,00%	95	95	100,00%	
		18	Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00%	70	70	100,00%	70	70	100,00%	70	70	100,00%	
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,36	91,36	107,03%	85,36	91,36	107,03%	85,36	91,36	107,03%	85,36	91,36	107,03%	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77,5	77,5	100,00%	77,5	77,5	100,00%	77,5	77,5	100,00%	77,5	77,5	100,00%	

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan III			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)			Simetris E-Performance			Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
	efektif di wilayah kerja UPT															
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	50	50	100,00%	50	50	100,00%	50	50	100,00%	
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lampiran 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75	99.84	101.10	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85	-	-		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.90	100.00	101.11	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.50	100.00	103.63	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	88.99	104.70	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	100.00	106.10	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.60	100.00	103.52	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	99.04	106.21	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	96.75	103.12	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	97.22	106.84	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	-	-		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.60	78.70	100.13	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	-	-		
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85	88.13	101.47	▲	Tercapai/ Melampaui
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	95.00	95.00	▲	Akan Tercapai
Jumlah desa pangan aman	100	70.00	70.00	▲	Akan Tercapai
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100.00	100.00	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	100.00	91.36	91.36	▲	Akan Tercapai

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan III	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	77.50	83.78	▲	Akan Tercapai
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50.00	53.19	▼	Perlu Upaya Keras
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85	-	-		
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.60	-	-		
Nilai AKIP UPT BPOM	82.15	-	-		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	-	-		
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94	-	-		

Lampiran 16

Penyesuaian anggaran Triwulan III Tahun 2026

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.06.26.457 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026 tanggal 22 Juni 2026 yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan IKU Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	• Dilakukan revisi untuk pembukaan blokir anggaran Kode A yang bersumber dari PNBP TA 2026 dalam rangka menambah kegiatan utama yang mendukung penerimaan negara (PNBP) Badan POM	Juli
2	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang berkenaan dengan IKU Jumlah desa pangan aman	• Melakukan penyesuaian anggaran Belanja Bahan pada 521211 pada detail ATK dan Pengadaan Seminar Kit • melakukan penambahan belanja Belanja Jasa Profesi pada akun 522151	Juli
3	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan Koordinasi/Bimbingan Teknis/Fgd Laboratorium yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Perjalanan Koordinasi/Konsultasi Pimpinan yang berkenaan dengan IKU Nilai Akip Upt BPOM	• Melakukan penambahan akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 untuk kegiatan koordinasi • Melakukan penyesuaian anggaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 untuk kegiatan Redistribusi Pegawai	Juli
4	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan IKU IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • kebutuhan anggaran pada kegiatan Gelar Perkara yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• Penyesuaian anggaran pada anggaran Penggandaan Bahan dan Pencetakan dan Produk Informasi Keamanan Pangan pada akun Belanja Bahan (521211). • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dan akun perjalanan dinas biasa (524111) pada kegiatan sarana distribusi	Agustus
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• kebutuhan penyesuaian anggaran pada Audit Sertifikasi Di Dalam Kota dan Audit Sertifikasi Di Luar Kota yang berkenaan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik UPT • kebutuhan penyesuaian anggaran pada kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang berkenaan dengan IKU Jumlah desa pangan aman	• penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524113 untuk kebutuhan perjalanan sertifikasi • penyesuaian anggara pada akun Belanja Bahan 521211 di detail Penggandaan Materi/Pencetakan/ATK dan Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan	September

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
6	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• kebutuhan anggaran pada Pengadaan Suku Cadang Dan Kolom, Pengadaan Baku pembanding, dan Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT • kebutuhan penyesuaian anggaran pada Pemberkasan yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• penyesuaian anggaran pada akun Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523123, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 untuk kegiatan di Pengujian • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Bahan 521211 dan akun Belanja Jasa Profesi 522151 untuk kegiatan Pemberkasan Perkara	September

Lampiran 17

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja

BADAN POM

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan jumlah laporan KTD		ok
								yang akan disampaikan sarana		
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	0		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum diperoleh data baseline		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	96		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	✓	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	84		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	94		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	97		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	93		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0	94		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	0	86		81	81.00	85.87	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✗	1. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki. 2.
DR.3165.01.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	105		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%	✗	pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	78		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	✓	ok
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	20		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96	87		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76	7		10	10.00	4.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31	3		6	6.00	2.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	1		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	17		31,25	31.25	27.08	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementrian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					yang didampingi tahun 2025-2029. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	93		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja.
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	94		91	91.00	0.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		realisasi 2025 sudah melebihi target 2026, maka target harus disesuaikan/dinaikan
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	5	5		4,75	4.75	4.85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90		90,4	90.40	90.40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	82	80		81,8	81.80	80.10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise		catatan agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari target pada renstra

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					prediksi Nilai AKIP tahun 2026, diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10		
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5		5	5.00	5.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	3		2,94	2.94	2.94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok

Lampiran 18

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan

BADAN POM

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.73		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.	✓	ok
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	26.67		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan jumlah laporan KTD	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								yang akan disampaikan sarana		
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.75		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	✓	ok
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum diperoleh data baseline	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.00		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	✓	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0.00	84.49		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	100.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	94.20		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU	✓	ok
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.53		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					masalah yang akan dihadapi		
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	93.21		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0.00	93.82		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	0.00	85.86		81	81.00	84.04	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	104.72		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%		
DR.3165.01.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.00	78.20		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	✓	ok
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	20.00		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.54	86.51		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76.00	7.00		10	10.00	7.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah		agar disesuaikan kertas kerjanya

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31.00	3.00		6	6.00	3.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu,		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00	1.00		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0.00	16.67		31,25	31.25	31.25	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementrian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana yang didampingi tahun 2025-2029.	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	92.50		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0.00	94.00		91	91.00	94.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93	4.84		4,75	4.75	4.85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.20	90.35		90,4	90.40	90.40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	81.62	80.10		81,8	81.80	80.10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise prediksi Nilai AKIP tahun 2026,	✓	agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10		target pada renstra
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00		5	5.00	5.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	2.94		2,94	2.94	2.94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok

Pangkal Pinang, 26 February 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

AGUS RIYANTO

Lampiran 19

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III 2026 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan III 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	99,84	106,78	**Tercapai/Melampaui**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	-	-	**-**
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38	**Tercapai/Melampaui**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	**Tercapai/Melampaui**
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26	**Tercapai/Melampaui**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88,99	101,13	**Tercapai/Melampaui**
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100,00	100,00	**Tercapai/Melampaui**
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26	**Tercapai/Melampaui**
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	**Tercapai/Melampaui**
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,04	104,25	**Tercapai/Melampaui**
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,6	96,75	103,37	**Tercapai/Melampaui**
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	97,22	115,74	**Tercapai/Melampaui**
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	**-**
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,3	78,70	93,36	**Akan Tercapai**
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	-	-	**-**
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,43	88,13	98,55	**Akan Tercapai**
17	Jumlah Sekolah yang	18	95,00	5,28	**Tidak Dapat**

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan III 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
	melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				**Dibandingkan**
18	Jumlah desa pangan aman	7	70,00	10,00	**Tidak Dapat Dibandingkan**
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100,00	100,00	**Tidak Dapat Dibandingkan**
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	97,92	91,36	93,30	**Tidak Dapat Dibandingkan**
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	77,50	82,45	**Akan Tercapai**
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19	**Perlu Upaya Keras**
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	-	-	**-**
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,7	-	-	**-**
25	Nilai AKIP UPT	82,1	-	-	**-**
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	**-**
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	3,06	-	-	**-**

Lampiran 20

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Triwulan III 2026

No	Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75	100.00	101.27	98.75	99.84	101.10
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9	100.00	101.11	98.9	100.00	101.11
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	100	100	100.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5	100	103.63	96.5	100	103.63
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86.73	102.04	85	88.99	104.70
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	100	100	100.00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	100.00	106.10	94.25	100.00	106.10
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	100.00	103.52	96.6	100.00	103.52
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	98.83	105.99	93.25	99.0411	106.21
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	96.20	102.53	93.83	96.75	103.12
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84.04	95.83	114.03	91	97.22	106.84
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.4	78,5	100.13	78.5	78.7	100.25
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85	87.43	100.67	86.85	88.13	101.47
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100.00	95	95	100.00
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100.00	70	70	100.00

No	Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100.00	100	100	100.00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62.88	68.32	108.65	85.36	91.36	107.03
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38.33	57.50	150.01	77.5	77.5	100.00
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	50	50	100.00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Lampiran 21

Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	09 September	015	063	672842	BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,07 20 18,61	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,27	100,00 25 25,00	100,00	98,61	100,00%	0,00	98,61

Lampiran 22

Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PR.04.02.2.12.25.771

Yth.	:	1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM 3. Para Kepala UPT BPOM di Seluruh Indonesia
Dari	:	Sekretaris Utama
Lampiran	:	4 Lembar
Hal	:	Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden
Tanggal	:	22 Desember 2025

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden dan Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK/AG/2025, tanggal 19 Desember 2025 tentang Tanggapan atas Permohonan Perubahan Jenis Belanja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden TA 2026, **BPOM diminta agar tetap mengacu pada hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** pada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025.
2. Hasil identifikasi dimaksud berasal dari anggaran belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang **bersifat rutin dan administratif**, seperti rapat, perjalanan dinas, dan belanja keperluan kantor, baik sumber dana Rupiah Murni (RM) maupun sumber PNBP.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan atas alokasi anggaran TA 2026 pada seluruh Satker di lingkungan BPOM **diminta untuk disesuaikan kembali dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026**.
4. Rincian besaran anggaran yang dapat digeser harus **merujuk pada besaran dan rincian hasil identifikasi untuk tiap Satker sesuai hasil yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** yang dapat dilihat melalui https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/ menu "**Input Informasi**", Sub menu "**Lampiran Hasil Identifikasi yang Dilakukan Kementerian Keuangan pada Seluruh Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025"**. Rincian tersebut menjadi dasar seluruh Satker untuk melakukan penyesuaian pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Seluruh Satker agar menyampaikan usul revisi anggaran sesuai hasil identifikasi, dengan ketentuan:
   a. hasil identifikasi yang bersumber dari RM dilakukan pergeseran ke RO Khusus melalui proses **pergeseran pengurangan anggaran** oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
   b. hasil identifikasi yang bersumber dari PNBP diberikan **catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A** - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
   c. untuk **proses penginputan ke dalam RO khusus** akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada Aplikasi SAKTI.
6. Melakukan pencadangan anggaran sebagai antisipasi adanya kebutuhan prioritas mendesak sehingga memerlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat namun tetap terjaga tata kelolanya, melalui **Penundaan Pembangunan Lanjutan dan Renovasi Gedung Laboratorium pada 8 (delapan) Satker** yaitu: Loka POM di Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Sorong, BPOM di Tasikmalaya, BPOM di Kota Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Buleleng, BPOM di Banyumas, dan BBPOM Makassar.
7. Seluruh Satker diminta untuk **melengkapi data dukung** berupa:
   a. Surat penyampaian revisi pergeseran anggaran kedalam RO Khusus TA 2026;
   b. Matriks semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;
   c. RKA Satker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA.

Seluruh data dukung agar dapat disampaikan selambat-lambatnya hari **Selasa, 23 Desember 2025** melalui https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/ pada menu Usulan Revisi Anggaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN (DILUAR BELANJA PEGAWAI)	HASIL IDENTIFIKASI RO KHUSUS SUMBER DANA RM SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	HASIL IDENTIFIKASI BLOKIR SUMBER DANA PNBP SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	ALOKASI ANGGARAN EFEKTIF HASIL IDENTIFIKASI TERMASUK BLOKIR PNBP (DILUAR BELANJA PEGAWAI)
14	BALAI BESAR POM PALEMBANG	13.775.447.000	2.630.274.000	77.554.000	11.145.173.000
15	BALAI BESAR POM PEKAN BARU	19.505.224.000	3.318.800.000	244.379.000	16.186.424.000
16	BALAI BESAR POM PONTIANAK	13.047.588.000	2.119.815.000	155.947.000	10.927.773.000
17	BALAI BESAR POM SAMARINDA	13.537.675.000	2.076.942.000	51.752.000	11.460.733.000
18	BALAI BESAR POM SEMARANG	20.870.223.000	4.173.198.000	502.670.000	16.697.025.000
19	BALAI BESAR POM SURABAYA	28.458.610.000	6.211.311.000	168.360.000	22.247.299.000
20	BALAI BESAR POM YOGYAKARTA	14.530.166.000	1.836.943.000	545.687.000	12.693.223.000
21	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	15.003.982.000	2.132.223.000	341.005.000	12.871.759.000
22	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	9.726.642.000	1.676.845.000	64.921.000	8.049.797.000
23	BALAI BESAR POM DI KUPANG	14.056.546.000	2.916.530.000	616.304.000	11.140.016.000
24	BALAI POM AMBON	11.405.833.000	1.737.167.000	60.800.000	9.668.666.000
25	BALAI POM BENGKULU	12.901.434.000	2.128.306.000	104.415.000	10.773.128.000
26	BALAI POM DI BATAM	14.078.208.000	2.219.022.000	173.069.000	11.859.186.000
27	BALAI POM DI MANOKWARI	14.880.346.000	2.874.201.000	230.500.000	12.006.145.000
28	BALAI POM DI PANGKAL PINANG	9.821.106.000	2.230.083.000	88.350.000	7.591.023.000
29	BALAI POM DI TARAKAN	8.392.579.000	1.724.960.000	-	6.667.619.000
30	BALAI POM JAMBI	9.976.170.000	1.689.018.000	99.537.000	8.287.152.000
31	BALAI POM KENDARI	10.529.229.000	2.095.479.000	53.330.000	8.433.750.000
32	BALAI POM MAMUJU	8.053.771.000	1.460.464.000	-	6.593.307.000
33	BALAI POM PALU	12.313.172.000	1.888.055.000	85.105.000	10.425.117.000
34	BALAI POM SOFIFI	7.939.026.000	1.587.086.000	-	6.351.940.000
35	BALAI POM DI BALIKPAPAN	2.423.003.000	571.321.000	-	1.851.682.000
36	BALAI POM DI BANYUMAS	6.474.990.000	597.450.000	-	5.877.540.000
37	BALAI POM DI BAU-BAU	2.778.103.000	678.963.000	-	2.099.140.000
38	BALAI POM DI BIMA	2.515.580.000	685.770.000	-	1.829.810.000
39	BALAI POM DI BOGOR	7.147.339.000	1.704.769.000	-	5.442.570.000
40	BALAI POM DI DUMAI	3.151.213.000	887.667.000	-	2.263.546.000
41	BALAI POM DI ENDE	5.253.317.000	1.339.254.000	-	3.914.063.000
42	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	21.170.223.000	673.887.000	-	20.496.336.000
43	BALAI POM DI JEMBER	4.925.270.000	1.022.094.000	-	3.903.176.000
44	BALAI POM DI KEDIRI	5.045.469.000	1.196.556.000	-	3.848.913.000
45	BALAI POM DI PALOPO	5.433.157.000	1.104.029.000	-	4.329.128.000
46	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	23.959.444.000	1.048.344.000	-	22.911.100.000
47	BALAI POM DI SANGGAU	2.653.763.000	687.931.000	-	1.965.832.000
48	BALAI POM DI SURAKARTA	6.912.507.000	1.450.762.000	-	5.461.745.000
49	BALAI POM DI TABALONG	2.404.714.000	602.485.000	-	1.802.229.000
50	BALAI POM DI TANGERANG	6.445.458.000	1.653.756.000	-	4.791.702.000
51	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	2.044.622.000	506.820.000	-	1.537.802.000
52	BALAI POM DI TASIKMALAYA	22.515.863.000	1.457.498.000	-	21.058.365.000
53	BALAI POM DI TULANG BAWANG	2.296.484.000	543.256.000	-	1.753.228.000
54	LOKA POM DI ACEH T SELATAN	2.550.076.000	577.320.000	-	1.972.756.000
55	LOKA POM DI ACEH TENGAH	5.916.035.000	480.995.000	-	5.435.040.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 23

Lembar Persetujuan Data Kinerja Bulan September 2026

LEMBAR PERSETUJUAN DATA KINERJA

BULAN SEPTEMBER 2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyetujui data kinerja capaian IKU dan Output yang menjadi tanggung jawab kami sebagaimana tertuang dalam notulen rapat evaluasi di atas.

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan Persetujuan	Keterangan
1	Mardianto, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Penguatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		
2	Ria Emeilia, S.Farm, Apt.	Ketua Tim Kerja Area Penguatan Manajemen Perubahan		
3	Tri Astuti Rahmawati, S.T.P., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Pangan Mikro		
4	Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt.,	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan		
5	Sony Lawrensia, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Kegiatan Sertifikasi		
6	Welinda Syafri, S.Farm, Apt	Ketua Tim Kerja Good Laboratory (GLP)		
7	Puspa Sari Paniti Ratri, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Infokom		
8	Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si.	Ketua Tim kerja Kegiatan Penindakan		
9	Priya Tri Nanda, S.Si	Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa II		
10	Ade Yan Emerson, S.Kom.	Ketua Tim Kerja Ketatausahaan Umum	-	Data Kinerja Belum ada di Bulan Ini
11	Netty Desi Margaretta Manullang, S.E.	Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa I	-	Data Kinerja Belum ada di Bulan Ini

Pangkal Pinang, 2 Oktober 2026
Mengetahui
Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang,

Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H.

Lampiran 24

Penghargaan Balai Besar POM di Pangkal Pinang



BADAN POM

1500533
HALO BPOM

bpompangkalpng

bpom.pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

bpom.pangkalpinang@pom.go.id

(0717) 439278, 434705